UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752
Website : http://www.budiluhur.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FKDK/000/005/02/26

TENTANG
KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Menimbang :
a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan peran Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.

Mengingat :
1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5) Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6) Statuta Universitas Budi Luhur No. K/YBLC/KET/000/216/06/23;
7) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/072/03/23 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk memiliki *roadmap* penelitian, menyusun rencana atau proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.

Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.

Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.

Kempat : Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Februari 2026
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur

Rocky Prasetyo Jati

UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752
Website : http://www.budiluhur.ac.id

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur
Nomor : K/UBL/FKDK/000/005/02/26
Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun 2025/2026

NO	NAMA
1.	Abdul Azis, S.S, M.I.Kom.
2.	Ahmad Thabathaba'I Saefudin, S.I.Kom., M.Ds.
3.	Amin Aminudin, S.Kom.I, M.I.Kom.
4.	Anastasia Putri Kristiani, M.I.Kom.
5.	Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, M.M.
6.	Anindya Putri Pradiptha, S.Hum., M.Hum.
7.	Arbi Cristional Lokananta, S.I.Kom., M.I.Kom.
8.	Arif Nur Hidayat, S.Kom., M.I.Kom.
9.	Artyasto Jatisidi, S.I.Kom., M.I.Kom.
10.	Benny Muhdaliha, S.Sn., M.Sn.
11.	Danang Soeminto, S.Sos., M.I.Kom.
12.	Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D.
13.	Dewi Pugersari, S.Ds, M.Ds.
14.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom., M.Sn.
15.	Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si.
16.	Doddy Wihardi, S.I.P., M.I.Kom.
17.	Dominggo Subandrio, S.Sn., M.I.Kom.
18.	Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si.
19.	Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom.
20.	Dr. Arief Ruslan, S.Kom. M.Sn.
21.	Dr. Eko Putra Boediman, S.S, MM, M.I.Kom.
22.	Dr. I.G.P. Wiranegara, S.Sn., M.Sn.
23.	Dr. Indah Suryawati, S.Sos, M.Si.
24.	Dr. Nawiroh Vera, S.Sos, M.Si.
25.	Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, S.I.P, M.Si.
26.	Dr. Rocky Prasetyo Jati, S.P.T., M.Si.
27.	Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.
28.	Dra. Riyodina Ganefsri Pratikto, M.Si.
29.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom.
30.	Drs. Dwi Prijono Soesanto, M.I.Kom.
31.	Eko Sumardi, S.Sos., M.I.Kom.
32.	Fatma Misky, S.I.Kom., M.Sn.
33.	Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom.
34.	Harningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.
35.	Haronas Kutanto, S.P.T., M.I.Kom.
36.	Ilham Akbar Afandi, S.I.Kom., M.I.Kom.
37.	Jeanie Annissa, S.I.P, M.Si.
38.	Julaiha Probo Anggraini, S.Si, M.Kom.
39.	Laksmi Rachmaria, S.Sos., M.I.Kom.
40.	Lies Andayani, S.Pd., M.Pd.
41.	Liza Dwi Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.
42.	Medya Apriliansyah, S.E, M.Si.
43.	Mira Herlina, S.Sos., M.I.Kom.
44.	Muhammad Ikhwan, S.Sos., M.I.K.
45.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom., M.I.Kom.
46.	Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom.
47.	Nurfitrianah Octavianingrum Raharjo Putri, S.Sn., M.Sn.
48.	Prof. Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom.
49.	Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.
50.	Prof. Dr. Umaimah, S.Fil., M.Si.
51.	Putro Nugroho, S.S.T., M.I.Kom
52.	Raden Wahyu Utomo Martianto, S.I.Kom., M.I.Kom.
53.	Rahajeng Puspitosari, S.I.Kom., M.I.Kom.
54.	Rama Romindo Utomo, S.H., M.I.Kom.

NO	N A M A
55.	Rana Syakirah Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom.
56.	Ria Anggraini, S.I.Kom., M.I.Kom.
57.	Ricky Widyananda Putra, S.I.Kom., M.Sn.
58.	Rini Lestari, S.Sos., M.I.Kom.
59.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom., M.I.Kom.
60.	Sekarseta Prihatmadi, S.P.T., M.I.Kom.
61.	Shinta Kristanty, S.Sos, M.Si.
62.	Sinta Dwi Utami, S.I.P., M.I.Kom.
63.	Sukma Alam, S.I.Kom., M.I.Kom.
64.	Suwarno, S.Sos., M.I.Kom.
65.	Wahyu Arnisa, S.I.Kom., M.Ds.
66.	Wenny Maya Arlena, S.Sos, M.Si.
67.	Yori Pusparani, S.Ds., M.Ds., Ph.D
68.	Yousep Eka Irawan Apriandi, S.P.T., M.I.Kom.
69.	Yuliana Choerul Reza, S.I.Kom., M.I.Kom.
70.	Zakaria Satrio Darmawan, S.P.T., M.I.Kom.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Februari 2026
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur

Rocky Prasetyo Jati

Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.

Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan

Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* pada Era Kontemporer



Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

PRAKATA

Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhânahu Wa Ta'âlâ atas rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca.

Gagasan utama buku ini berangkat dari kegelisahan intelektual terhadap bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dikonstruksi, dimaknai, dan direproduksi dalam ruang publik. Perubahan sosial yang ditandai oleh transformasi media, pergeseran komunikasi publik, serta dinamika politik dan kultural yang semakin kompleks turut memengaruhi cara masyarakat memaknai kepemimpinan. Dalam situasi demikian, konstruksi makna tidak hadir sebagai sesuatu yang netral atau berdiri sendiri, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang melibatkan aktor, institusi, dan praktik simbolik. Kepemimpinan karena itu tidak hanya berkaitan dengan praktik kekuasaan, tetapi juga dengan proses pembentukan makna yang berlangsung dalam praktik sosial dan ranah media.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI ix

BAB I
PENDAHULUAN 1

BAB II
MEDIA, BUDAYA JAWA, DAN KEPEMIMPINAN 15
A. Perspektif Beberapa Kajian Sejenis 15
B. Perspektif Pierre Bourdieu 29
C. Konstruksi Realitas Sosial 42
D. Tanggung jawab Sosial Pers 44
E. Kepemimpinan *Hasta Brata* 46
F. Media, Ideologi, dan Jurnalisme Budaya 48

BAB III
RUBRIK 'SANG PAMOMONG' (RSP) DALAM LANSKAP MEDIA 55
A. 'Suara Merdeka' sebagai Institusi Sosial-Budaya 55

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.

Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan

Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* pada Era Kontemporer



Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.

Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan

Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* pada Era Kontemporer

Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.

Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan

Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* pada Era Kontemporer



Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan: Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* pada Era Kontemporer

© Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom., 2026

Penulis : Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.
Editor : Asep Rachmatullah
Tata Letak : Indigo Media
Perancang Sampul : Indigo Media

Diterbitkan Oleh :
Indigo Media
Jl. Kalipasir No. 36 Sukasari
Sukasari, Kota Tangerang 15118
Mobile : 0812.1000.7656
Website : www.pustakaindigo.com
pustakaindigo@gmail.com

x + 292 halaman; 15 x 23 cm
Cetakan I, Mei 2026
ISBN 978-623-7709-87-9

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhânahu Wa Ta'âlâ atas rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca.

Gagasan utama buku ini berangkat dari kegelisahan intelektual terhadap bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dikonstruksi, dimaknai, dan direproduksi dalam ruang publik. Perubahan sosial yang ditandai oleh transformasi media, pergeseran komunikasi publik, serta dinamika politik dan kultural yang semakin kompleks turut memengaruhi cara masyarakat memaknai kepemimpinan. Dalam situasi demikian, konstruksi makna tidak hadir sebagai sesuatu yang netral atau berdiri sendiri, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang melibatkan aktor, institusi, dan praktik simbolik. Kepemimpinan karena itu tidak hanya berkaitan dengan praktik kekuasaan, tetapi juga dengan proses pembentukan makna yang berlangsung dalam praktik sosial dan ranah media.

Dalam kerangka ini, kepemimpinan *Hasta Brata* dalam budaya Jawa tidak dilihat sebagai ajaran yang statis atau sekadar warisan normatif. Ajaran leluhur ini sebagai filosofi dan rujukan normatif kepemimpinan yang mengalami proses konstruksi makna dalam ranah media. Melalui kajian atas praktik jurnalistik, buku ini menunjukkan bagaimana makna tersebut diartikulasikan, ditafsirkan, dan dihadirkan kembali dalam konteks sosial kontemporer. Filosofi kepemimpinan berbasis kearifan lokal tidak berada di luar realitas modern. Prinsip leluhur tersebut justru berinteraksi secara dinamis dengan perubahan zaman, struktur media, dan cara masyarakat memaknai kepemimpinan.

Dengan pijakan tersebut, buku ini tidak hanya memaparkan temuan penelitian, tetapi juga menghadirkan kerangka reflektif mengenai posisi kepemimpinan *Hasta Brata* dalam lanskap media kontemporer. Kajian ini menegaskan bahwa makna kepemimpinan *Hasta Brata* merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui praktik terstruktur dan berlangsung secara berulang dalam ranah media. Relevansi penelitian ini terletak pada peran media dalam pembentukan makna tersebut. Media tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, melainkan turut merawat dan mengaktualkannya di tengah perubahan sosial.

Perjalanan akademik yang melahirkan buku ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Tim Promotor yakni Dr. Siti Karlinah, M.Si, Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si dan Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si yang dengan ketelitian, kesabaran, dan keluasan perspektif membimbing penulis sejak tahap perumusan gagasan hingga penyempurnaan disertasi. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan kepada Tim Oponen Ahli yakni Prof. Deddy Mulyana, M.A, Ph.D., Dr. Aceng Abdullah, M.Si dan Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos, SH, M.Si, serta Representasi Guru Besar yakni Prof. Dr. Uud Wahyudin, M.Si yang melalui kritik dan pertanyaan tajamnya memperkaya kedalaman analisis serta memperkuat argumentasi ilmiah dalam karya ini. Tradisi akademik yang dialogis dan terbuka menjadi pengalaman berharga dalam proses pendewasaan intelektual penulis.

Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk kedua orangtua penulis, yakni almarhumah Ibunda: Hj Nurhaida Pulungan dan almarhum Ayahanda: H. Mara Laut Amin Siregar, serta kedua mertua penulis: almarhumah Ibunda Hj. Rochmani dan almarhum Ayahanda: H. Mudjitaba. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada suami tercinta: Rachmansyah Mudjitaba, serta kepada kedua Anandaku tersayang: Rafli Akram Kurniansyah, S.I.Kom, M.I.Kom serta Hanif Fadhlurahman S.Sos serta keluarga besar penulis dan keluarga besar suami. Dukungan moral, doa yang tidak pernah putus, serta pengertian dalam setiap fase studi doktoral menjadi kekuatan tersendiri dan penyemangat dalam menjaga keteguhan langkah. Tanpa kehadiran dan keikhlasan mereka, perjalanan akademik ini tidak akan sampai pada titik ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc, Prof. Dr. Prudensius Maring, M.A selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Budi Luhur, Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur, Artyasto Jatisidi, M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi FKDK-

Universitas Budi Luhur. Serta rekan-rekan dosen di FKDK Universitas Budi Luhur: Harningsih, M.I.Kom, Dr. Nawiroh Vera, M.Si, Prof. Dr. Umaimah Wahid, S.Fil, M.Si, Prof. Dr. Dudi Iskandar, M.I.Kom, Dr. Hj. Indah Suryawati, M.Si, Dr. Riyodina G. Pratikno, Anggun Putri Dewanggi, M.I.Kom, Made Doddy Wihardi, M.I.Kom, Laksmi Rahmaria, M.I.Kom, Dr. Ahmad Thoni, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan diskusi yang membangun dalam menyelesaikan buku ini.

Ibarat pepatah 'Tiada gading yang tak retak'. Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari tradisi ilmiah yang terus bergerak dan bertumbuh. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian media, budaya Jawa, dan kepemimpinan. Selain itu, buku ini diharapkan dapat pula menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan kembali nilai-nilai etis berbasis kultural dalam ruang publik.

Jakarta, April 2026
Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI ix

BAB I
PENDAHULUAN 1

BAB II
MEDIA, BUDAYA JAWA, DAN KEPEMIMPINAN 15
A. Perspektif Beberapa Kajian Sejenis 15
B. Perspektif Pierre Bourdieu 29
C. Konstruksi Realitas Sosial 42
D. Tanggung jawab Sosial Pers 44
E. Kepemimpinan *Hasta Brata* 46
F. Media, Ideologi, dan Jurnalisme Budaya 48

BAB III
RUBRIK 'SANG PAMOMONG' (RSP) DALAM LANSKAP MEDIA 55
A. 'Suara Merdeka' sebagai Institusi Sosial-Budaya 55

B. RSP: Sejarah dan Periodisasi Rubrik 60
C. Karakteristik Ideologis RSP 62

BAB IV
KONSTRUKSI MAKNA KEPEMIMPINAN *HASTA BRATA* 65
A. Dinamika Pemaknaan *Hasta Brata* Berbasis Periodisasi 65
B. Memaknai Keseluruhan Rentang Waktu Periodisasi 110
C. Diabaikannya Nilai *Hasta Brata* dalam
Kepemimpinan Kontemporer 122

BAB V
PRODUKSI DAN HABITUS AKTOR DALAM RUBRIK
'SANG PAMOMONG' 130
A. Produksi Rubrik 'Sang Pamomong' 130
B. *Habitus* Aktor dalam Produksi RSP 198

BAB VI
FUNGSI SOSIAL RUBRIK 'SANG PAMOMONG' 206
A. Fungsi Sosial Rubrik 'Sang Pamomong' 206
B. RSP sebagai Refleksi Kesadaran Jurnalis 227
C. *Jurnalisme Pamomong* dan Refleksi Praktik Sosial 234
D. Tantangan RSP di Era Kontemporer 247

BAB VII
PENUTUP 263

DAFTAR PUSTAKA 268
INDEKS 283
TENTANG PENULIS 290

BAB I

PENDAHULUAN

Pers tidak semata-mata sebagai institusi penyampai informasi faktual, melainkan sebagai ruang sosial tempat nilai, norma, dan orientasi etik diproduksi dan disebarluaskan (McQuail, 2010; Schudson, 2003). Dalam praktik jurnalistik, media berperan membentuk cara pandang publik terhadap realitas sosial melalui seleksi isu, sudut pandang, serta kerangka nilai yang dihadirkan dalam teks. Oleh karena itu, media tidak hanya menyajikan informasi seputar peristiwa, tetapi juga menyampaikan pesan maupun refleksi normatif yang berkaitan dengan kehidupan bersama (Carey, 2009). Dalam konteks ini, media sebagai ruang simbolik yang mengartikulasikan nilai, meneguhkan norma sosial, serta membentuk orientasi etis publik melalui praktik komunikasi yang berulang dan kontekstual.

Sejalan dengan perspektif tersebut, rubrik dalam konteks jurnalistik menjadi medium penting bagi media untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat reflektif dan evaluatif melalui wadah opini

ataupun editorial (Soysal, 2025). Sejumlah rubrik dirancang untuk mengartikulasikan nilai, menafsirkan realitas sosial, serta menawarkan orientasi etik kepada pembaca. Rubrik semacam ini berperan dalam membentuk pemahaman publik mengenai persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dinamika sosial-politik bangsa.

Surat kabar 'Suara Merdeka' misalnya, melalui Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) sejak terbit perdana pada 21 November 1996 menghadirkan refleksi dari beragam persoalan kehidupan masyarakat dan bangsa. Refleksi tersebut mencakup aspek sosial, politik, budaya, ritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga seni tradisi. Dalam kerangka ini, RSP tidak sekadar menyajikan informasi budaya. Rubrik ini sebagai wahana artikulasi nilai, pengetahuan kolektif, dan pandangan hidup dalam konteks sosial tertentu. Sejak awal kehadirannya, rubrik ini tidak diposisikan sebagai ruang pelaporan peristiwa aktual, melainkan sebagai ruang reflektif yang menafsirkan realitas sosial secara kultural.

Rubrik '*Sang Pamomong*' (RSP) secara historis terbit dalam rentang waktu yang panjang, yakni sejak 1996 hingga sekarang. Adapun kajian dalam buku ini memfokuskan pada periode 1996- hingga 2020Periode ini meliputi perubahan sosial-politik yang signifikan di Indonesia, mulai dari akhir Orde Baru, masa transisi reformasi, hingga fase konsolidasi demokrasi.

Menariknya, RSP juga intens menghadirkan refleksi yang mengandung artikulasi nilai dan pandangan normatif mengenai kepemimpinan dengan merujuk pada nilai-nilai budaya Jawa, di antaranya prinsip *Hasta Brata.* Kepemimpinan dalam konteks ini diposisikan sebagai

persoalan etika, keteladanan, tanggung jawab sosial, serta relasi antara pemimpin dan masyarakat. Itu sebabnya dalam RSP, kepemimpinan tidak direduksi menjadi persoalan teknis-administratif, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat nilai dan konsekuensi moral.

Prinsip *Hasta Brata* merupakan ajaran kepemimpinan dalam tradisi Jawa yang menekankan sifat-sifat ideal pemimpin melalui metafora unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, langit, angin, bumi, api, dan air (Bratawijaya, 1997). Nilai-nilai tersebut mengajarkan kebijaksanaan, kasih sayang, keadilan, kesabaran, serta pengabdian yang tulus berlandaskan *welas asih* sebagai fondasi kepemimpinan ideal. RSP menerapkan ajaran leluhur *Hasta Brata* sebagai kerangka normatif untuk memahami dan menyikapi praktik kepemimpinan dalam konteks realitas sosial kontemporer.

Dalam konteks tersebut, buku ini menekankan fokus pada tema yang berelasi dengan kepemimpinan. Hal ini mengingat spektrum tema yang diangkat RSP sangat luas sehingga kajian terhadap seluruh topik hanya menghasilkan pemetaan deskriptif yang kurang mendalam. Fokus tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi tema-tema dan konstruksi nilai kepemimpinan secara lebih sistematis dan terarah melalui analisis tematik. Dalam kerangka ini, studi menelusuri konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik sosial yang terus berubah.

Dalam praktik jurnalistik RSP, nilai-nilai *Hasta Brata* diartikulasikan melalui narasi yang mengandung pesan moral dan kritik sosial. Pesan tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit melainkan melalui refleksi, perbandingan, dan evaluasi terhadap perilaku pemimpin serta dinamika sosial yang melingkupinya. Kondisi semacam ini

menunjukkan bahwa RSP berfungsi sebagai wahana jurnalistik yang mengedepankan refleksi etik dan kritik sosial yang bersifat kultural.

Sementara itu, perubahan sosial dan politik Indonesia sepanjang periode 1996–2020 memberikan konteks penting bagi rubrik ini. Pada masa akhir Orde Baru, kritik terhadap kekuasaan disampaikan secara hati-hati melalui simbol, metafora, *pasemon,* dan rujukan budaya. Memasuki era reformasi, ruang publik mengalami keterbukaan yang lebih luas, namun persoalan kepemimpinan tetap menjadi isu sentral berbasis refleksi moral. Dalam konteks ini, RSP tampil sebagai ruang jurnalistik yang menjaga kontinuitas pesan etik di tengah perubahan struktur kekuasaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, RSP dipilih sebagai fokus studi dengan batasan periode terbit 1996–2020 yang dibagi ke dalam empat periodisasi sebagai berikut: (1) periodisasi 1996-1998 yang merupakan Era Represif Orde Baru-Awal Reformasi; (2) periode jeda yaitu 1999-2000; (3) periodisasi 2000-2010 yang merupakan Era Pascareformasi dan Transisi kepemimpinan nasional (tiga presiden); serta (4) periodisasi 2011-2020 sebagai periode kontemporer yang merupakan Era Disrupsi Digital-Dinasti Politik-Awal Pandemi Covid-19. Pembatasan periodisasi ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan keberlanjutan RSP setelah 2020, melainkan sebagai strategi analitis untuk memetakan perjalanan rubrik secara utuh, mulai dari periode awal, penguatan posisi, hingga proses adaptasi terhadap perubahan konteks sosial dan struktural media.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) pada periodisasi awal 1996–1998, hadir sebagai suplemen yang terbit setiap Kamis. Rubrik ini sempat disajikan dalam empat halaman, dua di antaranya *full colour*, sebelum

menyusut menjadi dua halaman pada edisi 1998. Sejak periode awal, setiap edisi RSP menampilkan satu tulisan utama atau *headline*. Dor (2003) menjelaskan bahwa *headline* merupakan tulisan utama yang menonjolkan isu paling penting pada suatu waktu, membantu pembaca memahami makna peristiwa, serta mencerminkan keputusan redaksi dalam menyusun prioritas dan arah pemahaman publik.

Rubrik ini pada periode perdana, terbit dalam masa transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi, ketika kebebasan pers dikekang. Rezim Soeharto memberlakukan kebijakan yang bersifat preventif dan represif, termasuk praktik pembredelan media (Imron et al., 2016; Suwirta, 2018). Kondisi ini mendorong RSP mengembangkan artikulasi kritik yang tidak konfrontatif, melainkan berlapis simbol budaya Jawa sebagai bentuk negosiasi terhadap rezim kekuasaan.

Kehadiran RSP di tengah pembaca diawali melalui liputan utama edisi Kamis (21/11/1996) yang ditempatkan sebagai *headline* berisi lima kolom di bagian kanan atas halaman. Tulisan ini memuat wawancara pengasuh rubrik, Bambang Sadono dan Hendro Basuki dengan Harmoko, Menteri Penerangan sekaligus Ketua DPR/MPR saat itu, dengan judul "Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!". Di halaman yang sama, dua tulisan pendukung turut disajikan. Identitas rubrik ditandai dengan nama *Sang Pamomong* disertai ilustrasi tokoh Semar, figur punakawan dalam pewayangan Jawa yang dikenal bijak, humoris, dekat dengan rakyat, dan kerap menjadi suara nurani masyarakat.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) tidak terbit pada periode 1999–2000 seiring dampak krisis moneter dan pascareformasi yang memengaruhi operasional 'Suara Merdeka'. Kendati demikian, periode ini tetap diperhitungkan dalam analisis untuk menjaga kesinam-

bungan konteks historis dan sosial rubrik, serta memahami dinamika transisi nilai kepemimpinan *Hasta Brata.*

Rubrik memasuki periodisasi 2000-2010 mengalami sejumlah perubahan penting. Sejak Maret 2002, RSP hadir dalam format bilingual, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Studi ini memusatkan analisis pada versi bahasa Indonesia untuk kepentingan analisis tematik. Pada periode ini pula, RSP tidak lagi menjadi suplemen, melainkan menyatu dengan edisi Minggu dan terbit rutin setiap akhir pekan. Rubrik disajikan dalam satu halaman yang memuat tiga tulisan, yakni *headline,* kolom *Pringgitan*, dan tulisan lepas di kolom *Blencong.*

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) di periode ketiga berlangsung dalam atmosfer pascareformasi yang ditandai oleh euforia kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan (Arnus, 2015), sementara sebelumnya Presiden B.J. Habibie menghapus SIUPP dan menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Anom & Waluyo, 2011). Periode ini paralel dengan masa transisi kepemimpinan nasional dari Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang turut membentuk dinamika relasi antara pers dan kekuasaan (Andani & Birsyada, 2024). Konteks politik dan regulasi tersebut menjadi latar struktural yang memengaruhi arah dan karakter praktik jurnalistik pada periode ini.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) periodisasi 2011-2020, ditandai oleh konsistensi terbit mingguan, format satu halaman hitam-putih dengan tiga tulisan, serta berlangsung di tengah disrupsi media dan awal pandemi Covid-19. Periode ini merupakan akhir pemerintahan SBY dan memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Saat Jokowi berkuasa inilah, demokrasi dan independensi pers kembali terhambat, media mengalami tekanan hukum dan intervensi politik, pers kesulitan menjaga kredibilitas informasi (Restendy et al., 2025). Tekanan tersebut menempatkan RSP dalam arena jurnalistik yang semakin kompetitif dan terpolarisasi, sehingga praktik produksi menuntut peneguhan nilai simbolik dan legitimasi moral.

Rubrik ini mengalami dinamika perubahan konteks dalam rentang 1996–2020 yang tercermin dalam pergeseran tema dan gaya *headline*. Merujuk pada Dor (2003), *headline* dalam RSP sebagai ruang strategis redaksi dalam menata prioritas makna, menyampaikan nilai, serta membentuk arah pemahaman pembaca terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Pengasuh rubrik memprioritaskan isu ataupun tema-tema yang dianggap paling penting dan paling menarik dalam sepekan terakhir. Isu atau tema yang dipilih selanjutnya dikonstruksi melalui ajaran *Hasta Brata* dengan memanfaatkan simbol, bahasa, dan narasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Nilai kepemimpinan *Hasta Brata* oleh redaksi 'Suara Merdeka' tidak dihadirkan sebagai doktrin normatif yang kaku, melainkan sebagai refleksi kontekstual yang terhubung dengan isu-isu aktual dan dinamika sosial.

Hal ini sejalan dengan studi Haryono et al., (2025) bahwa media lokal bukanlah sekedar saluran distribusi informasi. Lebih dari itu, media lokal sebagai ruang kultural yang berperan dalam membangun makna, menyampaikan nilai-nilai lokal secara kontekstual, serta merefleksikan pengalaman sosial masyarakat.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) menempatkan nilai *Hasta Brata* sebagai rujukan etis untuk mengingatkan praktik kepemimpinan modern yang kerap mengalami distorsi arah. Sejumlah studi menun-

jukkan kepemimpinan kontemporer semakin menjauh dari prinsip moral dan etika, ditandai oleh lemahnya integritas, maraknya pengingkaran janji politik, serta menguatnya praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik (Setiawan & Taufik, 2022; Manara et al., 2020; Ilham, 2022). Ronnie (2024) menegaskan kecenderungan munculnya pemimpin berkarakter otoriter, manipulatif, populis, dan egoistis (*toxic leader)* yang berdampak negatif terhadap kelangsungan pembangunan.

Uniknya, meskipun *Hasta Brata* merupakan warisan nilai leluhur, sejumlah kajian menunjukkan ajaran ini tetap relevan dalam konteks kepemimpinan kontemporer. Studi kuantitatif oleh Suyono (2023) dan Selvarajah & Meyer (2017) membuktikan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan kepemimpinan modern. Temuan ini menguatkan posisi *Hasta Brata* bukan sekadar sebagai artefak budaya, melainkan sebagai sumber nilai yang terus hidup dan dapat dimaknai ulang sesuai dengan konteks zaman.

Untuk mengeksplorasi kontruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif (Mulyana, 2018) sehingga dapat mengeksplorasi fenomena ini secara komprehensif dan holistik. Studi ini didukung dengan paradigma konstruktivis yang menekankan bahwa makna dibangun melalui interaksi antara penulis, subjek, dan konteks sosial (Denzin & Lincoln, 2009). Dalam kerangka ini, data tidak diperlakukan sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai sumber makna yang ditafsirkan secara reflektif. Dengan kata lain, pesan jurnalistik dipandang sebagai hasil konstruksi media terhadap realitas kepemimpinan, bukan sebagai refleksi objektif yang netral. 'Suara Merdeka' melalui RSP mengkonstruksi praktik kepemimpinan melalui rujukan nilai budaya dan etik.

Studi ini secara metodologis menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006, 2012) untuk mengidentifikasi tema dalam 48 artikel RSP yang dipilih secara purposif. Analisis tematik digunakan untuk menelusuri bagaimana pesan moral dan kritik sosial tentang kepemimpinan diorganisasikan dalam bentuk tematik yang berulang. Analisis tematik tersebut sebagai cara jurnalistik dalam menyusun dan menyampaikan pesan kepada publik.

Pemilihan 48 artikel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi isi artikel terhadap tema kepemimpinan dan nilai *Hasta Brata*. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konstruksi pesan jurnalistik dalam RSP. Prinsipnya, kekuatan riset ini terletak pada kedalaman analisis, bukan pada keluasan jumlah data.

Studi ini dilengkapi dengan wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap internal redaksi, pengasuh rubrik, dan pihak-pihak yang berkompeten, serta analisis dokumentasi. Data tersebut digunakan untuk menelaah nilai *Hasta Brata*, menelusuri bagaimana dan mengapa nilai tersebut diwujudkan melalui praktik jurnalistik dalam nuansa etos jurnalistik RSP di 'Suara Merdeka'.

Studi ini tidak hanya menganalisis tematik isi rubrik, tetapi juga mengkaji proses produksi RSP dengan menggunakan teori Bourdieu (1998) dalam kerangka konstruktivis. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana rubrik diproduksi melalui relasi antara *habitus* jurnalis, modal yang dimiliki, serta struktur ranah jurnalistik pada 'Suara Merdeka' beroperasi. Pendekatan ini menjadi pijakan studi untuk mengungkap produksi pesan jurnalistik sebagai hasil interaksi antara

agen dan struktur.

Riset ini juga mengaitkan pesan dan produksi rubrik dengan fungsi sosial pers melalui teori tanggung jawab sosial pers sebagaimana dirumuskan oleh Siebert dkk. dan dikembangkan oleh McQuail (2010). Dalam kerangka tersebut, RSP menjalankan kebebasan pers secara etis melalui beragam fungsi sosial yang saling berkelindan dalam praktik jurnalistiknya (Walden, 2016; Sen, 2021; Coe, 2023).

Kebebasan pers menuntut pelaksanaan tanggung jawab kepada publik (Dunne, 2017). Dalam praktiknya, fungsi sosial 'Suara Merdeka' melalui RSP sejalan dengan pandangan Dominick sebagaimana dikutip Karlinah et al. (2007). Dominick menekankan fungsi media massa sebagai pengawas, penafsir peristiwa penting, pembangun keterkaitan sosial, dan penyedia hiburan. RSP menjalankan fungsi-fungsi tersebut melalui pendekatan kultural yang reflektif dan simbolik.

Dalam menjalankan fungsi sosial tersebut, RSP menunjukkan praktik yang "melawan arus" di tengah dominasi *market-driven journalism* dalam ekosistem media yang semakin berorientasi pada profit (Rianto, 2005; McManus dalam Kurpius, 2003). Kondisi ini menjadi semakin kompleks seiring dampak disrupsi media digital yang memengaruhi kebiasaan konsumsi media, penurunan oplah, dan pendapatan iklan (Leurdijk et al., 2014; Franklin, 1988; Wahl-Jorgensen et al., 2016). Dalam konteks tersebut, keberlanjutan RSP sebagai pilihan kultural dan ideologis terkait komitmen terhadap fungsi pers sebagai ruang refleksi sosial dan kritik moral.

Keberlanjutan RSP ini berlangsung dalam suasana krisis media cetak. Data Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun 2022 menunjukkan

krisis media cetak menyebabkan ratusan media bangkrut, sementara media lokal yang bertahan harus melakukan efisiensi, pengurangan karyawan, dan migrasi ke ranah digital (Nielsen, 2015; Simons & Dickson, 2017). Padahal, media lokal tetap memiliki peran strategis dalam mengangkat isu kewilayahan yang kerap terabaikan media nasional (Maryani et al., 2018). Dalam konteks ini, keberlangsungan media lokal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi secara teknologi, tetapi juga oleh kapasitasnya mempertahankan kedekatan kultural dan relevansi sosial dengan komunitas pembacanya.

'Suara Merdeka' mempertahankan RSP di tengah tekanan struktural industri media, sehingga praktik tersebut menjadi fenomena yang signifikan. Ketika banyak media lokal menghapus rubrik budaya, rubrik ini tetap hadir sebagai ruang refleksi kultural. Fenomena ini menunjukkan bahwa rubrik budaya masih memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan nilai dan identitas lokal.

Penulis menelusuri hanya sedikit surat kabar lokal yang masih menyediakan ruang khusus bagi konten budaya Jawa, itupun dengan berbagai keterbatasan. Harian Solo Pos, misalnya, masih memuat rubrik komedi berbahasa Jawa 'Ah-Tenane', sementara Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) mempertahankan rubrik pewayangan 'Mekar Sari'. Namun, seiring penurunan oplah dan pendapatan iklan, halaman rubrik 'Mekar Sari' mengalami pengurangan signifikan, dari dua halaman menjadi satu halaman.

Kondisi serupa terjadi pada harian 'Jawa Pos' di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, koran ini memiliki rubrik khusus budaya lokal bertajuk 'Jawa Timur'. Akan tetapi, rubrik tersebut kemudian dihapus

dan digantikan dengan rubrik 'Saujana' yang memuat artikel sastra dan resensi buku dalam satu halaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa ruang bagi konten budaya lokal di media cetak kian menyempit dan rentan tergerus oleh pertimbangan efisiensi redaksional serta orientasi pasar.

Fenomena pada 'Jawa Pos' tersebut mencerminkan kecenderungan yang lebih luas dalam praktik pers di Indonesia, yakni semakin terbatasnya ruang ekspresi budaya lokal pada lingkup media cetak. Sen dan Hill (2001) dalam risetnya menyimpulkan bahwa semakin berkurangnya rubrik budaya di media lokal menegaskan konten budaya daerah belum menjadi prioritas dalam kebijakan redaksional. Keduanya berargumen bahwa dominasi budaya Jawa dalam industri kebudayaan Indonesia tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik media. Meskipun banyak pekerja media berasal dari latar budaya Jawa, ekspresi bahasa dan kesenian Jawa justru jarang dihadirkan dalam pemberitaan. Akibatnya, budaya Jawa seperti halnya budaya daerah lain, minim diakomodasi oleh pers, kecuali pada media tertentu seperti radio yang relatif masih menyediakan ruang bagi bahasa daerah dan kesenian tradisional.

Dikaitkan peran media lokal menurut Muktiyo (2011) bahwa media lokal sejatinya memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya, termasuk budaya Jawa, dengan menyediakan konten yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, media yang mempublikasikan konten budaya lokal sering kali terjebak pada orientasi komersial atau komodifikasi budaya (Muktiyo, 2011; Hidayat, 2012). Budaya justru diposisikan sebagai daya tarik pasar, bukan sebagai ruang refleksi nilai yang berkelanjutan.

Bertolak dari kondisi tersebut, ruang redaksi merupakan arena produksi konten budaya yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan. Dalam ruang ini, produksi rubrik budaya berlangsung di bawah tekanan beragam kepentingan, mulai dari kepentingan publik, kepentingan lokal, hingga kepentingan bisnis media agar tetap bertahan (Sudibyo, 2009; Shoemaker & Reese, 1996, 2014). Oleh karena itu, ruang redaksi merupakan 'ruang panas' tempat negosiasi makna dan kebijakan berlangsung secara terus-menerus.

Tekanan terhadap ruang redaksi tersebut semakin menguat seiring dengan perubahan lanskap media ke arah digital. Media massa dalam lanskap digital cenderung memprioritaskan isu-isu yang sensasional, cepat, dan kontroversial, seperti politik, ekonomi, hukum, dan kriminalitas (Sen, 2021). Dalam ekosistem digital sebagaimana dijelaskan Anderson (2012), praktik jurnalistik semakin bergantung pada indikator kuantitatif seperti klik, *page views*, dan *traffic report*. Kondisi ini tentu saja memengaruhi preferensi redaksi dalam menentukan isu yang dianggap layak diberitakan dan bernilai ekonomis bagi pengiklan.

Preferensi redaksional yang berorientasi pada capaian kuantitatif tersebut berimplikasi langsung pada menyempitnya ruang pemberitaan budaya. Kondisi tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang yang menampung isu budaya dibandingkan isu politik, ekonomi, atau hukum (Heikkilä & Lauronen, 2018; Kersten & Janssen, 2017; Biernacka-Ligieza, 2013; Nahak, 2018). Keterbatasan ini juga dipicu oleh rendahnya minat wartawan terhadap liputan budaya (Hanusch, 2013). Chika & Ugochi (2016) prihatin lantaran media cenderung menem-

patkan isu budaya hanya dalam konteks peristiwa tertentu, bukan sebagai liputan yang bersifat rutin dan berkelanjutan.

Dalam konteks menyempitnya ruang pemberitaan budaya tersebut, keberlanjutan RSP menjadi fenomena yang menarik sekaligus penting untuk dikaji secara akademik. Di tengah tekanan pasar, disrupsi digital, dan menyempitnya ruang budaya di media cetak, RSP tetap hadir sebagai ruang refleksi kultural yang konsisten mengartikulasikan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, khususnya nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Keberlanjutan ini tidak hanya mencerminkan kebijakan redaksional 'Suara Merdeka', tetapi juga menunjukkan adanya komitmen kultural dalam praktik jurnalistik lokal.

Studi ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dikonstruksi, dimaknai, dan direproduksi melalui praktik jurnalistik RSP dalam rentang waktu 1996–2020. Dengan mengintegrasikan tema-tema yang muncul dalam artikel (konten), produksi RSP ('Suara Merdeka'), dan fungsi sosial pers (RSP), riset ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran RSP dalam mengonstruksi pesan jurnalistik tentang nilai-nilai kepemimpinan lokal *Hasta Brata* dalam konteks kepemimpinan kontemporer. Riset ini tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas atau dampak rubrik terhadap pembaca, melainkan untuk memahami bagaimana pesan atau nilai kepemimpinan dikonstruksi dan dijalankan dalam praktik jurnalistik.

BAB II

MEDIA, BUDAYA JAWA, DAN KEPEMIMPINAN

A. Perspektif Beberapa Kajian Sejenis

Dalam kajian komunikasi dan media, isu budaya cenderung memperoleh perhatian yang lebih terbatas dibandingkan isu politik, ekonomi, atau hukum. Padahal, konten budaya memuat nilai-nilai, pandangan hidup, serta kearifan yang berperan penting dalam pembentukan karakter masyarakat (Kristensen & Riegert, 2017). Dengan demikian, jurnalisme budaya diposisikan sebagai arena reflektif tempat nilai-nilai kultural dikonstruksikan dan dinegosiasikan secara simbolik antara media dan publik.

Fenomena ini menunjukkan dinamika dalam konstruksi realitas media bahwa penentuan nilai berita dan produksi konten- terbentuk dari interaksi antara idealisme jurnalistik dan tuntutan industri media. Relasi antara fungsi sosial pers dan praktik jurnalistik sebagai proses negosiasi makna yang terus berlangsung. Meskipun hal ini menyebabkan terjadi '*gap*' antara idealisme fungsi sosial pers dan praktik jurna-

listik yang lebih menonjolkan aspek komersial, aktualitas, ataupun kontroversial.

Kondisi ini tampak di media lokal, terutama sejak pergeseran ke platform digital sehingga memaksa rubrik budaya terhenti seiring banyaknya koran lokal bangkrut. Dalam konteks itu, Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) di 'Suara Merdeka' menjadi contoh menarik. Sejak 1996, RSP melalui RSP mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Jawa melalui *pasemon* dan narasi reflektif yang memuat kritik sosial maupun pesan moral. Keberlanjutan RSP menunjukkan media lokal masih berperan sebagai penjaga nilai dan penuntun moral masyarakat. Fenomena ini sekaligus menandai adanya ruang kajian yang belum banyak disentuh dalam penelitian media dan budaya.

Meskipun banyak penelitian yang membahas hubungan antara media dan budaya, sebagian besar masih berfokus pada aspek representasi, ekonomi politik media, atau relasi kuasa dalam *newsroom*.

Perspektif dari enam disertasi dan 10 artikel yang digunakan sebagai perbandingan dalam buku ini, menunjukkan fokus dan kajian yang berbeda. Persamaannya adalah fokus tentang praktik jurnalistik sebagai arena sosial yang kompleks. Perbedaannya pada lokasi, metode, implementasi, dan kerangka teoritis yang digunakan. Beberapa bidang yang diteliti bersinggungan dengan ekonomi politik media, perubahan struktur kekuasaan dalam ranah jurnalistik, identitas budaya, nilai kepemimpinan Jawa dalam konteks organisasi dan perilaku sosial masyarakat kontemporer. Belum ada yang mengkaji jurnalisme budaya dikaitkan dengan kepemimpinan tradisional *Hasta Brata* berbasis *habitus* dari teori Pierre Bourdieu, teori tanggungjawab

sosial pers dalam konteks budaya lokal, dan teori konstruksi realitas sosial-seperti halnya buku ini.

Berikut ini penjelasan 16 penelitian terdahulu berdasarkan klasifikasi paradigma penelitiannya:

1. Dlamini (2023). Disertasi berjudul *Newsroom Culture and Journalistic Practice at The South African Broadcasting Corporation (SABC): An Enthnographic Study* dari University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan. Dlamini mengkaji bagaimana budaya ruang redaksi lembaga penyiaran publik Afrika Selatan membentuk praktik jurnalistik dan identitas profesional wartawan dalam konteks pasca-apartheid. Ia menggunakan pendekatan etnografi dalam paradigma konstruktivis. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dlamini mengaplikasikan teori Bourdieu tentang habitus, modal, ranah, perspektif jurnalisme global dan hibridisasi budaya. Ia menyimpulkan habitus jurnalis SABC terbentuk melalui negosiasi antara idealisme pelayanan publik dan tekanan kekuasaan politik. Independensi dimaknai secara simbolik dan strategis, sementara praktik redaksi merefleksikan *strategic hybridity* antara nilai jurnalisme Barat dan nilai kultural Afrika. Disertasi Dlamini relevan dengan buku ini karena kesamaan kerangka teoretis dan paradigma, khususnya dalam menelusuri peran habitus dan nilai budaya dalam praktik jurnalistik pada konteks kultural yang berbeda.
2. Boughen (2023). Disertasi berjudul *Sino-African Journalism and Journalistic Fields: CGTN Africa's Workers Between Worlds* dari University of Westminster, Inggris. Ia meneliti praktik jurnalisme lintas budaya di CGTN Africa, media milik Tiongkok yang beroperasi di

Nairobi, Kenya. Penelitiannya bertujuan mengeksplorasi bagaimana jurnalis Afrika dan Tiongkok menegosiasikan identitas profesional serta nilai jurnalisme dalam konteks budaya yang berbeda. Boughen menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan etnografi ruang redaksi global. Termasuk memadukan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Ia menggunakan teori ranah jurnalistik Pierre Bourdieu, jurnalisme transnasional, dan hibridisasi budaya. Temuan Boughen menunjukkan bahwa jurnalis CGTN Africa membangun identitas profesional hibrid melalui penyeimbangan nilai harmoni dan konsensus dengan prinsip kemandirian dan keterbukaan. Praktik redaksional mencerminkan *strategic hybridity* yang bersifat dialogis. Disertasi Boughne relevan dengan buku ini dalam penggunaan kerangka Bourdieu dan paradigma konstruktivis, meskipun berangkat dari konteks kultural yang berbeda.

3. Jaakolla (2015). Disertasi berjudul *The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism* dari University of Tampere, Finlandia. Jaakkola mengkaji dinamika jurnalisme budaya di Finlandia selama tiga dekade (1978–2008) dengan menelusuri bagaimana otonomi jurnalisme seni dipertahankan di tengah tekanan komersialisasi media dan perubahan nilai profesional di ruang redaksi. Jaakolla menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan sosiologis dan multidisipliner. Serta didukung metode campuran melalui analisis isi rubrik budaya, wawancara mendalam dengan wartawan dan redaktur, serta observasi etnografis. Ia menerapkan kerangka teori Pierre Bourdieu dan sosiologi seni. Jaakkola menyimpulkan adanya ketegangan berkelanjutan antara orientasi estetika

seni dan praktik jurnalistik, yang mencerminkan dualitas profesionalisme wartawan budaya. Temuan penelitian mengungkap pergeseran dari jurnalisme budaya yang relatif otonom menuju praktik yang lebih heteronom akibat tekanan pasar dan kebijakan redaksi. Meski demikian, wartawan budaya tetap berupaya menjaga keseimbangan antara nilai estetis dan tanggung jawab sosial jurnalistik. Disertasi Jaakolla ini relevan dengan buku ini dalam penggunaan teori Bourdieu, meskipun berada dalam konteks kultural yang berbeda.

4. Roza (2022). Disertasi berjudul *Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes,* dari University of Technology Sydney, Australia. Roza menelaah praktik jurnalisme data di Indonesia dalam menghadapi arus hoaks dan disinformasi digital. Fokus penelitiannya pada bagaimana media membangun kapasitas profesional dan etika di era data. Roza menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengkaji sejumlah media daring melalui wawancara mendalam, analisis isi, dan observasi *newsroom*. Ia mengadopsi kerangka teori Bourdieu, ekonomi politik media, serta model propaganda dalam penelitian tersebut. Roza menyimpulkan muncul ketegangan antara idealisme jurnalistik, tekanan pasar, dan pengaruh politik. Temuan penelitian mengungkap bahwa jurnalisme data masih berkembang dan bergantung pada modal teknologi serta sumber daya manusia, sekaligus berfungsi sebagai strategi simbolik untuk membangun kredibilitas publik. Transformasi digital dipahami bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga kultural, yakni terbentuknya habitus baru berbasis literasi data dan refleksi sosial. Disertasi Roza relevan dengan buku ini dalam penggunaan paradigma konstruktivis dan konsep

habitus, meski berbeda fokus antara jurnalisme data modern dan jurnalisme budaya Jawa dalam RSP.

5. Olsen (2019). Disertasi berjudul *The Value of Local News Unpacking Dynamics of Local Newspapers' Value Creation for Audiences and Society* dari University of Oslo, Norwegia. Ia menelaah bagaimana surat kabar lokal menciptakan nilai sosial, kultural, dan demokratis bagi komunitasnya di tengah tekanan digitalisasi. Olsen menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis melalui studi kasus media lokal di Norwegia. Ia berargumen bahwa keberlanjutan media lokal tidak semata ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh relasi sosial dan kepercayaan publik. Temuan penelitian Olsen menunjukkan tiga dimensi utama penciptaan nilai media lokal, yakni penguatan identitas lokal, pelestarian budaya, dan fungsi pengawasan sosial. Disertasi Olsen relevan dengan buku ini karena sama-sama memosisikan media sebagai entitas kultural yang membangun makna dan nilai sosial. Perbedaannya terletak pada konteks budaya dan fokus analisis yakni buku penulis menelaah habitus budaya Jawa dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik jurnalistik RSP.

6. Dune (2017). Disertasi berjudul *Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System* dari School of Communications Dublin City University, Irlandia. Dune meneliti proses institusionalisasi regulasi pers independen di negara dengan sistem media liberal melalui studi kasus komparatif di Inggris, Irlandia, dan Norwegia. Berpijak pada paradigma konstruktivis, penelitian Dune menelaah bagaimana kebebasan pers dan tanggung jawab sosial dinegosiasikan antara

negara, media, dan publik. Ia memadukan teori normatif media, tanggung jawab sosial, teori institusional, serta kerangka Pierre Bourdieu. Temuan penelitian Dune menunjukkan bahwa regulasi independen tidak melemahkan kebebasan pers, melainkan memperkuat legitimasi profesional dan kepercayaan publik. Regulasi yang terinstitusionalisasi membantu media menjalankan fungsi sosialnya secara akuntabel. Studi Dune relevan dengan buku ini terkait penekanan pada dimensi etis dan sosial jurnalisme melalui paradigma konstruktivis dan teori Bourdieu. Kendati berbeda konteks kultural antara praktik regulasi Barat dan jurnalisme budaya Jawa yang berlandaskan nilai *Hasta Brata.*

7. Yoedtadi & Salman (2023). Artikel berjudul Habitus Jurnalisme Keberagaman dan Kearifan Lokal Masyarakat Kupang terbit di *Jurnal Serina Sosial Humaniora*. Vol. 1, No. 3, Oktober 2023. Yoedtadi dan Salman mengkaji bagaimana wartawan di Kota Kupang menginternalisasi nilai kearifan lokal dalam praktik jurnalisme keberagaman untuk mengembangkan toleransi pada masyarakat multikultural. Keduanya menggunakan teori Pierre Bourdieu tentang habitus, modal, dan ranah dalam lingkup penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yoedtadi menelusuri peran nilai-nilai lokal seperti *Nusi, Butukila, Suki Toka Apa*, dan *Muki Nena* dalam membentuk disposisi etis wartawan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap wartawan lokal. Temuan menunjukkan bahwa *habitus* kultural yang terinternalisasi sejak awal kehidupan mendorong praktik jurnalistik yang mengutamakan harmoni sosial dan menghindari narasi konflik. Meski menghadapi tekanan ekonomi dan logika media daring, jurnalisme keberagaman di Kupang tetap berfungsi

sebagai ruang pemaknaan nilai solidaritas. Riset Yoedtadi & Salman relevan dengan buku ini dalam penekanan pada habitus kultural sebagai dasar praksis jurnalistik berbasis nilai lokal.

8. Wijayanto (2019). Artikel berjudul *Bourdieu and Media Theory: Explaining Medias Changes and Continuities in The Post Authoritarian Countries*- terbit di *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4 (2), 2019. Wijayanto menelaah paradoks demokratisasi media di negara pasca-otoritarian seperti Indonesia, sehingga kebebasan pers secara formal masih berhadapan dengan warisan struktur kekuasaan dan relasi ekonomi-politik lama. Ia menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis serta diperkuat kerangka teoritis Pierre Bourdieu. Penelitiannya bertujuan mengkaji habitus jurnalis, distribusi kapital, dan dinamika ranah media. Temuan menunjukkan adanya ketegangan berkelanjutan antara idealisme profesional dan tekanan ekonomi yang membatasi otonomi media. Perubahan media dipahami bukan sebagai proses linier menuju kebebasan, melainkan sebagai hasil interaksi antara struktur dan agensi. Studi Wijayanto relevan dengan buku penulis dalam penggunaan teori Bourdieu untuk memahami praktik jurnalistik sebagai konstruksi sosial, meskipun fokus penulis diarahkan pada jurnalisme budaya lokal dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam konteks Jawa.

9. Maares & Hanusch (2022). Artikel berjudul *Interpretations of the Journalistic Field: A Systematic Analysis of How Journalism Scholarship Appropriates Bourdieusian Thought.* Artikel ini terbit di Jurnal: *Journalism.* Maares dan Hanusch memetakan penggunaan teori medan Pierre Bourdieu dalam penelitian jurnalisme lintas negara

dengan menelaah bagaimana konsep-konsep kunci teori dimanfaatkan dan siapa yang memiliki otoritas akademik dalam membentuk pemahamannya. Menggunakan pendekatan *mixed systematic review* dalam paradigma konstruktivis, studi ini menganalisis 249 artikel jurnal internasional terbitan 1998–2018 melalui analisis isi, teks, dan bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan meningkatnya popularitas pemikiran Bourdieu sejak 2009, namun penerapannya cenderung parsial, dengan dominasi konsep ranah dan modal, sementara habitus dan *doxa* relatif jarang dieksplorasi. Temuan juga mengungkap dominasi perspektif Barat dalam kajian Bourdieusian. Studi Maares & Hanusch sejalan dengan kerangka buku ini yang menggunakan teori Bourdieu untuk memahami praktik jurnalistik sebagai konstruksi sosial. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang diarahkan pada jurnalisme budaya lokal serta artikulasi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam konteks budaya Jawa.

10. Lindell et al. (2019). Artikel berjudul *The Field of Television Production: Genesis, Structure and Position-Takings.* Artikel ini terbit di Jurnal *Poetics*, Volume 80 (2020). Lindell dkk mengkaji bagaimana struktur dan praktik produksi televisi di Swedia dibentuk oleh interaksi antara modal ekonomi, modal kultural, dan *habitus* para aktor media. Dengan pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis, Lindell memetakan ranah televisi sebagai arena sosial yang mempertemukan kepentingan, strategi, dan nilai profesional. Data diperoleh melalui wawancara, survei, serta analisis historis terhadap televisi publik dan komersial. Temuan penelitian menegaskan relevansi teori medan Bourdieu untuk memahami dinamika industri media modern. Artikel Lindell dkk relevan dengan buku

ini karena sama-sama menggunakan kerangka Bourdieu dalam ranah jurnalistik, meskipun konteksnya berbeda. Lindell berfokus pada industri televisi Swedia, buku ini menelaah habitus wartawan Jawa dalam membangun konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP.

11. Munnik (2018). Artikel berjudul *A Field Theory Perspective on Journalist–Source Relations* terbit di *Journal Sociology*, Vol. 52 (6). Penelitian Munnik mengkaji relasi antara jurnalis dan sumber berita Muslim di Glasgow melalui pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis dengan kerangka teori medan Pierre Bourdieu. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam, observasi etnografis, analisis dokumen, dan refleksi professional. Studi ini menunjukkan bahwa representasi Muslim di media Inggris dibentuk oleh ideologi redaksi, relasi sosial, serta distribusi kapital simbolik dalam ranah jurnalistik. Studi kasus Aamer Anwar sebagai *authorised knower* dan *Amina Muslim Women's Resource Centre* sebagai *new entrant* memperlihatkan bagaimana posisi sosial dan akumulasi kapital menentukan daya tawar aktor dalam memengaruhi pemberitaan. Relevansinya dengan buku ini terkait produksi makna dan negosiasi otonomi dalam medan jurnalistik. Dalam konteks RSP, figur pengasuh rubrik dipahami sebagai aktor berotoritas yang menegosiasikan nilai budaya Jawa (*Hasta Brata*) di tengah tekanan struktural media.

12. Danzon-Chambaud & Cornia (2023). Artikel berjudul *Changing or Reinforcing the Rules of the Game: A Field Theory Perspective on the Impacts of Automated Journalism on Media Practitioners* terbit di *Journalism Practice*, Vol 17 (2). Danzon-Chambaud dan Cornia

menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dalam paradigma konstruktivis untuk memahami otomatisasi jurnalisme melalui kerangka teori medan Pierre Bourdieu. Studi reflektif ini menekankan konsep habitus, ranah, modal, dan doxa sebagai nilai tak tertulis yang membentuk praktik jurnalistik. Kedua peneliti tersebut menerapkan riset berbasis kajian literatur dan sintesis konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa otomatisasi tidak menghilangkan peran manusia, melainkan menggeser konfigurasi *habitus* dan distribusi kapital di ruang redaksi. Kedua peneliti merujuk pada ideologi jurnalisme (Deuze) dan relasi struktur-agensi seraya menegaskan teknologi berfungsi sebagai mediator antara otonomi profesional dan tuntutan komersial. Relevansinya dengan buku ini terletak pada penggunaan teori Bourdieu dalam kerangka konstruktivis untuk memahami praktik jurnalistik sebagai hasil negosiasi nilai moral, sosial, dan struktural, bukan semata logika pasar.

13. Barnard (2013). Studi berjudul *The Journalistic Field in a Time of Mediatization* merupakan judul bab dari buku berjudul *Citizens at the Gates* yang diterbitkan Springer International Publishing. Barnard mengkaji perubahan medan jurnalistik di era *mediatization* dan media digital dengan memandang jurnalisme sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang. Ia menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dalam paradigma konstruktivis, serta menggabungkan teori medan Pierre Bourdieu dan teori *mediatization*. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dinamika *habitus*, modal, doksa, serta relasi otonomi–heteronomi jurnalis. Tanpa riset lapangan, kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi melahirkan media *meta-capital* yang membentuk praktik profesional dalam

ruang jurnalistik yang semakin hibrid. Otonomi jurnalis tetap ada, tetapi dinegosiasikan melalui logika jejaring dan partisipasi publik. Relevansinya dengan buku ini terletak pada pandangan jurnalis sebagai aktor reflektif dalam menegosiasikan nilai dan makna sosial, meski fokus buku ini berakar pada habitus budaya Jawa dan orientasi moral.

14. Suyono (2023). Artikel berjudul *Empirical Study of Javanese Leadership Style in Surakarta, Indonesia* terbit di JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 4, 2023. Suyono menguji secara empiris konsep kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai model kepemimpinan berbasis kearifan lokal Jawa dalam konteks pemerintahan desa di wilayah Surakarta. Ia menggunakan metode survei kuantitatif terhadap 138 kepala desa di Sukoharjo dan Sragen, untuk menganalisis dimensi dominan kepemimpinan *Hasta Brata*. Temuan menunjukkan adanya perbedaan penekanan nilai *Hasta Brata* yang dipengaruhi latar historis Mataram, di mana kebijaksanaan dan moralitas lebih menonjol di Sukoharjo, sementara ketegasan dan harmoni sosial lebih ditekankan di Sragen. Buku ini menegaskan relevansi *Hasta Brata* sebagai model kepemimpinan moral dalam konteks kontemporer. Penelitian Suyono relevan secara konseptual dengan buku ini dalam pembahasan nilai *Hasta Brata*, meskipun berbeda pendekatan dan ranah analisis, yakni pemerintahan lokal dan jurnalisme budaya Jawa dalam RSP.

15. Selvarajah & Meyer (2017). Artikel berjudul *Human Capacity Development in Indonesia: Leadership and Managerial Ideology in Javanese Organizations* terbit di Jurnal *Asia Pacific Business Review.* Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai budaya Jawa membentuk ideologi kepemimpinan dan praktik manajerial dalam organisasi

modern. Dengan pendekatan kuantitatif berparadigma positivistik, Selvarajah dan Meyer melakukan survei terhadap para pemimpin dan manajer di Jawa untuk memetakan dimensi kepemimpinan yang dianggap efektif melalui analisis faktor dan model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan ideal dalam konteks Jawa berakar pada etika, spiritualitas, dan harmoni sosial, serta menekankan prinsip rukun, keselarasan, dan tanggung jawab moral kolektif. Riset Selvarajah & Meyer relevan dengan buku ini karena sama-sama mengulas nilai kepemimpinan *Hasta Brata.* Perbedaannya terletak pada pendekatan dan ranah kajian: penelitian ini berfokus pada praktik manajerial organisasi modern, sedangkan buku penulis mengkaji konstruksi makna kepemimpinan *Hasta Brata* dalam ranah jurnalistik RSP.

16. Suwirta (2018). Artikel berjudul Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru terbit di *Jurnal Mimbar Pendidikan* Vol 3(2). Ia menelaah dinamika politik awal Orde Baru melalui studi kasus Mingguan Mahasiswa Indonesia (MMI) di Bandung (1966–1974). Suwirta melalui pendekatan kualitatif dan metode historis, menelusuri peran pers mahasiswa sebagai agen pengawasan sosial terhadap kekuasaan pada masa Orde Baru. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Mahasiswa Muslim Indonesia (MMI) mengalami pergeseran dari media pendukung rezim menjadi saluran kritik terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di sekitar pemerintahan Soeharto. Sikap kritis tersebut berujung pada pembungkaman pada tahun 1974, yang mencerminkan strategi negara dalam membatasi kebebasan berekspresi atas nama stabilitas dan pembangunan. Temuan ini menegaskan peran pers mahasiswa sebagai ekspresi idealisme sosial dan tanggung

jawab moral terhadap publik, meski berhadapan dengan represi politik. Studi Suwirta relevan dengan buku ini dalam menempatkan pers sebagai ruang refleksi moral. Kendati, penulis mengkaji kritik sosial melalui konstruksi simbolik budaya Jawa dalam RSP, bukan melalui perlawanan politik langsung.

Telaah terhadap perspektif beberapa kajian sejenis menunjukkan bahwa kajian jurnalisme berkembang luas, terutama dalam memahami praktik jurnalistik sebagai hasil interaksi antara aktor, struktur, dan konteks sosial. Sejumlah penelitian menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk menjelaskan peran *habitus* jurnalis, distribusi modal, serta posisi media dalam ranah jurnalistik. Kajian-kajian tersebut berkontribusi penting dalam menjelaskan dinamika profesionalisme, otonomi redaksi, tekanan ekonomi dan teknologi dalam industri media.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan jurnalisme dalam kerangka struktural dan institusional. Fokus kajian lebih banyak diarahkan pada perubahan medan jurnalistik, relasi kuasa di ruang redaksi, serta dampak digitalisasi dan komersialisasi. Kajian yang secara khusus menempatkan jurnalisme budaya sebagai ranah konstruksi nilai normatif masih relatif terbatas. Nilai budaya umumnya hadir sebagai konteks pendukung, bukan sebagai objek kajian utama.

Penelitian tentang kepemimpinan *Hasta Brata* berkembang dalam ranah studi kepemimpinan dan organisasi. Penelitian-penelitian tersebut memosisikan *Hasta Brata* sebagai konsep normatif atau model kepemimpinan ideal, dengan pendekatan yang cenderung

deskriptif. Relasi antara nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dan praktik jurnalistik, khususnya dalam media cetak lokal, belum banyak dikaji.

Penerapan teori Bourdieu dalam studi jurnalisme masih didominasi oleh konteks Barat dan jurnalisme arus utama. Pemanfaatan konsep habitus, ranah, dan modal untuk menelaah jurnalisme budaya lokal yang berakar pada tradisi Jawa masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, buku ini mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dengan menempatkan RSP sebagai arena konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik jurnalistik lokal berbasis kultural.

Sebagai respons atas kekosongan kajian tersebut, buku ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri habitus budaya Jawa yang dimiliki para aktor media dalam membentuk konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui RSP di harian 'Suara Merdeka'. Penelitian ini mengaitkan teori Pierre Bourdieu (1984, 1998), teori tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984), dan teori konstruksi realitas sosial sebagai kerangka analitis. Keterjalinan ketiga perspektif tersebut menghasilkan refleksi jurnalistik yang mengandung kritik sosial berbasis etis dan kultural dalam konteks jurnalisme budaya.

B. Perspektif Pierre Bourdieu

Pierre Felix Bourdieu (1930-2002) asal Perancis merupakan sosiolog dan filsuf terkenal di abad ke-20. Ia menggunakan praktik sosial yang merupakan hasil kolaborasi pemikirannya yang bersumber dari kajian sosiologi, antropologi, dan filsafat. Gagasan Bourdieu tentang *habitus* secara umum dalam praktik sosial, yang kemudian diadaptasi di antaranya pada kajian jurnalistik dan media massa.

Bourdieu menempatkan gagasan dan temuan studi tentang realitas sosial Durkheim, strukturalisme Saussure, Levi-Staruss, dan strukturalisme Marxis dalam aliran objektivisme. Ia menentang perspektif objektivisme karena struktur objektif terlalu berfokus pada faktor ekonomi sehingga mengabaikan subjektivitas manusia sebagai agen. Sosiolog ini dikenal dengan kata-katanya sendiri 'pertentangan yang absurd antara individu dan masyarakat' (Bourdieu, 1990) dalam Ritzer & Goodman (2003). Itu sebabnya Bourdieu tertarik pada pemikiran subjektivisme yang dipengaruhi oleh eksistensialisme Sartre, fenomenologi Schultz, interaksionisme simbolik Blumer, dan etnometodologi Garfinkel, yang menekankan kreativitas agensi dan inovasi dalam menyikapi realitas dan dunia sosial.

Karya Bourdieu difokuskan untuk 'menjembatani' subjektivisme dan objektivisme melalui konsep *habitus* dan ranah dalam masyarakat kontemporer dan menyorot hubungan dialektis antara keduanya. Menurutnya, *habitus* aktor berakar dalam pikiran, sementara ranah berada di luar kesadaran aktor.

Konsep *habitus* merupakan konsep kunci dalam sintesa teoritis Bourdieu. Saifuddin (2016) mengungkapkan, *habitus* merupakan produk dari struktur sosial yang merupakan struktur generatif dari praktik sosial serta mereproduksi struktur sosial. *Habitus* bersifat mikro (berfungsi pada tingkat individu dan antarpribadi) dan makro (merupakan produk dan kontribusi terhadap sistem masyarakat). Dalam implementasinya, *habitus* selalu terkait dengan ranah dan modal.

Habitus aktor melalui dinamika kreatif dan dinamika dialektika struktur sosial objektif melahirkan praktik-praktik sosial yang dirumuskan Bourdieu yaitu:

(*Habitus* x Modal) + Ranah = Praktik

Secara prinsip, Bourdieu ingin terbebas dari dikotomi objektivisme dan subjektivisme sehingga menekankan 'hubungan antara struktur sosial dan struktur mental'. *Habitus* oleh Wacquant (1989) disebut sebagai kebiasaan. Namun, Bourdieu mendefinisikan *habitus* adalah 'struktur mental atau kognitif' yang digunakan aktor untuk menyikapi kehidupan atau realitas sosial melalui proses internalisasi (Ritzer & Goodman, 2003). Kondisi ini ini mendorong aktor untuk berkreasi dan mengevaluasi tindakan mereka. Diketahui, *habitus* adalah 'produk internalisasi struktur dunia sosial' atau habitus merupakan 'realisasi dari hasil internalisasi terhadap struktur sosial' (Bourdieu, 1998). *Habitus* merupakan sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial, diperoleh dari waktu ke waktu dan dapat menjadi fenomena kolektif. Melalui *habitus* melandasi aktor untuk memahami dunia sosial, namun keberadaan *habitus* menyiratkan bahwa kehidupan sosial tidak dapat diberlakukan secara seragam pada semua aktor.

Habitus terbentuk dalam jangka waktu yang panjang, diperoleh melalui pengalaman hidup, pola pengasuhan sejak kecil, dan berperan penting dalam sejarah dunia sosial oleh aktor sosial. *Habitus* dapat bertahan dan berubah serta berpindah dari satu bidang ke bidang lain. Bourdieu (1993) menyebutkan *habitus* kerap kali dimetaforakan sebagai 'logika permainan'. Ia memandang *habitus* sebagai pengertian praktis yang mendorong aktor untuk bertindak dan bereaksi dalam situasi di luar aturan yang ditentukan sebelumnya, daripada sekadar mengikuti aturan.

Bourdieu mengasumsikan *habitus* sebagai sesuatu yang 'menghasilkan dan dihasilkan' aktivitas sosial. *Habitus* merupakan 'struktur yang menstruktur' yang berarti struktur tersebut membentuk kehidupan sosial. Sebaliknya, *habitus* adalah 'struktur yang terstruktur' yang menunjukkan bahwa struktur tersebut terstruktur oleh dunia sosial. Artinya, *habitus* adalah dialektika antara internalisasi dan eksternalitas serta eksternalisasi dari internalitas (Bourdieu, 1977) dikutip Ritzer & Goodman (2003).

Habitus bersinggungan dengan modal, karena beberapa *habitus* bertindak sebagai pengganda untuk berbagai jenis modal dan menciptakan modal simbolik baik di dalam maupun untuk aktor (Harker et al., 1990). Modal dalam perspektif tradisi Marxian yaitu mengacu pada penguasaan ekonomi atau modal ekonomi. Sebaliknya, merujuk konsepsi Bourdieu (1994) dalam Ritzer & Goodman (2003) menggolongkan modal yang lebih luas (selain modal ekonomi) yaitu modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik.

Modal sosial menurut Bourdieu (1993) sebagai hubungan dan jaringan yang dimiliki aktor dengan pihak lain dalam posisi kekuasaan. Modal kultural menekankan pengetahuan, kompetensi, atau disposisi tertentu. Komponen dalam modal kultural di antaranya kemampuan intelektual yang diperoleh secara formal, seperti sertifikat dan ijazah, pengetahuan yang dimiliki, warisan keluarga, dan sebagainya. Modal simbolik merujuk pada derajat akumulasi prestise, kesohoran, dan kehormatan. Bourdieu percaya bahwa modal ekonomi dan modal kultural sebagai modal krusial dari praktik sosial. Dengan kata lain, modal merupakan kekuatan krusial yang harus dimiliki oleh setiap aktor untuk mencapai kepentingannya dan untuk bertahan hidup dalam lingkungan sosial atau ranah tertentu.

Bourdieu (1993) mengemukakan bahwa aktor sosial beroperasi dalam situasi sosial tertentu (ranah) yang diatur oleh interaksi sosial sehingga bukan bertindak dalam 'ruang hampa'. Ranah dalam konsepsi Bourdieu adalah ruang sosial terstruktur tempat aktor sosial untuk mendapatkan modal dan posisi yang diatur oleh aturan dan hukum mereka sendiri (Bourdieu, 1993; Bourdieu & Wacquant, 1992; Harker et al., 1990). Ranah dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis seperti ranah politik, ranah ekonomi, ranah pendidikan, dan ranah jurnalistik dalam konteks analisis.

Dalam ranah, harus ada modal yang dimiliki oleh *habitus* selaku motor penggerak untuk berlangsungnya praktik sosial. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh *habitus* (aktor), maka semakin kuat pengaruhnya dalam suatu ranah dan kelangsungan praktik sosial atau kepentingan tertentu. Kendati *habitus* merupakan kunci utama dalam praktik sosial, namun secara keseluruhan antara *habitus*, modal, dan ranah saling bersinergi dan merupakan satu kesatuan utuh.

Hubungan antara *habitus*, modal, dan ranah dalam praktik sosial dibentuk oleh kemampuan antara aktor yang masing-masing memiliki *habitus* dan modal yang terakumulasi dan dikonfigurasi dalam ranah sosial tertentu. Bourdieu berpendapat, praktik sosial terjalin dengan struktur objektif di sekitar aktor sosial dan aspek kreatif atau kesadaran aktor. Konsep 'praktik' terbentuk dari hubungan dialektika antara struktur objektif dan fenomena subjektif sebagai cara aktor dalam menyikapi realitas sosial.

Bourdieu mengklaim perspektif teoritisnya sebagai strukturalisme konstruktivis, konstruktivisme strukturalis, atau strukturalisme genetis (Ritzer & Goodman, 2003). Penamaan ini mencerminkan posisinya

yang berangkat dari tradisi strukturalisme Saussure, Lévi-Strauss, dan Marxisme, terutama dalam penekanan pada bahasa dan kultur sebagai sistem relasi yang bersifat objektif. Dalam kerangka ini, Bourdieu menegaskan bahwa struktur objektif bekerja relatif independen dari kesadaran dan kehendak agen, serta membentuk kondisi bagi praktik dan representasi sosial. Namun, berbeda dari strukturalisme klasik, Bourdieu mengadopsi perspektif konstruktivis untuk menjelaskan bagaimana struktur tersebut dihayati, direproduksi, dan dimaknai melalui pemikiran serta tindakan sosial aktor.

Pierre Bourdieu merumuskan konsep *habitus*, modal, dan ranah sebagai perangkat analitis untuk mengungkap praktik sosial secara menyeluruh. Konsepsi ini sekaligus ditujukan untuk mengatasi oposisi biner dalam ilmu sosial, khususnya dikotomi antara agen dan struktur, makro dan mikro, serta objektif dan subjektif. Dalam konteks ini, Willig (2012) menjelaskan bahwa konsep *habitus* sebagai disposisi individual dengan struktur sosial yang lebih luas, sehingga praktik merupakan hasil relasi dialektis antara agensi dan struktur, baik pada level mikro maupun makro.

Dalam perjalanan kariernya sebagai sosiolog, filsuf, serta menekuni antropologi, Bourdieu tertantang untuk mengkaji dunia pertelevisian di Perancis yang menurut pandangannya terjadi kekerasan simbolik, sehingga membungkam kreativitas jurnalis selaku aktor sosial yang berada dalam tekanan atau kekuasaan kapitalis/pemilik media. Hal ini disebabkan ranah jurnalistik di televisi dikuasai arena ekonomi dan arena politik (Bourdieu, 1998). Kondisi ini menegaskan subordinasi ranah jurnalistik terhadap logika heteronom yang menggerus otonomi dan kreativitas praktik jurnalistik.

Bourdieu (1998) menegaskan ranah jurnalistik di layar kaca dinilai 'lumpuh' dalam menaklukkan ranah ekonomi yang disebabkan kekuatan komersial maupun kekuatan simbolik televisi. Pemikiran Bourdieu ini dituliskan dalam karyanya berjudul: *On Television* (1998) yang menjadi *best seller* di Perancis walaupun banyak dikecam para kritikus karena dinilai sangat kontroversial. Isu krusial dalam *On Television* oleh Bourdieu adalah menyorot budaya media Perancis, jurnalisme berita, dan kekuatan simbolik televisi. Marlierre (1998) maupun Harker et al., (1990) mengemukakan Bourdieu mengkritisi televisi sebagai ancaman karena mendegradasi jurnalistik akibat pengaruh intervensi dari ranah ekonomi dan politik.

Hanya saja, Bourdieu juga kerap dikritik. Salah satunya oleh Marlierre (1998) yang menyatakan bahwa Bourdieu belum memberikan penjelasan normatif mengenai bagaimana jurnalis dapat sepenuhnya terbebas dari kekerasan simbolik yang dijalankan oleh aktor dominan, khususnya kapitalis atau pemilik media yang berada pada kutub heteronom dan memiliki keunggulan modal ekonomi. Kritik ini menyorot keterbatasan teori Bourdieu dalam merumuskan strategi emansipatoris bagi aktor yang berada dalam posisi subordinat.

Pemikiran Bourdieu tentang praktik sosial yang dikembangkan Bourdieu tetap menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika realitas sosial dalam berbagai konteks, termasuk televisi serta studi jurnalistik dan media massa, seperti surat kabar. Menurut Bourdieu, kajian jurnalistik masih cenderung didominasi oleh perspektif politik-ekonomi, perspektif organisasi, dan kajian budaya yang sering kali berdiri secara terpisah dan saling berseberangan.

Dalam konteks inilah, perspektif teoritis jurnalistik oleh Bourdieu dipandang mampu menjadi solusi atau alternatif dalam kajian-kajian jurnalistik. Bourdieu menawarkan gagasan dan pemikirannya melalui konsep kunci *habitus*, ranah, dan modal, tanpa terjebak dalam dikotomi objektivisme-subjektivisme atau kesadaran palsu oleh agen dalam ranah jurnalistik yang melingkupinya. Bourdieu berpendapat bahwa jurnalistik sebagai sub-ranah dalam bidang produksi budaya yang lebih besar (sastra, seni, dan lainnya) yang sebagian ditentukan oleh hubungannya dengan ranah ekonomi dan arena politik (Willig, 2012).

Gagasan Bourdieu tentang *habitus*, modal, ranah, dan praktik sosial yang dikemukakan dalam *On Television* sesungguhnya dapat diadaptasi ke dalam konsep *habitus* jurnalistik, modal jurnalistik, dan ranah jurnalistik untuk menjelaskan pembentukan skema praktik jurnalistik. Schultz (2006) dalam Willig (2012) menilai *On Television* menyediakan kerangka kerja penting bagi sosiologi media kontemporer, meskipun karya tersebut juga menuai kritik karena dianggap kurang memenuhi standar ilmiah tertentu.

Berlandaskan model rumusan praktik sosial Bourdieu, model teoritik untuk praktik jurnalistik yaitu:

(*Habitus* Jurnalistik x Modal Jurnalistik) + Ranah Jurnalistik = Praktik Jurnalistik

Model teoritik tersebut mengelaborasi pemikiran Bourdieu dengan memosisikan praktik jurnalistik sebagai hasil relasional antara *habitus* jurnalistik dan modal jurnalistik, yang senantiasa berada di bawah tekanan ranah sosial lain.

Berpijak dari sudut pandang Bourdieusian dalam paradigma konstruktivis, model rumusan ini memandang praktik jurnalistik sebagai proses sosial yang secara aktif mengonstruksi realitas melalui interaksi antara agen, struktur, dan makna. Perspektif ini berbeda dari pendekatan ekonomi-politik maupun kajian budaya karena tidak semata menekankan determinasi struktur (praktik jurnalistik yang dikendalikan oleh struktur sosial dan kekuasaan) atau representasi kultural, melainkan menelusuri bagaimana makna jurnalistik diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam ranah jurnalistik. Praktik tersebut sebagai hasil relasional antara *habitus* jurnalistik dan kepemilikan modal jurnalistik yang bekerja secara simbolik dalam membentuk sudut pandang, kategori penilaian, serta klaim kebenaran yang dihadirkan dalam produk jurnalistik.

Habitus jurnalistik menjadi konsep kunci untuk menjelaskan bagaimana disposisi internal agen bekerja dalam praktik jurnalistik sehari-hari. *Habitus* berfungsi sebagai mekanisme mediasi antara struktur objektif ranah jurnalistik dan tindakan konkret para jurnalis dalam memproduksi makna dan klaim kebenaran. *Habitus* jurnalistik dalam konteks jurnalistik adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh jurnalis, organisasi media, atau profesional untuk memahami, menanggapi, memediasi masalah atau mengelola isu-isu terkait praktik jurnalistik. Struktur mental atau struktur kognitif Bourdieu mencerminkan struktur objektif agen, termasuk kode etik, aturan, dan kebiasaan dalam organisasi media atau forum profesional bagi jurnalis. *Habitus* merujuk pada pola pikir, persepsi, dan disposisi yang terbentuk melalui pengalaman profesional jurnalis dalam dunia media (Schultz, 2007). Disposisi ini membimbing cara jurnalis memaknai

peristiwa, menilai kelayakan konten, serta menafsirkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Berpijak dari penjelasan Bourdieu tersebut, penulis memandang habitus jurnalistik sebagai struktur mental dan kognitif yang membimbing jurnalis sebagai aktor sosial dalam memahami, menanggapi, serta mengelola isu-isu yang muncul dalam praktik jurnalistik di dalam ranah jurnalistik. *Habitus* ini tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan terbentuk secara historis melalui pengalaman profesional, posisi dalam struktur organisasi media, serta relasi kekuasaan yang melingkupinya. Oleh karena itu, *habitus* jurnalistik selalu kontekstual dan beragam, bergantung pada lokasi aktor dalam arena jurnalistik serta jenis praktik yang dijalankannya.

Atas dasar keragaman itulah, Schultz (2007) mengembangkan tipologi habitus jurnalistik yang lebih spesifik dalam arena jurnalistik, seperti *habitus* editorial, *habitus* reporter, dan *habitus* magang. Selain itu, *habitus* jurnalistik dapat dibedakan berdasarkan genre dan spesialisasi jurnalistik, misalnya *habitus* koresponden asing dan *habitus* reporter investigasi. Variasi *habitus* juga tampak berdasarkan jenis media, antara lain *habitus* surat kabar, *habitus* majalah, *habitus* televisi, *habitus* radio, hingga *habitus* media daring. Klasifikasi ini menegaskan bahwa praktik jurnalistik dibentuk oleh disposisi yang berbeda-beda sesuai dengan posisi, pengalaman, dan konteks kerja jurnalis dalam ranah jurnalistik.

Keragaman *habitus* sebagaimana dipetakan oleh Schultz tersebut menjadi kerangka konseptual untuk memahami praktik jurnalistik dalam RSP. Dalam konteks RSP, *habitus* penulis, baik yang berasal dari internal redaksi maupun aktor eksternal seperti sastrawan dan

budayawan dibentuk oleh perpaduan pendidikan kultural Jawa, etika profesi jurnalistik, dan pengalaman panjang di ranah media lokal. *Habitus* tersebut mendorong lahirnya gaya penulisan reflektif dan naratif yang sarat kearifan lokal, sekaligus tetap selaras dengan prinsip jurnalistik modern.

Selain *habitus*, posisi aktor dalam ranah jurnalistik juga ditentukan oleh penguasaan modal. Modal jurnalistik mencakup modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang memberikan pengakuan serta legitimasi dalam dunia media (Bourdieu, 1998; Schultz, 2007; Örnebring et al., 2018; Willig, 2012). Dalam perspektif konstruktivis, akumulasi modal terbentuk melalui rutinitas praktik jurnalistik dan relasi profesional yang berulang. Proses ini melahirkan kepercayaan, reputasi, dan otoritas moral wartawan sebagai hasil pengakuan sosial, bukan sekadar klaim individual atau struktur formal media.

Modal jurnalistik bersumber dari reputasi, kredibilitas, dan praktik profesional yang dalam konteks tertentu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi melalui mekanisme promosi maupun rutinitas kerja redaksional sehari-hari. Modal jurnalistik selain sebagai sumber daya simbolik, juga menjadi pedoman bagi jurnalis dalam memaknai posisi sosial mereka serta dalam membentuk dan menggerakkan dinamika ranah jurnalistik. Dalam kerangka *Bourdieusian*, modal jurnalistik dipandang sebagai modal yang bersifat khas karena menopang tingkat otonomi jurnalisme dari intervensi eksternal, meskipun otonomi tersebut senantiasa ada dalam kondisi dipertaruhkan oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan lainnya (Bourdieu, 1998).

Sejalan dengan pandangan tersebut, kajian jurnalisme kontemporer menekankan bahwa modal jurnalistik juga berakar pada dimensi

normatif dan etis yang menjadi dasar legitimasi sosial jurnalisme. Vos et al., (2018) menegaskan bahwa dedikasi jurnalisme terhadap pelayanan publik dan pengambilan keputusan etis berfungsi sebagai sumber utama legitimasi profesional, yang sekaligus memperkuat posisi dan otonomi jurnalisme dalam ranah sosial yang lebih luas. Dengan demikian, etika dan orientasi pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral internal, tetapi juga sebagai sumber legitimasi simbolik yang menjadi dasar bagi jurnalisme dalam mempertahankan otonomi dan otoritas profesionalnya dalam ranah sosial yang lebih luas.

Dalam kerangka Bourdieusian, legitimasi simbolik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam relasi kekuasaan antarberbagai bentuk modal yang saling berkompetisi dalam ranah jurnalistik. Benson (2006) mengutip Bourdieu bahwa dunia sosial (termasuk jurnalistik) dikendalikan dua jenis 'kekuasaan' yaitu modal ekonomi dan budaya. Dalam paradigma konstruktivis, kekuasaan ini tidak bekerja secara langsung atau mekanistik, melainkan melalui proses sosial yang mengonstruksi makna, nilai, dan kriteria legitimasi yang diakui sebagai sah dalam ranah jurnalistik. Dengan demikian, dominasi modal tertentu berlangsung melalui pengakuan simbolik yang diterima sebagai wajar, objektif, dan profesional oleh para agen jurnalistik.

Untuk memahami bagaimana legitimasi simbolik tersebut terbentuk dalam praktik, perlu diperjelas karakter masing-masing bentuk modal yang beroperasi dalam ranah jurnalistik. Bourdieu (1998) menjelaskan bahwa modal ekonomi merujuk pada uang atau aset yang dapat dipertukarkan dengan uang, sedangkan ijazah pendidikan, pengalaman teknis, pengetahuan umum, kecakapan verbal, dan kepe-

kaan artistik merupakan bentuk-bentuk modal budaya. Dalam konteks jurnalistik, modal ekonomi biasanya dikenali melalui indikator seperti sirkulasi media, pendapatan iklan, dan jangkauan audiens. Sementara itu, modal budaya tampak dalam bentuk prestise profesional, pengakuan sejawat, serta reputasi yang dibangun melalui karya dan partisipasi dalam forum jurnalistik maupun akademik.

Selain *habitus* dan modal, posisi aktor juga ditentukan kiprahnya dalam ranah jurnalistik. Secara empiris, ranah jurnalistik berada dalam relasi ketergantungan yang kuat dengan arena ekonomi dan arena politik (Benson & Neveu, 2010). Seperti ranah sosial lainnya, ranah jurnalistik terstruktur oleh pergulatan antara kutub heteronom, yang merepresentasikan tekanan dan kepentingan eksternal, dan kutub otonom, yang merepresentasikan modal spesifik jurnalistik, seperti kompetensi profesional, etika, dan kapasitas simbolik lainnya. Dalam paradigma konstruktivis, struktur ini bukan sebagai tatanan yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang terus direproduksi melalui praktik jurnalistik sehari-hari. Melalui praktik tersebut, aktor-aktor jurnalistik membangun dan menegaskan batas-batas tentang apa yang dianggap sah, profesional, dan bernilai, sekaligus menentukan posisi-posisi yang dapat mereka tempati dalam ranah jurnalistik.

Dalam ranah inilah, RSP berkembang sebagai praktik jurnalistik khas yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan reflektif. Dengan menggabungkan konsep *habitus*, modal, dan ranah, perspektif Bourdieu digunakan untuk memahami RSP sebagai praktik simbolik dalam jurnalisme budaya. Perspektif ini menempatkan RSP sebagai arena konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik jurnalistik yang berakar pada tradisi Jawa.

C. Konstruksi Realitas Sosial

Teori konstruksi realitas sosial dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya klasik *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Berger & Luckmann, 1990). Teori ini berpijak pada asumsi bahwa realitas sosial tidak hadir secara alamiah dan objektif, melainkan dibentuk dan dipelihara melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial merupakan hasil dari interaksi manusia yang bermakna dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial tertentu.

Berger dan Luckmann menempatkan pengetahuan sebagai elemen sentral dalam pembentukan realitas sosial. Pengetahuan tidak semata sebagai pengetahuan ilmiah atau formal, melainkan terutama sebagai *common-sense knowledge*, yaitu pengetahuan keseharian yang dianggap wajar dan *taken for granted* oleh anggota masyarakat. Pengetahuan inilah yang melandasi individu memahami dunia sosialnya, bertindak secara teratur, serta menjalin interaksi sosial yang relatif stabil dan terprediksi.

Pembentukan realitas sosial menurut Berger dan Luckman (1990) terjadi melalui dialektika tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi muncul ketika manusia mengekspresikan diri lewat tindakan, bahasa, dan praktik simbolik, menciptakan dunia sosial sebagai produk aktivitas mereka. Produk sosial ini kemudian diobjektivasikan melalui institusionalisasi dan mekanisme legitimasi berupa nilai, norma, serta sistem makna yang mapan. Melalui internalisasi, individu menyerap realitas sosial yang terobjektifikasi ke dalam kesadaran subjektif, menjadikannya alami dan diyakini kebenarannya.

Dengan demikian, masyarakat sekaligus menjadi kekuatan yang membentuk manusia. Proses ini menegaskan interaksi dinamis antara individu dan masyarakat, di mana pengalaman sosial dan *habitus* membimbing persepsi, pilihan, dan praktik sehari-hari, menjaga kontinuitas dan adaptasi realitas sosial (Berger & Luckmann, 1990). Proses ini menekankan makna sosial terus dibentuk dan dinegosiasikan secara kolektif, di mana norma, tradisi, dan pengalaman bersama membimbing tindakan individu serta membangun kesadaran budaya yang berkelanjutan.

Kerangka konstruksi sosial Berger dan Luckmann diadopsi oleh Hamad (2004) yang menekankan bahwa media massa berperan aktif dalam membangun realitas sosial melalui penggunaan simbol dan bahasa, pengemasan isu-isu aktual, serta penempatan agenda media. Media tidak sekadar merefleksikan realitas, melainkan terlibat dalam proses eksternalisasi dan objektivasi makna melalui pilihan diksi, narasi, dan struktur pemberitaan. Melalui proses tersebut, realitas yang dikonstruksi media diinternalisasi oleh khalayak sebagai pengetahuan keseharian yang dianggap wajar dan sah.

Kerangka teoritis ini menjadi relevan dalam *RSP di Harian 'Suara Merdeka' (1996–2020).* RSP sebagai ruang simbolik tempat nilai-nilai kepemimpinan dikonstruksi melalui bahasa, metafora budaya, serta pengemasan isu-isu sosial dan politik kontekstual. Praktik jurnalistik dalam rubrik ini merepresentasikan proses eksternalisasi nilai-nilai kepemimpinan oleh wartawan dan institusi media, yang mengalami objektivasi melalui pengulangan tema, konsistensi narasi, dan legitimasi kultural yang berakar pada kearifan lokal Jawa. Nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh pembaca sebagai pengetahuan keseharian tentang kepemimpinan yang ideal dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

Teori konstruksi sosial realitas memberikan landasan konseptual untuk memahami RSP bukan sekadar sebagai produk jurnalistik, melainkan sebagai praktik sosial yang berperan dalam membentuk, memelihara, dan mereproduksi nilai-nilai kepemimpinan tradisional dalam ruang publik sepanjang periode 1996–2020.

D. Tanggung jawab Sosial Pers

Teori tanggung jawab sosial pers berkembang pada dekade 1950-an sebagai respons atas keterbatasan teori kebebasan pers yang menempatkan kebebasan pers sebagai prinsip utama tanpa diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks tersebut, kebebasan pers dipandang berpotensi melahirkan praktik jurnalistik yang abai terhadap kepentingan publik apabila tidak disertai kerangka etis yang jelas. Melalui *Four Theories of the Press*, Siebert, Peterson, dan Schramm (1984), sebagaimana dikutip oleh McQuail (2010), merumuskan pandangan bahwa pers, selain memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi dan opini, juga mengemban kewajiban etis untuk melayani masyarakat. Pers tidak diposisikan semata-mata sebagai saluran ekspresi bebas atau instrumen kepentingan politik dan ekonomi, melainkan sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi normatif dalam kehidupan publik.

Inti dari teori tanggung jawab sosial pers terletak pada pemahaman bahwa kebebasan pers tidak bersifat absolut, tetapi harus disertai komitmen terhadap nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan sosial (McQuail, 2010). Media yang bertanggung jawab secara sosial dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan kontekstual, serta menjaga relevansi isi dengan kebutuhan masyarakat. Selain

itu, media juga diharapkan menjalankan peran edukatif melalui penyajian narasi yang mendorong refleksi sosial dan etika publik. Dalam kerangka ini, aktivitas jurnalistik tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi berkelindan dengan upaya pembentukan kesadaran sosial dan pemeliharaan moral publik.

Siebert et al. (1984) dalam McQuail (2010) merumuskan lima fungsi utama media sebagai fondasi teori tanggung jawab sosial pers. Kelima fungsi tersebut meliputi penyajian informasi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, penyediaan ruang publik sebagai arena diskursus sosial, pewarisan nilai dan budaya yang menopang identitas kolektif, representasi realitas sosial secara proporsional, serta pelaksanaan fungsi pengawasan sosial terhadap kekuasaan. Kelima fungsi ini menegaskan bahwa media beroperasi tak hanya dalam ranah teknis penyampaian informasi, tetapi juga dalam ranah etis dan kultural.

Dalam konteks Indonesia, teori tanggung jawab sosial pers memiliki relevansi yang kuat karena sistem pers nasional berlandaskan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pers nasional menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan pengawasan sosial. Dengan demikian, praktik jurnalistik di Indonesia secara normatif diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik, nilai sosial, serta keutuhan masyarakat.

Dalam praktik RSP, teori tanggung jawab sosial pers menjadi kerangka konseptual untuk memahami peran media sebagai pengawal moral dan etika publik. RSP tidak hanya menyajikan informasi atau opini, tetapi berfungsi sebagai ruang refleksi etis-kultural yang mengaitkan isu sosial-politik dengan nilai-nilai kepemimpinan Jawa, khususnya *Hasta Brata*. Berdasarkan lima fungsi media yang dirumuskan Siebert

et al., studi ini memusatkan perhatian pada tiga dimensi utama, yakni penyajian informasi yang bernilai etis dan kultural, peran rubrik sebagai ruang publik dan cermin representasi sosial, serta fungsi pengawasan sosial yang dijalankan melalui etika jurnalistik.

Melalui kerangka tersebut, RSP memperlihatkan praktik tanggung jawab sosial pers dalam konteks media lokal yang menghadapi tekanan digitalisasi, krisis media cetak, dan perubahan pola konsumsi informasi. Rubrik ini menegaskan bahwa media lokal tetap dapat menjalankan peran sosialnya sebagai institusi yang membimbing dan menata kesadaran publik dengan berpijak pada nilai budaya dan etika sosial masyarakatnya. Dengan demikian, teori tanggung jawab sosial pers tetap relevan sebagai landasan teoritis untuk memahami dan mengeksplorasi praktik jurnalistik yang berorientasi pada kepentingan publik dan nilai kultural di tengah dinamika media kontemporer.

E. Kepemimpinan *Hasta Brata*

Dalam khazanah kebudayaan Jawa, ajaran *Hasta Brata* menempati posisi sentral dalam pemikiran tentang etika kepemimpinan. Istilah *hasta* berarti delapan dan *brata* bermakna *laku* atau pedoman hidup, sehingga *Hasta Brata* dipahami sebagai delapan *laku* utama yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin ideal. Ajaran ini merefleksikan sifat-sifat alam semesta sebagai sumber kebijaksanaan moral dan etika sosial.

Secara historis, *Hasta Brata* dikaitkan dengan figur Sri Rama sebagai raja Pancawati (Bratawijaya, 1997). Awalnya, ajaran ini bersumber dari tradisi Hindu yang memuat delapan watak dewa- Indra, Surya, Bayu, Kuwera, Baruna, Yama, Candra, dan Brama. Seiring proses Islamisasi

di Jawa yang dipelopori Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, *Hasta Brata* kemudian dinarasikan ulang melalui delapan unsur kosmos alam semesta, yakni 'matahari', 'bulan', 'bintang', 'langit', 'angin', 'api', 'laut', dan 'bumi' (Sutardjo, 2014). Transformasi ini menunjukkan kelenturan budaya Jawa dalam menyerap dan memaknai ulang ajaran leluhur.

Bratawijaya (1997) menjelaskan delapan unsur alam tersebut tidak dimaknai secara fisik, melainkan sebagai metafora kultural yang menggambarkan laku batin dan moral seorang pemimpin. 'Matahari' melambangkan kemampuan memberi energi dan semangat; 'bulan' mencerminkan kebijaksanaan dan ketenangan; 'bintang' menjadi simbol penunjuk arah; 'angin' merepresentasikan kepekaan dan kedekatan dengan rakyat; 'api' menandai ketegasan dan keadilan; 'langit' melambangkan kewibawaan dan kejujuran; 'laut' mencerminkan kelapangan dan pandangan luas; sementara 'bumi' menegaskan keteguhan, keteladanan, dan kemanfaatan bagi banyak orang.

Makna kepemimpinan *Hasta Brata* tidak bersifat tetap, melainkan terus dibangun melalui interpretasi budaya yang berkembang dan direpresentasikan ulang dalam berbagai teks. *Hasta Brata* bersifat universal dan relevan lintas zaman karena berakar pada realitas kehidupan manusia (Mibtadin, 2022). Nilai-nilai *Hasta Brata* diinternalisasi melalui praktik sosial, pendidikan, dan tradisi lisan, sehingga membimbing perilaku, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial, sekaligus menjaga keseimbangan moral dan harmoni dalam masyarakat. Internalisasi nilai ini juga membentuk pemahaman khas tentang kepemimpinan dalam budaya Jawa, bahwa kekuasaan diartikulasikan sebagai tanggung jawab moral dan pengasuhan sosial, bukan semata dominasi formal.

Dalam konteks kepemimpinan, Magnis-Suseno (2001) mengungkapkan kepemimpinan dalam pandangan Jawa tidak hanya sebagai kekuasaan politik, melainkan sebagai tanggung jawab moral seorang *pamomong*–pengasuh dan penuntun harmoni sosial. Nilai ini selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1984) tentang budaya Jawa yang menekankan prinsip rukun, selaras, dan *tepa selira.*

Dalam studi ini, *Hasta Brata* diposisikan sebagai modal simbolik dalam kerangka teori Bourdieu (1984, 1998). Modal simbolik sebagai nilai yang memperoleh legitimasi melalui pengakuan sosial. Melalui RSP, redaksi memanfaatkan nilai kepemimpinan Jawa tersebut untuk membangun posisi sosial dan moralnya dalam ranah jurnalistik.

F. Media, Ideologi, dan Jurnalisme Budaya

Ideologi media dalam kajian komunikasi sebagai orientasi makna yang bekerja melalui isi dan praktik jurnalistik, bukan sebagai doktrin yang dinyatakan secara terbuka. Pawito (2014) menempatkan kajian ideologi media dengan menjadikan isi media sebagai fokus utama, dengan tujuan memahami cara media menawarkan pandangan tertentu tentang realitas sosial melalui teks, bukan untuk mengukur efek media terhadap khalayak. Dalam kerangka ini, teks media sebagai ruang artikulasi gagasan, nilai, dan norma yang hidup serta beredar dalam masyarakat (Pawito, 2014). Dengan demikian, ideologi media menekankan bagaimana nilai, budaya, dan praktik jurnalistik membentuk pemahaman sosial secara reflektif dan kontekstual.

Ideologi media hadir secara implisit melalui struktur penyajian yang relatif konsisten, bukan melalui pernyataan normatif yang eksplisit. Melalui kebiasaan penulisan, pemilihan isu, dan penekanan aspek

tertentu, media menawarkan cara pandang tertentu terhadap peristiwa, aktor sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari. (Pawito, 2014). Dengan demikian, media berfungsi sebagai arena artikulasi sekaligus dialog nilai-nilai yang beragam dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Hall (1997) menegaskan bahwa media bekerja melalui proses produksi makna yang diorganisasikan melalui bahasa dan simbol dalam konteks sosial dan kultural tertentu. Media tidak sekadar memantulkan realitas, melainkan menyusunnya ke dalam kategori-kategori makna yang dapat dipahami bersama, sehingga nilai dan sudut pandang tertentu tampil wajar dan alamiah bagi khalayak.

Proses ini tidak terlepas dari praktik produksi simbolik dalam ranah jurnalistik. Bourdieu (1991) menjelaskan bahwa praktik simbolik dibentuk oleh *habitus*, yakni disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman profesional dan tradisi institusional. Dalam konteks media, *habitus* jurnalistik membentuk kecenderungan berpikir dan menulis yang membuat pilihan-pilihan tertentu terasa sah dan pantas, sehingga ideologi media bekerja secara laten melalui kebiasaan redaksional.

Sebagai orientasi makna yang bekerja dalam praktik jurnalistik, ideologi media tampak secara konkret dalam bentuk teks, salah satunya melalui penulisan *headline*. Dor (2003) menyebut *headline* sebagai penanda utama yang membantu pembaca menangkap arah dan makna penting suatu peristiwa secara cepat. Melalui pilihan kata dan penekanan tertentu, *headline* menjadi medium simbolik tempat ideologi media membingkai makna dan menegaskan hierarki kepentingan informasi.

Dalam konteks RSP, penulisan *headline* (tulisan utama) mencerminkan orientasi makna yang sejalan dengan ideologi media 'Suara Merdeka' yang menempatkan nilai-nilai kultural dan etika sosial sebagai rujukan utama. Isu-isu sosial-politik yang dianggap krusial tidak disajikan secara konfrontatif, melainkan ditafsirkan melalui koridor budaya Jawa, khususnya nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Konsistensi ini menunjukkan bagaimana ideologi media 'Suara Merdeka' bekerja melalui pilihan simbolik yang berulang, menjadikan *headline* sebagai pengantar refleksi etis sekaligus cermin identitas kultural media.

Jurnalisme Budaya

Dalam lanskap jurnalisme konvensional yang semakin dipengaruhi logika pasar, algoritme digital, dan kecepatan informasi, jurnalisme budaya muncul sebagai ruang alternatif yang meneguhkan dimensi reflektif dan humanistik media. Praktik ini selain menyampaikan fakta, juga menafsirkan kehidupan sosial, membangun makna, dan menegosiasikan nilai budaya. Media, dalam konteks ini, berfungsi sebagai agen kebudayaan yang membentuk pemahaman publik terhadap identitas, norma, dan relasi sosial.

Kristensen & Riegert (2017) mengungkapkan jurnalisme budaya memberi ruang bagi masyarakat untuk merenungkan kembali jati diri, nilai, dan relasi sosialnya melalui rubrik, esai, dan liputan budaya. Hall (1997) menekankan media sebagai arena representasi tempat ideologi dan identitas budaya diproduksi.

Bertolak dari penjelasan Kristensen & Riegert (2017) dan Hall (1997), jurnalisme budaya dalam studi ini adalah praktik jurnalistik yang

menafsirkan kehidupan sosial dan menegosiasikan nilai budaya dalam arena publik berbasis refleksi budaya.

Secara empiris, jurnalisme budaya menghadapi berbagai tantangan serius. Dominasi logika pasar dan fenomena *click-bait* membuat konten budaya sering dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi (Anderson, 2012). Arus digitalisasi menuntut format cepat dan visual, yang tidak selalu sejalan dengan karakter jurnalisme budaya yang membutuhkan perenungan dan kedalaman. Selain itu, regenerasi jurnalis yang berminat pada jurnalisme budaya masih minim, karena banyak wartawan muda lebih tertarik pada liputan politik, kriminal, atau hiburan yang dianggap lebih 'menjual'. Padahal, jurnalisme budaya memiliki peran strategis dalam menjaga keberagaman simbolik dan memperkuat identitas lokal di tengah globalisasi (Heikkilä & Lauronen, 2018; Kersten & Janssen, 2017; Biernacka-Ligieza, 2013; Nahak, 2018). Oleh karena itu, pengembangan jurnalisme budaya memerlukan strategi kreatif yang mempertahankan kedalaman narasi sekaligus relevansi sosial dan kultural bagi publik.

Dalam studi ini, jurnalisme budaya menjadi fondasi penting. RSP menampilkan praktik jurnalisme budaya yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menafsirkan dan menyebarluaskan nilai kepemimpinan Jawa secara simbolik.

Pesan dalam Media

Dalam kajian komunikasi, pesan selain sebagai rangkaian fakta yang disampaikan kepada publik, juga sebagai hasil dari proses sosial dalam praktik media. Pesan media terbentuk melalui tindakan jurnalis yang berulang, terstruktur, dan dilembagakan dalam rutinitas jurnalistik.

Oleh karena itu, pesan selalu terkait dengan cara tertentu dalam memaknai realitas sosial, sesuai dengan konteks budaya, institusional, dan profesional tempat media beroperasi.

Sejalan dengan pandangan Berger & Luckmann (1990), realitas sosial sebagai kenyataan yang dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Media massa sebagai salah satu institusi sosial yang berperan dalam proses tersebut, khususnya melalui produksi pesan. Pesan media berfungsi sebagai wahana penyebaran pengetahuan sosial, yakni pengetahuan yang dipahami, dibagikan, dan diakui bersama sebagai kenyataan oleh anggota masyarakat.

Dalam praktik jurnalistik, proses pembentukan pesan melibatkan serangkaian keputusan professional. Pemilihan peristiwa, penentuan sudut pandang, penggunaan bahasa, serta penyusunan alur narasi. Pesan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai cara tertentu dalam memahami peristiwa sosial.

Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa pesan oleh media dibentuk melalui pengaruh berlapis yang mencakup individu jurnalis, rutinitas media, organisasi, serta lingkungan sosial yang lebih luas. Kerangka ini menunjukkan bahwa pesan media merupakan hasil dari praktik sosial yang berlangsung secara sistematis dan berulang, bukan semata-mata cerminan preferensi personal penulis. Pesan dalam pengertian ini, merupakan produk dari proses institusional yang memiliki keteraturan.

Dengan memahami pesan media sebagai konstruksi sosial, studi ini menempatkan pesan RSP bukan sekadar sebagai produk teks, melainkan sebagai bagian dari praktik jurnalistik yang turut menghadirkan makna kepemimpinan. Pesan-pesan dalam rubrik ini menampil-

kan nilai-nilai *Hasta Brata* melalui pilihan tema, gaya naratif, serta simbol budaya Jawa yang digunakan dalam konteks media lokal.

Pesan RSP diposisikan sebagai medium penyampaian nilai kepemimpinan yang berakar pada tradisi kultural Jawa. Nilai-nilai tersebut tidak disajikan secara instruktif. Sebaliknya, nilai tersebut dihadirkan melalui narasi reflektif yang memosisikan kepemimpinan sebagai *laku* etis dan pandangan hidup. Dengan cara ini, pesan RSP sebagai ruang reflektif budaya yang berkembang seiring dinamika masyarakat Jawa dan praktik jurnalistik media lokal.

Rubrik dan Artikel

Dalam ekosistem media, surat kabar berperan strategis sebagai sarana penyebaran informasi, pendidikan publik, dan pembentukan opini masyarakat. Salah satu bentuk karya jurnalistik yang penting ialah artikel, yakni tulisan yang menghadirkan sudut pandang penulis terhadap persoalan sosial dengan tujuan memberi pencerahan dan mendorong refleksi pembaca. Artikel bersifat interpretatif dan reflektif, memberi ruang bagi nilai kemanusiaan, namun tetap berpijak pada prinsip akurasi, etika, dan tanggung jawab sosial pers (Sumadiria, 2008; Djuroto, 2022; Yunus, 2010). Kehadiran artikel dalam surat kabar tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi medium konstruksi makna sosial, membentuk pemahaman kolektif, dan meneguhkan nilai-nilai moral serta budaya dalam interaksi publik sehari-hari.

Artikel umumnya disajikan dalam rubrik, yaitu bagian tetap surat kabar yang mengusung tema tertentu dan mencerminkan identitas redaksional media serta kedekatannya dengan pembaca (Effendy,

1989). Rubrik berfungsi sebagai ruang yang relatif konsisten dalam membangun relasi makna antara media dan komunitas sosial yang dilayaninya.

Salah satu rubrik yang mencerminkan karakter tersebut yaitu RSP. Sejak terbit pada 1996, rubrik ini menghadirkan nilai kearifan lokal Jawa yang mencakup spiritualitas, etika sosial, pendidikan karakter, serta kepemimpinan dalam bingkai ajaran *Hasta Brata*. Nama 'Sang Pamomong', yang bermakna penuntun atau pengasuh, menegaskan orientasi rubrik ini sebagai ruang pembimbing moral dan refleksi batin masyarakat. Sejak 2002, penggunaan bahasa Indonesia dan Jawa secara bergantian setiap pekan, menunjukkan komitmen rubrik ini untuk tetap berakar pada budaya lokal sekaligus menjangkau pembaca lintas generasi.

Dengan merujuk pada filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, RSP berfungsi bukan sekadar sebagai rubrik informasi, tetapi sebagai ruang refleksi kultural yang meneguhkan identitas lokal dan membimbing kesadaran moral masyarakat (Sumadiria, 2008; Djuroto, 2022). Peran ini sejalan dengan temuan bahwa media lokal di Indonesia berkontribusi dalam memperkuat budaya lokal di tengah arus globalisasi (Sormin, 2022). Dalam konteks RSP, rubrik ini membangun ruang interaksi antara pengasuh, penulis, dan pembaca, sehingga nilai kepemimpinan dan kearifan lokal Jawa terinternalisasi, membimbing praktik etis serta pemahaman sosial yang reflektif.

BAB III

RUBRIK 'SANG PAMOMONG' (RSP) DALAM LANSKAP MEDIA

A. 'Suara Merdeka' sebagai Institusi Sosial-Budaya

Surat kabar 'Suara Merdeka' merupakan salah satu surat kabar daerah terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Tengah. Sejak terbit pertama kali pada 11 Februari 1950 di Semarang oleh Hetami-selaku pendiri, 'Suara Merdeka' memosisikan diri sebagai media lokal yang menjadi sumber informasi masyarakat Jawa Tengah serta mempertahankan nilai lokal di tengah dinamika perubahan sosial (Machmud, 2010). Seiring waktu, 'Suara Merdeka' juga berperan sebagai ruang refleksi budaya, memelihara identitas lokal, dan membimbing kesadaran sosial masyarakat Jawa Tengah.

Hetami mendirikan 'Suara Merdeka' dengan oplah awal sekitar 5.000 eksemplar dengan sasaran pembaca dari wilayah Semarang, Solo, Kudus dan kawasan lainnya. Dari 5.000 eksemplar, sekitar 1.000 eksemplar dikirim ke Seksi Kesejahteraan Sosial Kodam VII/Diponegoro dan sisanya imigrasi pembaca dari Soeloeh Rakjat ke 'Suara Merdeka'.

Koran 'Suara Merdeka' tumbuh menjadi koran lokal terkemuka, namun harus bersaing ketat dengan sejumlah kompetitor ternama yang juga membidik pangsa pasar Jawa Tengah, antara lain Harian 'Solopos' dari Grup 'Bisnis Indonesia' dan grup 'Jawa Pos' meliputi 'Radar Semarang', 'Radar Kudus', 'Radar Solo', 'Radar Kedu', 'Radar Banyumas', 'Radar Tegal-Pekalongan', dan 'Radar Bojonegoro'. Sementara beberapa koran lainnya terpaksa 'gulung tikar' antara lain 'Semarang Post', 'Radar Kedu', 'Harian Satria', 'Koran Rakyat', 'Bengawan Pos', dan Harian 'Nirmala' karena jumlah pembacanya berkurang terus, sehingga oplah dan sumber pendapatan iklan juga berkurang drastis.

Di level nasional, 'Suara Merdeka' menghadapi ekspansi sejumlah media nasional yang berpusat di Jakarta seperti 'Kompas', 'Seputar Indonesia', dan 'Bisnis Indonesia' yang menyajikan suplemen lokal Jawa Tengah.

Menyikapi kondisi yang mulai genting akibat persaingan dalam entitas bisnis media, manajemen 'Suara Merdeka' menerbitkan 28 halaman pada kisaran tahun 2001 hingga tahun 2008. Strategi ini bertujuan memenuhi kebutuhan pembaca yang menginginkan diperbanyaknya edisi lokal yang isinya mencakup berbagai bidang. Pemilihan target demografi ini sekaligus untuk memperkuat relasi sosial antara 'Suara Merdeka' dengan pembaca.

Berdasarkan kebijakan tersebut, 'Suara Merdeka' tampil 'lebih gemuk' berupa enam edisi lokal setiap hari untuk masing-masing pembaca berdasarkan wilayahnya, selain halaman regular. Halaman khusus yang menampung konten lokal ini antara lain edisi lokal 'Metro Solo' (sebelumnya 'Suara Solo'), 'Metro Semarang', dan 'Suara Kedu'. 'Suara Muria' melayani pembaca di Jepara, Kudus, Blora, Pati, dan

Rembang; 'Suara Pantura' fokus untuk pembaca di Kawasan Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang, dan Batang. Edisi 'Metro Solo' memprioritaskan pada pembaca di wilayah Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, dan Surakarta.

Terkait *oplah* 'Suara Merdeka' dalam pusaran bisnisnya, koran lokal ini sempat mencapai tiras di atas 300.000 ribu eksemplar per harinya. Berikut petikan wawancara dengan GP selaku Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' (2015-2022).

> "Hingga di bawah tahun 2010, media cetak (koran) masih sangat menjanjikan karena belum masifnya era digitalisasi. Di era inilah *oplah* 'Suara Merdeka' berkisar 300 ribu-500 ribu eksemplar per harinya. Adapun untuk saat ini, tiras di kisaran 60an ribu eksemplar per hari, itu pun masih tergolong bagus dengan kondisi terkini." (Wawancara dengan Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' GP, Januari 2020).

Secara kelembagaan, 'Suara Merdeka' berada di bawah manajemen 'Suara Merdeka' Network (*SM Network*), sebuah konglomerasi media lokal yang meliputi surat kabar, media daring, televisi lokal, dan unit bisnis komunikasi lainnya. Struktur ini menjadikan 'Suara Merdeka' bukan hanya sebagai institusi pers, tetapi juga sebagai aktor industri yang beroperasi dalam ekosistem ekonomi-politik media modern. Meskipun mengalami transformasi sejak awal 2000-an, koran lokal ini tetap mempertahankan citra sebagai *korane wong Jawa Tengah*, sebuah posisi yang memiliki konsekuensi ideologis dalam produksi kontennya.



Dalam perspektif kelembagaan, 'Suara Merdeka' memiliki struktur redaksi yang cukup stabil. Pada periode 1996–2020, sebagian besar kebijakan editorial diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara nilai profesional jurnalisme (akurasi, keberimbangan, relevansi publik) dan nilai budaya lokal. Ruang budaya–termasuk RSP–mendapat tempat istimewa dalam struktur redaksi, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai pilar internal dalam mencerminkan karakter institusi. Kebijakan ini merefleksikan strategi ganda: di satu sisi memenuhi kebutuhan informasi modern yang objektif, di sisi lain tetap menghidupkan tradisi lokal sebagai diferensiasi identitas media.

Ideologi 'Suara Merdeka'

Secara ideologis, 'Suara Merdeka' sebagai media yang mengusung corak jurnalisme kultural. Ideologi ini menempatkan budaya lokal dalam hal ini budaya Jawa sebagai sumber nilai, standar moral, dan kerangka interpretasi dalam melihat isu- isu sosial, politik, dan kemasyarakatan. Identitas ini merupakan hasil proses sejarah panjang, termasuk pengaruh pendirinya, H. Hetami, yang menekankan pentingnya nilai integritas, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat Jawa Tengah.

Dalam konteks budaya Jawa, 'Suara Merdeka' cenderung menonjolkan nilai seperti keluhuran budi, keseimbangan, harmoni sosial, etika kepemimpinan, dan konsep pengasuhan (*momong*) sebagai narasi moral publik. Ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan redaksional: keberadaan rubrik budaya tetap (seperti RSP), gaya penulisan yang tidak konfrontatif namun 'tajam dan mengena', dan penggunaan metafora atau *pasemon* dalam mengkritik kondisi sosial-politik. Ideologi ini merupakan cara media menanamkan nilai etika melalui simbol budaya, tanpa menggunakan bahasa yang terlalu politis atau ideologis secara eksplisit.

Pada tataran operasional, ideologi jurnalisme kultural ini menghasilkan corak pemberitaan yang lebih menekankan moderasi, kehati-hatian, dan keharmonisan. Hal ini penting dipahami dalam konteks Jawa Tengah yang secara historis dikenal sebagai wilayah dengan tradisi sosial yang menjunjung tinggi kerukunan (rukun), saling menghormati, dan saling menjaga ketertiban (tata krama). Dengan demikian, orientasi editorial 'Suara Merdeka' mencerminkan nilai jurnalistik universal, serta mencerminkan filosofi sosial Jawa yang terbentuk secara historis. Keberadaan RSP sebagai rubrik unggulan mencerminkan bagaimana ideologi ini diformalkan ke dalam struktur redaksi.

Peran 'Suara Merdeka' sebagai Institusi Sosial-Budaya

Sebagai institusi media lokal, 'Suara Merdeka' berperan penting sebagai penjaga norma dan ruang produksi makna budaya Jawa. 'Suara Merdeka' secara konsisten mengartikulasikan nilai lokal dalam konten beritanya. Hal ini menegaskan fungsi media sebagai *cultural guardian*.

Dalam sistem industri media yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, ideologi ini pula yang menjadi modal kultural utama 'Suara Merdeka'. Ketika banyak media arus utama mengalami homogenisasi konten, 'Suara Merdeka' mempertahankan diferensiasi melalui penekanan pada kearifan lokal. Bagi masyarakat pembaca, ciri khas ini menjadi daya tarik utama: mereka menemukan ruang reflektif, kritik sosial, dan nilai moral yang relevan dengan identitas Jawa.

Profil kelembagaan dan ideologi 'Suara Merdeka' menunjukkan bahwa media ini bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga aktor budaya yang membentuk dan membingkai kesadaran publik Jawa Tengah. Posisi inilah yang melandasi RSP menjadi bagian integral dari konstruksi nilai, narasi kepemimpinan, dan kritik sosial yang khas Jawa yang selanjutnya menjadi fokus pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

B. RSP: Sejarah dan Periodisasi Rubrik

RSP awalnya ditulis oleh sejumlah penulis budaya dan jurnalis internal 'Suara Merdeka'. Dua nama paling sentral adalah:

1. Triyanto Triwikromo: Sastrawan, jurnalis budaya, redaktur senior dan Wakil Pemimpin Harian 'Suara Merdeka'. Triyanto adalah sosok kunci RSP. Gaya penulisannya memadukan metafora, kritik halus, dan pengetahuan mendalam tentang budaya Jawa. Ia menghidupkan rubrik ini sebagai ruang dialog antara tradisi lokal dan problem kontemporer dengan sensitivitas moral yang kuat.
2. Hendro Basuki: Penulis yang tampil pada beberapa fase awal rubrik. Hendro tampil dengan gaya narasi lebih historis dan normatif, menekankan akar budaya Jawa serta tokoh-tokoh moral sebagai teladan.

Selain dua figur utama tersebut, terdapat beberapa kontributor lain (internal), maupun penulis eksternal yang antara lain berasal dari kalangan sastrawan, budayawan, akademisi. Namun intensitas dan karakter tulisannya tidak sekuat Triyanto. Ini menegaskan RSP memiliki 'suara khas' yakni narasi moral Jawa yang diinterpretasikan oleh penulis-penulis dengan latar budaya kuat.

Karakter personal penulis inilah yang membentuk *habitus* rubrik: kritis, lembut, simbolik, dan reflektif. Berdasarkan perspektif Bourdieu dalam ranah jurnalistik, penulis RSP adalah agen budaya berbasis modal kultural (nilai Jawa), modal simbolik (otoritas moral), dan modal sosial (kedekatan dengan pembaca Jawa Tengah) untuk memproduksi narasi yang berpengaruh.

Periodisasi Rubrik

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) dipilih sebagai fokus studi dengan batasan periode terbit 1996–2020 yang dikelompokkan ke dalam empat periodisasi: (1) periode awal (1996–1998); (2) periode jeda (1999–2000); (3) periode pascareformasi dan transisi kepemimpinan nasional (2000–2010); dan (4) periode kontemporer (2011–2020). Pembatasan ini merupakan strategi analitis untuk memetakan perkembangan rubrik secara utuh, mulai dari periode awal terbit, penguatan posisi, hingga adaptasi terhadap perubahan konteks sosial dan struktural media.

Pada periodisasi 1996-1998, RSP hadir sebagai suplemen mingguan yang terbit setiap Kamis dan memuat satu tulisan utama (*headline)*. Rubrik ini beroperasi dalam konteks transisi Orde Baru menuju Reformasi, sehingga pesan-pesan kepemimpinan disampaikan secara simbolik

dan tersirat sebagai strategi kultural di tengah keterbatasan kebebasan pers. Periodisasi 1999–2000 merupakan masa jeda, karena RSP tidak terbit akibat krisis moneter dan dinamika pascareformasi, namun tetap diperhitungkan untuk menjaga kesinambungan konteks historis analisis.

Memasuki periodisasi 2000-2010, RSP mengalami perubahan format dan posisi redaksional. Sejak 2002, rubrik ini disajikan secara bilingual (bahasa Indonesia dan Jawa) dan menyatu dengan edisi Minggu sebagai rubrik reguler. Dalam atmosfer pasca-Reformasi yang lebih kondusif, RSP mulai mengartikulasikan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* secara lebih eksplisit melalui konten reflektif, kritis, dan etis. Periode ini beririsan dengan transisi kepemimpinan nasional dari Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada periodisasi 2011–2020 ditandai oleh konsistensi terbit mingguan dalam format satu halaman, berlangsung di tengah disrupsi media dan mencakup akhir pemerintahan SBY hingga periode kedua Joko Widodo. Pada fase ini, RSP tetap mempertahankan karakter reflektifnya dalam menyampaikan pesan moral dan kritik sosial melalui bingkai budaya Jawa, meskipun berada dalam konteks meningkatnya tantangan terhadap demokrasi dan independensi pers.

C. Karakteristik Ideologis RSP

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) terbit perdana pada akhir 1996 sebagai kolom opini budaya dan berkembang menjadi ruang moral Jawa yang khas. RSP menjadi arena simbolik tempat nilai, pesan moral, kritik sosial, identitas, dan etika Jawa dirumuskan, dinegosiasikan, dan disampaikan kepada publik. RSP selama 24 tahun perjalanan (1996–

2020) bertransformasi mengikuti dinamika sosial-politik Indonesia, namun tetap mempertahankan karakter dasar sebagai penjaga kebijaksanaan lokal dan pengarah moral publik.

BS (2024) selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' (1989-1998) yang juga penggagas RSP menjelaskan RSP merupakan hasil perpaduan antara kebijakan budaya, nilai-nilai Jawa, dan idealisme jurnalistik. Rubrik ini sebagai wujud komitmen kultural 'Suara Merdeka' dalam menjaga jati diri masyarakat Jawa Tengah di tengah arus modernisasi. Simbol Semar dijadikan ikon utama RSP karena merepresentasikan pemimpin *pamomong*: tokoh yang menuntun dengan kearifan, melindungi tanpa pamrih, dan mengingatkan dengan kasih.

Tradisi *Pasemon* dan Etika Jawa

Secara ideologis, RSP berakar pada tradisi *pasemon* dan *ngemong* yakni gaya penyampaian pesan melalui metafora, simbol, atau kisah-kisah yang mengandung kritik namun tidak bersifat konfrontatif. Pendekatan ini sangat dekat dengan tradisi *tutur* Jawa, di mana kritik sosial disampaikan secara *alus*, tidak frontal, namun tetap tajam dan menyentuh kesadaran moral pembaca.

Ideologi utama RSP mencakup tiga prinsip:

1. Pengasuhan moral *(Pamomong)*: Sesuai namanya, rubrik ini memposisikan diri sebagai 'pengasuh,' bukan mendoktrin. Pesan-pesan budaya, etika, dan kepemimpinan disampaikan bukan sekadar narasi biasa, tetapi juga sebagai tuntunan moral. Istilah *momong* merujuk pada praktik mengasuh dengan empati, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan karakter

seseorang. RSP menyerap ideologi ini ke dalam gaya penulisannya: menuntun melalui *pitutur,* bukan menggurui.

2. Kritik sosial berbasis nilai lokal: RSP merupakan contoh kritik sosial Jawa yang khas- kritik yang menggunakan bahasa simbolik, perbandingan historis, atau kisah mitologis untuk mengungkap ketimpangan sosial, penyimpangan moral, dan problem struktural politik. Kritik ini tidak berdiri lepas, melainkan dikaitkan dengan nilai budaya Jawa antara lain: tata krama, *andhap asor*, *prasojo*, *tepa selira*, dan *sangkan paraning dumadi.*

3. Etika kepemimpinan Jawa ala *Hasta Brata*: Meski tidak tertulis sebagai misi formal, narasi dalam RSP kerap kali menampilkan nilai kepemimpinan Jawa yang bersumber pada filosofi *Hasta Brata* delapan *laku* kepemimpinan yang meneladani karakter alam ('bumi', 'api', 'angin', 'air', 'matahari', 'bulan', 'bintang', dan 'laut'). Nilai ini hadir sebagai fondasi ideologis dalam menilai moralitas pemimpin, birokrasi, maupun masyarakat.

Dengan dasar ideologi tersebut, RSP menjadi wadah pembentukan makna sosial-budaya tentang bagaimana seorang manusia Jawa seharusnya hidup, berperilaku, dan memimpin.

BAB IV

KONSTRUKSI MAKNA KEPEMIMPINAN *HASTA BRATA*

A. Dinamika Pemaknaan *Hasta Brata* Berbasis Periodisasi

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) dalam harian 'Suara Merdeka' periodisasi 1996–2020 terdapat 48 artikel yang dianalisis dalam kerangka konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Untuk memudahkan analisis, periodIsasi dikelompokkan menjadi empat periode sesuai kebijakan redaksi dan dinamika sosial-politik nasional sebagai berikut:

1. Periode Awal (1996-1998)–terdapat 8 artikel *headline* yang dikaji.
2. Periode Transisi (1999-2000)–meskipun RSP tidak terbit pada periode ini, fase historis tetap dianalisis.
3. Periode Konsolidasi (2000-2010)–terdapat 18 artikel *headline* yang dikaji.
4. Periode Kontemporer (2011-2020)–terdapat 22 artikel *headline* yang dikaji.

Pembagian periodisasi ini dimaksudkan untuk memahami dinamika refleksi kepemimpinan dari masa ke masa. Termasuk juga untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai *Hasta Brata* hadir dan berfungsi sebagai rujukan normatif. Periodisasi tersebut digunakan sebagai konteks waktu yang menyertai pembahasan setiap kategori tema. Dengan menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke (2012), pembahasan studi ini disusun berdasarkan kategori tema sebagai unit analisis, yang dihasilkan melalui proses koding awal terhadap seluruh artikel RSP yang dianalisis. Dalam konteks ini, penerapan metode analisis tematik menuntut keterlibatan penuh penulis, ketelitian, transparansi, serta konsistensi selama proses analisis (Ahmed et al., 2025; Christou, 2023; Naeem et al., 2023; Byrne, 2022; Pearson et al., 2025). Selanjutnya, kategori tema yang dihasilkan melalui analisis tematik di setiap periodisasi digunakan sebagai bahan pembahasan.

Periode Awal (1996-1998)

Periode awal RSP pada rentang 1996–1998 berlangsung dalam konteks sosial-politik yang ditandai oleh menguatnya krisis legitimasi kepemimpinan Orde Baru. Delapan artikel yang terbit pada periode ini dianalisis sebagai satu kesatuan dengan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2012). Pendekatan ini mendorong penulis untuk memahami tematik yang berulang dalam rubrik.

Hasil pengkodean menunjukkan tiga kategori tema yaitu: 1) krisis kepemimpinan (4 artikel); 2) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* (2 artikel); 3) harapan terhadap pemimpin ideal (2 artikel).

Dominasi kategori tema 'krisis kepemimpinan' dalam empat artikel mengindikasikan RSP pada periode ini berfungsi sebagai ruang refleksi moral atas realitas kekuasaan. Krisis kepemimpinan muncul sebagai refleksi terhadap situasi sosial-politik yang dinilai melemahkan keteladanan, tanggung jawab dan kepekaan seorang pemimpin. Dalam konteks ini, krisis kepemimpinan sebagai kondisi *genting* ketika pemimpin tidak lagi mampu menjalankan peran *pengayom* bagi masyarakat.

Empat artikel dalam periode 1996-1998 mengonstruksi krisis kepemimpinan bukan sebagai kegagalan teknokratis semata, melainkan sebagai krisis nilai, martabat, dan makna etis kepemimpinan Jawa. Dalam konteks historis menjelang runtuhnya Orde Baru ditandai oleh menguatnya otoritarianisme, krisis moneter 1997, dan krisis multidimensi, kepemimpinan direpresentasikan kehilangan fondasi moral yang sebelumnya berakar pada *laku* batiniah dan prinsip *ngemong*.

Periode ini diawali dari artikel berjudul 'Martabat dalam Krisis Besar' (6 November 1997) yang menempatkan krisis kepemimpinan sebagai kemerosotan martabat pada praktik kekuasaan. Kepemimpinan tidak lagi sebagai pengabdian dan *laku* etis, melainkan direduksi menjadi sarana akumulasi kekuasaan dan kekayaan. Kritik Rendra terhadap elite Jawa yang "hanya mampu menciptakan budaya koruptif, mental merampok, ekspansif, dan logika satpam dalam mengatur negara" memperlihatkan kegagalan elite menjaga fungsi teladan. Konsep martabat mengalami distorsi ketika diukur semata melalui "pangkat (kekuasaan), *semat* (kekayaan), dan *kramat* (kepandaian)." Darmanto Jatman mengungkapkan korupsi dimaknai sebagai strategi menaikkan martabat keluarga. Pergeseran orientasi dari batin ke material menandai putusnya rujukan normatif kepemimpinan Jawa, sehingga "kerohanian tidak lagi dipandang sebagai variabel penentu martabat".

Krisis tersebut diperluas dalam artikel berjudul 'Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan' (22 Januari 1998), yang menempatkan kepemimpinan dengan tata kelola birokrasi. Kepemimpinan bukan sekadar wibawa personal, melainkan kemampuan menjaga keselarasan sosial melalui sistem birokrasi yang berorientasi etis. Dalam tradisi Jawa, birokrasi dibentuk untuk *njaga tata tentreming praja*. Namun, krisis muncul ketika birokrasi kehilangan orientasi moral, sebagaimana pengalaman kolonial ketika aparat "menggunakan birokrasi untuk mempersulit dan mengeksploitasi kehidupan rakyat", hingga mempercepat keruntuhan VOC akibat korupsi dan jual beli jabatan. Narasi ini menegaskan bahwa kecanggihan sistem tidak bermakna tanpa kepemimpinan bermartabat. Figur Raden Patah di Demak dihadirkan sebagai contoh raja berkredibilitas tinggi. Dengan demikian, krisis kepemimpinan direfleksikan sebagai kegagalan menjaga harmoni antara kekuasaan moral dan tata kelola birokrasi.

Sementara itu, artikel berjudul 'Gaya Hidup Boros Akibatkan Elite Jawa Runtuh' (12 Februari 1998) memfokuskan krisis kepemimpinan pada *laku* hidup elite. Kepemimpinan sebagai praktik keseharian yang seharusnya mencerminkan pengendalian diri dan tanggung jawab sosial. Tetapi, elite justru terjebak dalam ideologi kepriyayian, sehingga "kepriyayian menjadi semacam ideologi" yang dikejar demi prestise. Gaya hidup boros, "berpoligami, berjudi main *ceki*, dan menenggak minuman keras" *menyeret* elite pada utang, ketergantungan ekonomi, dan akhirnya penjualan simbol status, hingga "kepriyayian dan keelitan ternyata dapat dibeli". Runtuhnya elite dikonstruksi bukan akibat tekanan eksternal semata, melainkan akibat kegagalan menjaga keselarasan antara status, etika, dan tanggung jawab sosial. Nilai

kepemimpinan ideal berbasis pengendalian diri hadir sebagai rujukan implisit.

Krisis ini semakin memuncak melalui artikel berjudul 'Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi' (3 September 1998) yang menunjukkan dimensi simbolik dari krisis kepemimpinan. Idiom dan mitos kepemimpinan Jawa tidak lagi berfungsi sebagai pedoman moral, melainkan dimanipulasi sebagai alat legitimasi politik. Narasi *ksatria piningit* diproduksi spekulatif dan memicu euforia simbolik tanpa pijakan etika. Rama Sudi Yarmana menegaskan bahwa "idiom-idiom kepemimpinan Jawa sebenarnya tetap bagus, namun lantaran banyak petinggi Jawa melakukan manipulasi terhadapnya, kepercayaan bangsa ini pada pemimpin yang berasal dari Jawa mengurang". Bahkan terdapat peringatan bahwa "kalau tak segera direhabilitasi, ajaran-ajaran Jawa akan punah" (Damardjati Supadjar). Krisis kepercayaan publik pun menguat ketika pemimpin terjebak feodalisme dan "menyangka diri telah menjelma sebagai raja-raja Mataram baru" (Rendra).

Secara tematik, keempat artikel tersebut membentuk tematik argumentatif: krisis kepemimpinan pada periode 1996–1998 merupakan krisis multidimensi yang mencakup kemerosotan martabat, kegagalan birokrasi etis, dekadensi *laku* (cara bertindak) elite, dan manipulasi simbol kepemimpinan. Dalam lanskap akhir Orde Baru yang otoriter dan represif, RSP memosisikan sebagai arena refleksi kultural yang mengulas keterputusan antara praktik kekuasaan dan nilai ideal kepemimpinan Jawa. Nilai-nilai *Hasta Brata* hadir bukan sebagai doktrin yang disampaikan secara eksplisit, melainkan sebagai landasan normatif yang absen. Nilai-nilai ini sekaligus menjadi tolok

ukur kritik terhadap kepemimpinan yang kehilangan fungsi *ngemong* di tengah krisis moneter dan krisis multidimensi menjelang Reformasi.

Sejalan dengan itu, kategorisasi tema 'harapan terhadap pemimpin ideal' hadir sebagai respons simbolik atas situasi krisis tersebut. Harapan tersebut muncul sebagai gambaran normatif mengenai kualitas dan sikap pemimpin yang diinginkan. Hal ini terutama relevan dalam situasi sosial-politik yang dinilai membutuhkan pemimpin dengan keteladanan dan kepekaan sosial. Dengan demikian, kategori tematik 'harapan terhadap pemimpin ideal' ini menonjolkan gambaran normatif tentang figur pemimpin yang berwatak bijaksana, adil, dan beriorientasi pada kepentingan rakyat.

Tematik 'harapan terhadap pemimpin ideal' tampak jelas pada artikel berjudul 'Ketika Orang Jawa Menantikan *Ratu Adil*' (15 Mei 1997) yang mengonstruksi harapan terhadap pemimpin ideal sebagai respons simbolik-kultural atas krisis legitimasi kepemimpinan menjelang runtuhnya Orde Baru. Artikel yang terbit satu tahun sebelum lengsernya Soeharto, merefleksikan situasi sosial yang ditandai ketimpangan, represi, dan akumulasi ketidakadilan struktural. Dalam konteks tersebut, konsep *Ratu Adil* berfungsi sebagai bahasa kultural untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap kepemimpinan aktual tanpa menyebut kekuasaan secara langsung.

Penekanan Damardjati Supadjar bahwa "selama ketidakadilan merajalela, kerinduan itu akan muncul dengan sendirinya" menunjukkan bahwa harapan kepemimpinan ideal tidak lahir dari nostalgia mitologis, melainkan dari pengalaman sosial konkret. Sindhunata memperkuatnya dengan menyebut kerinduan itu sebagai "kerinduan yang

kontekstual", yang muncul ketika penguasa "menebarkan bencana dan ketidakadilan kepada *wong cilik*".

Mitos *Ratu Adil* dikonstruksi sebagai kritik terselubung terhadap kekuasaan yang gagal menjalankan fungsi *ngemong.* Tulisan ini memperlihatkan pergeseran penting: kepemimpinan ideal tidak lagi dipersonifikasikan sebagai figur heroik, melainkan sebagai situasi etis dan sistemik. Pernyataan Andrik Purwasito bahwa "*Ratu Adil* itu sebuah situasi. Bukan figur" menandai delegitimasi kepemimpinan personalistik Orde Baru dan sekaligus membangun imajinasi kepemimpinan baru yang berorientasi pada keadilan, hukum, dan keteraturan sosial. Dalam kerangka ini, harapan terhadap pemimpin ideal menjadi medium refleksi kolektif atas krisis kekuasaan menjelang Reformasi. Artikel ini mencerminkan kerinduan kolektif terhadap figur pemimpin yang mampu memulihkan keseimbangan sosial dan keadilan.

Di sisi lain, RSP periode ini menghadirkan pula 'harapan terhadap Sultan Hamengku Buwono (HB) X' yang mengartikulasikan pemaknaan kolektif masyarakat terhadap Sultan sebagai figur kepemimpinan ideal yang *ngemong,* melayani rakyat, menghadirkan rasa aman, dan menjunjung nilai etis pada masa transisi pasca-Orde Baru. Dengan demikian, kategori tema ini menampilkan figur Sultan sebagai simbol kepemimpinan ideal yang diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai tradisi dan tuntutan kepemimpinan modern.

Artikel berjudul 'Sultan HB X Dianggap Ratu Adil' (10 September 1998) mengartikulasikan proses pemaknaan kepemimpinan yang tidak lagi bertumpu pada legitimasi struktural atau simbol feodal, melainkan pada pengalaman sosial sehari-hari masyarakat terhadap *laku* kepemimpinan Sultan. Penilaian bahwa Sultan HB X "*tansah paring*

ayem tentrem" mengonstruksi kepemimpinan sebagai praktik yang menghadirkan rasa aman, ketenteraman, dan kedekatan emosional dengan rakyat.

Harapan tersebut dipertegas melalui pandangan Moedjanto yang menyebut Sultan sebagai pemimpin yang "bukan sosok yang minta dilayani, tapi justru melayani rakyat", bahkan menjalankan prinsip defeodalisasi. Pemaknaan ini menunjukkan pergeseran nilai kepemimpinan Jawa menuju orientasi pelayanan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap partisipasi publik. Dalam konteks Reformasi, figur Sultan diposisikan sebagai simbol hadirnya kepemimpinan moral yang mampu menjembatani tradisi keraton dengan tuntutan demokrasi.

Dalam konteks ini, catatan khusus yang disampaikan oleh Butet Kertaredjasa mengenai potensi "terkooptasi" tidak dibingkai sebagai penolakan, melainkan sebagai refleksi kesadaran publik terhadap keberlanjutan komitmen etis seorang pemimpin. Jadi, Sultan HB X dikonstruksikan sebagai representasi harapan kepemimpinan *ngemong* yang dinilai melalui konsistensi *laku*, bukan sekadar status simbolik.

Sejalan hal tersebut, RSP mengonstruksi 'filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*' sebagai rujukan etis dan kultural dalam memahami praktik kepemimpinan Jawa. Filosofi *Hasta Brata* digunakan sebagai kerangka pemaknaan kepemimpinan dalam rubrik budaya ini, dengan menekankan nilai keseimbangan, keteladanan, dan kebijaksanaan Jawa. Kategori tema filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* menekankan aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Jawa klasik sebagai rujukan etis dalam praktik kepemimpinan modern.

Kategori tersebut muncul dalam artikel berjudul 'Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!' (21 November 1996) menempatkan *Hasta*

Brata sebagai pedoman *laku* kepemimpinan yang menekankan keterbukaan, kedekatan sosial, dan keteladanan moral. Kepemimpinan sebagai praktik kebudayaan yang harus menyatu dengan rakyat, sebagaimana ditegaskan Harmoko bahwa nilai Jawa "harus menyatu dengan khalayak, jangan eksklusif dan 'jangan seperti katak dalam tempurung." Ajaran seperti "*aja kagetan, aja gumunan lan aja dumeh*" serta "sabar, *sareh lan saleh*" dikonstruksikan sebagai disiplin etik yang membentuk kejernihan nalar, stabilitas sikap, dan pengendalian diri pemimpin. Menjelang runtuhnya Orde Baru, *Hasta Brata* diposisikan sebagai landasan moral yang menekankan proses, keteguhan, dan keseimbangan demi terwujudnya "*tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi.*"

Konstruksi tersebut dipertegas dalam artikel berjudul 'Raja Tak Sekadar Berbekal *Pulung*' (6 November 1997) yang menggeser pemaknaan kepemimpinan Jawa dari legitimasi mitologis menuju kapasitas etik. *Hasta Brata* bukan sebagai simbol wahyu kekuasaan, melainkan *laku* kebajikan yang harus dihayati dan dijalankan secara konsisten. Penegasan bahwa pemimpin ideal ialah sosok yang "terus menerus mencari tuntunan ilahi, *wicaksana* dan paham delapan kebajikan negarawan (*Astabhrata*)" menunjukkan pemahaman kepemimpinan sebagai praktik reflektif dan relasional. Pandangan bahwa "*pulung* hanyalah alat atau mitos yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan" menempatkan keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan *memayu hayuning jagad* sebagai tolok ukur utama kepemimpinan. Pada periode akhir Orde Baru, RSP menghadirkan *Hasta Brata* sebagai acuan etik-kultural dalam merumuskan kepemimpinan Jawa yang bermoral, membumi, dan berakar pada kosmologi Jawa.

Berpijak dari penjelasan yang dikemukakan, periodisasi 1996–1998 menunjukkan RSP mengonstruksi kepemimpinan sebagai persoalan etika dan kebijaksanaan, bukan semata-mata persoalan politik praktis. Konstruksi ini muncul karena RSP pada periodisasi awal berada pada fase akhir kekuasaan Orde Baru, di tengah krisis multidimensi yang mengguncang kehidupan bangsa.

Dalam situasi penuh tekanan ini, RSP sebagai ruang 'aman' bagi kegelisahan publik. Kritik sosial disampaikan dengan bahasa *pasemon* yang halus namun tajam, memanfaatkan simbol pewayangan, kisah kerajaan Jawa, dan metafora alam. Berbasis *pasemon* inilah, kasus-kasus korupsi, feodalisme birokrasi, dan pengultusan terhadap kekuasaan (Soeharto) jelas disindir meski tanpa menyebut aktor. Secara bersamaan, nilai *Hasta Brata* dihadirkan sebagai penuntun moral untuk menyikapi *laku* kepemimpinan di tengah tirani. Temuan ini menjadi fondasi penting untuk memahami nilai kepemimpinan *Hasta Brata* pada periode-periode berikutnya. RSP menjadi pengingat etis bahwa kekuasaan sejati bertumpu pada kebijaksanaan, bukan ketakutan.

Dengan demikian, kerangka tematik RSP periodisasi 1996–1998 ditandai oleh dominasi tema krisis kepemimpinan, yang tidak mencerminkan filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* sehingga rakyat berharap pada pemimpin ideal. Berikut ini delapan artikel dalam RSP periodisasi 1996-1998 seperti tertera dalam Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Artikel RSP Periodisasi 1996-1998

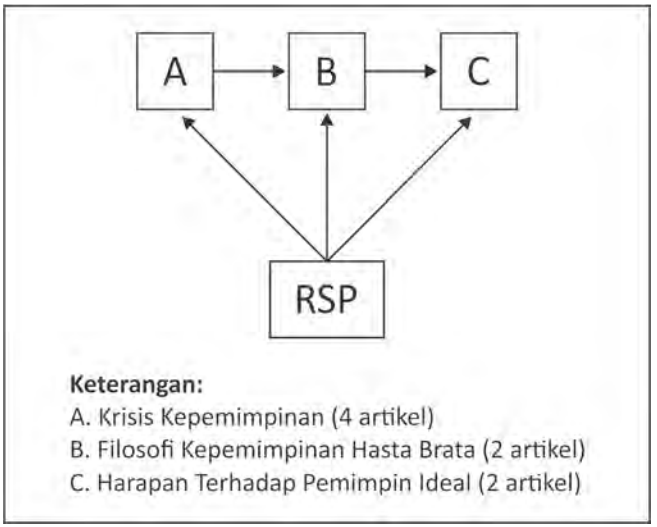
No	Judul Artikel	Edisi	Penulis	Kode Awal	Kategori Tema
1	'Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!'	Kamis, 21/11/1996	Bambang Sadono (Wakil Pemimpin Redaksi Harian 'Suara Merdeka', salah satu Penggagas RSP) dan Hendro Basuki (Kordinator Liputan, Penulis internal, Sastrawan)	Pemimpin yang Tertutup	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*
2	'Ketika Orang Jawa Menantikan Ratu Adil'	Kamis, 15 Mei 1997	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki. Catatan: keduanya merupakan penulis internal dan sastrawan	Berharap Pada 'Ratu Adil'	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
3	'Martabat dalam Krisis Besar'	Kamis, 6 November 1997	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Krisis Martabat Ideal	Krisis Kepemiminan
4	'Raja Tak Sekedar Berbekal Pulung'	Kamis, 15 Januari 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	*Pulung* sebagai Simbol Legitimasi	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*
5	'Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan'	Kamis, 22 Januari 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Disfungsi Birokrasi	Krisis Kepemimpinan
6	'Gaya Hidup Boros Akibatkan Kaum Elite Jawa Runtuh'	Kamis, 12 Februari 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Gaya Hidup Boros	Krisis Kepemimpinan
7	'Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi'	Kamis, 3 September 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Manipulasi Kepemimpinan Jawa	Krisis Kepemimpinan
8	'Sultan HB X Dianggap Ratu Adil'	Kamis, 10 September 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Sultan HB X	Harapan terhadap Pemimpin Ideal

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4.1, delapan artikel terbit pada akhir Orde Baru. Melalui *pasemon* khas budaya Jawa, rubrik ini menyuarakan kritik dan menempatkan *Hasta Brata* sebagai rujukan moral kepemimpinan. RSP

periodisasi 1996-1998 terdapat tiga kategori tema: krisis kepemimpinan, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal.

Berikut ini gambar 4.1 yang menampilkan tematik RSP periodisasi 1996-1998.



Gambar 4.1: Tematik RSP Periodisasi 1996 – 1998
Sumber: Penulis (2026)

Lebih jauh, RSP mengedepankan prinsip *Hasta Brata* sebagai kerangka moral tentang kepemimpinan nasional. Di tengah perubahan konteks sosial-politik, rubrik ini mempertahankan kesinambungan nilai yang berakar kuat dalam kebudayaan Jawa. Kepemimpinan dimaknai sebagai harmoni antara kebijaksanaan, integritas moral, kejernihan batin, ketegasan etis, dan kepekaan kemanusiaan. Kritik disampaikan melalui bahasa simbolik yang halus namun tajam, dengan unsur-unsur alam sebagai cermin *laku* kekuasaan.

Dalam konteks *Hasta Brata*, menjelang runtuhnya Orde Baru metafora *Hasta Brata* merefleksikan krisis moral: 'matahari' meredup, 'bumi' rapuh, 'laut' keruh, dan 'api' berubah menjadi represif. Kritik tidak diarahkan secara frontal kepada rezim, melainkan diekspresikan lewat *pasemon* kultural agar tetap aman dari sensor. Di sini, kegagalan kepemimpinan bukan sebagai persoalan teknis, melainkan krisis nilai yang mengganggu keseimbangan sosial.

Periode Transisi (1999-2000)

Periode 1999–Februari 2000 menempati posisi yang unik sekaligus krusial dalam periodisasi RSP. Pada periode ini, rubrik tidak terbit sehingga tidak tersedia data empiris langsung untuk dianalisis secara tematik. Namun, ketiadaan tersebut bukan sebagai kekosongan data atau jeda administratif dalam praktik redaksional. Sebaliknya, absennya RSP justru menghadirkan petunjuk penting mengenai dinamika struktural, sosial, dan historis yang memengaruhi produksi narasi kultural dalam media cetak. Fenomena ini terutama terlihat pada masa transisi besar bangsa Indonesia pascareformasi.

Tahun-tahun setelah 1998 merupakan periode yang penuh dengan ketidakpastian. Krisis moneter yang melanda sejak 1997 tidak hanya mengguncang fondasi ekonomi nasional, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan industri pers. Banyak media cetak menghadapi tekanan finansial serius, mulai dari meningkatnya biaya produksi, menurunnya daya beli pembaca, hingga perubahan drastis dalam strategi bisnis media. Dalam situasi semacam ini, redaksi dipaksa melakukan penyesuaian cepat dan sering kali pragmatis. Mereka memprioritaskan rubrik-rubrik yang dianggap lebih aktual, memiliki

nilai jual tinggi, dan relevan secara langsung dengan gejolak politik yang berlangsung.

Dalam konteks tersebut, rubrik reflektif-kultural seperti RSP berada pada posisi yang rentan. RSP tidak dirancang sebagai ruang pemberitaan keras (*hard news*), melainkan sebagai wahana perenungan, kritik moral, dan artikulasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa. Karakter ini menjadikan RSP sangat bergantung pada stabilitas struktural media dan konsistensi visi redaksional. Ketika ruang redaksi dihadapkan pada tuntutan untuk merespons perubahan politik yang cepat, seperti pergantian rezim, euforia kebebasan pers, konflik dan tarik-menarik kepentingan, ruang untuk narasi etis dan kultural menjadi semakin menyempit. Hal ini menunjukkan bagaimana dinamika politik langsung memengaruhi prioritas dan strategi produksi konten di media cetak.

Ketiadaan RSP pada periode 1999–2000 mencerminkan pergeseran orientasi jurnalistik yang lebih luas. Pasca-reformasi, pers Indonesia mengalami transformasi besar dari media yang sebelumnya dikontrol ketat oleh negara menjadi arena ekspresi yang relatif bebas. Namun, kebebasan ini diiringi dengan kecenderungan meningkatnya jurnalisme politik, opini konfrontatif, dan liputan konflik. Dalam atmosfer tersebut, pendekatan jurnalistik yang halus, simbolik, dan bersifat *pasemon*- seperti yang menjadi ciri khas RSP- kurang memperoleh ruang prioritas. Nilai-nilai kebijaksanaan, pengasuhan *(pamomong)*, dan refleksi moral kalah oleh kebutuhan untuk menghadirkan informasi yang cepat, keras, dan sensasional.

Meskipun demikian, periode ini memperlihatkan batasan-batasan struktural yang selama ini membingkai eksistensi RSP. Absennya rubrik menegaskan bahwa produksi narasi kultural dalam media bukanlah

praktik yang berdiri di ruang hampa. Rubrik ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi media, konfigurasi kekuasaan dalam redaksi, serta konteks sosial-politik yang lebih luas. Dengan kata lain, keberadaan atau ketiadaan RSP merupakan hasil dari relasi kompleks antara idealisme jurnalistik dan realitas struktural yang menekan.

Periode 1999–2000 berfungsi sebagai periode transisi yang penting untuk memahami kontinuitas dan diskontinuitas dalam perjalanan RSP. Ketika RSP kembali hadir pada periode berikutnya, rubrik ini tidak muncul dari ruang kosong, melainkan dari pengalaman historis tentang keterbatasan, jeda, dan negosiasi makna. Ketiadaan RSP memperlihatkan betapa rapuhnya ruang refleksi etis ketika media berada dalam tekanan eksternal yang intens. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang sebelumnya diusung RSP seperti kepemimpinan moral, kearifan lokal, dan kritik sosial yang berakar pada budaya Jawa menjadi rentan dihilangkan.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) pada periode ini menegaskan bahwa peran moral media tidak selalu dapat dijalankan secara konsisten di setiap situasi. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil dan orientasi redaksional bergeser, fungsi media sebagai penjaga nilai/ pengawal moral, sering kali harus berkompromi. Ketiadaan RSP sebagai refleksi dari dilema mendasar media: antara bertahan secara ekonomi dan menjaga idealisme kultural. Dilema ini tidak bersifat abstrak, melainkan dialami secara nyata oleh para pengelola media, jurnalis, dan penulis yang bekerja di bawah tekanan situasi yang serba tidak pasti.

Periode 1999–2000 sebagai bagian integral dari periodisasi RSP secara utuh dan kontekstual. Periode jeda ini bukan sekadar kekosongan, tetapi menjadi penanda historis tentang kondisi yang mem-

batasi hadirnya ruang refleksi etis dan budaya dalam media arus utama. Ketiadaan RSP pada periode ini, menunjukkan bahwa eksistensi rubrik bergantung pada konfigurasi sosial-politik dan ekonomi yang melingkupinya. Di tengah tekanan eksternal yang kuat, menjaga ruang moral dalam media bukanlah tugas yang mudah, melainkan perjuangan yang menuntut keteguhan, negosiasi, dan kesabaran.

Periode Konsolidasi (2000-2010)

Periodisasi Maret 2000–2010 menandai fase penting dalam perkembangan tematik RSP. Setelah mengalami jeda penerbitan pada periode transisi 1999–2000, rubrik ini kembali hadir dalam konteks sosial-politik yang berbeda, yakni era pasca-Reformasi dengan dinamika kepemimpinan nasional yang lebih terbuka, plural, dan fluktuatif. Pada periode ini, terdapat 18 artikel yang dianalisis menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke (2012), dengan fokus pada pengelompokan kategori tema dan kecenderungan tematik yang berkembang dalam keseluruhan artikel periode 2000–2010.

Hasil pengkodean menunjukkan lima kategori tema yaitu: 1) krisis kepemimpinan (9 artikel); 2) harapan terhadap pemimpin ideal (3 artikel); 3) kemenangan beretika (3 artikel); 4) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* (2 artikel); 5) persepsi publik terhadap pemimpin (1 artikel).

Dibandingkan periode awal, periode ini memperlihatkan peningkatan jumlah kategori tema serta diversifikasi isu kepemimpinan yang dibahas dalam RSP. Hal ini menunjukkan bahwa pasca-Reformasi, rubrik ini mulai mengembangkan cakupan tematik yang lebih luas dalam merespons realitas kepemimpinan nasional.

Berdasarkan 18 artikel yang diteliti menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan merupakan kecenderungan tematik paling dominan dan menentukan, sebagaimana tercermin dari sembilan artikel yang secara langsung mengulas runtuhnya etika, keteladanan, dan kepekaan moral pemimpin. Dominasi tema ini menandakan bahwa kepemimpinan pada periode pascareformasi sebagai situasi berulang yang problematik dan belum menemukan pijakan etis yang kokoh.

Penerapan kategori tema 'krisis kepemimpinan' misalnya tampak jelas muncul dalam artikel berjudul '*Nglali ya Nglali Aja Ning Banget-banget*' (2 Desember 2001). Artikel ini mengulas praktik *nglali* dan *ngapus*i digambarkan bukan lagi sebagai penyimpangan luar biasa, melainkan sebagai perilaku yang kian ditoleransi melalui pembenaran kultural. Ketika peringatan *kalabendu* kembali dihadirkan sebagai ajakan *eling*, krisis kepemimpinan diposisikan sebagai kegagalan moral kolektif, bukan semata kesalahan individu. Tematik ini diperkuat dalam artikel berjudul '*Ngedan, Edan-edanan* pada Zaman *Edan*' (25 Agustus 2002), ketika kondisi negara digambarkan *edan-edanan* dan penguasa menjadi *micel lan mbudheg*, yakni kehilangan kemampuan melihat dan mendengar penderitaan rakyat. Dalam konteks ini, krisis kepemimpinan tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi situasi yang terus direproduksi.

Narasi kosmologis dalam artikel berjudul 'Bila *Jagad Gedhe* Melongsorkan Penguasa' (16 Maret 2003) memperlihatkan bahwa krisis kepemimpinan sebagai pelanggaran tatanan moral yang lebih luas. Ungkapan "raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah" menegaskan bahwa kekuasaan yang kehilangan *laku* etis pada akhirnya kehilangan legitimasi sosial. Namun, artikel-artikel berikutnya justru menunjukkan pergeseran menjadi praktik-praktik pragmatis.

Hal tersebut tampak dalam artikel berjudul '*Sowan Asuh Muka Soroh Banda*' (2 Mei 2004), ketika praktik budaya *sowan* yang semula bermakna etis dipertanyakan karena berpotensi berubah menjadi alat politik dan bahkan "benih untuk menyemaikan budaya korupsi". Pertanyaan serupa muncul melalui artikel berjudul 'Dalam Pusaran Takhta untuk *Brayat*' (30 Mei 2004), yang secara eksplisit mempertanyakan orientasi kekuasaan: takhta untuk rakyat atau untuk *brayat*? Krisis kepemimpinan di sini tidak lagi menekankan soal etika personal, melainkan menyentuh orientasi dasar kekuasaan.

Akumulasi krisis tersebut berdampak langsung pada kondisi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam artikel dengan judul 'Kehilangan Mimpi, Ketiadaan Harapan' (13 Juni 2004). Ketika muncul pertanyaan "apalagi yang bisa diharapkan dari para pemimpin negeri ini?", kepemimpinan dipersepsikan gagal memberi arah dan harapan. Artikel berjudul '*Mosok Wong* Jawa Tidak Bisa Korupsi' (19 Juni 2005) kemudian menunjukkan bahwa krisis ini semakin rumit karena nilai-nilai budaya dan ungkapan kearifan Jawa justru dapat berfungsi membiasakan perilaku menyimpang. Dengan demikian, krisis kepemimpinan tidak hanya bersumber dari elite, tetapi juga dari penyimpangan terhadap praktik tidak etis.

Selanjutnya, artikel berjudul 'Ratu *Ngopeni Kawula* demi Kuasa yang *Langgeng*' (31 Juli 2005) menyorot kecenderungan pemimpin yang "merasa tak cukup dengan karisma" lalu memilih "jalan cepat untuk kembali merebut takhta". Upaya menangguk simpati sesaat dari *kawula* memperlihatkan krisis kepemimpinan sebagai praktik pragmatis yang semakin menjauh dari prinsip keteladanan.

Terakhir, artikel berjudul 'Jurus Pemangku Penjinak Lawan' (18 Oktober 2009) menampilkan strategi kekuasaan yang manipulatif. Prinsip bahwa "musuh jangan dimusuhi, tetapi *direngkuh* dan dipangku" diposisikan sebagai cara menjinakkan lawan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan etika strategi tersebut.

Secara umum, sembilan artikel dalam konteks kategori tema 'krisis kepemimpinan' merefleksikan realitas sosial terkait krisis kepemimpinan yang berkelanjutan. Artinya, kepemimpinan dipersepsikan kehilangan pijakan etis, menyimpang dari nilai budaya yang ideal, serta gagal menjaga relasi moral dengan masyarakat. RSP periode ini menunjukkan krisis kepemimpinan sebagai kondisi yang terus berulang dalam praktik kekuasaan.

Dalam situasi krisis yang berlarut inilah, tema filosofi kepemimpinan *Hasta Brata,* harapan terhadap pemimpin ideal, dan kemenangan beretika muncul bukan sebagai gambaran realitas yang dominan, melainkan sebagai rujukan nilai yang terus dihadirkan justru karena realitas kepemimpinan dipersepsikan menyimpang. Artikel dengan judul 'Menepis Kemelaratan dengan *Tan Amukti Palapa*' (3 Juli 2005) mengonstruksi *Hasta Brata* sebagai landasan etis kepemimpinan yang menautkan kekayaan pemimpin dengan tanggung jawab sosial. Hal ini tampak dalam pernyataan: "Dalam ajaran *Asthabrata* ditunjukkan bahwa seorang raja, gusti, atau pemimpin haruslah kaya sekaligus penderma kepada rakyatnya yang miskin." Kekayaan dalam perspektif ini tidak dimaknai sebagai akumulasi pribadi, melainkan sebagai sarana distribusi kesejahteraan

Demikian pula figur Baladewa yang keluguannya "ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami" ('Mencari Baladewa di Panggung Kuasa', 16 Juni 2010), menunjukkan betapa nilai-nilai kejujuran semakin sulit ditemukan dalam praktik kekuasaan. Bahkan ditegaskan bahwa keluguan tersebut "tidak akan pernah mendapatkan tempat, kecuali untuk segera disisihkan dan *dikibuli*." Melalui perbandingan dengan kisah Yudistira dan Drona, RSP mengulas rapuhnya nilai kejujuran ketika berhadapan dengan strategi kekuasaan yang manipulatif. Namun, artikel ini kembali menegaskan kepemimpinan ideal Jawa dengan menyatakan bahwa "dalam konsep kekuasaan dan kepemimpinan Jawa, sebagaimana yang terkristalisasi dalam *Astabrata,* bahwa kepemimpinan itu juga bak 'matahari' yang senantiasa tidak hanya panas dan terangnya tapi juga memancarkan lurus sinarnya." Metafora 'matahari' memperlihatkan bahwa pemimpin ideal bukan hanya kuat dan berwibawa, tetapi juga konsisten, jujur, dan memberi arah secara moral.

Dalam konteks ini 'harapan terhadap pemimpin ideal' melalui figur *Ratu Adil*, *Satriya Piningit* maupun teladan Sultan HB-X bertujuan menjaga orientasi etis di tengah kekecewaan yang berulang. Pernyataan bahwa *Ratu Adil* "*anane mung winates*" ('*Ratu Kuwi Anane Mung Winates*', 3 Oktober 2004) menandai kesadaran bahwa figur ideal tersebut lebih berfungsi sebagai rujukan moral daripada sosok nyata yang mudah diwujudkan.

Selain itu, artikel berjudul 'Saat Orang Jawa Menantikan *Ratu Adil*' (9 Juli 2000) menampilkan tematik 'harapan terhadap pemimpin ideal' yang berpijak pada pengalaman historis konflik politik. Kutipan yang menyebut bahwa "*geger* politik bukanlah situasi baru bagi orang Jawa"

serta rangkaian konflik sejak Ken Arok hingga Sultan Agung menunjukkan bahwa kecurangan kekuasaan dimaknai sebagai kecenderungan berulang dalam sejarah Jawa. Kritik bahwa "para elite politik kurang belajar dari cara para raja Jawa itu mengatasi politik" memperlihatkan bahwa harapan terhadap pemimpin ideal muncul sebagai respons terhadap praktik kepemimpinan modern yang dipersepsikan mengabaikan kearifan sejarah. Konflik yang terjadi akibat pengabaian tersebut digambarkan berujung pada "darah tercecer dan nyawa-nyawa melayang untuk sesuatu yang hampa".

Kondisi ini semakin diperkuat melalui artikel berjudul 'Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja' (29 April 2007) yang menghadirkan figur Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai rujukan konkret dalam narasi pemimpin ideal. Momentum *wiyosan* ke-61 HB X dipandang mengguncang *kawula* ketika *Ngarso Dalem* menyatakan "keinginan untuk tak bersedia lagi menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah masa jabatannya berakhir pada 2008". Pernyataan ini sebagai sikap yang menegaskan jarak antara *laku* kepemimpinan kultural dan jabatan politik formal, sehingga analisis tematik yang muncul menempatkan pemimpin ideal sebagai figur yang mampu membatasi hasrat kekuasaan.

Secara umum, tiga artikel dalam kategori tema 'harapan terhadap pemimpin ideal' merefleksikan konsistensi atas harapan terhadap pemimpin ideal. Harapan itu berakar pada ingatan sejarah konflik, dibangun melalui imaji kultural tentang *Ratu Adil*, serta diarahkan pada figur pemimpin yang dipandang mampu menjaga etika dan jarak dari kekuasaan formal. RSP periode ini menampilkan harapan terhadap pemimpin ideal bukan sebagai romantisme semata, melainkan sebagai

refleksi kultural atas kekecewaan sekaligus aspirasi masyarakat terhadap kepemimpinan.

Sementara itu, kategori tema 'kemenangan beretika' dalam RSP periode ini menekankan pentingnya perilaku pemimpin yang beradab, memiliki integritas moral, dan sikap ksatria dalam memaknai kemenangan (politik). Dalam artikel dengan judul 'Menang Tanpa *Ngasorake*, Kenapa Tidak?' (12 Maret 2000) kemenangan beretika ditampilkan sebagai strategi kepemimpinan yang menghindari perendahan martabat lawan.

Hal ini tercermin dalam kutipan: "Gus Dur barangkali sedang menjalankan strategi menang tanpa *ngasorake* ketika *sowan* ke rumah Wiranto, Habibie dan Soeharto." Tindakan tersebut dimaknai sebagai praktik nilai, bukan sekadar manuver politik. Penegasan bahwa "*menang tanpa ngasorake* menurut Prof. Suwaji Bastomi merupakan *piwulang* sekaligus *piweling* tentang kepemimpinan" menunjukkan bahwa kemenangan dimaknai sebagai ajaran etis yang bersumber dari tradisi budaya Jawa. Kemenangan beretika dimaksudkan untuk menjaga harmoni sosial.

Dalam konteks yang sama, artikel berjudul 'Diperlukan Bisma untuk *Wani Ngalah*' (13 Mei 2001) memperkuat nuansa tematik yang menekankan penerimaan atas kekalahan sebagai bagian dari etika kepemimpinan. Pernyataan bahwa "kultur bangsa ini tak pernah mendidik untuk menerima kekalahan sebagai sesuatu hal yang wajar" mengungkap kecenderungan memaknai kemenangan secara konfrontatif. Kutipan "kekalahan selalu menjadi titik awal untuk membangun dendam dan pembalasan" menunjukkan implikasi sosial dari absennya etika dalam memahami menang dan kalah. Dalam artikel ini, figur

Bisma dihadirkan sebagai teladan kepemimpinan yang mampu *wani ngalah*, yakni mengalah dengan kesadaran dan ketulusan. Kemenangan beretika mencakup kemampuan menahan ambisi pribadi demi kepentingan yang lebih luas.

Artikel berjudul 'Menang Sejati *Tan Ngasorake*' (12 Juli 2009) menampilkan kemenangan beretika pada ranah batin dan penguasaan diri. Ungkapan "menang sejati, *sejatining* menang' semestinya *digandrungi* oleh setiap petarung sejati" mengarahkan pemahaman kemenangan pada dimensi internal kepemimpinan. Rujukan pada pemikiran R.M. Sosrokartono bahwa "menang tanpa *ngasorake* sebagai kemenangan yang paling luhur" mempertegas bahwa kemenangan tertinggi tidak diukur dari keberhasilan menundukkan pihak lain, melainkan dari kemampuan menjaga integritas moral. Penyebutan "ksatria, bahkan *ksatria pinandhita*" memperlihatkan standar etis yang menyertai klaim kemenangan dalam kepemimpinan.

Secara umum, ketiga artikel dari kategori tema 'kemenangan beretika' memperlihatkan kategori ini dibangun relatif konsisten, meskipun hadir dalam konteks waktu yang berbeda. Kemenangan dimaknai sebagai *laku* kepemimpinan yang menuntut kebijaksanaan dalam bertindak, ketulusan dalam mengalah, serta komitmen menjaga martabat pihak lain. Dalam perspektif konstruktivis, analisis ini tidak bermaksud menilai aktor politik tertentu. Akan tetapi menelaah bagaimana nilai kemenangan beretika dimaknai dan disampaikan sebagai bagian dari refleksi kultural atas praktik kepemimpinan nasional pada periode tersebut.

Terakhir, kategori tema 'persepsi publik terhadap pemimpin'. Persepsi publik ini menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap figur pemimpin, khususnya dalam menilai kedekatan, keteladanan, dan tanggung jawab sosialnya. Persepsi tersebut tercermin dalam artikel berjudul 'Kuasa yang (Dianggap) *Sarwa Ora Pener*' (31 Oktober 2010) untuk menelaah bagaimana persepsi publik terhadap pemimpin dikonstruksi oleh aktor. Artikel ini menandai pergeseran signifikan dalam cara publik memandang pemimpin. Pada masa lalu, penguasa digambarkan sebagai sosok yang "selalu dianggap benar dan harus dibenarkan", di mana "titahnya laksana sabda dewa, sehingga tidak ada kata lain bagi *kawula*, kecuali *mundhi dhawuh sang nata*." Namun, dalam konteks demokrasi, pemimpin justru berada pada posisi yang "tidak selalu benar, bahkan *sarwa ora kepeneran*." Pergeseran ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak lagi bersifat sakral, melainkan bergantung pada persepsi publik yang dinamis.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, analisis tematik periode 2000–2010 menunjukkan bahwa RSP mengonstruksi kepemimpinan sebagai persoalan etika yang mengalami krisis berkepanjangan, dengan sembilan artikel krisis kepemimpinan sebagai penanda utama. Tema-tema lain tidak meniadakan krisis tersebut, melainkan hadir untuk melengkapi rujukan nilai, harapan, dan *laku* kepemimpinan yang lebih bermartabat di tengah realitas kekuasaan yang terjadi.

Lebih lanjut, analisis terhadap 18 artikel RSP memperlihatkan bahwa persoalan yang paling menonjol adalah krisis kepemimpinan sebagai realitas sosial yang berulang dan dirasakan secara kolektif. Kepemimpinan tidak diposisikan sebagai sesuatu yang stabil atau

mapan, melainkan sebagai praktik yang dikonstruksi karena kehilangan *laku* etis, keteladanan, dan daya *pamong.* Kritik yang muncul tidak diarahkan pada individu semata, tetapi pada cara kekuasaan dijalankan tanpa kepekaan moral dan tanggung jawab terhadap rakyat.

Dalam konteks inilah, nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dihadirkan sebagai rujukan makna kultural yang digunakan untuk menyikapi antara kepemimpinan yang dijalankan dan kepemimpinan yang diharapkan. Harapan terhadap pemimpin ideal dimaknai sebagai penilaian normatif atas legitimasi etis kekuasaan. Kondisi ini sekaligus merefleksikan kekecewaan publik terhadap praktik kepemimpinan yang dianggap belum memenuhi tanggung jawab moral.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) pada periode ini tetap menempatkan kepemimpinan sebagai tema sosial-kultural yang berlandaskan pertimbangan etis. Nilai kepemimpinan bukan sebagai konsep yang mapan, melainkan sebagai pedoman (*laku*) sehari-hari yang berkelanjutan dalam tradisi kepemimpinan Jawa.

Atas dasar itu, rangkaian tematik RSP 2000–2010 tetap menunjukkan dominasi tema krisis kepemimpinan. Selain itu, terdapat tema-tema lain: etika kemenangan (kemenangan beretika), figur pemimpin ideal (harapan terhadap pemimpin ideal), nilai kepemimpinan tradisional (filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*), dan persepsi publik terhadap pemimpin.

Tabel 4.2 Artikel RSP Periodisasi 2000-2010

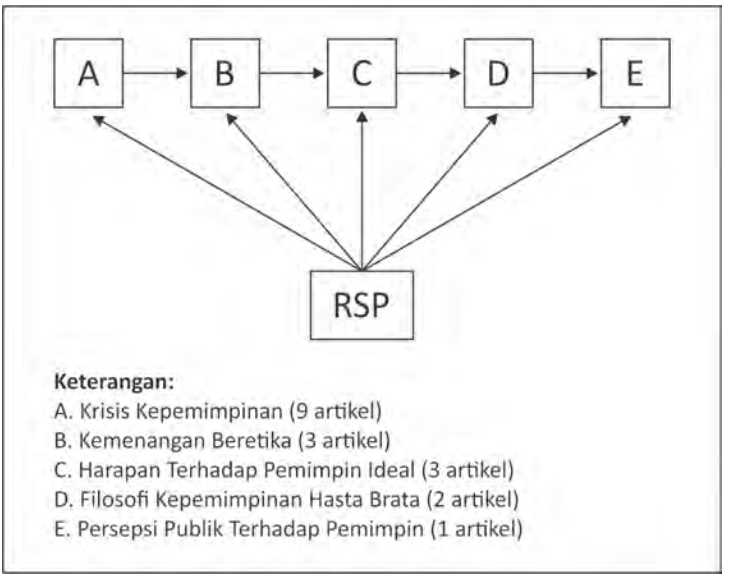
No	Judul Artikel	Edisi	Penulis	Kode Awal	Kategori Tema
1	'Menang Tanpa *Ngasorake*, Kenapa Tidak?'	Minggu, 12 Maret 2000	Sucipto Hadi Purnomo (Penulis eksternal, sastrawan, kolumnis, dosen)	Menang Tanpa *Ngasorake*	Kemenangan Beretika
2	'Saat Raja Jawa Mengatasi Geger Politik'	Minggu, 9 Juli 2000	Hendro Basuki Triwikromo (Penulis internal, sastrawan)	Geger Politik	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
3	'Diperlukan Bisma Untuk *Wani Ngalah*'	Minggu, 13 Mei 2001	Sucipto Hadi Purnomo	Figur Ideal Bisma	Kemenangan Beretika
4	'*Nglali Ya Nglali, Ning Aja Banget-Banget!*'	Minggu, 2 Desember 2001	Sucipto Hadi Purnomo	*Nglali*	Krisis Kepemimpinan
5	'*Ngedan, Edan-edanan* Pada Zaman *Edan*'	Minggu, 25 Agustus 2002	Gunawan Budi Susanto (Penulis internal, Pengasuh RsP, sastrawan)	Zaman *Edan*	Krisis Kepemimpinan
6	'Bila *Jagad Gedhe* Melongsorkan Penguasa'	Minggu, 16 Maret 2003	Sucipto Hadi Purnomo	*Jagad Gedhe*	Krisis Kepemimpinan
7	'*Sowan Asuh Muka Soroh Bandha*'	Minggu, 2 Mei 2004	Sucipto Hadi Purnomo	Tradisi *Sowan*	Krisis Kepemimpinan
8	'Dalam Pusaran Takhta untuk *Brayat*'	Minggu, 30 Mei 2004	Gunawan Budi Susanto	Takhta	Krisis Kepemimpinan
9	'Kehilangan Mimpi Ketiadaan Harapan'	Minggu, 13 Juni 2004	Gunawan Budi Susanto	Pupusnya Harapan	Krisis Kepemimpinan

10	*'Ratu Kuwi Anane Mung Winates'*	Minggu, 3 Oktober 2004	Sucipto Hadi Purnomo	Pemimpin/Ratu	Harapan pada Pemimpin Ideal
11	*'Mosok Wong* Jawa Tidak Bisa Korupsi?'	Minggu, 19 Juni 2004	Sucipto Hadi Purnomo	Budaya Korupsi	Krisis Kepemimpinan
12	'Menepis Kemelaratan dengan Tan Amukti Palapa'	Minggu, 3 Juli 2005	Sucipto Hadi Purnomo	'Amukti Palapa'	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*
13	'Ratu *Ngopeni Kawula* Demi Kuasa yang Langgeng'	Minggu, 31 Juli 2005	Sucipto Hadi Purnomo	Pemimpin/Ratu	Krisis Kepemimpinan
14	'Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja'	Minggu, 29 April 2007	Sucipto Hadi Purnomo	Sabda Raja	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
15	'Menang Sejati *Tan Ngasorake'*	Minggu, 12 Juli 2009	Sucipto Hadi Purnomo	Menang *Tan Ngasorake*	Kemenangan Beretika
16	'Jurus Pemangku Penjinak Lawan'	Minggu, 18 Oktober 2009	Sucipto Hadi Purnomo	Musuh Mengintai	Krisis Kepemimpinan
17	'Mencari Baladewa di Panggung Kuasa'	Minggu, 6 Juni 2010	Sucipto Hadi Purnomo	Sosok Baladewa	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*
18	'Kuasa yang (Dianggap) *Sarwa Ora Pener'*	Minggu, 31 Oktober 2010	Sucipto Hadi Purnomo	Eksistensi Penguasa	Persepsi Publik terhadap Pemimpin

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan tabel 3.2, RSP periodisasi 2000-2010 menampilkan dinamika kepemimpinan yang semakin kompleks, menyingkap kontradiksi antara nilai luhur kepemimpinan *Hasta Brata* dan praktik kekuasaan sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 4.2, berikut gambar tematik RSP periodisasi 2000-2010 seperti tercantum dalam Gambar 4.2 di bawah ini:



Gambar 4.2. Tematik RSP Periodisasi 2000 – 2010
Sumber: Penulis (2026)

Secara umum, RSP periode 2000–2010 memaknai nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai refleksi atas berlanjutnya krisis moral kepemimpinan dalam konteks Indonesia pada fase transisi dan konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi. Periode ini ditandai oleh pergantian kepemimpinan nasional yang relatif cepat dari Abdurrahman Wahid,

Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk situasi politik dan birokrasi yang belum sepenuhnya stabil. Dalam lanskap tersebut, metafora 'matahari' tetap hadir sebagai simbol meredupnya keteladanan pemimpin di tengah ketidakpastian arah dan konsistensi kepemimpinan nasional.

Metafora 'bumi' serta 'samudra' atau 'laut' merepresentasikan melemahnya tanggung jawab sosial dan kejernihan nurani pemimpin dalam mengelola relasi dengan rakyat, seiring dengan proses penataan ulang institusi negara dan birokrasi yang masih sarat tarik-menarik kepentingan politik. Sementara itu, unsur 'api'- yang pada periode sebelumnya tampil dominan sebagai simbol keberanian moral- cenderung memudar, menandai surutnya keberanian etis dalam mengambil keputusan tegas di tengah dinamika kompromi dan negosiasi politik masa transisi.

Menariknya, unsur 'angin' justru tampil lebih tegas dalam periode ini, melambangkan renggangnya relasi emosional antara pemimpin dan rakyat. Hal ini merefleksikan jarak komunikasi dan empati yang terbentuk selama proses konsolidasi kekuasaan. Refleksi ini menggambarkan stabilitas politik dan tata kelola sering kali lebih diutamakan, daripada kedekatan sosial dan kepekaan terhadap pengalaman keseharian masyarakat.

Berpijak pada penjelasan tersebut, RSP mengonstruksi krisis kepemimpinan bukan semata sebagai persoalan moral personal pemimpin, melainkan sebagai persoalan relasional yang mencakup 'kemiskinan empati' dan rapuhnya ikatan sosial antara penguasa dalam fase transisi demokrasi Indonesia.

Periode Kontemporer (2011-2020)

Penulis mengkaji 22 artikel RSP periodisasi 2011-2020. Rubrik di era ini berlangsung di tengah disrupsi digital sehingga menghantam bisnis pers cetak- khususnya surat kabar. Di periode ini, kritik moral justru menguat, menyinggung polarisasi, hoaks, dan degradasi etika. Nilai *Hasta Brata* berfungsi sebagai 'jangkar' kearifan lokal, menghadirkan keteduhan reflektif di tengah gaduhnya demokrasi di layar digital.

Seperti di periode sebelumnya, 22 artikel dalam periode ini dianalisis sebagai satu kesatuan dengan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2012).

Hasil pengkodean menunjukkan lima kategori tema yaitu: 1) krisis kepemimpinan (13 artikel); 2) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* (4 artikel); 3) harapan terhadap pemimpin ideal (2 artikel); 4) kaderisasi kepemimpinan (2 artikel); 5) kemenangan beretika (1 artikel).

Dalam rentang 2011–2020, RSP mengonstruksi krisis kepemimpinan bukan sebagai kegagalan teknokratis atau administratif, melainkan sebagai melemahnya kendali diri dan pengabaian nilai etika kepemimpinan Jawa dalam praktik kekuasaan. Kepemimpinan dinilai bukan dari efektivitas kebijakan, melainkan dari keselarasan antara kuasa, kendali diri, dan etika hidup. Di titik inilah nilai-nilai *Hasta Brata* berfungsi sebagai prinsip evaluatif, bukan doktrin normatif.

Krisis kepemimpinan dikonstruksi sebagai proses pemaknaan atas relasi antara nilai-nilai budaya Jawa yang ideal dan praktik kekuasaan yang berlangsung. Artikel berjudul 'Orientasi Politik Jawa Soeharto' (29 Mei 2011) menjadi fondasi penting, karena RSP memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya Jawa direduksi menjadi simbol legitimasi.

Ketika Soeharto digambarkan "menampilkan diri dalam ambiguitas"-sebagai "raja dengan nalar kekuasaan tradisional" sekaligus "manusia politik modern", RSP menunjukkan bahwa krisis muncul saat nilai budaya Jawa tidak sebagai *laku.* Nilai tersebut berubah menjadi "selimut" kekuasaan. Pernyataan bahwa "idealitas (kekuasaan) Jawa hampir tak terasakan" menandai kegagalan internalisasi nilai, bukan ketiadaannya.

Reduksi nilai menjadi instrumen politik itu berulang dalam artikel berjudul 'Tradisi dan Kampanye Politikus' (2 Maret 2014). RSP menegaskan bahwa perubahan sosial tidak mungkin lahir dari simbol kosong, sebab "alas perubahan kehidupan adalah perubahan kebudayaan". Ketika kebudayaan diperlakukan sebagai "kuda tunggangan meraih kekuasaan", kepemimpinan kehilangan basis etikanya. Di sini krisis tidak lahir dari perbedaan pandangan politik, tetapi dari pengkhianatan terhadap fungsi kebudayaan sebagai penuntun *laku.*

Dimensi berikutnya adalah krisis sabda dan konsistensi moral. Artikel berjudul '*Reshuffle* dan Jagat Wayang' (27 Juli 2016) membingkai kepemimpinan melalui prinsip *sabda pandhita ratu tan kena wola-wali*. Ketika publik "mencium aroma bagi-bagi kue kekuasaan" dan janji menuntaskan pelanggaran HAM tergeser oleh "kursi empuk", krisis kepemimpinan dimaknai sebagai retaknya ikatan etis antara ucapan dan tanggung jawab. Kepemimpinan hadir secara struktural, tetapi kehilangan bobot moralnya.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) kemudian memperdalam krisis sebagai pergeseran makna kekuasaan dari amanah menjadi kalkulasi dukungan. Dalam artikel dengan judul 'Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan' (7 Oktober 2018) mengonstruksi kekuasaan dikelilingi figur

bidhung api rowang- tampak menolong, tetapi menyimpan kepentingan. Demi suara, "mantan koruptor, maling, bergabung, silakan". Di sini krisis tidak lagi personal, melainkan sistemik: legitimasi dibangun lewat simbol *wingka katon kencana*, bukan keselarasan nilai dan *pulung* kekuasaan. Kepemimpinan tetap ada, tetapi "terasa hambar" karena tercerabut dari dasar kulturalnya.

Krisis semakin nyata ketika nilai Jawa direduksi menjadi strategi elektoral. Artikel berjudul 'Membangun Markas Batin Jawa' (16 Desember 2018) mempertanyakan apakah Jawa dijalani sebagai *laku* atau sekadar basis persepsi politik. Ketika ruang publik dipenuhi "hujat-hujatan, *srekal-srekalan, pongah-pongahan*", RSP menegaskan bahwa fokus pada "markas lahir" dan pengabaian "markas batin" mengosongkan kepemimpinan dari nilai "*wedi, isin, sungkan, rukun, urmat, eling lan waspada*".

Dimensi krisis batin tampak kuat dalam artikel berjudul 'Kuasa, Bencana dan Budaya' (27 Januari 2019). Pemimpin digambarkan *gobal-gabul*, "acap cemas", dan gemar "merekayasa citra", sementara kepemimpinan sejati mensyaratkan "kekuatan batin tinggi" yang menyelaraskan masyarakat dan alam. Pencitraan '*blusukan* ke selokan' dan gestur religius, ditampilkan sebagai tanda ketiadaan *laku* batin, bukan kehadiran kepemimpinan.

Kerakusan dan keakuan menjadi simpul krisis berikutnya. Artikel berjudul 'Politik *Umuk* dan *Kemaruk*' (10 Februari 2019) menyebut aktor politik sebagai "manusia *kemaruk* yang gila hormat", yang "*ngregem* kekuasaan" dan mengandalkan *aji mumpung*. Dalam kondisi ini, demokrasi dan kemanusiaan disisihkan, bahkan kritik dibungkam. RSP

menegaskan bahwa kehancuran kepemimpinan bersumber dari hilangnya kendali diri, bukan dari kurangnya kecakapan.

Tema kegagalan kendali diri itu mencapai metafora tajam dalam artikel berjudul 'Gagal Memilih *Ugul-Ugul'* (24 Maret 2019). *Paribasan 'kekudhung walulang macan'* digunakan untuk menunjukkan ketergantungan semu pada kekuasaan besar. Ketika "kerudung itu tersingkap", pemimpin yang merasa kebal hukum jatuh sebagai "macan-macanan". Penjara menjadi penutup pahit kegagalan batin, bukan sekadar sanksi hukum.

Dalam ranah elektoral, artikel berjudul 'Memburu *Pulung* Kekuasaan' (7 April 2019) menampilkan krisis sebagai runtuhnya *laku alus*. Ketika kepemimpinan tampil "kasar nan vulgar" dan "sikap hormat telah dibuang ke tengah laut", RSP menegaskan bahwa kewibawaan lahir dari ketenangan batin, bukan hiruk-pikuk pencitraan dan serangan personal.

Bahasa menjadi medan krisis tersendiri. Artikel berjudul 'Metafora yang *Gegabah* dan *Sewiyah-Sewiyah*' (25 Agustus 2019) menegaskan bahwa pemimpin adalah "*titah yang kadunungan* akal budi". Ketika metafora merendahkan: "coro, kera, monyet, babi, anjing" digunakan untuk menyebut "saudara-setanah air: Papua", kekuasaan kehilangan kehalusan budi. Polarisasi "cebong dan kampret" diposisikan sebagai awal, tetapi krisis sejati lahir dari kegagalan menjaga etika tutur.

Relasi kosmis menjadi penanda krisis berikutnya. Dalam artikel berjudul 'Memahami Jagat Banjir' (5 Januari 2020) banjir tidak dimaknai netral, sebab ketika "banjir melanda, hujat-menghujat pun datang bergelombang" dan bencana "menjadi panggung politik". Wejangan "*aja dumeh* punya uang... lantas *kemaruk* membangun dengan mem-

babati alam" menunjukkan kepemimpinan yang memutus kesadaran bahwa manusia adalah "*jagad cilik, bawana alit*".

Krisis mencapai bentuk reflektif dalam artikel berjudul 'Wabah versus *Power* Budaya' (5 April 2020). Ketika "kekuatan dan dampak imajinasi lebih besar ketimbang realitas", kepemimpinan diuji pada kemampuan menenteramkan kecemasan kolektif. Namun, penguasa justru larut dalam kalkulasi kuasa. RSP mengajukan pemimpin "*wira, wegig, wiled*, dan *wicaksana*" sebagai antitesis terhadap dominasi nafsu "raja amarah", "raja *aluamah*", dan "raja *supiyah*".

Akhirnya, artikel dengan judul 'Harta atau Nyawa, *Mukti* atau Mati' (2 Agustus 2020) menutup rangkaian krisis sebagai artikulasi nilai etis antara progresivitas dan keluhuran *laku*. Progresivitas diakui, tetapi harus berakar pada *eling lan waspada* dan *wani ngalah luhur wekasane.* Ketika semboyan "*mukti* atau mati" berubah menjadi hasrat menang, kepemimpinan kehilangan kemuliaannya. Nilai *Hasta Brata* menyimpang, bukan karena ditolak, tetapi karena ditundukkan oleh ambisi.

Secara keseluruhan, RSP membangun krisis kepemimpinan sebagai kegagalan menjaga kendali batin dalam mengelola kuasa. Kekuasaan hadir, tetapi *laku* batin absen; simbol melimpah, tetapi 'nilai mengering'. Dalam perspektif *Hasta Brata,* krisis ini bukan soal siapa berkuasa, melainkan bagaimana kuasa dijalani.

Rubrik pada periode ini memiliki kategori tema 'filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* dengan tetap menempatkan ajaran *Hasta Brata* sebagai kerangka etis untuk memahami praktik kepemimpinan, bukan sekadar sebagai rujukan simbolik. Terdapat empat artikel yang menempatkan *Hasta Brata* sebagai filosofi *laku* kepemimpinan, bukan sekadar sistem simbol atau warisan konseptual. Kepemimpinan Jawa

dalam hal ini sebagai praktik etis yang menuntut keselarasan antara kekuasaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, kekuasaan bukan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk pengayoman.

Artikel dengan fondasi etis kepemimpinan *Hasta Brata* muncul dalam artikel berjudul 'Mengontrol *Gung Binathara'* (26 Juni 2011). RSP menegaskan dalam posisi *agung binathara* dan *mbaudhendha anyakrawati,* kekuasaan tetap harus dikendalikan. Prinsip "sabda brahmana-*raja sepisan tan kena wola-wali* dan *bawa laksana* menempatkan kata-kata pemimpin sebagai ikatan moral atas dirinya sendiri. Kepemimpinan *Hasta Brata* hanya bekerja ketika ada iktikad menjalankan *njaga tata tentreming kawula* melalui relasi *jumbuhing kawula-gusti*. Tanpa itu, kekuasaan kehilangan arah dan berjalan *padha nggugu karepe dhewe.*

Artikel dengan judul 'Mitos & Mazhab Kekuasaan Jawa' (5 Maret 2017) menegaskan posisi *Hasta Brata* sebagai mazhab kepemimpinan Jawa, bukan etika situasional. Kekuasaan dimaknai sebagai amanah dan takdir yang keberlangsungannya ditentukan kebijakan penguasa kepada *kawula alit*, bukan kecakapan teknis semata. Kehilangan *wahyu keprabon* sebagai konsekuensi etis, bukan kekalahan politik. Sindiran terhadap ritual tanpa *laku*- seperti ziarah ke Pringgondani- menegaskan bahwa *Hasta Brata* menolak simbol kosong yang tak ditopang perilaku luhur.

Penegasan paling konkret muncul dalam artikel berjudul 'Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan' (27 Agustus 2017). Sifat *mahambeg lakuning samudra* dan *ati kang nyamudra* menempatkan kritik sebagai ujian batin. Ketika penguasa "tak kuasa menahan kritik", lalu menem-

puh jalan "membunuh, menindas, menculik", RSP menunjukkan bahwa kegagalan kepemimpinan bukanlah kegagalan sistem, melainkan kegagalan pengendalian diri.

Secara keseluruhan, ketiga artikel ini membangun *Hasta Brata* sebagai filosofi kepemimpinan berbasis *laku.* Kepemimpinan terlihat dari kemampuan pemimpin menahan diri, menjalankan kekayaan secara etis, menepati sabda, dan menjaga hubungan adil dengan rakyat. Dalam perspektif RSP, kepemimpinan Jawa melemah ketika praktik nilai-nilai *Hasta Brata* sebagai pedoman etis dan pengendalian diri tidak diwujudkan dalam *laku* nyata, sehingga sekedar simbol atau retorika semata.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) periodisasi 2011–2020 mengonstruksi kaderisasi kepemimpinan sebagai proses sosial-kultural yang berlangsung melalui relasi, pembelajaran, dan pewarisan nilai. Kaderisasi kepemimpinan menekankan pentingnya proses persiapan calon-calon pemimpin secara berkelanjutan, beretika dan berbasis keteladanan. Dalam artikel berjudul *'Ayo Siapa Berani Memimpin?'* (1 April 2012) memaknai kepemimpinan sebagai proses sosial yang terbentuk melalui relasi timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin. Hal ini tampak dalam pernyataan bahwa "jangan pernah melihat kepemimpinan hanya dari yang memimpin... antara yang *paring* pengayoman dan *konjuk kabekten* mesti membangun relasi saling mengerti". Kepemimpinan dengan demikian bukan semata-mata sebagai atribut individual, melainkan sebagai hasil interaksi, proses pembelajaran, dan pengaruh situasional. Pandangan ini ditegaskan melalui penjelasan bahwa kepemimpinan melibatkan bagaimana

"pemimpin dan pengikut saling memengaruhi, juga bagaimana situasi bisa memengaruhi kemampuan dan tingkah laku keduanya".

Dalam perspektif budaya Jawa, artikel berjudul 'Ayo Siapa Berani Memimpin?' membangun kerangka kaderisasi kepemimpinan melalui internalisasi nilai kepekaan dan penentuan skala prioritas (*hambeg paramarta*). Artikel ini juga berisi *laku* memberi yang bersifat kontekstual, sebagaimana diungkapkan melalui metafora "*aweh payung marang wong kang kudanan... aweh banyu marang wong kasatan*". Kutipan-kutipan tersebut mengonstruksi kepemimpinan sebagai praktik etis yang dipelajari melalui keteladanan dan pengelolaan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan bahwa pemimpin "*tak* boleh mempunyai keberpihakan" serta harus mampu memberikan sanksi dan penghargaan secara proporsional menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam kepemimpinan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembentukan kepemimpinan sebagai mekanisme sosial yang terus direproduksi melalui praktik. Dengan demikian, artikel ini merepresentasikan kaderisasi kepemimpinan sebagai proses sosial-kultural yang dibangun, dipahami, dan diwariskan melalui pengalaman kepemimpinan yang konkret.

Selanjutnya, artikel berjudul *'Tak Mau Lengser Sampai Hilang'* (8 Juli 2012) mengonstruksi kaderisasi kepemimpinan sebagai proses sosial yang sangat bergantung pada relasi antargenerasi. Narasi diawali dengan gambaran bahwa "kaum muda tak mudah mendapat kepercayaan" dan kerap diposisikan sebagai pihak yang belum tepat waktu (*aja nggege mangsa*), sehingga peluang untuk belajar dan memimpin menjadi terbatas. Dalam konstruksi ini, kaderisasi bukan semata-mata sebagai persoalan kesiapan generasi muda, melainkan juga sebagai

persoalan keterbukaan generasi senior dalam berbagi pengetahuan dan peran. Hal tersebut ditegaskan melalui pertanyaan reflektif: "bagaimana pengaderan bisa berlangsung bila yang senior tak mau bertukar *kawruh,* apalagi *lengser*?"

Kepemimpinan Jawa dalam artikel dengan judul 'Tak Mau *Lengser* Sampai Hilang' direpresentasikan sebagai *laku* keteladanan aktif, bukan sekadar kewibawaan simbolik, selaras dengan prinsip *ing ngarsa sung tuladha*. Kesediaan untuk *lengser keprabon* dimaknai sebagai bagian penting dari proses pembelajaran sosial bagi calon pemimpin. Sebaliknya, ketidaksediaan untuk mundur dikonstruksikan melalui ungkapan *Krasa enak, diuntal sapiringe!* yang merepresentasikan keterikatan pada kenikmatan posisi dan ketenaran. Melalui narasi tersebut, artikel ini membangun pemahaman bahwa dengan *leren* dan memberi ruang bagi kaderisasi, makna kepemimpinan justru dapat direproduksi secara lebih berkelanjutan. Kaderisasi, dalam konstruksi ini, hadir sebagai praktik sosial-kultural yang dijaga melalui kesadaran waktu, keteladanan, dan kesediaan berbagi peran.

Rubrik ini mengonstruksi 'harapan terhadap pemimpin ideal' sebagai proses sosial-kultural yang dibentuk melalui pemaknaan simbolik, ingatan kolektif, dan konteks sosial yang melingkupinya. Artikel berjudul *'Ratu Adil dan Simbol Pemimpin'* (22 Juni 2014) mengonstruksi harapan tersebut melalui proses simbolisasi yang berakar pada memori kultural masyarakat. *Ratu Adil* diposisikan sebagai "simbol untuk menolong bangsa ini dari kegelapan menuju ke cahaya terang". Figur ini membangun pemahaman tentang pemimpin ideal sebagai sosok transformasional yang memberi arah, inspirasi, dan energi moral bagi kehidupan kolektif. Dalam konstruksi ini, kepemimpinan

tidak dimaknai semata-mata sebagai fungsi struktural, melainkan sebagai representasi nilai dan harapan bersama.

Artikel ini menunjukkan bahwa simbol '*Ratu Adil*' berfungsi sebagai kerangka rujukan kultural yang "terus berulang di tengah bangsa yang membutuhkan komando kepemimpinan". Pengulangan tersebut menandai bahwa harapan terhadap pemimpin ideal dibentuk dan dipelihara melalui proses simbolisasi yang berkelanjutan. Dalam konteks kekinian, makna '*Ratu Adil*' mengalami pergeseran ketika ia "tidak lagi sebagai penanda sejarah", melainkan "hadir sebagai pesan politik yang membawa makna dan tafsir yang beragam". Pergeseran ini mengindikasikan bahwa figur pemimpin ideal dikonstruksikan melalui adaptasi simbol budaya ke dalam praktik komunikasi yang kontekstual. Prinsipnya, artikel ini memperlihatkan bagaimana harapan terhadap pemimpin ideal dibangun dan dimaknai ulang melalui simbol '*Ratu Adil*' sesuai dengan kebutuhan sosial pada zamannya.

Sementara itu, artikel berjudul '*Yudistira & Kejujuran Kita*' (10 April 2016) mengonstruksi harapan terhadap pemimpin ideal melalui oposisi simbolik antara praktik politik kontemporer dan nilai kejujuran yang hidup dalam kesadaran budaya Jawa. Politik dimaknai sebagai ruang ketika "politik menjadi panggung sandiwara", sedangkan kejujuran digambarkan sebagai sesuatu yang "langka, bahkan ajaib". Rubrik ini mengonstruksi jarak antara realitas empirik politik dan imajinasi normatif tentang kepemimpinan. Sebagai konsekuensinya, kejujuran bukan sekadar sebagai sikap personal, melainkan sebagai nilai yang semakin terpinggirkan dalam *laku* kepemimpinan publik.

Dalam kerangka budaya Jawa, kejujuran dikonstruksikan sebagai kesatuan antara batin dan tutur, yang diekspresikan melalui konsep

blakasuta, cablaka, atau *blaka*, yakni "kesatuan hati dan ucapan". Artikel ini menempatkan nilai tersebut sebagai hasil pewarisan sosial yang "telah diajarkan sejak kecil" dan menjadi "nilai dasar konstruksi pendidikan serta pembentukan identitas". Harapan terhadap pemimpin ideal dibangun melalui memori kultural tentang kejujuran sebagai tolok ukur kualitas manusia dalam "kesadaran Jawa".

Figur Yudhistira kemudian berfungsi sebagai medium simbolik untuk mengonkretkan nilai tersebut. Narasi bahwa Yudhistira "selalu berkata jujur dan tidak pernah menipu" serta memiliki "darah putih" mengonstruksi pemimpin ideal sebagai personifikasi kemurnian moral. Melalui figur wayang ini, artikel tidak menilai praktik politik secara langsung, melainkan membentuk makna tentang kepemimpinan yang jujur sebagai nilai yang diharapkan, dikenali, dan direproduksi dalam imajinasi kultural masyarakat.

Sementara itu, kategori tema '*kemenangan beretika*' dikonstruksikan melalui pemaknaan kemenangan yang tidak berhenti pada capaian hasil, melainkan diletakkan dalam kerangka tanggung jawab moral. Artikel berjudul *'Mengalah dan Kemenangan Sejati'* (9 Juni 2013) membangun makna kemenangan dengan menempatkan aspek etis sebagai pusat pembahasan. Sejak awal, narasi ini membedakan kemenangan sebagai hasil (menguasai medan) dari kemenangan sebagai proses yang bernilai, dengan menegaskan bahwa "kemenangan bukan segalanya". Pernyataan ini berfungsi mengarahkan pembaca untuk memahami kemenangan tidak hanya sebagai pencapaian faktual, tetapi sebagai pengalaman yang sarat tuntutan moral.

Narasi tersebut mengonstruksi hubungan antara kemenangan dan amanah. Kalimat "dalam kemenangan ada amanah yang harus

dipegang teguh" memosisikan kemenangan sebagai kondisi yang menuntut tanggung jawab. Kemenangan dapat "berubah menjadi kekalahan" apabila *laku* etis tidak dijalankan. Kemenangan tidak dipahami sebagai titik akhir, melainkan sebagai tahap sosial yang menuntut pembuktian moral secara berkelanjutan.

Dalam konteks kepemimpinan itulah, pemenang diposisikan sebagai subjek yang justru diuji setelah 'duduk di singgasana', bukan semata-mata pada saat kompetisi berlangsung. Etika kemenangan dibangun melalui perbedaan antara pemenang yang hanya 'mengalahkan musuh' dan pemenang yang 'menjadi pemenang bagi semua'. Perbedaan ini membatasi makna kemenangan yang dianggap layak secara kultural, sekaligus menegaskan tuntutan tanggung jawab sosial dari posisi menang.

Rujukan nilai Jawa seperti *sekti tanpa aji, sugih tanpa bandha* serta pernyataan bahwa "*ngalah* sesungguhnyalah menghasilkan kemenangan lebih gemilang" berfungsi sebagai rujukan budaya untuk memperkuat makna tersebut. Melalui rujukan ini, pengendalian diri dan kejujuran dimaknai sebagai sumber kewibawaan kepemimpinan. Dengan cara ini, RSP tidak merayakan kemenangan sebagai pencapaian semata, melainkan mengajarkan cara memaknai kemenangan sebagai praktik etis yang sepatutnya dijaga dan diterapkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, RSP periodisasi 2011–2020 tetap mengonstruksi makna kepemimpinan dalam kerangka etika Jawa, terutama melalui nilai-nilai *Hasta Brata.* Dari 22 artikel yang dianalisis, tema krisis kepemimpinan menempati porsi paling dominan, yang menunjukkan kuatnya perhatian RSP terhadap problem etika, ketela-

danan, dan tanggung jawab pemimpin dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Di tengah dominasi kategori tema krisis kepemimpinan tersebut, RSP menghadirkan rujukan melalui filosofi kepemimpinan *Hasta Brata,* yang berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menyikapi perilaku pemimpin. Nilai-nilai ini tidak dihadirkan sebagai ajaran abstrak, melainkan sebagai pedoman *laku* dalam tautan dengan keadilan, pengendalian diri, dan kepekaan sosial.

Selain itu, isu kaderisasi kepemimpinan dan 'harapan terhadap pemimpin ideal' menunjukkan bahwa konteks kepemimpinan melalui RSP merupakan proses yang berkelanjutan. Kepemimpinan tidak ditempatkan semata pada figur yang berkuasa, tetapi pada mekanisme pewarisan nilai, keteladanan antargenerasi, serta mentradisikan prinsip kejujuran sebagai dasar kualitas moral pemimpin.

Tema kemenangan beretika melengkapi konstruksi dalam RSP dengan menempatkan keberhasilan politik sebagai peristiwa yang menuntut tanggung jawab moral. Secara keseluruhan, RSP periode 2011–2020 membangun pemahaman kepemimpinan sebagai praktik bernilai yang dikonstruksi dan dipahami melalui relasi sosial, *laku etis*, dan kesadaran budaya.

Dengan demikian, tematik RSP 2011-2020 tetap menunjukkan dominasi tema krisis kepemimpinan. Selain itu, terdapat tema-tema lain meliputi etika kemenangan (kemenangan beretika), figur pemimpin ideal (harapan terhadap pemimpin ideal), nilai kepemimpinan tradisional (filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*), dan keberlanjutan kepemimpinan.

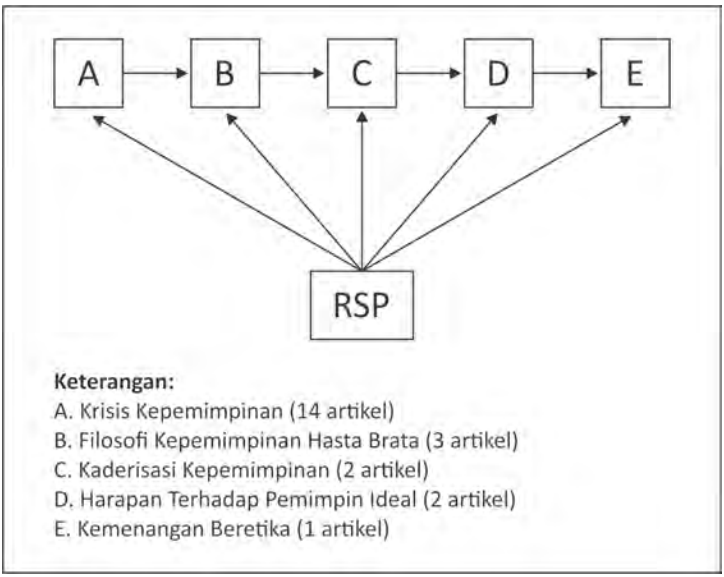
Tabel 4.3 Artikel RSP Periodisasi 2011-2020

No	Judul Artikel	Edisi	Penulis	Kode Awal	Kategori Tema
1	'Saat Orang Jawa Kehilangan Rai'	Minggu, 3 April 2011	Munawir Azis (Penulis eksternal)	Hilangnya Rasa Malu	Krisis Kepemimpinan
2	'Orientasi Politik Jawa Soeharto'	Minggu, 29 Mei 2012	Bandung Mawardi (Penulis eksternal)	Politik Kejawaan Soeharto	Krisis Kepemimpinan
3	'Mengontrol Gung Binathara'	Minggu, 26 Juni 2012	Sucipto Hadi Purnomo	*Gung Binathara*	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*
4	'Ayo Siapa Berani Memimpin?'	Minggu, 1 April 2012	Dhoni Zustiyantoro (Penulis eksternal, mantan wartawan Harian 'Suara Merdeka', sastrawan, dosen)	Pemimpin	Kaderisasi Kepemimpinan
5	'Tak Mau Lengser Sampai Hilang'	Minggu, 8 Juli 2012	Dhoni Zustiyantoro	*Lengser Keprabon*	Kaderisasi Kepemimpinan
6	'Mengalah dan Kemenangan Sejati'	Minggu, 9 Juni 2013	Dhoni Zustiyantoro	Etika Kemenangan	Kemenangan Beretika
7	'Tradisi dan Kampanye Politikus'	Minggu, 2 Maret 2014	Sendang Mulyana (Penulis eksternal, mantan wartawan Harian 'Suara Merdeka', sastrawan, dosen)	Tradisi Kampanye	Krisis Kepemimpinan
8	'Ratu Adil dan Simbol Pemimpin'	Minggu, 22 Juni 2014	Sendang Mulyana	'Ratu Adil'	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
9	'Yudistira dan Kejujuran Kita'	Minggu, 10 April 2016	Purnawan (Penulis eksternal)	Yudistira Simbol Kejujuran	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
10	'Reshuffle dan Jagat Wayang'	Minggu, 7 Agustus 2016	Heri Priyatmoko (Penulis eksternal)	Kepemimpinan	Krisis Kepemimpinan
11	'Mitos dan Mazhab Kekuasaan Jawa'	Minggu, 5 Maret 2017	Ari K (Penulis eksternal)	*Wahyu Keprabon*	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*
12	'Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan'	Minggu, 27 Agustus 2017	Danang Firmansyah (Penulis eksternal, mantan wartawan Harian 'Suara Merdeka', sastrawan)	Kekuasaan Tak Terkendali	Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata*

13	'Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan'	Minggu, 7 Oktober 2018	Sendang Mulyana	Rekayasa Kekuasaan	Krisis Kepemimpinan
14	'Membangun Markas Batin Jawa'	Minggu, 16 Desember 2018	Sendang Mulyana	'Markas Batin'	Krisis Kepemimpinan
15	'Kuasa, Bencana dan Budaya'	Minggu, 27 Januari 2019	Sendang Mulyana	Pemimpin *Gobal-Gabul*	Krisis Kepemimpinan
16	'Politik Umuk dan Kemaruk'	Minggu, 10 Februari 2019	Sendang Mulyana	Pemimpin *Kemaruk*	Krisis Kepemimpinan
17	'Gagal Memilih Ugul-Ugul'	Minggu, 24 Maret 2019	Sendang Mulyana	Berkerudung *Wawulang Macan*	Krisis Kepemimpinan
18	'Memburu Pulung Kekuasaan'	Minggu, 7 April 2019	Sendang Mulyana	*Pulung* Kekuasaan	Krisis Kepemimpinan
19	'Metafora yang Gegabah dan Sewiyah-Wiyah'	Minggu, 25 Agustus 2019	Sendang Mulyana	Metafora Hewan	Krisis Kepemimpinan
20	'Memahami Jagat Banjir'	Minggu, 5 Januari 2020	Sendang Mulyana	Banjir Melanda	Krisis Kepemimpinan
21	'Wabah Versus Power Budaya'	Minggu, 5 April 2020	Sendang Mulyana	Wabah Korona	Krisis Kepemimpinan
22	'Harta Atau Nyawa, Mukti Atau Mati'	Minggu, 2 Agustus 2020	Sendang Mulyana	Nyawa Terancam	Krisis Kepemimpinan

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4.3., RSP periodisasi 2011-2020 menunjukkan puluhan artikel ini memotret krisis moral dan etika kepemimpinan di ruang publik, termasuk praktik oportunis dan anti-kritik. Pada saat yang sama, rubrik ini tetap merawat imaji kepemimpinan aspiratif yang berakar pada nilai budaya dan etika kemenangan bermartabat. Berikut ini gambar tematik RSP periodisasi 2011-2020 seperti terlihat dalam Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Tematik RSP Periodisasi 2011 – 2020
Sumber: Penulis (2026)

Secara kontekstual, periode ini berlangsung dalam lanskap politik yang semakin kompleks mencakup fase akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga era kekuasaan Presiden Joko Widodo (2014-2024). Konsolidasi kekuasaan yang relatif stabil di satu sisi, justru diiringi oleh menguatnya polarisasi politik, praktik politik dinasti, serta kompetisi simbolik yang intens di ruang publik. Dalam konteks tersebut, kritik RSP mengonstruksikan krisis kepemimpinan sebagai persoalan yang semakin struktural dan meluas, menyentuh relasi kuasa, tata kelola institusi, serta buruknya dinamika komunikasi di era disrupsi digital.

Dalam konteks ini, metafora *Hasta Brata* dalam RSP menangkap perubahan ini dengan menunjukkan bahwa krisis nilai memasuki wilayah yang lebih struktural dan meluas. Pada periode ini, metafora

'matahari' dan 'bumi' kembali menjadi pusat refleksi atas merosotnya integritas publik dan tanggung jawab sosial di tengah kegaduhan informasi. 'Laut' semakin keruh oleh pragmatisme politik, sementara 'api' menyala berlebihan sebagai simbol ambisi kuasa dan konflik sosial. 'Angin' menandai menipisnya empati pemimpin, dan simbol kosmik 'langit', 'bulan', serta 'bintang' menegaskan hilangnya orientasi moral yang mendasar.

B. Memaknai Keseluruhan Rentang Waktu Periodisasi

Analisis tematik terhadap RSP periode 1996–2020 mengidentifikasi enam kategori tema utama yang membentuk tematik rubrik secara keseluruhan. Keenam tema tersebut adalah: (1) krisis kepemimpinan; (2) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*; (3) harapan terhadap pemimpin ideal; (4) kemenangan beretika; (5) kaderisasi kepemimpinan; (6) persepsi publik terhadap pemimpin. Dari keenam tema ini menunjukkan bahwa RSP menekankan kepemimpinan sebagai objek utama. Hanya saja, masing-masing tema muncul dengan frekuensi dan distribusi yang berbeda, tergantung periode dan konteks sosial-politik saat artikel ditulis.

Tema 'krisis kepemimpinan' menempati posisi paling dominan, muncul dalam 27 artikel dari total corpus yang dianalisis. Tema ini menandai kepedulian rubrik terhadap kondisi kepemimpinan dalam masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Setiap artikel yang menyinggung krisis kepemimpinan, menampilkan cara RSP menafsirkan situasi dan perilaku pemimpin melalui simbol, metafora, yang melekat pada nilai-nilai budaya Jawa. Rubrik membangun

kepemimpinan yang tidak hanya melihat aspek administrasi atau politik, tetapi juga memperhatikan konteks moral, tanggung jawab sosial, dan kualitas karakter pemimpin. Tema ini muncul secara konsisten di semua periodisasi Rubrik 'Sang Pamomong', menegaskan bahwa isu kepemimpinan menjadi titik fokus yang terus dijaga oleh pengasuh rubrik.

Hasil wawancara dengan informan TT (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' menjelaskan RSP secara berulang menempatkan isu kepemimpinan dalam bingkai persoalan sosial yang terus hadir di berbagai periode. Informan menjelaskan bahwa dinamika sosial-politik nasional kerap direspon melalui penggambaran nilai, simbol, dan *laku* kepemimpinan. Dengan cara ini, krisis kepemimpinan tampil sebagai tema yang mengemuka tanpa harus dinyatakan secara eksplisit atau diarahkan pada sosok maupun peristiwa tertentu secara terbuka.

Bersandingan dengan kategori tema 'krisis kepemimpinan', filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* tampil sebagai kategori tema yang menekankan landasan nilai dan etika dalam kepemimpinan. Delapan artikel mengartikulasikan bagaimana rubrik mengaitkan praktik kepemimpinan dengan prinsip-prinsip moral tradisi Jawa, seperti keteguhan, kesabaran, keadilan, dan keteladanan. Tema ini memperlihatkan bahwa RSP membentuk interpretasi kepemimpinan dengan mengacu pada standar nilai budaya *Hasta Brata* yang diwariskan turun-temurun.

Dalam tradisi budaya Jawa, ajaran *Hasta Brata* menempati posisi penting sebagai pedoman etis bagi seorang pemimpin. Ajaran ini merujuk pada delapan *laku* kepemimpinan yang bersumber dari sifat-sifat kosmis: bumi, matahari, bulan, api, angin, samudra, langit, dan

bintang (Bratawijaya, 1997). Setiap elemen memuat makna simbolik mengenai bagaimana seorang pemimpin ideal harus bersikap, bertindak, dan mengelola kekuasaan. Menurut Herusatoto (1987), simbolisme kosmos dalam budaya Jawa tidak pernah berdiri sendiri. Simbolisme ini berfungsi sebagai sistem nilai yang mengarahkan tindakan manusia dalam struktur sosial yang hierarkis namun tetap menjunjung harmoni.

Ajaran *Hasta Brata* menjadi sangat relevan dalam RSP. Rubrik ini menampilkan narasi budaya, *pitutur,* metafora, wayang, kisah kerajaan Jawa kuno, serta refleksi moral yang secara langsung maupun tidak langsung mengacu pada prinsip *Hasta Brata.* Para penulis-sebagian besar berasal dari kalangan sastrawan, budayawan, dan akademisi menggunakan prinsip leluhur tersebut sebagai perangkat konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik yang terjadi. Di sinilah RSP sebagai ruang artikulasi nilai kepemimpinan Jawa yang bekerja melalui bahasa simbolik.

Informan HB–Kordinator Liputan 'Suara Merdeka' (saat itu-1996) dan sebagai salah satu penggagas RSP sekaligus pengasuh RSP menjelaskan, nilai *Hasta Brata* melalui personifikasi delapan elemen alam antara lain 'bumi', 'matahari', 'langit', 'bintang', tercermin dalam cara pengasuh merancang dan mengelola RSP. Ia menegaskan bahwa kekuatan *pamomong* ada pada kemampuan mengingatkan dengan 'bahasa yang lembut namun berisi'.

> ''Rubrik ini (Rubrik 'Sang Pamomong'-red) bukan proyek redaksional semata, melainkan proyek kebudayaan- bentuk nyata dari peran media sebagai penjaga nurani publik dan pelestari jati diri Jawa di tengah modernitas. Rubrik 'Sang Pamomong' menerapkan jurnalisme sejati, yang bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi

menuntun nurani-menjadi *pamomong* bagi nalar dan budaya masyarakat." (Wawancara dengan HB, 2020).

Di sisi lain, Koentjaraningrat (1984) menjelaskan, budaya Jawa memiliki kecenderungan kuat dalam mengonstruksi kepemimpinan berbasis teladan (*ing ngarso sung tulodho*), kedekatan moral (*ing madyo mangun karso*), dan kemampuan mengayomi (*tut wuri handayani*). Ketiga prinsip tersebut selaras dengan struktur *Hasta Brata.* Dalam berbagai artikel RSP, nilai ini tidak diajarkan secara langsung sebagai dogma, tetapi hadir melalui narasi cerita, *pasemon*, atau refleksi terhadap peristiwa aktual.

Sebagaimana dikemukakan Magnis-Suseno (2001), masyarakat Jawa memberi perhatian pada dimensi moral seorang pemimpin. Kekuasaan yang tidak ditopang oleh *budi pekerti* dianggap tidak memiliki *kasekten* (wibawa batin). Ajaran *Hasta Brata* menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk memahami apakah seorang pemimpin selaras dengan etika kosmis tersebut. Para penulis RSP menggunakan sensibilitas budaya ini untuk menyorot fenomena seperti korupsi, ketidakadilan, keserakahan, konflik elite, hingga penyimpangan moral dalam arena politik lokal maupun nasional.

Lebih jauh, tradisi *Hasta Brata* bersinggungan dengan cara masyarakat Jawa memaknai kepemimpinan sebagai hubungan etis, bukan sekadar relasi kekuasaan. Dalam konteks itu, *Hasta Brata* menjadi pedoman moral tentang bagaimana seorang pemimpin membangun relasi komunikasi yang empatik, menjaga harga diri masyarakat, dan mengelola konflik dengan mempertimbangkan 'rasa'. Nilai ini muncul berulang kali dalam artikel RSP terutama ketika membahas dinamika kepemimpinan, polemik politik, atau kegaduhan yang terjadi di tingkat nasional.

Sementara itu, salah satu kekuatan RSP adalah kemampuannya menghidupkan ajaran *Hasta Brata* melalui penokohan pewayangan. Informan GBS (2020) yang juga penulis internal dan pengampu halaman RSP menjelaskan, tokoh Rama, Arjuna, Bima, Semar, dan para punakawan menjadi media naratif untuk menggambarkan *laku* moral seorang pemimpin. Mulyono (1982) menegaskan bahwa wayang bagi orang Jawa bukan sekadar hiburan, melainkan wahana pendidikan etis yang sarat nilai filosofis.

Di sinilah, para penulis RSP memanfaatkan hal ini: kasus-kasus kepemimpinan modern diartikulasikan melalui berbagai tokoh wayang. Cara ini diharapkan dapat memudahkan pembaca bisa memahami antara perilaku elite masa kini dan *laku* para ksatria dalam cerita klasik. Informan GBS (2020) menambahkan, RSP menghadirkan kritik sosial yang halus namun tajam, bersandar pada nilai yang telah hidup berabad-abad dalam budaya Jawa. Kritik sosial yang disampaikan dalam RSP tidak untuk penistaan ataupun pembunuhan karakter.

Sejalan dengan gagasan GBS, Geertz (1981) mengungkapkan. masyarakat Jawa memiliki kecenderungan untuk membaca realitas sosial melalui simbol dan makna batin. Hal ini menandakan penggunaan metafora *Hasta Brata* dalam RSP bukan sekadar upaya romantisasi budaya, melainkan cara efektif berkomunikasi dengan pembaca Jawa yang terbiasa menafsirkan pesan melalui metafora. Ini pula yang menjelaskan mengapa pembaca sepuh begitu mencintai rubrik tersebut: mereka menemukan kembali 'suara batin' budaya Jawa yang semakin jarang hadir dalam media modern. Hal ini seperti dituturkan informan K (2020) pelanggan 'Suara Merdeka' yang berlangganan koran ini sekitar 1970an dan rutin membaca RSP. Ia mengaku rindu berbagai kisah yang sarat mengandung nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa.

Selain menjadi kerangka kepemimpinan, *Hasta Brata* dalam RSP berfungsi sebagai sarana refleksi moral bagi pembaca. Berbagai informan dalam studi ini mengakui tulisan-tulisan RSP sering digunakan sebagai bahan renungan. Hal ini sejalan dengan gagasan Endraswara (2016) tentang budaya Jawa sebagai '*laku* spiritual yang mendorong manusia menuju keteduhan batin.' Ketika RSP mengartikulasikan nilai *Hasta Brata,* rubrik ini tidak hanya mengomentari fenomena sosial tetapi juga memberikan ruang kontemplatif bagi pembaca untuk introspeksi dan menata diri.

Itu sebabnya, simbolisasi *Hasta Brata* bekerja sebagai kerangka moral normatif, misalnya dalam menyikapi penyimpangan kekuasaan dengan menyuarakan kritik sosial yang tetap dikemas melalui koridor budaya. Temuan wawancara berdasarkan informasi dari informan GBS (2020) menunjukkan bahwa nilai *Hasta Brata* kerap dipakai untuk membandingkan kepemimpinan ideal dengan praktik politik yang berlangsung. Temuan ini paralel dengan studi Suyono (2022) yang mempertegas kepemimpinan *Hasta Brata* bersifat adaptif dan relevan secara historis maupun kontekstual. Sebelumnya, studi Selvarajah & Meyer (2017) membuktikan filosofi *Hasta Brata* dengan gaya kepemimpinan paternalistik berperan penting dalam membimbing dan menjaga. Temuan kedua penulis ini mempertegas kebijaksanaan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam bingkai *Hasta Brata* tetap relevan serta memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam manajemen modern yang dinamis.

Dengan kata lain, RSP mengadopsi ajaran *Hasta Brata* sebagai kerangka kultural dalam membangun pemaknaan kepemimpinan dan kehidupan publik. Melalui bingkai kepemimpinan *Hasta Brata*, RSP

mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak hanya merujuk dari efektivitas, tetapi juga dari kedalaman budi pekerti dan kebijaksanaan (Magnis-Suseno, 2001). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan yang menjelaskan bagaimana tradisi budaya Jawa memandang kepemimpinan sebagai kombinasi antara kebijaksanaan, etika, dan tanggung jawab sosial yang relevan bagi kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, tema ketiga adalah harapan terhadap pemimpin ideal, meski melalui sosok imajiner misalnya *Ratu Adil* maupun *Satriya Piningit* tercermin dalam tujuh artikel. Tema ini menampilkan konstruksi figur kepemimpinan yang dianggap ideal oleh rubrik, baik dalam hal karakter, perilaku, maupun kapasitas menghadapi tantangan sosial-politik. Dalam hal ini, RSP membangun interpretasi kolektif mengenai kualitas pemimpin yang diharapkan masyarakat, namun tetap bersifat umum dan normatif, sehingga tidak selalu mengacu pada satu figur tertentu. Tema harapan terhadap pemimpin ideal sebagai pelengkap dari tema krisis kepemimpinan dan filosofi *Hasta Brata.* Tema tersebut memberikan perspektif aspiratif terhadap kepemimpinan, menegaskan nilai-nilai etis yang harus hadir, dan menghadirkan orientasi moral bagi pembaca tanpa menyodorkan kritik langsung terhadap figur nyata.

Menyikapi sosok imajiner pemimpin ideal melalui simbolisasi *Ratu Adil Satriya Piningit*, maupun Sultan HB X, informan TT (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' menjelaskan bahwa figur tersebut muncul bukan sebagai rujukan personal. Sosok-sosok ini berfungsi sebagai simbol harapan kolektif terhadap hadirnya kepemimpinan yang adil, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dalam konteks perubahan sosial yang berkelanjutan.

Harapan tersebut mengemuka karena, menurut informan, praktik kepemimpinan yang berlangsung belum mampu memenuhi kewajiban serta janji-janji yang disampaikan kepada publik. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan kebutuhan akan figur pemimpin yang lebih berintegritas.

Menanggapi tema Sultan HB X sebagai bagian dari tematik 'harapan terhadap pemimpin ideal', informan TT (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' mengungkapkan RSP menghadirkan harapan terhadap figur Sultan HB X meskipun hanya muncul dalam satu artikel dari keseluruhan korpus yang dianalisis. Informan menjelaskan bahwa kemunculan tersebut bersifat kontekstual, sebagai respons atas dinamika sosial-politik nasional pada periode tertentu. Figur Sultan HB X tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral, melainkan sebagai representasi simbolik dari harapan akan kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan, etika, dan kepekaan sosial.

Empat kategori tema lainnya muncul dengan frekuensi yang lebih terbatas, namun tetap memberikan kontribusi pada tematik rubrik. Tema kemenangan beretika, muncul dalam empat artikel, menekankan praktik kepemimpinan dan politik yang berlandaskan etika dan adab. Dalam hal ini, rubrik menyorot bagaimana integritas dan perilaku moral pemimpin menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kepemimpinan. Tema ini hadir untuk menyeimbangkan pembahasan krisis dan idealitas, sehingga interpretasi kepemimpinan yang dibangun rubrik mencakup dimensi etis yang nyata dalam praktik sosial-politik.

Terkait tema 'kemenangan beretika', hasil wawancara dengan informan HB (2020) salah satu penggagas RSP sekaligus pengasuh RSP dan Kordinator Liputan 'Suara Merdeka' (1990-1999) mengung-

kapkan, RSP turut memberi perhatian pada makna kemenangan dalam konteks etika dan keluhuran *laku*. Informan menjelaskan bahwa dinamika sosial-politik nasional kerap direspons melalui penekanan pada cara memperoleh kemenangan, bukan semata hasil akhir. Dalam kerangka tersebut, kemenangan sebagai proses yang seharusnya dijalankan dengan adab, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

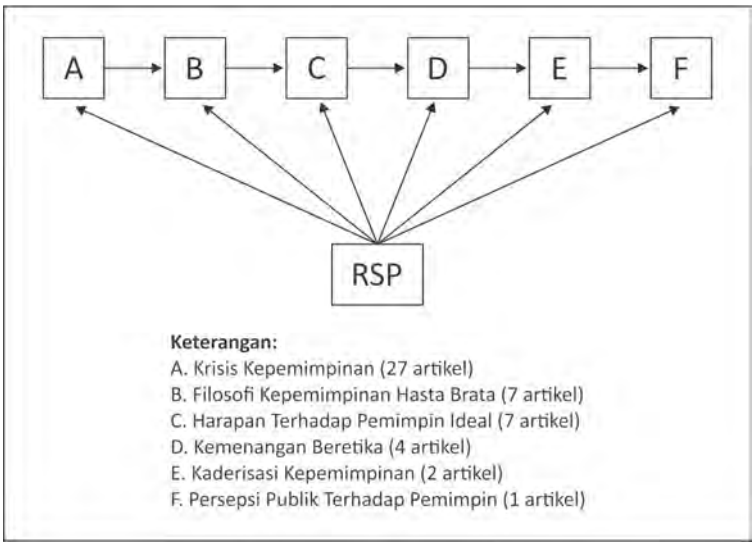
Sementara itu, tema kaderisasi kepemimpinan muncul dalam dua artikel, menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan kepemimpinan dan regenerasi figur pemimpin. Tema ini menyorot proses pembelajaran, pendampingan, dan transmisi nilai yang terjadi antara generasi pemimpin. Tema tersebut sekaligus memperlihatkan cara rubrik membangun pemahaman tentang pentingnya kesinambungan dan kapasitas kepemimpinan. Tema ini, meskipun muncul terbatas, menunjukkan bahwa RSP tidak hanya menyorot kepemimpinan yang berlangsung, tetapi juga bagaimana kepemimpinan dipersiapkan untuk masa depan, membangun konstruksi makna yang berkelanjutan.

Dalam konteks kaderisasi kepemimpinan, hasil wawancara dengan informan GP (2020) selaku Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' mengungkapkan bahwa RSP juga menaruh perhatian pada keberlanjutan kepemimpinan melalui proses kaderisasi. Informan ini menjelaskan bahwa dinamika sosial-politik nasional kerap disikapi dengan refleksi mengenai kesiapan generasi penerus, nilai yang diwariskan, serta proses pembelajaran kepemimpinan yang berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, kaderisasi untuk menjaga kesinambungan nilai dan etika kepemimpinan dalam kehidupan publik.

Tema terakhir, yaitu 'persepsi publik terhadap pemimpin', muncul secara kontekstual hanya satu artikel. Tema ini menunjukkan respons rubrik terhadap situasi dan figur tertentu yang memiliki relevansi sosial-budaya di periode tertentu. Tema kontekstual ini menambah dimensi periodik dalam tematik rubrik, sehingga meskipun tidak selalu hadir, tema-tema tersebut memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan dari perspektif nilai dan interpretasi lokal.

Secara terpisah, informan SA (2020) selaku Redaktur Pelaksana 'Suara Merdeka' menanggapi tema 'persepsi publik terhadap pemimpin' yang diulas dalam RSP. Ia mengungkapkan bahwa kemunculan tema tersebut bersifat kontekstual, merefleksikan cara pandang masyarakat terhadap praktik kepemimpinan pada situasi sosial-politik tertentu. Persepsi publik tersebut dihadirkan sebagai bagian dari refleksi sosial yang melengkapi pembahasan nilai dan etika kepemimpinan dalam rubrik. Temuan ini menegaskan bahwa variasi tema dalam RSP tidak hanya ditentukan oleh frekuensi kemunculan, tetapi juga oleh relevansi tematiknya dalam merespons konteks sosial yang berkembang.

Bertolak dari keseluruhan temuan tersebut, berikut ini disajikan gambar tematik RSP periode 1996-2020 yang menampilkan enam kategori tema sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.4.



Gambar 4.4: Tematik RSP Periode 1996 – 2020
Sumber: Penulis (2026)

Keenam kategori tema ini membentuk tematik yang menunjukkan fondasi inti dan periodik dalam RSP. Tiga tema inti yakni krisis kepemimpinan, filosofi *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal hadir di seluruh periodisasi Rubrik 'Sang Pamomong' (1996–1998, 2000–2010, 2011–2020), membentuk rangkaian tematik yang relatif stabil.

Di sisi lain, kehadiran tema inti sebagai basis RSP menghadirkan tema-tema tambahan secara terstruktur. Misalnya, kemenangan beretika, kaderisasi kepemimpinan, dan tema kontekstual lainnya muncul tidak sebagai topik utama, tetapi sebagai pengayaan yang melengkapi pembahasan.

Tematik rubrik menampilkan keseimbangan antara kontinuitas dan variasi. Kontinuitas terlihat pada tema inti yang hadir lintas periode, sedangkan variasi muncul dari tema-tema kontekstual yang

menyesuaikan dengan kondisi sosial-politik dan situasi kepemimpinan tertentu.

Melalui tematik ini, menunjukkan bagaimana RSP membangun konstruksi nilai kepemimpinan secara berlapis. Tema krisis kepemimpinan menekankan aspek kondisi dan tantangan yang dihadapi, filosofi *Hasta Brata* menekankan nilai dan norma yang menjadi acuan, dan harapan terhadap pemimpin ideal menghadirkan orientasi aspiratif. Tema tambahan menambah kedalaman dan nuansa pada pembahasan, memberikan perspektif yang lebih kaya tentang kepemimpinan dari sudut pandang budaya, etika, dan sosial.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa meskipun frekuensi munculnya tema berbeda-beda, keenam tema ini tidak berdiri sendiri. Setiap tema saling melengkapi dalam membentuk pemahaman kepemimpinan, baik sebagai isu, nilai, maupun aspirasi. Tematik rubrik merupakan konstruksi makna yang dibangun secara bertahap dan konsisten oleh pengasuh rubrik, sehingga setiap artikel hadir sebagai bagian dari jaringan tema yang saling terkait.

Dengan demikian, tematik RSP 1996-2020 memperlihatkan keseimbangan antara stabilitas tema inti dan fleksibilitas tema periodik. Tema inti menegaskan fokus rubrik pada kepemimpinan dan nilai budaya, sedangkan tema periodik menambah dimensi konteks yang lebih spesifik. Kondisi ini menunjukkan cara RSP membentuk interpretasi dan pemahaman tentang kepemimpinan, melalui penekanan nilai moral, etika, dan budaya Jawa, serta refleksi terhadap figur kepemimpinan ideal. Dalam konteks inilah, tematik RSP menampilkan proses konstruksi makna yang hangat, manusiawi, dan berakar pada pengalaman sosial serta nilai budaya yang relevan.

C. Diabaikannya Nilai *Hasta Brata* dalam Kepemimpinan Kontemporer

Berdasarkan data longitudinal periode 1996 hingga 2020, RSP menampilkan konstruksi kepemimpinan Indonesia melalui kerangka nilai budaya Jawa, khususnya filosofi *Hasta Brata.* Hasil konstruksi dari analisis tematik menunjukkan satu kesimpulan utama: krisis kepemimpinan yang diangkat rubrik ini merupakan krisis nilai yang berlangsung lintas dekade. Kritik yang dibangun RSP tidak berbentuk tudingan langsung atau konfrontasi terhadap figur tertentu atau peristiwa politik spesifik. Sebaliknya, rubrik menggunakan simbol, *pasemon*, metafora, dan bahasa budaya yang akrab bagi pembaca. Pendekatan ini menandai cara rubrik membangun konstruksi nilai kepemimpinan, sehingga budaya berfungsi sebagai media etis sekaligus 'ruang aman' untuk menyampaikan kegelisahan sosial. Dengan strategi ini, pembaca diajak untuk memahami dan mengevaluasi praktik kepemimpinan serta kondisi sosial-politik secara reflektif, tanpa menghadirkan tekanan atau kesan menyalahkan individu tertentu.

Terkait hal tersebut, fokus rubrik pada krisis nilai yang muncul dari praktik kepemimpinan dan kehidupan publik. Krisis ini menjadi 'benang merah' yang menjelaskan mengapa persoalan sosial, seperti penyalahgunaan kekuasaan, degradasi etika publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat, terus berulang dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini, RSP membangun pemahaman bahwa krisis nilai merupakan fenomena yang muncul dari pergeseran nilai yang lebih luas, yang memerlukan perhatian dari masyarakat.

Dalam konteks ini, krisis nilai yang dimaksud rubrik tidak dimaknai sebagai hilangnya nilai secara menyeluruh. Sebaliknya, krisis ini muncul sebagai *gap* antara nilai luhur yang diwariskan secara budaya dan praktik sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Informan TT (2020) mengakui, RSP kerap mengulas berbagai ketimpangan sosial yang melanda bangsa sebagai cerminan dari krisis nilai untuk dicarikan solusi atau jalan tengah agar tidak semakin menyusahkan rakyat. Kondisi ini pada akhirnya bermuara pada kepemimpinan bangsa itu sendiri.

Itu sebabnya dalam RSP, nilai kepemimpinan *Hasta Brata* tetap hadir sebagai referensi moral. Namun rubrik ini mengingatkan bahwa nilai tersebut tidak selalu terinternalisasi secara konsisten oleh pemimpin maupun masyarakat. Artinya, ada 'celah' antara prinsip etika dan praktik kepemimpinan aktual. *Gap* ini menjadi titik penting dalam konstruksi tematik rubrik, sehingga setiap artikel menekankan perlunya evaluasi terhadap praktik kepemimpinan dalam kerangka nilai budaya yang relevan.

Sejalan dengan hal tersebut, konstruksi nilai dalam RSP terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya sepanjang periodisasi Rubrik 'Sang Pamomong'. Rubrik menafsirkan krisis nilai sebagai hasil dari dinamika yang kompleks antara praktik kepemimpinan, struktur sosial, dan sikap publik. Dengan pendekatan ini, RSP membangun pemahaman bahwa nilai bukan hanya prinsip abstrak, tetapi bagian dari pengalaman sosial yang terus direfleksikan dan dimaknai melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Atas dasar itu, kritik yang muncul melalui rubrik menjadi sarana kolektif untuk menegaskan pentingnya nilai sebagai penunjuk arah atau 'kompas' dalam menyikapi perubahan sosial-politik. Rubrik ini sekaligus mengajak pembaca untuk menumbuhkan kesadaran etis terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin. Sebagai 'kompas moral', rubrik ini merujuk pada nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui metafora dari simbolisasi delapan elemen alam.

Terkait *Hasta Brata* sebagai rujukan kepemimpinan ideal ala Jawa dalam RSP, berikut penjelasan informan TT selaku Wakil Pemimpin Redaksi surat kabar 'Suara Merdeka' (2020-2023):

> "Melalui Rubrik 'Sang Pamomong', kami tergerak untuk menyikapi kondisi bangsa ini agar kembali pada nilai-nilai luhur budaya yang sudah teruji kehandalannya. Dalam budaya Jawa, di antaranya ada ajaran leluhur *Hasta Brata* yang menekankan pada kepemimpinan berbasis moral, sosial hingga spiritual sekalipun selain teknis administratif. Kepemimpinan *Hasta Brata* sejatinya bisa terwujud untuk membangun peradaban bangsa dan menyejahterakan rakyat seutuhnya." (Wawancara dengan TT, 2023)

Untuk memahami bagaimana konstruksi atas kritik etik tersebut dikonstruksikan secara simbolik dalam artikel, penting ditelusuri penggunaan metafora yang digunakan RSP lintas periode. Metafora *Hasta Brata* berfungsi sebagai perangkat kultural utama dalam mengartikulasikan nilai kepemimpinan sekaligus menandai krisis nilai yang dibahas. Oleh karena itu, adopsi metafora *Hasta Brata* dalam RSP lintas periode disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 4.4 Simbolisasi Metafora Hasta Brata dalam RSP 1996-2020

No	Periode	Metafora *Hasta Brata* (yang dilanggar)
1	1996-1998	'Matahari', 'Bumi', 'Laut', 'Api', dan 'Angin'
2	1999-2000	Tidak terbit
3	2000-2010	'Matahari', 'Bumi', 'Laut', 'Api', dan 'Angin'
4	2011-2020	'Matahari', 'Bumi', 'Laut', 'Api', 'Angin', 'Langit', 'Bulan', dan 'Bintang'

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4.4, metafora 'matahari', 'bumi', 'laut', 'api', dan 'angin' merupakan metafora yang paling banyak disorot pada setiap periode RSP. Bahkan, pada periode keempat, muncul pula metafora 'langit', 'bulan', dan 'bintang', selain 'matahari', 'bumi', 'laut', 'api', dan 'angin'.

Berikut gambar yang merupakan simbolisasi metafora *Hasta Brata* yang paling banyak diulas dalam RSP sepanjang periodisasi 1996-2020.



Gambar 4.5. Simbolisasi Metafora *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020
Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan gambar 4.5 konstruksi nilai *Hasta Brata* dalam RSP muncul melalui berbagai simbol dan metafora sebagai bagian dari budaya Jawa. Metafora 'matahari' paling banyak digunakan untuk menandai keteladanan atau kejelasan moral yang meredup dalam praktik kepemimpinan. 'Bumi' sering menjadi simbol tanggung jawab sosial dan keadilan, sedangkan 'laut' atau 'samudra' mewakili kejernihan batin, kesabaran, dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Elemen 'api' menunjukkan ketegasan, semangat, dan keberanian moral, sementara 'angin' melambangkan kemampuan pemimpin untuk menyebarkan nilai dan kebijaksanaan secara luas. Analisis tematik menunjukkan bahwa elemen-elemen ini sering tidak dijalankan dalam praktik kepemimpinan yang diulas oleh rubrik, sehingga menjadi pusat refleksi moral yang muncul berulang kali dari masa ke masa.

Setiap simbol, metafora mapun *pasemon* dipilih sebagai medium untuk membentuk interpretasi nilai dan pemahaman kepemimpinan. Misalnya, pembahasan terkait 'matahari' yang meredup tidak selalu merujuk pada satu tokoh tertentu, tetapi sebagai refleksi melemahnya keteladanan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa RSP membangun makna melalui pengulangan simbolik, sehingga pembaca dapat mengenali krisis nilai yang berulang dan mengaitkannya dengan praktik kepemimpinan di era berbeda.

Selain itu, rubrik menghadirkan dimensi aspiratif melalui penguatan nilai moral yang hilang. Dengan menegaskan *gap* antara nilai *Hasta Brata* dan praktik nyata, RSP mengajak pembaca untuk melihat kepemimpinan bukan hanya sebagai fenomena administratif. Rubrik ini sebagai wahana terhadap nilai dan prinsip etis diterapkan dalam praktik kepemimpinan dan kehidupan publik.

Konstruksi nilai yang demikian membuka ruang bagi rubrik untuk menampilkan harapan masyarakat terhadap pemimpin ideal, yang tercermin melalui artikel-artikel yang menekankan integritas, keteguhan moral, dan kapasitas pemimpin dalam membangun harmoni sosial. Meskipun kritik RSP tidak diarahkan langsung kepada figur tertentu, rubrik membangun pemahaman kolektif mengenai kualitas kepemimpinan yang diharapkan masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai budaya dalam praktik sosial. Konsistensi dalam menghadirkan tema aspiratif ini sekaligus menjadi dasar bagi tematik rubrik sepanjang periode 1996–2020, bahwa refleksi nilai moral dan aspirasi terhadap kepemimpinan ideal tetap menjadi fokus utama.

Secara keseluruhan, analisis lintas periode menunjukkan bahwa tematik RSP memperlihatkan kesinambungan refleksi dalam menyampaikan pesan moral maupun kritik sosial. Dari periode 1996–1998, rubrik memfokuskan ketidaksesuaian nilai selama masa Orde Baru. Pada periode 2000–2010, RSP memperluas refleksi terhadap krisis nilai dalam konteks transisi kepemimpinan dan reformasi, menunjukkan bagaimana *gap* antara nilai dan praktik berlanjut meskipun ada perubahan politik. Pada periode 2011–2020, RSP mengedepankan ketidaksesuaian nilai *Hasta Brata* dengan praktik kepemimpinan modern. Hal ini menunjukkan konsistensi rubrik dalam membangun pemahaman tentang kepemimpinan sebagai fenomena yang harus terus disikapi melalui nilai budaya dan moral.

Berpijak dari penjelasan tersebut, konstruksi RSP terhadap krisis nilai memperlihatkan cara rubrik menafsirkan praktik kepemimpinan dalam koridor nilai-nilai budaya dan aspirasi publik. Rubrik membentuk pemahaman bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal

kekuasaan atau hasil administratif. Lebih dari itu, RSP mengonstruksi bagaimana nilai moral dan budaya diterapkan dalam pengambilan keputusan, perlakuan terhadap masyarakat, dan konsistensi etis dalam setiap tindakan.

Menyikapi temuan studi ini, informan Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' menegaskan sebagai berikut:

> "Kami mengadaptasi nilai-nilai luhur kebudayaan Jawa termasuk prinsip Hasta Brata dalam menyikapi situasi sosial-politik yang terjadi. Hasilnya, tidak diungkapkan secara langsung dengan menunjuk tokoh tertentu atau peristiwa politik tertentu. Solusinya, kami kaitkan dengan konteks Hasta Brata sebagai simbolisasi diperkuat dengan metafora, kisah wayang, pitutur, pasemon dan semacam itu agar pembaca paham dan kecenderungannya pembaca paham apa yang tersirat di balik itu." (Wawancara dengan TT, 2023).

Dengan demikian, merujuk pada pernyataan informan TT, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* menempati posisi sebagai rujukan utama RSP dalam membangun konsep kepemimpinan ideal ala Jawa. Rujukan nilai tersebut kemudian dipetakan secara konseptual untuk memperlihatkan keterkaitan antara filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, harapan normatif terhadap pemimpin ideal, dan realitas praktik kepemimpinan yang berlangsung (Bratawijaya, 1997).

Namun demikian, hasil analisis tematik menunjukkan bahwa harapan normatif tersebut tidak berjalan seiring dengan praktik kepemimpinan kontemporer pada level pemerintahan. Sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, praktik kepemimpinan yang dibahas dalam RSP cenderung tidak menampilkan refleksi nilai-nilai *Hasta Brata* secara konsisten. Ketidaksesuaian antara nilai ideal dan realitas kepemimpinan ini muncul berulang dalam berbagai konteks

sosial-politik, sehingga membentuk tematik yang stabil sepanjang periode Rubrik 'Sang Pamomong' yang dikaji dalam studi ini.

Ketidaksinkronan tersebut bukanlah sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai persoalan nilai yang berkelanjutan dalam kehidupan publik. Dalam konstruksi RSP, krisis kepemimpinan hadir sebagai konsekuensi dari melemahnya penghayatan nilai-nilai budaya yang sebelumnya dijadikan pedoman moral. Dengan cara ini, rubrik tidak menyederhanakan kepemimpinan ke dalam kategori benar atau salah, tetapi memahaminya sebagai proses sosial yang terus berhadapan dengan tantangan etis dan perubahan zaman.

Melalui konstruksi tersebut, RSP menegaskan adanya jarak (*gap*) antara idealitas kepemimpinan dan praktik nyata, sekaligus menghadirkan ruang refleksi bagi pembaca lintas generasi. Refleksi ini tidak disampaikan secara konfrontatif, melainkan melalui simbol, metafora, dan *pasemon* yang akrab dalam tradisi budaya Jawa. Dengan demikian, RSP berfungsi sebagai medium yang merawat kesadaran nilai, mengajak pembaca menimbang kembali makna kepemimpinan, serta menempatkan *Hasta Brata* sebagai rujukan moral yang tetap relevan dalam dinamika kepemimpinan Indonesia.

BAB V

PRODUKSI DAN *HABITUS* AKTOR DALAM RUBRIK 'SANG PAMOMONG'

A. Produksi Rubrik 'Sang Pamomong'

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) pada surat kabar 'Suara Merdeka' periodisasi 1996–2020 meliputi empat periode yang diteliti yaitu: 1) periodisasi 1996-1998; 2) periodisasi 1999-februari 2000; 3) periodisasi maret 2000-2010; 4) periodisasi 2011-2020. Pengelompokkan periodisasi ini sesuai kebijakan redaksi dan dinamika sosial-politik nasional.

Pembagian periodisasi bertujuan untuk memahami produksi RSP dalam mengonstruksi nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dari masa ke masa. Periodisasi tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai *Hasta Brata* hadir dan berfungsi sebagai rujukan normatif dalam RSP pada setiap periode pembahasan. Periodisasi sebagai kerangka waktu analitis yang menyertai pembahasan produksi rubrik.

Untuk mengeksplorasi produksi RSP dalam empat periodisasi, studi ini menggunakan teori Pierre Bourdieu (1988, 1993) dengan tiga elemen kunci yakni *habitus*, modal, dan ranah.

1. Periode Awal (1996-1998)

Habitus Pengasuh Rubrik

Produksi Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) pada fase awal kemunculannya, yakni periode 1996–1998, tidak dapat dilepaskan dari peran sentral para pengasuh rubrik yang sekaligus berfungsi sebagai penulis utama. Pada periode ini, RSP dibentuk dan dijalankan oleh aktor-aktor yang memiliki latar belakang sebagai sastrawan, kolumnis, serta penggiat budaya Jawa.

Latar kultural dan intelektual tersebut membentuk suatu *habitus* yang khas, yakni seperangkat disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman pendidikan humaniora, keterlibatan dalam dunia kesusastraan, serta praktik kebudayaan Jawa yang telah lama dijalani. *Habitus* inilah yang kemudian menjadi landasan utama dalam proses produksi RSP pada fase awal.

Hasil wawancara dengan informan HB selaku salah satu penggagas RSP, pengasuh RSP, dan Kordinator Liputan 'Suara Merdeka' (pada 1996) dan informan TT selaku pengasuh RSP, keduanya berasal dari suku Jawa tepatnya Jawa Tengah. HB dan TT memiliki latar belakang sastra.

Dalam kerangka Bourdieu (1993), *habitus* sebagai struktur sosial yang terinternalisasi, yang membimbing cara aktor mempersepsi realitas, menilai situasi, serta bertindak dalam suatu lapangan sosial tertentu. *Habitus* tidak bekerja secara mekanis, melainkan sebagai kecenderungan yang lentur dan kontekstual (Willig, 2012; Schultz, 2007). Artinya, tindakan dan pilihan individu dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan struktur sosial yang melekat, namun tetap menyesuaikan diri dengan kondisi dan tekanan lingkungan yang berubah.

Dalam praktiknya, *habitus* membimbing individu untuk bertindak secara refleksif sambil tetap mempertahankan konsistensi dengan identitas dan norma yang diyakini, sehingga menghasilkan perilaku yang alami namun sarat makna sosial dan kultural.

Dalam konteks RSP, *habitus* pengasuh rubrik membentuk disposisi etik yang kuat, yang memengaruhi cara mereka menafsirkan fenomena sosial-politik pada masa akhir Orde Baru. Fenomena kekuasaan bukan dimaknai sebagai persoalan politik praktis, melainkan sebagai problem etika kepemimpinan yang berkaitan dengan nilai, keteladanan, dan tanggung jawab moral.

Disposisi etik tersebut tercermin secara konsisten dalam sensitivitas tematik rubrik. Artikel-artikel RSP pada periode 1996–1998 menunjukkan perhatian yang intens terhadap isu krisis kepemimpinan, merosotnya keteladanan moral elite, serta jarak antara nilai-nilai luhur budaya Jawa dan praktik kekuasaan yang dijalankan. Nilai kepemimpinan *Hasta Brata* digunakan sebagai kerangka rujukan utama untuk menyikapi realitas sosial-politik (Bratawijaya, 1997). Melalui metafora alam seperti 'matahari', 'bumi', 'air', 'api', dan 'samudra', RSP menyajikan refleksi tentang pemimpin ideal yang seharusnya mampu memberi penerangan, keadilan, keteguhan, dan kejernihan nurani.

Pada saat yang sama, rubrik juga menghadirkan figur simbolik seperti *Ratu Adil* dan *Satriya Piningit* sebagai ekspresi harapan kultural masyarakat Jawa terhadap hadirnya pemimpin yang mampu mengemban amanah moral. Figur-figur tersebut tidak dimunculkan sebagai narasi politis eksplisit, melainkan sebagai simbol kultural yang berfungsi memperluas ruang perenungan pembaca. Dengan cara ini,

RSP tidak hanya merepresentasikan kegelisahan sosial, tetapi juga memfasilitasi proses pemaknaan bersama mengenai kepemimpinan dan moralitas dalam konteks masyarakat Jawa.

Dalam konteks ini, *habitus* pengasuh rubrik membentuk gaya tutur jurnalistik yang khas. Kritik sosial dalam RSP tidak disampaikan melalui bahasa konfrontatif atau oposisi terbuka terhadap kekuasaan, melainkan melalui ajakan reflektif yang bersifat *ngemong, ngajari,* dan *ngelingake.*

Informan GP selaku Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' (2015-2022) menjelaskan visi redaksional dalam pemberitaan, termasuk dalam RSP dibingkai oleh kesadaran akan karakter masyarakat Jawa yang menghindari konfrontasi dan menjunjung harmoni. Penjelasan GP ini memperlihatkan *habitus* kultural Jawa dalam pengambilan kebijakan redaksional.

Itu sebabnya, pilihan gaya dalam RSP menunjukkan kesadaran kultural yang kuat terhadap konteks sosial-politik Orde Baru, saat ruang ekspresi sangat terbatas. Dalam situasi tersebut, pengasuh rubrik berperan sebagai penyaring tunggal yang menjaga agar kritik tetap berada dalam batas aman secara politis, namun tetap mengandung kedalaman makna etis dan kultural.

Peran ini menempatkan pengasuh rubrik yakni HB (pada 1996 sebagai Kordinator Liputan 'Suara Merdeka' dan Kordinator pengasuh RSP) dibantu TT (pada 1996 sebagai Reporter 'Suara Merdeka') sebagai aktor kunci dalam produksi awal RSP. HB dan TT saat awal RSP tidak hanya berfungsi sebagai penulis, tetapi juga sebagai penjaga orientasi moral dan identitas rubrik.

Fokus utama tulisan-tulisan pada periode awal adalah mengingatkan para pemimpin agar meneladani prinsip-prinsip kepemimpinan berbasis nilai moral Jawa, khususnya yang terkandung dalam filosofi *Hasta Brata*. Simbolisasi keadilan melalui elemen 'bumi', kejujuran melalui metafora 'air', serta keteguhan melalui metafora 'api', digunakan secara konsisten untuk menegaskan standar etis kepemimpinan yang diharapkan. Menurut informan HB, RSP mengingatkan orang Jawa agar tidak *lali Jawane* di segala aspek kehidupan dengan menerapkan nilai-nilai luhur dan etika yang didukung aspek spiritualitas sekalipun.

Orientasi normatif ini tidak muncul secara sporadis, melainkan dilembagakan sejak awal pendirian rubrik. Hal ini tampak jelas pada edisi perdana RSP yang terbit pada 21 November 1996 dalam format suplemen budaya. Edisi tersebut menampilkan wawancara khusus dengan Menteri Penerangan (saat itu), Harmoko, yang membahas kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai rujukan kepemimpinan ideal berbasis budaya Jawa. Tulisan utama (*headline*) tersebut berjudul 'Jangan Seperti Katak dalam Tempurung! disusun oleh Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka', BS, bersama dengan Koordinator Liputan, HB. Keduanya merupakan penggagas RSP yang memiliki latar belakang sebagai sastrawan dan pengamat budaya, sehingga secara langsung menanamkan orientasi kultural dan etis ke dalam mekanisme rubrik sejak awal.

Berdasarkan wawancara dengan informan HB, Kordinator Liputan (saat itu) sekaligus pengasuh RSP, bahwa laporan utama edisi perdana RSP (21 November 1996) secara khusus mengulas prinsip kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai pedoman etis dalam kehidupan bermasya-

rakat, berbangsa, dan bernegara. HB menegaskan bahwa tujuan rubrik sejak awal bukan hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan etika publik. Ia menambahkan bahwa strategi penyajian yang menggabungkan narasi langsung dan interpretasi moral dirancang untuk menghadirkan diskusi tentang kepemimpinan yang relevan dengan konteks sosial-politik pada masa Orde Baru, sekaligus membangun identitas rubrik sebagai ruang kesadaran kolektif bagi pembaca.

Kombinasi latar kultural dan pengalaman profesional pengasuh RSP memberikan karakter khas pada produksi RSP pada fase awal, yang membedakannya dari rubrik jurnalistik konvensional. RSP tampil sebagai ruang refleksi budaya yang memadukan praktik jurnalistik dengan sensibilitas sastra dan etika Jawa.

Komposisi aktor dan latar kultural tersebut menjadi kunci untuk memahami praktik jurnalistik RSP pada periode perdana. Analisis terhadap delapan artikel yang diteliti pada fase ini menunjukkan bahwa seluruh tulisan disusun langsung oleh pengasuh rubrik, tanpa melibatkan penulis eksternal. Peran ganda sebagai kolumnis, sastrawan, dan penggiat budaya sehingga pengasuh rubrik mengintegrasikan pengalaman personal, pengetahuan budaya, dan kepekaan sosial ke dalam narasi jurnalistik yang dihasilkan.

Habitus yang terinternalisasi ini membimbing cara pengasuh memilih isu, membingkai narasi, serta menyampaikan refleksi etis mengenai kepemimpinan dan moralitas masyarakat. Pilihan isu tidak semata didasarkan pada aktualitas peristiwa, melainkan pada relevansi nilai yang ingin disampaikan. Narasi tidak diarahkan untuk menyam-

paikan fakta secara langsung, tetapi untuk membuka ruang tafsir dan perenungan.

Informan HB (2020) menjelaskan, RSP (saat itu) tampil sekali seminggu dan terbit setiap Kamis sebagai suplemen. Awal terbit empat halaman yang berisi hasil reportase menyikapi isu yang hangat dalam sepekan terakhir dan diulas dalam perspektif budaya Jawa. Reportase tersebut dilakukan oleh TT yang kerap juga dibantu secara insidentil oleh beberapa wartawan 'Suara Merdeka' manakala menggarap beragam laporan kebudayaan. Dengan demikian, RSP pada periode awal lebih berfungsi sebagai wahana dialog moral daripada sebagai medium informasi politik. Selain *headline,* RSP pada fase awal juga diisi beragam tulisan lainnya yang paralel dengan budaya Jawa. Rubrik ini dilengkapi kolom Horoskop, kolom konsultasi spiritual Jawa dengan nama Konsultasi *Kawruh* Jawa.

Pengaruh *habitus* tersebut termanifestasi secara konkret dalam pilihan kerangka simbolik dan rujukan nilai yang digunakan. Filosofi *Hasta Brata* berfungsi sebagai "kompas moral" utama yang mengarahkan pemahaman terhadap realitas sosial. Simbol-simbol budaya Jawa seperti *memayu hayuning bawana*, *adigang*, *adigung*, *adiguna*, serta prinsip *menang tan ngasorake* digunakan untuk menegaskan pesan kepemimpinan ideal sekaligus menyampaikan kritik sosial secara halus. Penggunaan simbol-simbol ini dalam RSP bertujuan menjangkau pembaca pada tingkat kultural yang lebih dalam, tanpa harus menyatakan kritik secara eksplisit.

Dalam konteks jurnalistik, konsep *habitus* sebagai pola pikir, persepsi, disposisi yang terbentuk dari pengalaman profesional wartawan dalam dunia media (Schultz, 2007). *Habitus* membimbing cara jurnalis

memaknai peristiwa, menentukan kelayakan konten, serta menafsirkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Pada RSP, *habitus* pengasuh rubrik tidak hanya dibentuk oleh pengalaman jurnalistik, tetapi juga oleh pengalaman kultural dan kesusastraan, sehingga menghasilkan praktik jurnalistik yang berkarakter reflektif dan simbolik. Termasuk dalam menyuarakan berbagai pesan moral maupun kritik sosial menyikapi kondisi dinamika bangsa yang berlangsung saat itu.

Hal ini seperti diungkapkan informan Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' TT yang pada 1996 sebagai penulis utama dan pengasuh RSP. Menurutnya, *pasemon* dan simbolisme Jawa digunakan untuk menyampaikan kritik politik secara elegan dan aman di tengah tekanan kekuasaan. Dengan demikian, kritik ini sebagai pijakan kritik sosial agar diterima pembaca tanpa menimbulkan kegaduhan atau resistensi terbuka. Dalam relasinya dengan kekuasaan yang dikritik, RSP memilih jalur koreksi moral yang bersifat implisit, menghindari konfrontasi langsung, namun tetap menjaga keberanian etis dalam menyuarakan kegelisahan sosial.

Dalam konteks inilah, produksi rubrik pada periode ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal, internalisasi *habitus* Jawa, serta penguasaan modal simbolik menjadi penentu utama. Untuk menempatkan peran *habitus* dalam relasi antara agen dan struktur media, analisis ini menggunakan kerangka lima level hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese (1996, 2014). Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana disposisi individu pengasuh rubrik berinteraksi dengan batasan struktural produksi konten.

Pada level individu dan rutinitas media, pengasuh rubrik memiliki keleluasaan dalam menentukan jadwal terbit, format tulisan, pemilihan isu, serta pembingkaian kritik melalui metafora budaya. Informan HB selaku Kordinator Pengasuh RSP menjelaskan, pada fase awal ia menerapkan rapat rutin mingguan untuk memberikan penugasan kepada TT maupun secara insidentil kepada wartawan 'Suara Merdeka' lainnya untuk menggarap liputan dengan beragam isu yang menonjol, menarik, dan hangat dalam sepekan terakhir yang diulas dengan perspektif budaya Jawa.

Pada level organisasi, praktik produksi RSP tetap berada dalam pengawasan redaksi 'Suara Merdeka', yang menjaga keselarasan rubrik dengan identitas media sebagai surat kabar lokal yang mengedepankan nilai-nilai kultural. Tekanan politik Orde Baru membentuk narasi simbolik pada level ekstra-media.

Pada level ideologi, RSP menegaskan nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan filosofi *Hasta Brata* sebagai fondasi etis yang menjiwai keseluruhan praktik jurnalistiknya. Penegasan tersebut tidak hadir dalam bentuk pernyataan normatif yang eksplisit, melainkan bekerja secara laten melalui penyajian yang relatif konsisten. Rutinitas penulisan, pemilihan isu, serta penekanan pada aspek-aspek moral dan kultural tertentu menjadi mekanisme utama bagi rubrik ini dalam membentuk cara pandang khalayak terhadap peristiwa, aktor sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari (Pawito, 2014). Dalam kerangka ini, rubrik jurnalistik tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan proses konstruksi sosial secara berkelanjutan (Boughen, 2023). Proses ini menegaskan bahwa setiap narasi media membentuk

perspektif pembaca, sekaligus memengaruhi cara mereka memahami kehidupan sosial sehari-hari.

Proses kontruksi tersebut sebagai manifestasi dari implementasi idelogi media sebagai nilai yang diartikulasikan secara halus melalui narasi dan simbol budaya. Kondisi dimaksud selaras dengan kebijakan manajemen 'Suara Merdeka' yang dirintis oleh Hetami, di mana sejak awal media lokal ini mengadopsi filosofi manajemen berbasis budaya Jawa (Machmud, 2010).

Dengan demikian, interaksi antara *habitus* pengasuh dan struktur media dalam bingkai hierarki pengaruh isi media menunjukkan bahwa RSP mengadaptasi nilai-nilai etis dan kultural dalam situasi politik yang represif. Mobilisasi modal kultural diakui informan TT (2010) berupa penguasaan literatur Jawa dan filosofi *Hasta Brata*, menjadi sarana utama dalam produksi makna dan pembentukan identitas rubrik. Modal sosial melalui jejaring komunitas budaya dan kolumnis, serta modal simbolik berupa legitimasi sebagai ruang refleksi publik (Krisdinanto, 2018), turut memperkuat posisi RSP dalam ranah jurnalistik budaya.

Temuan ini menegaskan bahwa produksi jurnalistik RSP pada periode 1996–1998 tidak semata-mata merupakan aktivitas penyampaian informasi, melainkan praktik distribusi simbol dan kontinuitas budaya. Sebagaimana dikemukakan Lindell et al. (2019) bahwa praktik jurnalistik berfungsi sebagai arena produksi makna yang berakar pada nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat. RSP tampil sebagai medium yang menjembatani etika kepemimpinan Jawa dengan realitas sosial-politik zamannya, melalui praktik jurnalistik yang berakar pada *habitus* pengasuh rubrik.

Modal Simbolik dan Modal Kultural dalam Produksi RSP

Produksi RSP periodisasi 1996–1998 ditentukan oleh konfigurasi modal yang dimiliki para aktor pengelolanya. Dalam kerangka Bourdieu, praktik sosial termasuk praktik jurnalistik tidak hanya dibentuk oleh disposisi internal *(habitus)*, tetapi juga oleh akumulasi dan mobilisasi berbagai bentuk modal yang dimiliki aktor dalam suatu ranah (Bourdieu, 1998; Schultz, 2007; Örnebring et al., 2018).

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pengasuh RSP berpijak pada modal simbolik dan modal kultural yang relatif kuat, yang berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus sebagai sarana strategis dalam menyampaikan refleksi etis dan kritik sosial.

Modal simbolik pengasuh RSP terutama bersumber dari reputasi mereka sebagai sastrawan, kolumnis, dan pengamat budaya Jawa. Reputasi ini tidak sekadar menunjukkan kemampuan teknis menulis, tetapi juga mencerminkan pengakuan sosial atas integritas moral, kepekaan kultural, dan kedalaman refleksi yang mereka miliki (Munnik, 2018). Dalam ranah jurnalistik, modal simbolik semacam ini memberikan otoritas moral kepada aktor untuk berbicara tentang nilai, etika, dan kepemimpinan, tanpa harus mendasarkan argumennya pada posisi struktural formal semata (Schultz, 2007). Pengakuan simbolik tersebut membuat pengasuh RSP dipersepsi sebagai figur yang 'layak didengar' ketika membicarakan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, seperti *ambeg adil paramarta*, *wicaksana*, dan *tepa selira*. Nilai-nilai tersebut tidak disajikan sebagai doktrin normatif yang menggurui (Dlamini, 2023). Nilai lokal dalam RSP sebagai hasil perenungan kultural yang lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan dunia sastra dan budaya Jawa.

Dalam kerangka ini, nilai sebagai tolok ukur mengenai baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Sistem nilai yang telah mengakar cenderung relatif menetap karena berfungsi sebagai orientasi hidup dan perilaku masyarakat (Djajasudarma dkk., 1997 dalam Sartini, 2009). Meski demikian, nilai tidak bersifat statis, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui proses sosial-historis, praktik budaya, serta interaksi antargenerasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Otoritas moral pengasuh rubrik bekerja secara persuasif dan reflektif, sehingga pembaca dapat menerima pesan tanpa merasa sedang diarahkan atau dihakimi. Otoritas semacam ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan bertumpu pada modal simbolik yang dibangun melalui konsistensi sikap, gaya penulisan, dan kredibilitas kultural pengasuh rubrik.

Modal simbolik tersebut menjadi semakin efektif karena diperkuat modal kultural yang dimiliki pengasuh rubrik. HB dan TT, yang berasal dari latar budaya Jawa dan memiliki pengalaman panjang dalam dunia sastra Jawa, menguasai literatur budaya, tradisi pewayangan, serta filsafat Jawa. Modal kultural ini juga mencakup kepekaan estetis dan keterampilan penguasaan bahasa dan gaya bahasa (karya sastra) yang terasah melalui praktik kesusastraan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam praktik jurnalistik RSP. Tulisan-tulisan yang dihasilkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki kualitas estetik-naratif, sehingga pesan etis dapat disampaikan secara lembut dalam format *soft news*.

Penguasaan modal kultural ini memfasilitasi penggunaan *pasemon* sebagai strategi komunikasi utama dalam RSP. *Pasemon* berfungsi sebagai medium simbolik sehingga kritik sosial disampaikan secara tidak langsung, namun melalui metafora, perumpamaan, dan rujukan

budaya. Strategi ini memiliki relevansi kontekstual yang kuat, mengingat periode 1996–1998 merupakan masa akhir Orde Baru, di mana ruang kritik terbuka terhadap kekuasaan masih sangat terbatas. Dalam situasi tersebut, *pasemon* menjadi jembatan antara keberanian moral dan kehati-hatian politik. Menurut informan TT selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' dalam wawancara pada 2020 menjelaskan, pihaknya pada awal RSP mengadaptasi nilai-nilai budaya Jawa sebagai pedoman moral dan spiritual dalam proses menulis dan membingkai kritik sosial.

Melalui kombinasi modal simbolik dan modal kultural, pengasuh RSP menyampaikan refleksi mengenai kepemimpinan dan moralitas tanpa memicu konflik ataupun konfrontasi terbuka. Kritik sosial tidak diarahkan pada figur atau institusi tertentu secara eksplisit, melainkan pada praktik dan nilai yang dianggap menyimpang dari prinsip kepemimpinan ideal. Dengan cara ini, RSP mempertahankan posisinya sebagai ruang refleksi budaya yang relatif aman secara politis, sekaligus tetap bermakna secara sosial.

Berikut penjelasan informan TT:

> "Kritik terhadap penyimpangan sosial dan kekuasaan disampaikan lewat keindahan bahasa dan perenungan batin, bukan konfrontasi." (Wawancara awal dengan TT, 2020).

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa aktor dalam ranah jurnalistik senantiasa beroperasi melalui akumulasi berbagai bentuk modal. Örnebring et al. (2018) menegaskan bahwa praktik jurnalistik tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi atau tekanan eksternal, tetapi juga oleh modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang dimiliki aktor media. Dalam konteks RSP, modal kultural berupa penge-

tahuan budaya dan literasi sastra berpadu dengan modal simbolik berupa reputasi dan legitimasi moral, sehingga membentuk basis yang kokoh bagi praktik jurnalistik yang berorientasi pada refleksi etis.

Selain modal simbolik dan kultural, modal sosial berperan penting dalam produksi RSP, meskipun tidak selalu tampak secara eksplisit dalam teks. Jejaring pengasuh rubrik dengan komunitas sastrawan, budayawan, dan tokoh-tokoh budaya Jawa memperluas jangkauan referensi serta memperkaya perspektif yang digunakan dalam tulisan. Modal sosial ini sebagai sarana pertukaran gagasan, rujukan nilai, dan sensitivitas kultural yang kemudian terartikulasikan dalam rubrik. Produksi RSP bukanlah sebagai kerja individual semata, melainkan sebagai hasil interaksi dalam jejaring kultural yang lebih luas.

Konfigurasi modal tersebut berfungsi sebagai fondasi penting bagi praktik jurnalistik RSP yang berorientasi pada keberlanjutan nilai budaya. Rubrik ini tidak sekadar merespons peristiwa aktual, tetapi secara konsisten membangun narasi tentang kepemimpinan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka budaya Jawa. Praktik ini sesuai hasil studi Boughen (2023) menunjukkan bahwa modal kultural dan simbolik tidak hanya digunakan untuk memperoleh posisi dalam ranah jurnalistik, tetapi juga untuk menjaga kontinuitas nilai dan tradisi dalam ruang publik.

Dalam perspektif konstruktivis, praktik produksi RSP terkait konstruksi nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai proses interaksi antara pengasuh rubrik dan pembaca. Modal simbolik pengasuh rubrik bertujuan membangun relasi kepercayaan, sementara modal kultural menyediakan bahasa simbolik yang dapat dipahami dan dimaknai bersama. Pembaca tidak diposisikan sebagai objek pasif, melainkan

sebagai subjek yang diajak untuk merenungkan dan menafsirkan nilai-nilai yang disajikan. Ini artinya, makna kepemimpinan dan etika yang dihadirkan dalam RSP merupakan hasil konstruksi sosial yang terus dinegosiasikan.

Penggunaan *pasemon* dan simbol budaya juga berfungsi sebagai mekanisme kultural. Nilai-nilai Jawa yang diartikulasikan dalam rubrik tidak disajikan secara eksklusif untuk kalangan tertentu, melainkan dibingkai dalam bahasa yang relatif 'cair' dan komunikatif. Cara ini memudahkan RSP menjangkau pembaca lintas latar belakang sosial, sekaligus mempertahankan kedalaman kulturalnya. Dalam konteks ini, modal kultural tidak berfungsi sebagai alat dominasi simbolik, tetapi sebagai sarana mediasi makna.

Praktik ini memperlihatkan bagaimana modal simbolik dan kultural bekerja secara simultan dalam produksi jurnalistik. Modal simbolik memberikan legitimasi terkait nilai, sementara modal kultural menyediakan perangkat simbolik untuk menyampaikan pesan tersebut secara efektif (Dlamini, 2023). Kombinasi keduanya ini penting bagi RSP untuk menjalankan fungsi reflektifnya dalam ruang publik, tanpa harus terjebak dalam kisruh politik.

Konfigurasi modal ini memengaruhi posisi RSP dalam ranah jurnalistik budaya. Rubrik ini memperoleh legitimasi sebagai ruang refleksi yang kredibel dan berwibawa, meskipun tidak menempati posisi dominan dalam struktur organisasi media. Legitimasi tersebut tidak semata-mata bersumber dari kebijakan redaksi, tetapi dari pengakuan simbolik yang dibangun melalui konsistensi nilai, kualitas tulisan, dan kepekaan kultural. Posisi RSP dalam ranah jurnalistik dibentuk oleh akumulasi modal yang bersifat non-material.

Temuan ini menegaskan bahwa produksi jurnalistik pada RSP merupakan praktik kultural yang melibatkan distribusi simbol, negosiasi makna, dan pengembangan nilai-nilai etis dalam ruang publik. Modal simbolik dan kultural menjadi sumber daya utama sehingga praktik tersebut berlangsung secara berkelanjutan, terutama dalam konteks politik yang membatasi ekspresi langsung.

Dalam kerangka analisis kualitatif, temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap praktik jurnalistik RSP menuntut perhatian pada pengalaman subjektif aktor, latar kultural, serta sumber daya simbolik yang dimiliki. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang bersifat kontekstual dan dinamis (Hamad, 2004). RSP, sebagai produk interaksi antara aktor, nilai budaya, dan struktur sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian, modal simbolik dan modal kultural tidak hanya berfungsi sebagai atribut personal pengasuh rubrik, tetapi sebagai elemen kunci dalam proses produksi jurnalistik melalui RSP. Kedua modal ini secara signifikan menjadikan RSP berperan sebagai wahana refleksi etika kepemimpinan berbasis budaya Jawa, sekaligus menjaga relevansinya dalam ruang publik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik jurnalistik budaya, seperti yang dijalankan RSP, merupakan bentuk kerja kultural yang sarat makna, sehingga nilai, simbol, dan pengalaman aktor berkelindan dalam proses konstruksi realitas sosial.

Ranah Jurnalistik dan Konteks Produksi

Produksi RSP pada periode awal kemunculannya berlangsung dalam lanskap jurnalistik yang berada di bawah pengawasan ketat pemerintahan Orde Baru. Menjelang akhir masa kekuasaan Presiden Soeharto, iklim pers nasional ditandai oleh meningkatnya kontrol negara terhadap media, baik melalui regulasi formal maupun mekanisme informal yang berdampak langsung pada praktik redaksional. Sejumlah studi mencatat bahwa pada fase ini media berada dalam kondisi rawan terhadap penyensoran, teguran administratif, hingga pembreidelan, terutama jika memuat kritik yang dianggap melampaui batas toleransi politik (Imron et al., 2016; Suwirta, 2018).

Situasi tersebut membentuk kerangka struktural yang secara langsung memengaruhi cara media memproduksi konten. Kritik sosial-politik yang bersifat lugas dan frontal semakin jarang dijumpai, digantikan oleh gaya penyampaian yang lebih normatif, reflektif, dan 'berhati-hati'. Media tidak sepenuhnya berhenti membicarakan persoalan moral dan kepemimpinan, tetapi menata ulang cara pengungkapannya agar tetap selaras dengan batasan yang berlaku (Wijayanto, 2019). Dalam konteks inilah RSP menemukan posisinya sebagai rubrik budaya yang bergerak di wilayah refleksi etis, bukan laporan politik langsung.

Pengasuh RSP seperti dituturkan informan TT (2020, 2023, 2024) menjelaskan saat awal rubrik ini hadir ke tengah pembacanya, pengasuh rubrik sangat menyadari kondisi sosial politik yang tidak kondusif dan berdampak buruk bagi kelangsungan bangsa. Namun untuk secara frontal melontarkan kritik terhadap penguasa, sangat beresiko karena berpotensi disensor bahkan dibredel. Sebagai solusi-

nya, pengasuh rubrik mengambil jalan tengah yaitu menyuarakan kegelisahan publik yang disalurkan dalam bingkai budaya Jawa.

TT (2020) mengakui pihaknya secara sadar menempatkan rubrik ini sebagai ruang artikulasi kultural yang memanfaatkan simbol, metafora, serta gaya sastra Jawa untuk menyampaikan pesan moral. Strategi ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan berangkat dari pengalaman historis para pengasuh rubrik yang telah lama bergelut dalam dunia jurnalistik dan kesusastraan pada masa Orde Baru. Pengalaman tersebut membentuk sensitivitas terhadap batas-batas yang harus dijaga, sekaligus kepekaan dalam memilih bentuk ekspresi yang tetap bermakna bagi pembaca.

Dalam praktiknya, lanjut TT, RSP mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai rujukan etis utama. Meski juga ada ajaran leluhur dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan *Tut Wuri Handayani*.

Secara khusus menurut informan TT, nilai-nilai filosofis *Hasta Brata* dihadirkan melalui simbolisasi delapan elemen alam dan narasi budaya yang akrab bagi masyarakat Jawa. Melalui cara ini, refleksi tentang kepemimpinan, tanggung jawab moral, dan keprihatinan sosial disampaikan tanpa harus merujuk pada peristiwa politik tertentu secara eksplisit. Rubrik ini menjadi arena alternatif yang menawarkan narasi etis di tengah kondisi struktural yang membatasi ekspresi langsung.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan logika kerja ranah jurnalistik sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Bourdieu (1993). Ranah jurnalistik sebagai ruang sosial yang memiliki aturan main, hierarki nilai, serta mekanisme evaluasi tersendiri (Benson, 2004;

Benson & Neveu, 2010). Wartawan, redaktur, dan institusi media beroperasi dalam batasan tersebut, sambil terus menyesuaikan praktiknya dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang. Praktik jurnalistik, dalam pengertian ini, merupakan hasil interaksi antara struktur institusional media dan pengalaman historis aktor yang terinternalisasi dalam *habitus* mereka (Willig, 2012).

Dalam konteks RSP, struktur ranah jurnalistik Orde Baru mendorong pengasuh rubrik untuk mengoptimalkan sumber daya kultural yang mereka miliki. Pilihan untuk bergerak melalui jalur budaya bukan hanya persoalan preferensi estetis, tetapi juga bagian dari strategi profesional untuk menjaga keberlangsungan rubrik dalam situasi yang tidak kondusif bagi kritik terbuka. Rubrik budaya menyediakan ruang yang relatif lebih lentur, karena fokusnya pada nilai, tradisi, dan refleksi kehidupan sosial, bukan pada dinamika politik praktis.

Kondisi ini membentuk produksi konten RSP yang khas. Artikel-artikel yang terbit pada periode 1996–1998 memperlihatkan konsistensi dalam penggunaan bahasa simbolik dan rujukan budaya Jawa. Kritik terhadap krisis moral kepemimpinan tidak disampaikan melalui tudingan langsung, melainkan melalui penggambaran figur pemimpin ideal, perenungan atas *laku* etis, serta penegasan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Dengan cara ini, RSP tetap relevan dengan situasi sosial yang dihadapi masyarakat, tanpa melanggar batasan yang ditetapkan oleh konteks politik saat itu. Hal ini sesuai penegasan informan TT bahwa RSP menerapkan estetika, spiritualitas, dan etika budaya Jawa sebagai cara menuntun dan mengkritik masyarakat maupun elite secara halus dan bermakna.

Dari sudut pandang konstruktivis, praktik produksi RSP sebagai proses pembentukan konstruksi nilai kepemimpinan yang berlangsung secara kontekstual. Konstruksi kepemimpinan, moralitas, dan tanggung jawab sosial tidak hadir sebagai kebenaran tunggal yang baku, melainkan sebagai hasil perumusan bersama antara pengasuh rubrik, teks budaya, dan pengalaman sosial pembaca. Di sini, RSP berfungsi sebagai medium yang menghubungkan pengalaman keseharian masyarakat dengan nilai-nilai budaya Jawa yang telah lama hidup dalam tradisi. Hal ini sejalan dengan hasil studi Yoedtadi & Salman (2023) bahwa nilai-nilai budaya yang dihayati sejak kecil mendorong praktik jurnalistik yang menjunjung toleransi dan keharmonisan sosial.

Selain itu, keputusan redaksional untuk mempertahankan RSP sebagai rubrik budaya mencerminkan orientasi '*Suara Merdeka*' pada periode tersebut. Sebagai surat kabar lokal yang memiliki basis pembaca kuat di Jawa Tengah, '*Suara Merdeka*' memosisikan diri sebagai media yang mengedepankan kedekatan kultural dengan masyarakatnya. RSP menjadi salah satu wujud konkret dari orientasi tersebut, sekaligus sarana untuk menjaga identitas media di tengah perubahan sosial dan tekanan politik.

Dalam praktik keseharian, pengasuh rubrik menurut TT melalui *habitus*nya menjalankan peran sebagai penjaga konsistensi nilai dan gaya tutur RSP. Mereka menyeleksi isu, menentukan sudut pandang, serta merangkai narasi dengan mempertimbangkan situasi sosial yang sedang berlangsung. Proses ini tidak bersifat mekanis, tetapi melibatkan penilaian profesional yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepekaan kultural, dan pemahaman terhadap iklim jurnalistik saat itu.

Produksi konten RSP merupakan hasil kerja reflektif yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan konteks.

Temuan studi ini paralel dengan hasil studi Dlamini (2023) bahwa *habitus* jurnalis terbentuk melalui negosiasi antara idealisme publik dan struktur kekuasaan politik. Hal ini dibuktikan melalui tekanan struktural Orde Baru yang membentuk hubungan RSP dengan pembacanya. Rubrik ini tidak memosisikan diri sebagai corong kritik yang keras, melainkan sebagai ruang perenungan bersama. Pembaca diajak untuk menimbang kembali nilai-nilai kepemimpinan dan *laku* etis melalui kisah, metafora, dan simbol budaya. Komunikasi semacam ini menciptakan ikatan emosional dan kultural yang kuat antara rubrik dan pembacanya, karena pesan disampaikan melalui bahasa yang akrab dan bernuansa keseharian.

Dalam ranah jurnalistik yang penuh pembatasan, keberadaan RSP menunjukkan bahwa media tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi reflektif dan edukatif. Fungsi ini tidak dijalankan melalui pelaporan peristiwa politik secara langsung, melainkan melalui penguatan nilai dan etika sosial. Dengan cara tersebut, RSP berkontribusi pada pembentukan kesadaran kultural masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan nilai-nilai Jawa dalam ruang publik.

Kerangka Bourdieu membantu menjelaskan bahwa praktik jurnalistik RSP bukan semata hasil kehendak individual pengasuh rubrik, tetapi bagian dari dinamika ranah yang lebih luas. Struktur institusional media, iklim politik nasional, serta tradisi jurnalistik yang berkembang pada masa Orde Baru bersama-sama membentuk kondisi produksi rubrik. Dalam kondisi tersebut, pengasuh RSP menata strategi penulisan

dan pemilihan tema agar tetap selaras dengan logika ranah jurnalistik yang berlaku.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa RSP pada periode 1996–1998 beroperasi sebagai ruang artikulasi nilai yang relatif stabil di tengah situasi sosial yang bergejolak. Dengan mengandalkan pendekatan budaya dan simbolik, rubrik ini menjaga keberlangsungannya sekaligus mempertahankan relevansi sosial. Produksi konten RSP tidak diarahkan untuk membangun oposisi politik, melainkan untuk merawat kesadaran etis dan kultural masyarakat melalui narasi yang bersumber dari tradisi Jawa.

Ranah jurnalistik dan konteks produksi pada periode awal RSP membentuk karakter rubrik sebagai media refleksi budaya yang berhati-hati, konsisten, dan berakar pada nilai lokal. Praktik jurnalistik yang dijalankan menunjukkan bagaimana aktor media menata ulang cara bertutur dan menyampaikan pesan di tengah keterbatasan struktural, tanpa kehilangan orientasi etis yang menjadi fondasi rubrik. Temuan ini menegaskan bahwa produksi jurnalistik dalam konteks Orde Baru tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya merawat nilai dan makna dalam ruang publik melalui jalur budaya.

2. Periode Transisi (1999-2000)

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) tidak terbit pada periode 1999–2000. Ketidakhadiran ini dalam konteks dinamika produksi jurnalistik, bukanlah sekadar sebagai jeda administratif atau teknis penerbitan. Fase ini merefleksikan situasi transisional yang kompleks, ketika disposisi kultural para pengelola rubrik berhadapan dengan

perubahan struktural yang berlangsung secara cepat dan mendasar. *Habitus* pengelola RSP sebelumnya terbentuk melalui internalisasi nilai kepemimpinan moral, kearifan lokal budaya Jawa, serta orientasi reflektif terhadap fungsi pers sebagai penuntun etis masyarakat. Namun, dalam situasi krisis moneter dan perubahan lanskap sosial-politik pascareformasi, disposisi tersebut mengalami keterbatasan aktualisasi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir dekade 1990-an memberikan tekanan langsung terhadap industri pers, termasuk 'Suara Merdeka'. Lonjakan biaya produksi, penurunan pendapatan iklan, serta tuntutan efisiensi operasional mendorong redaksi untuk melakukan penataan ulang prioritas dan mekanisme kerja. Dalam situasi ini, perhatian redaksional terfokus pada isu-isu yang dianggap lebih mendesak dan memiliki relevansi langsung dengan situasi publik, terutama pemberitaan politik, keamanan, dan peristiwa aktual. Pergeseran orientasi ini berdampak pada berkurangnya ruang bagi rubrik reflektif seperti RSP. Rubrik semacam RSP secara karakter membutuhkan kontinuitas, ketenangan redaksional, serta ruang editorial yang relatif longgar untuk mengolah gagasan secara mendalam dan simbolik.

Tidak hadirnya RSP periode 1999 hingga Februari 2000 diakui informan TT sebagai kondisi yang tidak bisa terelakkan yang dialami oleh 'Suara Merdeka' seiring krisis moneter yang sangat berdampak terhadap operasional media lokal tersebut.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, kondisi tersebut memperlihatkan perubahan konfigurasi ranah jurnalistik yang mengalami tekanan dan penataan ulang struktur kekuasaan. Modal simbolik yang

dimiliki RSP, berupa legitimasi moral, otoritas kultural, serta kedekatan simbolik dengan pembaca dan komunitas budaya Jawa. Hal ini belum memiliki bobot yang cukup untuk mempertahankan posisinya ketika modal ekonomi dan modal politik memperoleh penekanan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan redaksional. Perubahan ini tidak meniadakan nilai simbolik RSP, tetapi menempatkannya dalam posisi yang kurang strategis pada fase tertentu dari dinamika ranah.

Pada periode tersebut, ranah jurnalistik 'Suara Merdeka' bergerak dalam situasi yang menuntut respons cepat terhadap perubahan sosial dan politik. Dalam situasi demikian, rubrik reflektif yang berfungsi sebagai ruang perenungan etis cenderung dipandang sebagai tidak prioritas, meskipun secara kultural tetap memiliki makna. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi jurnalistik budaya tidak hanya bertumpu pada komitmen nilai dan kapasitas kultural aktor, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas struktur yang menopang proses produksi media.

Meskipun tidak diproduksi, ketiadaan RSP pada periode 1999–2000 justru memberikan pemahaman penting mengenai batas-batas praktik jurnalistik berbasis nilai dalam konteks krisis. Fase jeda ini memperlihatkan bahwa *habitus* kultural pengelola rubrik tidak selalu dapat terwujud secara optimal ketika kondisi struktural tidak mendukung. Ketidakhadiran tersebut bukan penanda melemahnya relevansi nilai yang diusung RSP, melainkan cerminan situasi ketika nilai-nilai tersebut belum memperoleh ruang aktualisasi yang memadai dalam dinamika redaksional yang berubah.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) periode 1999–2000 menjadi fase penting untuk memahami dinamika produksi secara utuh. Fase ini

menegaskan bahwa praktik jurnalistik budaya berada dalam relasi yang dinamis antara disposisi kultural aktor, distribusi modal, dan struktur ranah jurnalistik. Dalam situasi krisis dan pergeseran prioritas redaksi, rubrik reflektif seperti RSP dapat tertahan sementara, meskipun secara ideologis dan kultural tetap memiliki daya hidup. Jeda ini justru memperkuat pemahaman bahwa keberlanjutan RSP pada periode-periode selanjutnya merupakan hasil dari kemampuan aktor dan institusi media dalam menegosiasikan kembali nilai, struktur, dan kondisi produksi yang terus berubah.

3. Periode Konsolidasi (2000-2010)

Habitus Penulis dan Pengasuh Rubrik

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) periode 2000–2010 menandai fase penting dalam produksi, seiring dengan perubahan lanskap sosial, politik, dan jurnalistik pasca-Reformasi. Berakhirnya rezim Orde Baru membawa iklim kebebasan pers yang lebih terbuka, yang berdampak langsung pada cara media mengelola isi, gaya penulisan, serta ragam suara yang tampil di ruang publik. Dalam konteks ini, RSP tidak lagi sebagai ruang refleksi yang bergantung pada pengasuh internal, melainkan berkembang menjadi rubrik yang memfasilitasi keterlibatan penulis eksternal dengan latar belakang intelektual dan kultural yang beragam.

Berikut penjelasan informan TT (2020):

> "Redaksi 'Suara Merdeka' memberi ruang aman bagi ekspresi budaya dan kritik sosial penulis, memperlihatkan mekanisme kerja redaksional yang sadar budaya." (Wawancara dengan TT, 2020).

Perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas kultural RSP, tetapi justru memperkaya bentuk artikulasinya. Pada periode ini, kritik sosial tetap disampaikan secara reflektif melalui metafora, kisah wayang, alegori, dan narasi simbolik berbasis tradisi Jawa. Di periode ini pula pengelolaan RSP sepenuhnya dipercayakan kepada TT. Dalam wawancara pada Januari 2020, informan HB menjelaskan dirinya secara khusus mengkader Triyanto yang berlatar belakang kesusastraan untuk meneruskan RSP.

Namun, sudut pandang penulis menjadi lebih plural, seiring masuknya aktor baru ke dalam proses produksi rubrik. Variasi gaya tutur dan penafsiran nilai *Hasta Brata* menjadi ciri menonjol dalam artikel-artikel RSP pada fase ini.

Temuan studi menunjukkan bahwa dari 18 artikel RSP yang ditelaah sepanjang periode 2000–2010, sebanyak 14 artikel atau sekitar 80 persen ditulis oleh penulis eksternal, yakni Sucipto Hadi Purnomo, seorang sastrawan yang juga berprofesi sebagai akademisi. Sisanya ditulis oleh pengasuh rubrik internal. Komposisi ini menandai perubahan signifikan dalam struktur produksi RSP dibandingkan periode sebelumnya, di mana pengasuh rubrik berperan dominan sebagai penulis tunggal.

Informan TT maupun informan HB mengakui, masuknya penulis eksternal membawa *habitus* yang berbeda, meskipun masih beririsan kuat dengan tradisi kultural Jawa. *Habitus* penulis eksternal dibentuk oleh pengalaman akademik, tradisi intelektual, serta keterlibatan panjang dalam dunia sastra. Latar tersebut memengaruhi cara penulis memaknai persoalan sosial-politik pasca-Reformasi, dengan penekanan pada refleksi etis, pendidikan moral, dan tanggung jawab

sosial warga negara. Perspektif akademik memberi kedalaman argumentasi, sementara sensibilitas sastra menjaga nuansa estetik dan simbolik dalam penyampaian gagasan.

Namun kedua informan berpendapat, meski terbentuk *habitus* yang berbeda karena penulis eksternal dari latar belakang akademisi, tidak menghambat produksi RSP. Kehadiran penulis ekternal ini justru diakui mereka untuk memperkuat eksistensi rubrik ini di mata publik, khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Dalam kerangka Bourdieu (1993), habitus merupakan disposisi aktor yang terinternalisasi melalui pengalaman hidup dan praktik sosial yang berulang. Pada RSP periode 2000–2010, *habitus* penulis eksternal dan pengasuh rubrik tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling bersinergi dalam proses produksi konten. *Habitus* penulis eksternal menghadirkan cara pandang reflektif yang lebih sistematis, sementara *habitus* pengasuh rubrik menjaga kesinambungan nilai kultural dan orientasi moral rubrik.

Peran pengasuh rubrik pada periode ini mengalami pergeseran yang cukup penting. Pada fase awal pengasuh bertindak sebagai penulis utama sekaligus penjaga narasi, pada periode 2000–2010 mereka lebih menempati posisi sebagai kurator dan editor. Dalam peran ini, pengasuh rubrik menyeleksi naskah, menjaga konsistensi tema, serta memastikan bahwa setiap artikel tetap berpijak pada visi kultural RSP. Kurasi ini tidak bersifat membatasi kreativitas penulis, tetapi berfungsi sebagai penyeimbang antara keragaman perspektif dan keutuhan identitas rubrik.

Informan TT menjelaskan, pada periode ini redaksi khususnya pengasuh RSP berkolaborasi dengan penulis eksternal untuk memba-

has isu-isu untuk disajikan dalam RSP di edisi berikutnya yang tentu wajib 'bernilai' dengan menyikapi kondisi yang berkembang dalam masyarakat sepekan terakhir. Isu tersebut harus sesuai koridor jurnalistik lalu dibahas dengan kerangka nilai-nilai budaya Jawa. Berhubung penulis eksternal memiliki latar belakang sastra dan budayawan serta akademisi, sehingga hal ini memudahkan dalam kordinasi oleh pengasuh rubrik terkait penentuan tema-tema apa saja yang menjadi perhatian serius untuk diangkat sebagai *headline* (tulisan utama).

Merujuk pada Dor (2003), *headline* dalam RSP sebagai ruang strategis redaksi dalam menata prioritas makna, menyampaikan nilai, serta membentuk arah pemahaman pembaca terhadap isu-isu sosial-politik yang berkembang. Artinya, prioritas makna melalui penonjolan isu-isu yang dianggap paling penting dan paling menarik dalam sepekan terakhir.

Lebih lanjut, komunikasi yang dilakukan saat itu menurut TT, lazimnya pengasuh rubrik menghubungi langsung penulis eksternal melalui telepon atau pesan singkat melalui *BlackBerry messenger* (BBM).

Habitus pengasuh rubrik yang terbentuk sejak periode sebelumnya tetap menjadi rujukan etis dalam proses kurasi. Nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata,* pandangan hidup Jawa, serta prinsip *ngemong, ngajari,* dan *ngelingake* terus dijaga sebagai fondasi moral rubrik (Bratawijaya, 1997). Atas dasar itulah, meskipun penulis eksternal membawa gaya dan sudut pandang yang beragam, keseluruhan narasi RSP tetap bergerak dalam satu tatanan kultural yang relatif konsisten.

Keragaman perspektif pada periode ini tercermin dalam cara artikel-artikel RSP menanggapi persoalan sosial pasca-Reformasi. Isu

birokrasi, moral publik, pendidikan, dan kepemimpinan kontemporer dihadirkan sebagai bahan perenungan bersama, bukan sebagai objek penilaian benar atau salah. Penulis eksternal sering kali mengaitkan persoalan aktual dengan kisah-kisah simbolik kerajaan Jawa atau tokoh pewayangan, sehingga pengalaman masa kini disandingkan dengan kebijaksanaan tradisional. Pendekatan ini memberi jarak reflektif yang membantu pembaca menimbang persoalan secara lebih mendalam.

Menyikapi kepekaan penulis eksternal dalam mengisi *headline* untuk RSP, diakui informan TT (2023) bahwa penulis sudah mengetahui arah tema, karena sudah memahami nilai budaya Jawa dan arah redaksi. Terlebih penulis eksternal merupakan akademisi sekaligus sastrawan dan budayawan.

Untuk melihat bagaimana disposisi penulis dan pengasuh bekerja dalam struktur produksi jurnalistik, analisis ini menggunakan kerangka lima level hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese (1996, 2014). Kerangka ini tidak digunakan untuk memetakan dominasi atau konflik, melainkan untuk memahami dan memetakan memahami pengalaman individu, rutinitas redaksional, kebijakan organisasi, konteks sosial yang lebih luas, serta orientasi nilai yang melandasi produksi konten.

Pada level individu, penulis baik internal maupun eksternal memiliki keleluasaan dalam memilih tema dan sudut pandang, selama tetap selaras dengan visi kultural RSP. Kebebasan ini tercermin dalam variasi gaya penulisan dan penekanan isu, namun tetap berada dalam koridor refleksi etis berbasis budaya Jawa. Pengalaman akademik

penulis eksternal memberi warna analitis yang lebih eksplisit, sementara latar sastra menjaga kehalusan bahasa dan kedalaman simbolik.

Pada level rutinitas media, redaksi menetapkan pedoman editorial yang mengatur panjang tulisan, format rubrik, serta jadwal penerbitan. Rutinitas ini berfungsi menjaga keteraturan produksi dan kualitas konten, sekaligus memastikan bahwa RSP tetap dikenali sebagai rubrik reflektif yang khas. Proses penyuntingan dilakukan dengan memperhatikan alur narasi, kejelasan simbol, dan kesesuaian nilai, tanpa menghilangkan ciri personal penulis.

Informan TT (2023) menjelaskan RSP periodisasi 2000-2010 tidak lagi sebagai suplemen budaya dan tidak lagi terbit setiap Kamis, melainkan menjadi bagian dari edisi minggu dan tetap terbit seminggu sekali yakni pada Minggu, kecuali jika libur nasional. Berhubung untuk terbit Minggu, lanjut TT lazimnya pengasuh rubrik sudah menghubungi penulis eksternal paling lambat pada Selasa dan naskah sudah harus dikirim melalui email paling lambat pada Kamis karena untuk *dilay-out* pada Jumat untuk terbit Minggu.

Di sisi lain, level organisasi tercermin dalam dukungan 'Suara Merdeka' terhadap keberlanjutan RSP sebagai rubrik budaya. Sebagai surat kabar yang memiliki basis pembaca kuat di Jawa Tengah, 'Suara Merdeka' menempatkan RSP sebagai bagian dari identitas media yang dekat dengan nilai-nilai lokal. Dukungan ini memberi ruang bagi rubrik untuk terus berkembang, sekaligus menjaga konsistensi orientasi moral yang dibangun sejak awal.

Pada level ekstra-media, konteks pasca-Reformasi membawa perubahan signifikan dalam iklim kebebasan pers. Ruang ekspresi yang lebih terbuka memberi peluang bagi penulis untuk mengangkat

persoalan sosial secara lebih luas. Namun, kehati-hatian tetap menjadi bagian dari praktik jurnalistik RSP. Penulis memilih jalur reflektif dan simbolik untuk menyampaikan kegelisahan sosial, sehingga rubrik tetap tampil sebagai ruang perenungan, bukan arena polemik langsung.

Secara ideologis, filosofi *Hasta Brata* dan nilai kearifan lokal Jawa tetap menjadi fondasi utama rubrik. Ideologi tersebut bekerja secara laten melalui struktur penyajian yang konsisten yaitu rutinitas penulisan, seleksi isu, dan penekanan moral-kultural yang membentuk cara pandang khalayak (Pawito, 2014), selaras dengan filosofi manajemen budaya Jawa 'Suara Merdeka'. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif yang memberi arah bagi penulis dan pengasuh dalam menyusun narasi (Sartini, 2009). Dengan konsistensi ini, RSP menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan perubahan sosial.

Informan HB (2020) menegaskan bahwa RSP berperan memberi "nutrisi kebudayaan" dalam konteks masa kini. Pandangan ini selaras dengan visi dan misi 'Suara Merdeka' yang dirintis oleh Hetami, dengan menempatkan media tidak sekadar sebagai institusi informasi, tetapi juga sebagai ruang pemeliharaan dan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal.

Dalam kerangka tersebut, produksi RSP pada periode 2000–2010 sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi antara penulis, pengasuh rubrik, redaksi, dan pembaca. Makna kepemimpinan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dibangun melalui dialog simbolik dalam teks dan ditafsirkan secara beragam oleh pembaca. Melalui mekanisme ini, rubrik mengajak khalayak merefleksikan kembali nilai-nilai tradisi Jawa serta relevansinya dengan situasi sosial kontemporer.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan informan SSL (2020) bahwa RSP menjadi arena reproduksi *habitus* kultural Jawa dalam jurnalisme modern, serta sarana kontrol sosial halus melalui bahasa *pasemon.* Nilai-nilai budaya Jawa di antaranya *ngemong, ojo dumeh, rukun, tepa selira*, dan budi pekerti luhur dijalankan sebagai prinsip kerja, gaya bahasa, dan arah kebijakan redaksi.

Interaksi tersebut tercermin dalam perubahan komposisi penulis pada periode ini. Perubahan komposisi penulis pada periode ini tidak menggeser RSP dari jalur refleksi budaya yang dibangun, tetapi memperkaya cara nilai-nilai tersebut diartikulasikan. *Habitus* penulis eksternal dan pengasuh rubrik berjumpa dalam ruang produksi yang cair, saling melengkapi antara kedalaman intelektual dan kepekaan kultural. Hasilnya adalah rubrik yang tetap konsisten secara nilai, namun lentur dalam bentuk dan gaya.

Secara keseluruhan, produksi RSP periodisasi 2000–2010 menunjukkan bahwa praktik jurnalistik budaya merupakan kerja kolektif yang bertumpu pada pengalaman aktor (pengasuh rubrik, penulis internal dan penulis eksternal), nilai, dan konteks sosial. Hal ini sesuai studi Maares & Hanusch (2022) dan Lindell et al., (2019) bahwa struktur dan praktik jurnalistik dibentuk oleh relasi antara modal ekonomi, modal kultural, dan *habitus* para pelaku media.

Rubrik 'Sang Pamomong' tampil sebagai ruang refleksi yang hidup, yang menampung keragaman suara tanpa kehilangan arah kulturalnya. Dalam situasi pasca-Reformasi yang penuh perubahan, rubrik ini menjaga perannya sebagai penuntun moral yang bersahaja, menghubungkan kebijaksanaan tradisi Jawa dengan tantangan kehidupan masyarakat kontemporer. Kendati diungkapkan informan SSL (2020)

bahwa RSP periode 2000-2010 tetap berisi pesan-pesan moral dan kritik sosial halus dengan menggunakan bahasa *pasemon.*

Modal Simbolik, Kultural, dan Ekonomi

Pada periodisasi 2000–2010, produksi RSP tidak hanya ditandai oleh perubahan komposisi penulis, tetapi juga oleh konfigurasi modal yang semakin berlapis dan saling melengkapi. Dalam konteks pasca-reformasi yang membuka ruang ekspresi lebih luas bagi pers, RSP mengembangkan strategi keberlanjutan melalui mobilisasi modal kultural, modal sosial, modal simbolik, dan modal ekonomi secara bersamaan. Keempat jenis modal ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara terpadu dalam membentuk praktik produksi rubrik sebagai ruang refleksi kultural dan etis.

Modal kultural menempati posisi sentral dalam praktik jurnalistik RSP pada periode ini. Modal ini terutama hadir dalam bentuk penguasaan literatur sastra Jawa, pengetahuan filosofis tentang *Hasta Brata*, serta kemampuan merangkai narasi reflektif yang menghubungkan nilai budaya dengan realitas sosial-politik kontemporer. Keterlibatan penulis eksternal berlatar belakang sastrawan dan akademisi memperkaya basis modal kultural rubrik. Pengalaman mereka dalam dunia sastra dan pendidikan tinggi membentuk cara pandang yang matang, berhati-hati, dan berlapis dalam menafsirkan persoalan publik.

Modal kultural tersebut tampak dalam pilihan diksi, penggunaan metafora wayang dan kisah kerajaan Jawa yang tidak sekadar dekoratif, serta kedalaman refleksi etis yang tidak terjebak pada moralitas penghakiman (benar atau salah). Hal ini ditegaskan informan HB (2020)

bahwa gagasan atau opini yang sifatnya refleksi kebudayaan yang dituangkan dalam RSP bukan untuk menghakimi siapa pun atau kondisi apa pun.

Sebaliknya, tandas informan HB (2020), artikel-artikel RSP pada periode ini memperlihatkan kecenderungan untuk mengajak pembaca merenung, bukan menghakimi, serta serta mendorong proses berpikir reflektif. Cara bertutur semacam ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa yang menempatkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kehalusan rasa sebagai fondasi etika sosial. Hal ini sesuai penegasan informan SA (2020) bahwa kekuatan RSP pada perannya menjaga bahasa, identitas, dan falsafah Jawa di tengah arus kapitalisme media. Melalui simbolisasi Semar dan prinsip *Hasta Brata,* rubrik ini menjalankan fungsi sosial dan moral: menuntun, mengingatkan, serta mengkritik kekuasaan dengan cara yang santun, humoris, dan berakar pada etika budaya Jawa.

Dalam konteks ini, keberadaan pengasuh rubrik memainkan peran penting dalam menjaga arah pemanfaatan modal kultural tersebut. Sebagai kurator, pengasuh tidak hanya bertugas menyunting teks secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa setiap artikel tetap sejalan dengan visi kultural RSP. Pengasuh rubrik menjadi penjaga kesinambungan nilai, terutama filosofi *Hasta Brata,* agar tidak tergerus oleh keberagaman gaya dan interpretasi yang dibawa oleh penulis eksternal. Karena itulah, modal kultural pengasuh rubrik yang terbentuk dari pengalaman jurnalistik panjang, kedekatan dengan tradisi budaya Jawa, dan pemahaman mendalam atas karakter pembaca berfungsi sebagai 'jangkar' yang menjaga konsistensi identitas rubrik.

Selain modal kultural, modal sosial berperan signifikan dalam produksi RSP. Modal sosial terwujud dalam jejaring kepercayaan dan kerja sama antara pengasuh rubrik dan penulis eksternal. Relasi ini bukan bersifat transaksional semata, melainkan dibangun sebagai hubungan professional yang dibangun di atas saling pengertian terhadap nilai, etos kerja, dan tujuan rubrik. Informan TT (2023) menjelaskan, kepercayaan yang dibangun memudahkan ruang gerak penulis mengekspresikan gagasan dengan relatif leluasa, sementara pengasuh rubrik memiliki keyakinan bahwa substansi tulisan tetap berada dalam koridor etika dan budaya yang dijaga bersama.

Jejaring sosial semacam ini turut memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Penulis eksternal membawa perspektif akademik dan kesastraan yang memperkaya wawasan rubrik, sementara pengasuh rubrik berkontribusi memberi pemahaman kontekstual tentang atmosfer redaksional dan karakter pembaca '*Suara Merdeka'.* Pertukaran ini berlangsung secara halus melalui proses penyuntingan, diskusi informal, maupun kontinuitas kerja sama lintas waktu. Modal sosial yang terpelihara dengan baik ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan rubrik di tengah perubahan iklim media.

Modal simbolik RSP pada periode 2000–2010 mengalami penguatan. Rubrik ini menempati posisi khusus sebagai ruang refleksi budaya dan etika dalam lanskap jurnalistik. Reputasi ini tidak dibangun secara instan, melainkan melalui konsistensi tema, gaya bertutur, dan orientasi nilai yang dijaga lintas periode. Kepercayaan pembaca terhadap RSP sebagai rujukan reflektif menjadi bentuk pengakuan simbolik yang memperkuat legitimasi rubrik.

Keterlibatan penulis eksternal justru memperluas jangkauan modal simbolik ini. Kehadiran penulis eksternal dengan latar belakang akademik dan kesastraan memberi bobot tambahan pada rubrik, sekaligus mempertegas posisinya sebagai arena dialog budaya yang serius namun tetap 'membumi'. Dalam konteks ini, modal simbolik tidak dimaknai sebagai dominasi atau klaim otoritas sepihak, melainkan sebagai hasil dari akumulasi kepercayaan publik yang tumbuh melalui praktik jurnalistik yang konsisten dan beretika.

Sementara itu, pengasuh rubrik memanfaatkan modal simbolik tersebut untuk menjaga standar kualitas dan arah pemaknaan rubrik. Informan TT menjelaskan, setiap artikel yang dimuat tidak hanya dinilai dari kelayakan teknis, tetapi juga dari kesesuaian nilai dan kontribusinya terhadap refleksi kolektif pembaca. Dengan cara ini, modal simbolik berfungsi sebagai penguat identitas rubrik sekaligus sebagai rujukan normatif dalam proses produksi.

Aspek lain yang tidak terpisahkan dari dinamika produksi RSP adalah modal ekonomi. Meskipun RSP berorientasi pada refleksi budaya dan nilai luhur, praktik produksinya tetap berada dalam konteks media cetak sebagai entitas profesional. Pemberian honor kepada penulis eksternal menjadi salah satu bentuk konkret pengakuan terhadap kontribusi intelektual dan kreatif mereka. Honorarium ini diakui oleh informan TT (2023) bukan semata insentif material, tetapi juga simbol penghargaan atas kerja intelektual yang dilakukan.

Dalam konteks ini, modal ekonomi berfungsi menopang keberlanjutan praktik jurnalistik tanpa menggeser orientasi nilai rubrik. Praktik pemberian honor menunjukkan bahwa kerja reflektif dan kultural memiliki nilai yang diakui secara profesional. Hal ini memperkuat relasi

kerja yang sehat antara pengasuh rubrik dan penulis eksternal, sekaligus menjaga komitmen bersama terhadap kualitas isi.

Interaksi antara modal kultural, sosial, simbolik, dan ekonomi pada periode ini memperlihatkan konfigurasi yang relatif seimbang. Tidak satu jenis modal pun bekerja secara dominan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk praktik produksi RSP. Modal kultural memberi kedalaman makna, modal sosial menjaga kelancaran kerja sama, modal simbolik memperkuat legitimasi publik, dan modal ekonomi menopang keberlanjutan profesional. Keseimbangan ini membantu RSP tetap konsisten sebagai rubrik reflektif di tengah iklim media yang semakin kompetitif dan terbuka.

Dalam kerangka teori Bourdieu (1993), interaksi antara *habitus* dan modal tersebut membentuk praktik yang relatif stabil namun tetap lentur menghadapi perubahan konteks. Praktik jurnalistik RSP pada periode 2000–2010 memperlihatkan bagaimana disposisi kultural agen, baik penulis maupun pengasuh rubrik berinteraksi dengan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan teks jurnalistik yang bermakna. Proses ini berlangsung secara simultan dan reflektif, bukan sebagai respons reaktif terhadap tekanan eksternal semata.

Di sisi lain, RSP di periode ini mulai tampil bilingual yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa secara bergantian setiap minggu. Menurut informan HB (2020), RSP tampil dengan dua bahasa agar inklusif. Artinya, bagi pembaca yang tidak paham bahasa Jawa dapat mencermati RSP edisi bahasa Indonesia. Sedangkan pembaca dari suku Jawa bertujuan untuk memperkuat orientasi nilai-nilai budaya Jawa di era modernisasi budaya, sehingga semakin banyak dibaca khalayak luas.

Dikaitkan dengan hierarki pengaruh isi media Shoemaker dan Reese (1996, 2014), konfigurasi modal ini beroperasi lintas level. Pada level individu, modal kultural penulis membentuk cara mereka menafsirkan isu dan menyusun narasi. Pada level rutinitas, praktik penyuntingan dan kurasi menjadi ruang pertemuan antara modal kultural dan simbolik. Pada level organisasi, dukungan redaksi terhadap keberlanjutan RSP memperkuat modal simbolik rubrik. Sementara itu, pada level ekstra-media, iklim pasca-reformasi memberi ruang artikulasi nilai yang lebih beragam, tanpa menghilangkan kehati-hatian dalam penyampaian. Pada level ideologis, filosofi *Hasta Brata* tetap menjadi fondasi moral yang menyatukan seluruh praktik tersebut.

Dengan demikian, RSP periode 2000–2010 menunjukkan rubrik ini berkembang sebagai wahana konstruksi nilai kolektif yang relevan dengan konteks zamannya. Melalui mobilisasi dan interaksi berbagai jenis modal, RSP menjaga kesinambungan nilai lokal sambil merespons dinamika sosial-politik secara reflektif. Praktik ini menegaskan bahwa jurnalisme budaya tak hanya bergantung pada kebebasan struktural, tetapi juga pada kedalaman disposisi kultural dan etos profesional para agennya.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan relevansi teori Bourdieu dan kerangka hierarki pengaruh isi media dalam memahami praktik jurnalistik budaya secara kualitatif dan konstruktivis. RSP menjadi contoh bagaimana rubrik jurnalistik dapat berfungsi sebagai ruang dialog nilai yang hidup, sehingga makna dibangun bersama melalui interaksi agen, struktur, dan sumber daya simbolik yang dimiliki.

Ranah Jurnalistik dan Konteks Produksi

Periode pasca-reformasi menandai perubahan penting dalam ranah jurnalistik Indonesia. Berakhirnya kontrol ketat negara terhadap pers membuka ruang artikulasi yang lebih luas bagi media untuk mengemukakan pandangan, refleksi, dan evaluasi atas kehidupan sosial-politik. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghadirkan situasi yang sepenuhnya stabil. Ranah jurnalistik justru berada dalam fase transisi yang ditandai percepatan perubahan sosial, penyesuaian kelembagaan media, serta upaya berkelanjutan untuk menempatkan kembali peran pers dalam kehidupan publik.

Dalam konteks tersebut, RSP tidak memosisikan diri sebagai saluran kritik langsung, melainkan sebagai ruang refleksi kultural yang berangkat dari nilai-nilai budaya Jawa. Kebebasan pers yang lebih terbuka dimanfaatkan RSP untuk mengulas kepemimpinan, etika publik, dan dinamika sosial melalui pendekatan simbolik. Rujukan pada filosofi *Hasta Brata* menjadi kerangka utama dalam menyusun refleksi tersebut, sehingga kritik moral disampaikan melalui kisah, metafora, dan alegori yang dekat dengan pengalaman kultural pembaca.

Berikut penjelasan informan GBS (2020) selaku pengampu halaman RSP menggantikan tugas SA:

> "Kritik sosial dalam rubrik (RSP) tidak dimaksudkan untuk menyerang, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran moral, sebagaimana ajaran *Hasta Brata* yaitu menyeimbangkan kekuasaan, spiritualitas, dan kebijaksanaan. nilai budaya Jawa bukanlah dogma, melainkan proses hidup yang terus ditafsir ulang yaitu melalui budaya sebagai kata kerja."

Lebih lanjut, posisi RSP dalam ranah jurnalistik periode 2000–2010 tetap dibentuk melalui proses editorial yang sadar akan tanggung

jawab kultural dan etis. Pengasuh rubrik memaknai kebebasan pers bukan sebagai ruang ekspresi tanpa batas, melainkan sebagai peluang untuk memperdalam refleksi sosial dengan tetap menjaga kehati-hatian dan keluhuran nilai. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut diolah melalui seleksi tema, penyusunan narasi, dan penyuntingan yang memastikan bahwa setiap artikel berkontribusi pada dialog moral yang berkesinambungan.

Hanya saja berhubung RSP periodisasi 2000-2010 tampil satu halaman dengan berisi tiga tulisan yaitu *headline*, kolom *Pringgitan* dan tulisan lepas di bagian kaki halaman yakni *Blencong*, mekanisme pengelolaan RSP tidak seketat saat periode awal dengan rutin melakukan rapat mingguan untuk menentukan tema dan *guideline*. Informan TT menjelaskan komunikasi dengan penulis eksternal berlangsung 'cair' sehingga tata kelola RSP khususnya untuk penempatan *headline* berjalan lancar. Adapun untuk kolom Pringgitan dan Blencong diisi oleh penulis internal yaitu TT dan SA.

Ranah jurnalistik pasca-reformasi ditandai oleh meningkatnya keberagaman suara dan perspektif. Dalam situasi ini, RSP menempuh jalan moderat dengan tetap berpijak pada identitas kulturalnya. Rubrik ini tidak larut dalam euforia kebebasan yang cenderung menampilkan opini secara terbuka dan konfrontatif. Sebaliknya, RSP mempertahankan gaya bertutur yang reflektif, mengedepankan kebijaksanaan, dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan persoalan sosial secara mandiri. Pilihan ini menunjukkan kesadaran bahwa praktik jurnalistik tidak hanya berurusan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dengan pembentukan orientasi etis masyarakat.

Pada level praksis, peran kuratorial pengasuh rubrik menjadi faktor kunci dalam membentuk karakter RSP. Beragam perspektif penulis, baik internal maupun eksternal dipadukan melalui proses seleksi dan penyuntingan yang menjaga kesinambungan nilai. Pengasuh rubrik berfungsi sebagai penjaga arah pemaknaan, memastikan bahwa keberagaman gaya dan sudut pandang tetap berada dalam koridor filosofi *Hasta Brata* dan nilai luhur budaya Jawa. Melalui proses ini, RSP tidak sekadar menampilkan kumpulan tulisan individual, tetapi menghadirkan suara kolektif yang terjalin secara tematik dan etis.

Praktik kuratorial tersebut mencerminkan *habitus* profesional yang berkembang di dalam ruang redaksi. *Habitus* ini terbentuk dari pengalaman jurnalistik, pemahaman terhadap karakter pembaca, serta komitmen terhadap visi kultural media. Dalam konteks RSP, *habitus* pengasuh rubrik tampak dalam cara memilih isu yang relevan dengan kehidupan sosial, menyusun alur narasi yang tidak tergesa-gesa, serta menekankan dimensi reflektif dibandingkan sikap normatif yang menggurui. Dengan demikian, produksi konten RSP menjadi proses yang sarat pertimbangan kultural dan etis.

Ranah jurnalistik pada periode ini dipengaruhi oleh organisasi media yang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Media cetak menghadapi tuntutan profesionalisme yang semakin kompleks, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan pembaca di tengah kompetisi yang meningkat. Dalam situasi tersebut, RSP menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Rubrik ini tetap dipertahankan sebagai ruang refleksi budaya, meskipun media secara keseluruhan mengalami penyesuaian strategi dan orientasi.

Sementara itu, konteks produksi RSP pada periode 2000–2010 memperlihatkan bahwa kebebasan pers tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang frontal. Sebaliknya, kebebasan tersebut dimaknai sebagai ruang untuk mengembangkan gaya jurnalistik yang lebih matang dan bernuansa. RSP memanfaatkan situasi ini untuk memperdalam berbagai isu tentang kepemimpinan dan etika publik melalui pendekatan kultural. Artikel-artikel yang terbit tidak hanya merespons peristiwa aktual, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai yang bersifat lintas waktu.

Argumen ini sejalan dengan temuan Dlamini (2023) yang menunjukkan bahwa budaya *newsroom* merupakan hasil konstruksi sosial dari interaksi nilai, pengalaman profesional, dan orientasi kelembagaan yang membentuk *habitus* jurnalis.

Dalam ranah jurnalistik pasca-reformasi Indonesia, budaya redaksi berkembang sebagai hasil interaksi antara nilai profesional, pengalaman historis, dan orientasi kultural media. RSP menjadi contoh bagaimana rubrik jurnalistik mengolah kebebasan pers melalui internalisasi nilai budaya lokal, sehingga praktik jurnalistiknya tetap memiliki arah dan konsistensi.

Namun demikian, periode 2000–2010 ditandai oleh dinamika yang tidak selalu stabil. Wijayanto (2019) menunjukkan bahwa meskipun pers secara formal berada dalam situasi yang lebih terbuka, struktur ekonomi-politik yang terbentuk pada masa sebelumnya masih memengaruhi praktik media. Kondisi ini menciptakan situasi di mana jurnalis dan pengelola media harus menyeimbangkan idealisme profesional dengan tuntutan keberlanjutan organisasi. Dalam konteks

ini, RSP menunjukkan strategi adaptif dengan tetap mempertahankan gaya reflektif dan simbolik sebagai ciri khasnya.

Alih-alih merespons situasi tersebut dengan perubahan drastis, RSP memilih jalur kontinuitas nilai. Rubrik ini meneguhkan posisinya sebagai ruang refleksi yang konsisten, sekaligus relevan dengan perubahan sosial. Pilihan ini mencerminkan pemahaman bahwa peran jurnalistik budaya bukan hanya menyuarakan perubahan, tetapi menyediakan kerangka etis untuk memaknai perubahan tersebut. Dengan cara ini, RSP berkontribusi pada konstruksi makna kolektif tentang kepemimpinan dan kehidupan sosial di tengah situasi transisi.

Dalam kerangka konstruktivis, praktik ini menunjukkan bahwa makna jurnalistik dibangun melalui interaksi antara teks, penulis, pengasuh rubrik, dan pembaca. Produksi makna tidak dipahami sebagai proses satu arah, melainkan sebagai titik temu berbagai pengalaman dan orientasi nilai. RSP memfasilitasi proses tersebut dengan menyediakan narasi yang kaya simbol dan rujukan budaya, sehingga pembaca memiliki ruang untuk membangun pemaknaan secara mandiri.

Berpijak pada penjelasan tersebut, ranah jurnalistik dan konteks produksi RSP pada periode 2000–2010 memperlihatkan praktik jurnalistik yang kompleks. Kebebasan pers dimaknai sebagai peluang untuk memperdalam refleksi budaya, bukan sekadar memperluas ekspresi opini. Melalui praktik kuratorial yang konsisten, internalisasi nilai budaya Jawa, dan adaptasi terhadap dinamika organisasi media, RSP meneguhkan dirinya sebagai ruang publik kultural yang berperan dalam membentuk orientasi etis masyarakat.

Dalam konteks tersebut, praktik jurnalistik budaya tidak dapat dilepaskan dari konteks produksi yang melingkupinya. RSP menunjukkan bagaimana rubrik jurnalistik dapat bertahan dan relevan dengan memadukan kebebasan struktural, *habitus* profesional, dan nilai budaya lokal. Dalam perspektif ini, RSP menjadi contoh konkret bagaimana jurnalisme budaya bekerja sebagai proses konstruksi makna sosial yang hidup, reflektif, dan berakar pada pengalaman kultural masyarakatnya. Hal ini selaras dengan studi Barnard (2018) bahwa jurnalisme bukan sekedar profesi, tapi sebagai hasil konstruksi sosial yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, RSP pada periode ini berlangsung dalam suasana euforia kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan (Arnus, 2015). Sebelumnya Presiden B.J. Habibie menghapus SIUPP dan menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Anom & Waluyo, 2011). Periode ini beririsan dengan masa transisi kepemimpinan nasional dari Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membentuk dinamika relasi pers dan kekuasaan (Andani & Birsyada, 2024).

4. Periode Kontemporer (2011-2020)

Habitus Aktor

Periodisasi 2011–2020 menandai fase lanjutan yang penting dalam produksi RSP. Periode ini berlangsung dalam konteks perubahan struktural media yang lebih kompleks, terutama akibat disrupsi digital dan krisis media cetak. Di tengah perubahan tersebut, RSP memperlihatkan konsistensi dalam orientasi nilai serta mekanisme produksi yang berbasis refleksi kultural. Konsistensi ini tidak dapat dilepaskan

dari peran aktor-aktor yang terlibat dalam produksi rubrik, khususnya penulis eksternal dan pengasuh rubrik, beserta *habitus* yang mereka bawa ke dalam praktik jurnalistik.

Periodisasi 2011-2020, RSP tetap tampil satu halaman yang menjadi bagian dari edisi minggu, berisi tiga tulisan yaitu *headline,* kolom *Pringgitan* dan tulisan lepas *Blencong*. RSP juga tetap tampil bilingual (bahasa Indonesia-Jawa) secara bergantian setiap pekan.

Seluruh artikel RSP yang dianalisis pada periode 2011–2020 ditulis oleh penulis eksternal. Fakta ini menunjukkan pergeseran penting dalam struktur produksi rubrik, sehingga pengasuh rubrik tidak lagi berperan sebagai penulis utama, melainkan sepenuhnya menempatkan diri sebagai kurator. Perubahan ini tidak mengurangi peran strategis pengasuh rubrik, justru menegaskan fungsinya sebagai penjaga kesinambungan nilai, arah pemaknaan, dan karakter kultural RSP. Dalam konteks ini, produksi rubrik menjadi hasil kerja kolektif yang dibangun melalui interaksi berkelanjutan antara pengasuh dan jejaring penulis eksternal.

Hal ini sejalan dengan penjelasan informan TT (2023) bahwa memasuki periode sekitar 2015, *headline* dialokasikan untuk penulis eksternal yang tentu saja tetap harus memiliki kompetensi di bidang sastra Jawa ataupun pengetahuan tentang budaya Jawa untuk memudahkan dalam menulis di RSP.

Hasil penelusuran dari 22 artikel yang diteliti menunjukkan *habitus* para penulis eksternal pada periode ini memiliki karakteristik yang relatif homogen dalam hal orientasi nilai, meskipun beragam dalam latar pengalaman. Para penulis berasal dari lingkungan budaya Jawa dan memiliki latar belakang sebagai sastrawan, akademisi, maupun

penggiat komunitas budaya. Pengalaman hidup, keterlibatan dalam praktik kebudayaan, serta kedekatan dengan tradisi literasi Jawa membentuk disposisi kultural yang khas. Disposisi ini tercermin dalam sensitivitas mereka terhadap persoalan etika sosial, kepemimpinan, dan kehidupan publik, yang kemudian diolah melalui simbol, metafora, dan narasi reflektif.

Nilai-nilai *ngemong, ngayomi*, dan *ngayemi* tetap menjadi inti filosofi *Hasta Brata* yang hadir sebagai rujukan etis utama dalam tulisan-tulisan RSP periode ini. Para penulis tidak mengemukakan nilai-nilai tersebut sebagai konsep normatif yang kaku, melainkan sebagai *laku* hidup yang terus diuji dalam konteks masyarakat modern. Pengalaman pribadi, pengamatan sosial, dan pengetahuan kultural dirangkai menjadi refleksi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pembaca. Dengan cara ini, tulisan-tulisan RSP menghadirkan etika kepemimpinan Jawa sebagai panduan moral yang bersifat kontekstual dan hidup.

Habitus penulis eksternal ditandai oleh kecenderungan untuk memadukan kedalaman refleksi dengan kepekaan sosial. Krisis moral masyarakat modern, perubahan pola relasi sosial, serta tantangan kepemimpinan di era digital tidak disikapi secara reaktif. Sebaliknya, para penulis mengolahnya melalui renungan yang berangkat dari nilai budaya dan pengalaman kolektif. Disposisi semacam ini dapat ditelusuri secara lebih sistematis melalui kerangka teori *habitus* Pierre Bourdieu.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, *habitus* berfungsi sebagai disposisi internal yang membimbing agen dalam menafsirkan realitas sosial dan memilih simbol-simbol budaya yang relevan (Bourdieu,

1993). Pada periode 2011–2020, *habitus* penulis RSP terlihat bekerja secara konsisten dalam praktik jurnalistik. Pilihan tema, sudut pandang, serta cara menyusun narasi tidak terlepas dari disposisi kultural yang telah mengendap melalui pengalaman panjang dalam dunia sastra, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, praktik produksi rubrik menjadi ruang aktualisasi *habitus* yang relatif stabil, meskipun berada dalam konteks media yang terus berubah.

Aktualisasi *habitus* tersebut berlangsung dalam ranah jurnalistik yang juga mengalami pergeseran signifikan. Ranah jurnalistik pada periode ini mengalami pergeseran signifikan. Sebagaimana dikemukakan Benson (2004) dan Lindell et al. (2019), ranah jurnalistik merupakan ruang sosial yang diatur oleh seperangkat norma, kebijakan redaksional, dan orientasi nilai yang membimbing praktik media. Pada periode 2011–2020, ranah ini diwarnai oleh tekanan ekonomi akibat penurunan oplah media cetak, perubahan pola konsumsi media, serta meningkatnya kompetisi dengan platform digital. Kondisi tersebut membentuk konteks produksi yang menuntut penyesuaian strategi tanpa mengorbankan identitas kultural rubrik. Situasi ini sejalan dengan studi Jaakkola (2015) bahwa terjadinya pergeseran jurnalisme budaya dari otonom dan berbasis nilai estetis menjadi heteronom akibat tekanan pasar.

Dalam situasi ini, pengasuh rubrik memainkan peran penting sebagai mediator antara nilai kultural dan realitas organisasi media. Sebagai kurator, pengasuh rubrik memastikan bahwa tulisan-tulisan yang dimuat tetap selaras dengan visi RSP sebagai ruang refleksi budaya. Proses seleksi dan penyuntingan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai, kedalaman refleksi, serta relevansi tema

dengan kehidupan sosial kontemporer. Melalui praktik ini, pengasuh rubrik menjaga agar RSP tidak kehilangan orientasi etisnya di tengah perubahan lingkungan media. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan TT (2023) bahwa proses seleksi naskah tetap dilakukan oleh pengasuh RSP agar konten yang ditampilkan tetap memenuhi standar redaksi.

Hubungan antara pengasuh rubrik dan penulis eksternal pada periode ini berkembang sebagai relasi sosial yang dinamis dan berkelanjutan. Pengasuh tidak hanya berperan sebagai penyunting, tetapi juga sebagai mitra dialog kultural. Interaksi ini menciptakan ruang pertukaran gagasan dan pengalaman, yang memperkaya kualitas refleksi dalam rubrik. Temuan ini sejalan dengan studi Munnik (2018) yang menunjukkan bahwa produksi makna dalam praktik jurnalistik melibatkan interaksi sosial yang berkesinambungan antara jurnalis dan berbagai aktor pendukungnya.

Relasi yang dibangun tersebut memperkuat kontinuitas nilai dalam RSP. Meskipun seluruh artikel ditulis oleh penulis eksternal, karakter rubrik tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa *habitus* pengasuh rubrik berfungsi sebagai penyangga nilai yang memastikan keselarasan budaya dan etika dalam setiap konten yang dihasilkan. Praktik ini menegaskan bahwa keberlanjutan rubrik tidak semata-mata bergantung pada individu penulis, tetapi pada kesepahaman nilai yang dibangun secara kolektif.

Dikaitkan era disrupsi digital, keberadaan RSP sebagai rubrik refleksi budaya menjadi semakin signifikan. Ketika arus informasi bergerak cepat, RSP menawarkan ruang jeda untuk merenung. *Habitus* para aktor yang terlibat dalam produksi rubrik mendorong praktik

jurnalistik yang tidak terburu-buru, memberi tempat bagi kedalaman makna dan keluhuran nilai. Dengan cara ini, RSP mempertahankan relevansinya sebagai ruang konstruksi realitas sosial yang berakar pada budaya lokal.

Habitus aktor dalam produksi RSP periode 2011–2020 menunjukkan proses adaptasi yang bersifat reflektif dan berkesinambungan. *Habitus* penulis eksternal dan pengasuh rubrik bekerja secara sinergis dalam menjaga kontinuitas nilai etis dan kultural, sekaligus merespons perubahan konteks media. Praktik jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan pandangan individual, tetapi mencerminkan upaya kolektif untuk merawat kebijaksanaan budaya Jawa dalam kehidupan publik modern.

Produksi jurnalistik RSP pada periode 2011–2020 tetap merujuk pada konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui interaksi *habitus*, nilai budaya, dan konteks ranah jurnalistik. Dengan pendekatan kualitatif dan konstruktivis, RSP sebagai ruang bagi nilai-nilai kepemimpinan ala Jawa tersebut terus dirawat, ditafsirkan ulang, dan dihadirkan secara relevan bagi masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat. Nilai-nilai tersebut hadir sebagai hasil perenungan kultural yang tumbuh dari pengalaman panjang berinteraksi dengan dunia sastra dan kebudayaan Jawa. Dalam kerangka ini, nilai sebagai tolok ukur mengenai baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Sistem nilai yang mengakar cenderung relatif menetap karena berfungsi sebagai orientasi hidup dan perilaku masyarakat (Djajasudarma dkk., 1997 dalam Sartini, 2009). Meski demikian, nilai tidak bersifat statis, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui proses sosial-historis, praktik budaya, serta interaksi antargenerasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Temuan studi menunjukkan RSP sebagai ruang di mana nilai-nilai kepemimpinan Jawa yang terus dirawat, ditafsirkan ulang. Hal ini sejalan dengan hasil studi Boughen (2023) bahwa jurnalis menegosiasikan identitas profesional serta nilai-nilai jurnalisme dalam konteks tertentu.

Modal Simbolik dan Kultural Aktor

Pada periodisasi 2011–2020, produksi RSP semakin menegaskan peran modal simbolik dan modal kultural sebagai penopang utama keberlanjutan rubrik. Perubahan struktural dalam industri media, terutama akibat krisis surat kabar dan disrupsi digital, membatasi ruang gerak media cetak secara ekonomi. Dalam situasi ini, RSP tidak lagi bergantung pada kekuatan material sebagai basis eksistensinya, melainkan pada akumulasi modal non-material yang dibangun sejak periode sebelumnya.

Modal simbolik dalam RSP periode ini terutama melekat pada figur para penulis eksternal. Para penulis hadir dengan reputasi kultural sebagai sastrawan, budayawan, akademisi, dan intelektual publik yang telah dikenal dalam ruang kebudayaan Jawa. Reputasi tersebut membentuk kepercayaan pembaca terhadap isi tulisan, karena rekam jejak kultural dan intelektual yang dibawa oleh para penulis. Dengan latar belakang tersebut, setiap artikel yang dimuat di RSP memperoleh bobot moral yang kuat sebagai refleksi nilai, bukan sekadar opini personal.

Hal ini sesuai penjelasan informan TT (2023). Menurutnya, pengasuh RSP menerima kontribusi dari masyarakat luas dalam hal ini penulis eksternal untuk mengisi RSP dengan latar belakang yang relevan dan

berkompeten. Kontribusi penulis eksternal tersebut mendapat penghargaan dari manajemen melalui pemberian honorarium sebagai modal ekonomi.

Kepercayaan pembaca terhadap tulisan-tulisan RSP tidak terbentuk secara instan. Hal tersebut merupakan hasil dari konsistensi gaya bertutur, kedalaman refleksi, dan kesetiaan pada nilai budaya yang dijaga lintas waktu. Dalam konteks ini, modal simbolik bekerja sebagai pengikat antara rubrik dan pembacanya. RSP dipandang sebagai ruang refleksi yang layak dirujuk ketika pembaca ingin merenungkan persoalan kepemimpinan, etika sosial, dan perubahan zaman dari perspektif budaya Jawa. Kepercayaan tersebut memperkuat posisi RSP sebagai rubrik yang memiliki otoritas moral berbasis kebudayaan. Hal ini seperti dikemukakan informan K (2020), warga Semarang, Jawa Tengah, yang sejak 1970an berlangganan 'Suara Merdeka' dan rutin membaca RSP setiap pekan.

Modal simbolik tersebut ditopang secara substantif oleh modal kultural para penulis eksternal. Modal kultural para penulis eksternal menjadi fondasi utama yang memperkaya narasi dalam RSP periode ini. Modal ini hadir dalam bentuk penguasaan tradisi Jawa, pemahaman mendalam atas filosofi *Hasta Brata*, serta kemampuan mengolah simbol dan estetika sastra. Penulis tidak hanya mengutip nilai-nilai budaya sebagai referensi tekstual, tetapi menghidupkannya melalui kisah, metafora, dan renungan yang dekat dengan pengalaman sosial pembaca. Kedalaman refleksi spiritual juga menjadi ciri khas, terutama dalam cara penulis mengaitkan nilai kepemimpinan dengan *laku* hidup dan tanggung jawab moral.

Penguasaan modal kultural tersebut tercermin dalam pilihan bahasa yang halus, penggunaan simbol-simbol budaya yang kontekstual, serta cara penulis menyusun alur narasi yang tidak tergesa-gesa. Artikel-artikel RSP pada periode ini mengajak pembaca untuk sejenak merenung, dan menimbang kembali arah kehidupan sosial. Praktik ini menunjukkan bahwa modal kultural tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun kedalaman makna dalam praktik jurnalistik budaya.

Pengasuh rubrik memiliki modal simbolik dan institusional yang berperan penting dalam menjaga arah pemaknaan RSP. Sebagai figur yang lekat dengan identitas rubrik, pengasuh membawa legitimasi institusional sebagai representasi nilai dan visi '*Suara Merdeka*'. Modal ini digunakan untuk mengarahkan kualitas tulisan melalui proses kuratorial yang cermat. Setiap artikel diseleksi dan disunting dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai, kedalaman refleksi, serta relevansi dengan konteks sosial kontemporer.

Informan BS (2024) selaku penggagas RSP dan Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' (1989-1998) menjelaskan, RSP merupakan hasil perpaduan antara kebijakan budaya, nilai-nilai Jawa, dan idealisme jurnalistik. Rubrik ini merupakan wujud komitmen kultural *'Suara Merdeka'* dalam menjaga jati diri masyarakat Jawa Tengah di tengah arus modernisasi. Simbol Semar dijadikan ikon utama RSP karena merepresentasikan pemimpin *pamomong*: tokoh yang menuntun dengan kearifan, melindungi tanpa pamrih, dan mengingatkan dengan kasih.

Sementara itu, peran pengasuh rubrik tidak berhenti pada aspek teknis penyuntingan. Pengasuh juga berfungsi sebagai penjaga

kesinambungan nilai *Hasta Brata* agar tetap hadir secara kontekstual dalam situasi masyarakat yang berubah cepat. Nilai-nilai *ngemong, ngayomi*, dan *ngayemi* tidak disajikan sebagai konsep abstrak, melainkan diterjemahkan dalam narasi yang menyentuh pengalaman konkret kehidupan modern. Dengan cara ini, modal simbolik pengasuh rubrik memperkuat orientasi etis RSP tanpa menjadikannya kaku atau terlepas dari realitas sosial.

Interaksi antara modal simbolik penulis dan modal institusional pengasuh rubrik membentuk konfigurasi produksi yang khas. Penulis membawa otoritas kultural dan kedalaman refleksi, sementara pengasuh memastikan bahwa keseluruhan narasi tetap berada dalam koridor nilai rubrik. Kondisi tersebut diakui informan TT maupun informan SA, sebagai hubungan yang bersifat saling melengkapi dan berkelanjutan. Pertimbangan ini yang melandasi RSP mempertahankan karakter reflektifnya meskipun seluruh artikel ditulis oleh penulis eksternal.

Dalam konteks modal ekonomi pada periode ini berada dalam kondisi yang semakin terbatas. Krisis surat kabar dan perubahan pola konsumsi media berdampak langsung pada sumber daya material yang dimiliki rubrik (manajemen 'Suara Merdeka'). Hal ini sesuai yang dikemukakan Herman & Chomsky (2008) bahwa media semakin mengalami krisis.

Informan TT (2020) mengakui sejak awal 2019 pihak manajemen 'Suara Merdeka' menerapkan kebijakan berupa penghentian honorarium untuk para penulis eksternal, termasuk RSP.

Namun, keterbatasan tersebut diakui TT, tidak serta-merta melemahkan RSP. Sebaliknya, kondisi ini mendorong pengasuh rubrik

untuk semakin mengandalkan modal simbolik dan kultural sebagai sumber legitimasi dan keberlanjutan. Keberadaan RSP dipertahankan bukan hanya karena nilai komersialnya semata, melainkan karena kontribusinya sebagai sebuah ruang refleksi budaya yang bernilai bagi pembaca.

Dalam konteks ini, praktik jurnalistik RSP menunjukkan bahwa keberlanjutan media tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Informan SA, GBS, SSL hingga TT mengaku pihaknya harus *berjibaku* menjalin dan merangkul para penulis eksternal untuk mengisi *headline* RSP secara *pro-bono* alias gratis.

TT mengaku bersyukur bahwa kepercayaan pembaca, reputasi kultural penulis, dan konsistensi nilai menjadi sumber daya utama yang menjaga relevansi rubrik. Modal simbolik berfungsi sebagai penopang utama ketika modal ekonomi menyusut, sementara modal kultural memastikan bahwa isi rubrik tetap memiliki kedalaman dan makna.

Dari perspektif konstruktivis, konfigurasi modal RSP periode 2011–2020 sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Makna, nilai, dan legitimasi rubrik dibangun melalui interaksi antara penulis, pengasuh rubrik, dan pembaca. Praktik jurnalistik sebagai ruang dialog kultural, sehingga nilai-nilai budaya Jawa terus dirawat dan ditafsirkan ulang.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, modal simbolik dan kultural yang dimobilisasi oleh para aktor RSP berfungsi sebagai sumber daya yang membimbing praktik jurnalistik dalam ranah media. Namun, dalam studi ini, fokusnya bukan pada dinamika dominasi, melainkan pada bagaimana modal tersebut berkontribusi pada kesinambungan

nilai dan orientasi etis rubrik. Modal digunakan untuk menjaga kualitas refleksi, memperkuat kepercayaan pembaca, dan memastikan bahwa RSP tetap relevan di tengah perubahan lingkungan media.

Integrasi modal simbolik dan kultural dalam produksi RSP periode 2011–2020 menunjukkan bahwa rubrik ini bertahan dan berkembang melalui kekuatan nilai dan reputasi kultural. Keterbatasan ekonomi tidak menghilangkan peran RSP sebagai ruang refleksi, justru mempertegas pentingnya modal non-material dalam praktik jurnalistik budaya. Melalui kombinasi reputasi penulis, peran kuratorial pengasuh rubrik, dan kesetiaan pada nilai *Hasta Brata,* RSP terus hadir sebagai wahana refleksi etis yang berakar pada budaya Jawa dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Analisis atas produksi RSP periode 2011–2020 memperlihatkan dalam situasi media yang berubah cepat, keberlanjutan jurnalistik budaya tidak hanya bergantung pada sumber daya material, tetapi juga pada kemampuan aktor-aktornya dalam merawat dan mengartikulasikan nilai. RSP periode 2011–2020 menjadi contoh bagaimana modal simbolik dan kultural bekerja sebagai fondasi utama dalam konstruksi makna sosial yang hidup, reflektif, dan berkesinambungan.

Ranah Jurnalistik dan Konteks Produksi

Pada periode 2011–2020, RSP beroperasi dalam lanskap media yang mengalami perubahan struktural signifikan. Penurunan oplah surat kabar, menyusutnya pendapatan iklan, serta pergeseran pola konsumsi informasi ke platform digital menjadi kondisi yang tidak terpisahkan dari proses produksi rubrik. Situasi ini semakin kompleks ketika pandemi Covid-19 mulai merebak pada awal 2020, yang tidak

hanya berdampak pada keberlangsungan ekonomi media cetak, tetapi juga pada ritme kerja redaksi dan orientasi produksi jurnalistik secara umum. Dalam konteks tersebut, RSP tidak sekadar bertahan sebagai rubrik tetap, tetapi terus memosisikan diri sebagai ruang artikulasi nilai budaya dan refleksi sosial yang konsisten.

Keberadaan RSP di tengah situasi media yang rapuh memperlihatkan bahwa produksi jurnalistik budaya tidak sepenuhnya bergantung pada kelimpahan sumber daya material. Rubrik ini tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai ruang produksi makna kultural dengan menempatkan nilai kepemimpinan etis berbasis filosofi *Hasta Brata* sebagai poros utama narasi. Nilai-nilai seperti *ngemong, ngayomi*, dan *ngayemi* hadir secara berkelanjutan dalam artikel-artikel yang terbit, sebagai kerangka refleksi atas realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Konsistensi ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang serba tidak menentu, orientasi nilai justru menjadi jangkar penting bagi keberlanjutan praktik jurnalistik budaya.

Pada saat yang sama, informan TT (2020) menandaskan, RSP tetap menjalankan fungsi kritik sosial melalui bahasa *pasemon* dan simbol-simbol budaya yang khas. Pilihan gaya ungkap ini bukan sekadar strategi estetis, tetapi merupakan bagian dari tradisi komunikasi budaya Jawa yang mengedepankan kehalusan, sindiran, dan perenungan. Melalui metafora, perumpamaan, serta rujukan pada kisah-kisah simbolik, RSP menyampaikan refleksi atas persoalan kepemimpinan, etika publik, dan krisis moral tanpa harus hadir dalam bentuk pernyataan yang frontal. Dengan cara ini, ditambahkan informan SA (2020), RSP tetap menjaga daya reflektifnya sekaligus mempertahankan kesinambungan dengan tradisi budaya yang menjadi fondasinya.

Interaksi antara tradisi dan modernitas menjadi ciri penting dalam praktik jurnalistik RSP pada periode ini. Di satu sisi, rubrik berpijak pada nilai-nilai budaya Jawa yang mengakar kuat; di sisi lain, RSP merespons dinamika sosial-politik kontemporer yang terus berubah. Praktik jurnalistik semacam ini menunjukkan bahwa RSP tidak hanya bereaksi terhadap kondisi struktural yang melingkupinya, tetapi secara aktif membangun makna sosial melalui proses seleksi isu, pilihan simbol, dan cara bertutur yang khas. Makna sosial yang dihasilkan tidak hadir sebagai cerminan langsung realitas, melainkan sebagai hasil konstruksi yang dibentuk melalui interaksi antara pengalaman aktor, tradisi kultural, dan konteks institusional media.

Dalam konteks institusional media berbasis kerangka paradigma konstruktivis, perspektif Bourdieu terkait ranah merupakan ruang sosial yang sarat norma dan aturan (Benson, 2004; Lindell et al., 2019). Ranah ini menyediakan seperangkat aturan, norma, dan kebiasaan profesional yang membingkai bagaimana aktor media memproduksi dan memaknai realitas sosial. Pemahaman ini relevan untuk melihat posisi RSP sebagai praktik jurnalistik yang tumbuh di dalam struktur institusional media, sekaligus berakar pada konteks sosial-budaya pembacanya. Rubrik ini tidak berdiri di luar struktur, tetapi beroperasi di dalamnya dengan cara yang reflektif dan berkesinambungan.

Melalui RSP, wartawan, redaktur, dan penulis eksternal tidak hanya menyampaikan informasi atau opini, tetapi membangun pemaknaan bersama atas realitas sosial. Pemaknaan tersebut dijelaskan informan TT (2020) disajikan melalui simbol, metafora, dan rujukan kultural yang akrab bagi khalayak pembaca Jawa. Proses ini menghadirkan ruang dialog kultural antara media dan masyarakat, sehingga nilai-nilai

tradisional berfungsi sebagai sumber refleksi untuk menafsirkan persoalan kontemporer. Dengan demikian, konstruksi makna semacam ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui praktik produksi rubrik yang mengikuti aturan profesional, norma redaksional, dan kebijakan institusional media.

Berpijak dari hal tersebut, pada level operasional, aturan profesional dan kebijakan redaksional berfungsi sebagai pedoman utama dalam produksi RSP. Tentu saja ditandaskan informan GP selaku Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' (2015-2022), operasional RSP tetap menginduk pada kebijakan redaksi. Namun, pedoman tersebut tidak dijalankan secara mekanis. Sebagaimana dikemukakan Willig (2012), aturan dan norma media selalu dihayati dan ditafsirkan melalui disposisi para aktor yang terlibat dalam praktik jurnalistik.

Dalam konteks RSP, seperti diungkapkan informan GBS (2020) bahwa para pengasuh rubrik berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan redaksi ke dalam keputusan editorial yang konkret, mulai dari pemilihan tema, penentuan penulis, hingga penyuntingan gaya bahasa. Proses ini memperlihatkan bagaimana kebijakan institusional dan disposisi individual saling berkelindan dalam praktik sehari-hari.

Secara praktis, RSP menunjukkan bahwa orientasi kultural seperti fungsi edukatif dan pewarisan nilai, berjalan berdampingan dengan tuntutan keberlanjutan media sebagai institusi ekonomi (Benson, 2006). Meskipun rubrik ini tidak berorientasi pada profit, RSP tetap berada dalam struktur media yang harus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Konteks ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupi produksi rubrik membentuk nuansa pemaknaan yang memengaruhi cara isu dirumuskan dan disajikan. Oleh karena itu,

artikel-artikel dalam RSP tidak hanya mencerminkan pandangan penulis, tetapi merupakan hasil konstruksi makna yang dibentuk secara sosial di dalam lingkungan media tertentu (Schultz, 2007).

Dalam konteks yang berbeda, salah satu unsur penting dalam nuansa tersebut adalah dinamika politik nasional pada periode 2011–2020. Periode ini merupakan masa akhir pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada periode pertama serta kedua pemerintahan Joko Widodo. Perubahan konfigurasi politik nasional ini membawa implikasi bagi iklim kebebasan pers dan praktik jurnalistik secara umum. Sejumlah kajian mencatat bahwa pada periode pemerintahan Jokowi, pers menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi kebebasan pers, termasuk tekanan hukum, intervensi politik, serta keterbatasan akses terhadap informasi publik (Restendy et al., 2025). Selain itu, Mubarok (2021) mengulas rezim yang 'mengembangbiakkan' para *buzzer* sebagai bagian dari strategi komunikasi politik sehingga memengaruhi ekosistem media maupun publik pada umumnya.

Kondisi struktural tersebut membentuk lingkungan produksi RSP dan menjadi konteks penting dalam menelaah dinamika antara agen, struktur, dan isi media. Dalam situasi di mana ruang kebebasan pers menghadapi berbagai pembatasan, dijelaskan informan TT (2023) pilihan RSP untuk tetap mengandalkan bahasa *pasemon* dan simbol budaya menunjukkan komitmen pengasuh rubrik untuk menjaga ruang refleksi yang aman sekaligus bermakna. Praktik ini tidak berdiri sebagai sikap oposisi, melainkan sebagai cara kultural untuk merawat nilai-nilai etis dan kebijaksanaan dalam narasi publik. Berbagai kondisi tersebut dapat dipahami secara lebih sistematis melalui kerangka analisis pengaruh isi media.

Untuk memahami kompleksitas produksi RSP pada periode ini, kerangka lima level hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese (1996, 2014) memberikan perspektif yang komprehensif. Pada level rutinitas media, adaptasi terlihat dalam pengaturan jadwal terbit, panjang tulisan, serta gaya bahasa yang disesuaikan dengan keterbatasan distribusi dan perubahan pola baca di era digital. Konsistensi rubrik dijaga melalui format yang relatif stabil, meskipun medium dan ritme produksi media cetak mengalami perubahan.

Pada level individu, kebebasan penulis dalam menafsirkan isu sosial-politik melalui metafora budaya Jawa tetap menjadi ciri khas RSP. Kebebasan ini tidak berlangsung tanpa batas, melainkan diarahkan melalui proses kurasi oleh pengasuh rubrik untuk menjaga kohesi nilai dan kesinambungan narasi. Di sini, pengalaman personal, latar belakang kultural, dan kepekaan sosial penulis berperan penting dalam membentuk isi artikel.

Pada level organisasi, kebijakan redaksi 'Suara Merdeka' menjaga identitas RSP sebagai rubrik budaya yang memiliki fungsi reflektif dan edukatif. Meskipun berada dalam institusi media yang menghadapi tekanan ekonomi, rubrik ini dipertahankan sebagai bagian dari komitmen redaksi terhadap pewarisan nilai budaya dan pelayanan publik. Keputusan ini menunjukkan bahwa orientasi kultural tetap memiliki tempat dalam struktur organisasi media.

Tekanan ekstra-media, seperti disrupsi digital dan perubahan perilaku pembaca, turut memengaruhi strategi distribusi dan eksistensi rubrik. Namun, alih-alih mengubah substansi nilai yang diusung, RSP menyesuaikan diri dengan cara mempertahankan gaya bertutur dan tema yang relevan dengan konteks zaman. Pada level

ideologi, filosofi *Hasta Brata* berfungsi sebagai fondasi moral yang menopang keseluruhan praktik produksi rubrik. Fondasi ini diperkuat oleh modal kultural, sosial, dan simbolik para aktor yang terlibat, sehingga RSP tetap memiliki legitimasi di mata pembacanya.

Tekanan pada level organisasi dan ekstra-media tidak hanya hadir sebagai latar abstrak, tetapi terwujud dalam keputusan-keputusan konkret di ruang redaksi, mulai dari pemilihan topik hingga keberlanjutan rubrik itu sendiri. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa produksi RSP pada periode 2011–2020 merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur media, disposisi aktor, dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Dalam kerangka konstruktivis, praktik jurnalistik RSP sebagai proses berkelanjutan dalam merawat, merumuskan, dan menyampaikan makna sosial yang berakar pada nilai budaya Jawa, sekaligus relevan dengan tantangan zaman.

Kondisi struktural tersebut tercermin secara nyata dalam kebijakan redaksional yang menyentuh aspek produksi rubrik. Salah satu bentuk keputusan tersebut terjadi pada awal tahun 2019, ketika honorarium bagi penulis eksternal dihentikan seiring krisis keuangan yang dialami 'Suara Merdeka'. Kondisi ini juga diakui oleh Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka', TT (2024), serta Sekretaris Redaksi 'Suara Merdeka', HSK, yang menyatakan bahwa situasi internal media yang "tidak baik-baik saja" memaksa redaksi untuk sementara waktu tidak memberikan honor kepada penulis eksternal, termasuk kontributor RSP.

Ketiadaan honorarium tersebut tidak menjadi kendala serius bagi sejumlah penulis eksternal. Mereka tetap antusias mengirim naskah dengan berlandaskan pada kepuasan batin, penguatan jejaring kultural, serta semangat yang kerap dimaknai sebagai bentuk "jihad

jurnalistik" melalui kontribusi di RSP. Etos non-material ini berkelindan dengan orientasi nilai yang sejak awal diusung oleh rubrik, sehingga relasi antara penulis dan RSP tidak semata bersifat profesional, tetapi juga ideologis dan kultural.

Berikut penuturan SM-penulis eksternal dalam RSP:

> "Sejujurnya saya tidak masalah dengan tidak menerima honor, karena saya justru menganggap rubrik ini tempat saya membangun komunitas dan saya pun pernah menjadi wartawan Suara Merdeka, sehingga saya tetap berupaya menjalin kedekatan dengan para pengasuh rubrik ini (RSP-red). Saya tetap akan mengisi rubrik, karena penting untuk membangun jejaring, ada kepuasan batin dan bahkan bisa dikatakan sebagai Jihad Jurnalistik untuk memperjuangkan kebenaran dalam ranah budaya." (Wawancara dengan SM, 2020).

Dalam kerangka nilai tersebut, RSP pada periode ini tetap mengedepankan prinsip jurnalisme yang menghindari konfrontasi langsung, meskipun semakin intens melontarkan kritik sosial di tengah ketidakpastian bisnis media akibat disrupsi digital, situasi politik nasional yang kian kompleks, serta awal krisis pandemi Covid-19.

Informan GP, Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' periode 2015–2023, menjelaskan bahwa sejak awal 'Suara Merdeka' mengusung orientasi jurnalisme yang berakar pada nilai kearifan lokal Jawa, termasuk dalam pengelolaan RSP. Dalam kerangka ini, koran lokal bukan sekedar penyampai informasi, tetapi juga sebagai perekat komunitas Jawa Tengah yang berperan menjaga keselarasan sosial.

Kebijakan redaksional 'Suara Merdeka', lanjut GP, diarahkan untuk menghadirkan pemberitaan yang menyejukkan dan berorientasi

solusi, bukan sensasi atau konflik terbuka. Prinsip ini mencerminkan nilai budaya Jawa seperti rukun dan musyawarah, dengan media diposisikan sebagai moderator konflik sosial. Di sisi lain, lokalitas menjadi identitas utama 'Suara Merdeka', dengan sekitar 80–90 persen kontennya bersumber dari isu lokal. Orientasi redaksional ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai rubrik tematik sebagai wadah artikulasi nilai dan identitas budaya tersebut.

Dalam kerangka inilah, RSP berperan penting sebagai ruang refleksi budaya dan moral masyarakat Jawa. Melalui rubrik ini, relasi manusia dengan Tuhan, sesama, alam, dan diri sendiri diartikulasikan secara reflektif termasuk di antaranya melalui nilai kepemimpinan *Hasta Brata,* sehingga RSP menjadi wahana pemaknaan etis yang konsisten dengan visi kultural Suara Merdeka.

Berikut penjelasan dari informan GP selaku Pimpinan Redaksi 'Suara Merdeka':

> "Orientasi kepemimpinan redaksi 'Suara Merdeka' berpijak pada kultural Jawa- yakni kepemimpinan yang memadukan kebijaksanaan, harmoni, tanggung jawab sosial, kearifan lokal dan pendidikan moral masyarakat. Kebijakan ini juga dituangkan dalam bentuk publikasi, terutama melalui Rubrik 'Sang Pamomong' sebagai pedoman bagi masyarakat yang di dalamnya sarat muatan nilai-nilai luhur, termasuk prinsip *Hasta Brata*." (Wawancara dengan GP, 2023).

Pada intinya, lanjut GP, praktik jurnalisme di 'Suara Merdeka' dijalankan sebagai wujud kearifan lokal yang menekankan harmoni sosial, tanggung jawab moral, dan pelestarian nilai budaya Jawa. Orientasi ini menjadi dasar pembentukan kebijakan redaksional secara profesional sekaligus penguatan identitas media di tengah tantangan modernitas digital. Sejalan dengan pandangan Danzon-Chambaud &

Cornia (2023), bahwa dalam menghadapi kemajuan teknologi, jurnalis dituntut tetap aktif menegosiasikan praktik profesionalnya agar nilai inti profesi tetap terjaga. Negosiasi nilai dan praktik inilah yang dalam jangka panjang, membentuk konfigurasi disposisi dan cara pandang kolektif dalam ruang redaksi.

Berpijak pada kerangka teoretis Bourdieu, budaya kultural Jawa yang hidup di 'Suara Merdeka' sebagai *habitus* yang memengaruhi logika produksi isi media. Melalui *habitus* tersebut, koran lokal ini menampilkan praktik jurnalisme yang berpihak pada harmoni sosial, kearifan lokal, serta pendidikan moral masyarakat. RSP bukan semata sebagai strategi editorial, melainkan sebagai orientasi kultural yang terinternalisasi dalam praktik jurnalistik sehari-hari. *Habitus* ini menjadi dasar keberlanjutan rubrik dalam menghadapi perubahan struktur media.

Dengan demikian, praktik produksi rubrik ini mengafirmasi pemikiran Bourdieu tentang relasi agen dan struktur, serta menegaskan relevansi hierarki pengaruh isi media dalam memahami distribusi simbol, legitimasi, dan konstruksi makna dalam produksi budaya di era digital. Temuan ini menempatkan RSP sebagai contoh empiris dari bagaimana jurnalisme beradaptasi tanpa kehilangan orientasi nilai dalam lanskap media yang berubah.

Sejalan dengan temuan tersebut, Barnard (2018) menunjukkan bahwa ranah jurnalistik kontemporer semakin bersifat hibrid dan lentur. Kendati demikian, jurnalis masih memiliki ruang otonomi dalam menegosiasikan praktiknya sambil beradaptasi dengan logika digital dan mekanisme kerja dalam ekosistem jejaring sosial. Pandangan ini diperkuat oleh Boughen (2023) yang menekankan bahwa jurnalis

dituntut adaptif dan mampu bernegosiasi melalui identitas profesionalnya dengan bertumpu pada nilai inti jurnalisme itu sendiri.

5. Potret Produksi RSP Periodisasi 1996-2020

Produksi RSP sepanjang periode 1996–2020 menunjukkan pergeseran konfigurasi aktor, mekanisme produksi, dan sumber daya pendukung, namun tetap mempertahankan kontinuitas orientasi kultural dan etis. Perubahan ini berkembang seiring perubahan konteks sosial dan media itu sendiri.

Pada periode awal 1996–1998, produksi RSP berada dalam konfigurasi yang relatif tertutup dan terpusat. RSP pada fase ini berlangsung di era represif oleh Presiden Soeharto dan ketatnya pengawasan terhadap pers mulai penyensoran hingga pembredelan (Imron et al., 2016). Kondisi tersebut mendorong pengelola rubrik mengadopsi strategi artikulasi simbolik dan pasemon budaya sebagai medium kritik sosial, untuk menjaga keberlanjutan rubrik sekaligus menghindari benturan langsung dengan kekuasaan.

Di fase ini, pengasuh rubrik merangkap sebagai penulis internal, sekaligus berfungsi sebagai pengarah utama isi dan orientasi nilai rubrik. Latar belakang pengasuh yang berasal dari budaya Jawa, dengan pengalaman sebagai sastrawan, budayawan, kolumnis, dan cerpenis, membentuk mekanisme produksi secara personal, reflektif, dan berbasis pengalaman kultural. Dalam fase ini, rubrik beroperasi sebagai ruang ekspresi kultural internal redaksi, di mana proses seleksi, penulisan, dan pemaknaan berlangsung dalam satu lingkaran aktor. Kondisi ini mencerminkan bentuk produksi jurnalistik budaya yang

mengandalkan otoritas personal, kedalaman tradisi, dan pengalaman menulis sebagai sumber legitimasi utama.

Seiring dengan perubahan konteks sosial dan keterbukaan pasca-Reformasi (Arnus, 2015; Anom & Waluyo, 2011; Andani & Birsyada, 2024) produksi RSP pada periode 2000–2010 mulai mengalami perluasan aktor yang signifikan. Keterlibatan penulis eksternal mulai menjadi bagian penting dalam produksi rubrik. Dari 18 artikel yang dianalisis, sekitar 80 persen merupakan karya penulis eksternal yang juga berasal dari latar budaya Jawa, dengan profil sebagai sastrawan dan akademisi, terutama dosen. Fakta ini menunjukkan bahwa perluasan aktor tidak menggeser orientasi nilai rubrik, melainkan memperluas spektrum refleksi melalui figur-figur yang memiliki kesesuaian disposisi kultural. Dalam periode ini, pengasuh rubrik tetap hadir sebagai penulis internal (sekitar 20 persen), sekaligus menjalankan peran sebagai editor dan kurator yang menjaga kesinambungan arah nilai dan gaya refleksi.

Pada fase ini, penulis eksternal memperoleh honorarium. Kehadiran dukungan ekonomi tersebut membentuk relasi profesional yang relatif stabil antara rubrik dan penulis luar. Namun, yang lebih menentukan bukan semata aspek materialnya, melainkan kesamaan orientasi kultural dan etik antara pengasuh dan penulis. Honor berfungsi sebagai pengakuan profesional, sementara kualitas refleksi tetap bertumpu pada latar literasi, pengalaman budaya, dan kepekaan sosial aktor-aktornya. Dengan demikian, RSP periode 2000–2010 menandai fase transisi dari produksi yang bersifat internal menuju produksi kolaboratif, tanpa kehilangan identitas kultural rubrik.

Periode 2011–2020, RSP di era akhir kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memasuki periode kedua Presiden Joko Widodo yang secara empiris menghambat kebebasan pers (Restendy et al., 2025). Rubrik ini memperlihatkan perubahan yang lebih drastis dalam struktur produksi, terutama dari sisi aktor dan sumber daya ekonomi. Seluruh artikel *headlin*e yang dianalisis pada periode ini merupakan karya penulis eksternal, dengan latar yang semakin beragam: sastrawan, akademisi, budayawan, penggiat komunitas budaya, guru, hingga mahasiswa pascasarjana. Meskipun demikian, kesamaan latar budaya Jawa tetap menjadi 'benang merah' yang menyatukan praktik produksi rubrik. Pengasuh rubrik tidak lagi berperan sebagai penulis internal, tetapi semakin menegaskan fungsi kuratorial, memastikan bahwa keberagaman latar aktor tetap bergerak dalam satu kerangka nilai yang selaras.

Perubahan struktur aktor dan mekanisme produksi tersebut kemudian beririsan langsung dengan tekanan ekonomi media yang memuncak sejak 2019 (Croteau & Haynes, 2006). Krisis keuangan yang dialami 'Suara Merdeka' sebagai dampak dari krisis surat kabar dan disrupsi digital, menyebabkan implikasi serius terhadap dinamika produksi RSP. Hal ini sesuai studi Leurdijk et al., (2014), Franklin, (1988), Wahl-Jorgensen et al., (2016) terkait imbas bisnis media cetak di era disrupsi digital. Kondisi ini berimbas terhadap penulis eksternal yang tidak lagi menerima honor, sehingga keberlanjutan produksi rubrik sepenuhnya bertumpu pada loyalitas kultural dan komitmen personal para penulis. Fakta bahwa RSP tetap terbit dengan karakter reflektif yang konsisten menunjukkan bahwa praktik jurnalistik budaya ini tidak bertumpu pada insentif ekonomi. Rubrik ini bertahan karena

diperkuat oleh internalisasi nilai dan kedekatan sosial antara pengasuh rubrik dan jejaring penulisnya.

Dinamika lintas periode ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan RSP ditopang oleh tiga hal utama. Pertama, *habitus* kultural aktor yang terbentuk melalui pengalaman panjang, keterlibatan dalam tradisi Jawa, dan komitmen terhadap etika kepemimpinan *Hasta Brata*. Kedua, pergeseran mekanisme produksi dari terpusat ke kolabo-ratif, lalu ke jejaring eksternal berbasis kepercayaan dan kedekatan sosial. Ketiga, praktik redaksional RSP menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan ekosistem media, terutama dalam situasi keterbatasan sumber daya, tanpa meninggalkan orientasi nilai kultural dan etis yang menjadi dasar rubrik.

Dengan kata lain, produksi RSP 1996-2020 menunjukkan peran disposisi kultural aktor menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan jurnalistik budaya, meskipun terjadi perubahan dalam mekanisme produksi RSP dan kondisi ekonomi media. RSP berfungsi sebagai praktik jurnalistik budaya yang berkelanjutan, dengan produksi makna yang dibentuk melalui keselarasan nilai, pengalaman, dan komitmen lintas generasi penulis.

Secara keseluruhan, keberlanjutan produksi RSP 1996-2020 dirangkum dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Produksi RSP Periodisasi 1996-2020

No	Periode	Penulis & *Habitus*	Modal Dominan	Kondisi Sosial-Politik	Catatan Produksi
1	1996-1998	Internal; *habitus* Jawa kuat	Simbolik & sosial internal	Era otoriter akhir Orde Baru	Rubrik homogen, fokus keteladanan dan moral, kritik halus (*pasemon*)
2	1999-2000	Tidak Terbit	--------	--------	Imbas dari pasca krismon dan pasca-Reformasi
3	2000-2010	80% eksternal; *habitus* plural	Simbolik dan sosial lebih luas, ekonomi bervariasi	Reformasi, kebebasan pers, transisi kepemimpinan nasional	Rubrik reflektif dan kontemplatif, perspektif plural, pengawasan sosial tetap terjaga, honor hingga 2018, kuratorial kuat
4	2011-2020	100% eksternal; *habitus* adaptif	Simbolik dan sosial tertinggi	Krisis surat kabar, dinasti politik, pandemi Covid-19	Rubrik kompleks, kritik sosial halus tetap, kuratorial ketat

Sumber: Penulis (2025)

Tabel 5.1 menunjukkan produksi RSP yang responsif terhadap perubahan konteks sosial-politik dan komposisi penulis. Periode 1996–1998 ditandai dominasi penulis internal dengan *habitus* Jawa yang kuat dan refleksi simbolik yang halus. Periode jeda 1999–2000 merefleksikan dampak krisis pasca-Reformasi. Pada 2000–2010, keterlibatan penulis eksternal memperluas modal simbolik dan perspektif reflektif. Periode 2011–2020 menegaskan daya tahan kultural RSP melalui kurasi ketat, kritik sosial 'lembut', dan konsistensi nilai etis.

B. *Habitus* Aktor dalam Produksi RSP

Habitus jurnalistik yang membentuk produksi RSP tidak dapat dilepaskan dari dinamika redaksi 'Suara Merdeka' sebagai media lokal

dengan akar budaya Jawa yang kuat. RSP dijelaskan informan HB (2020) merupakan ruang simbolik tempat para wartawan dan penulis eksternal menegosiasikan antara profesionalisme jurnalisme modern dengan nilai-nilai kejawaan yang mereka anut secara personal dan kultural.

Dalam kerangka Bourdieu (1993), ruang semacam ini sebagai *field* tempat para aktor jurnalistik berinteraksi dan membangun makna secara sosial, dengan membawa *habitus* serta modal yang mereka miliki. (Willig, 2012; Schultz, 2007). Melalui praktik dan relasi yang berlangsung di dalamnya, posisi, pengaruh, dan orientasi makna dalam jurnalisme tidak hadir secara alamiah, melainkan dikonstruksi secara dinamis dalam keseharian praktik jurnalistik (Barnard, 2018). Di sini, dinamika dalam ranah jurnalistik merefleksikan proses negosiasi makna yang berlangsung terus-menerus antara pengalaman aktor, nilai profesional, dan struktur institusional yang melingkupinya.

Lebih lanjut, bagi tokoh-tokoh seperti TT dan HB, penulisan di RSP bukan semata aktivitas jurnalistik, melainkan juga bentuk *laku* spiritual dan kultural. Mereka menulis bukan untuk mengejar popularitas atau kepentingan ekonomi, melainkan sebagai cara untuk '*ngemong* masyarakat' melalui konten kebudayaan. Seperti diungkap oleh TT (wawancara, 2024), RSP baginya adalah "ruang sunyi di tengah kebisingan politik dan komersialisasi media." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dalam kesadaran wartawan, ada jarak terhadap arus utama industri media yang cenderung menonjolkan sensasi dan kepentingan pasar (Anderson, 2012). *Habitus* kultural mereka yang dibentuk oleh prinsip leluhur antara lain *eling lan waspada* mendorong lahirnya praktik penulisan yang reflektif, penuh *pasemon,* dan sarat *pitutur* moral.

Dalam praktiknya, wartawan dan redaksi 'Suara Merdeka' membangun sistem kerja yang unik dalam RSP. Tulisan-tulisan di rubrik ini melewati proses kurasi yang tidak hanya mempertimbangkan aktualitas, tetapi juga nilai moral dan kehalusan bahasa. Informan TT (2024) salah satu pengasuh rubrik, menjelaskan bahwa setiap artikel harus 'membawa pencerahan tanpa menggurui, dan menegur tanpa menyakiti.' Prinsip ini mencerminkan logika budaya Jawa dalam berkomunikasi, yaitu mengedepankan *tata krama* dan harmoni sosial (Magnis-Suseno, 1993). Melalui prinsip inilah kritik terhadap pemerintah, elite politik, atau perilaku sosial masyarakat dikemas secara *alus,* namun tetap tajam secara makna.

Kelembutan itu bukan bentuk kepasrahan, tetapi strategi komunikasi yang cerdas. Dalam era pemerintahan Orde Baru yang represif, gaya bahasa simbolik menjadi satu-satunya cara agar kritik bisa lolos dari sensor dan ancaman *pembredelan.* Informan HB (2020) yang aktif menulis di masa 1990-an, mengakui bahwa Rubrik 'Sang Pamomong' adalah medan yang lembut" sebuah ruang aman untuk menyampaikan perlawanan moral melalui metafora budaya. Dengan kata lain, *habitus pamomong* melandasi jurnalisme RSP berfungsi sebagai kritik secara halus tanpa mengundang konflik ataupun konfrontasi terbuka dengan pihak sasaran.

Dalam proses produksinya, wartawan RSP sering memadukan riset tekstual dengan refleksi budaya. Informan TT (2024), salah satu pengasuh RSP menjelaskan bahwa ia kerap mengambil referensi dari teks klasik seperti *Serat Kalatidha* karya Ranggawarsita atau *Serat Wulangreh* karya Pakubuwono IV, untuk memotret persoalan sosial-politik kontemporer. Praktik ini memperlihatkan artikulasi makna antara nilai-nilai tradisi dan pengalaman sosial masa kini, sehingga teks budaya Jawa tidak

berhenti sebagai peninggalan simbolik, tetapi hadir sebagai rujukan etis dalam konteks modern. Pendekatan ini mencerminkan *habitus pamomong* yang menjaga kesinambungan nilai sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika zaman. Informan TT mempertegas bahwa jurnalisme melalui RSP menjadi sarana *pamomong* masyarakat.

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) menjembatani kearifan tradisional dan kehidupan sosial modern. Di sinilah, jurnalis RSP berperan sebagai *pamomong* bukan sekadar penyampai informasi, tetapi pembimbing moral dan kultural bagi masyarakat. Peran ini tampak dalam cara mereka menulis: memilih diksi yang halus, menggunakan metafora Jawa, dan menghindari provokasi. Dalam istilah Carey (2009), praktik semacam itu menunjukkan fungsi komunikasi sebagai ritual yakni upaya memperkuat rasa kebersamaan dan makna hidup bersama, bukan semata transmisi informasi.

Dari keseluruhan praktik itu, *habitus* jurnalistik dalam RSP terbentuk melalui tiga lapis nilai utama. Pertama, etos moral yang menempatkan tulisan sebagai sarana pengasuhan spiritual masyarakat. Kedua, etos budaya yang menekankan kesantunan dan keseimbangan dalam menyampaikan kritik. Ketiga, etos sosial yang menegaskan tanggung jawab jurnalis sebagai bagian dari komunitas lokal yang harus dirawat dan diperkuat. Ketiga etos ini berpadu menjadi identitas kultural 'Suara Merdeka' yang membedakannya dari media lain, dan sekaligus menjadi fondasi keberlanjutan RSP selama lebih dari dua dekade.

Habitus aktor dalam produksi RSP melahirkan *spirit pamomong*. *Spirit* ini tidak hanya berfungsi sebagai konsep moral dalam menulis, tetapi juga sebagai modal simbolik yang menopang eksistensi 'Suara Merdeka' di antara media lokal Jawa Tengah. Dalam kerangka teori

Bourdieu (1993), modal simbolik merupakan modal yang diperoleh melalui legitimasi sosial, bukan materi. Dalam konteks RSP, modal itu hadir dalam bentuk kepercayaan publik terhadap nilai-nilai luhur yang diusung: kejujuran, kesantunan, kebijaksanaan, dan pengayoman. Nilai-nilai ini yang membedakan 'Suara Merdeka' dari media lain di ranah lokal maupun nasional.

Merujuk dari jejak historis RSP sejak awal kemunculannya pada 1996, menempatkan diri sebagai ruang bagi ekspresi kearifan lokal budaya Jawa di tengah dinamika sosial-politik. RSP berperan bukan hanya sebagai rubrik budaya, tetapi juga sebagai 'kompas moral' masyarakat Jawa Tengah. Seperti dikatakan informan MT (2020), tulisan-tulisan di RSP merupakan "interaksi kebudayaan antara penulis dengan pembaca," yang mempertemukan kesadaran kultural wartawan Jawa dengan masyarakat pembaca yang memiliki basis budaya serupa. Di titik inilah RSP berfungsi sebagai medium komunikasi komunal, tempat nilai-nilai kejawaan direfleksikan, dimaknai ulang, dan diwariskan lintas generasi.

Nilai *pamomong* yang secara etimologis berarti mengasuh, membimbing, dan mengayomi menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas redaksional di 'Suara Merdeka'. *Spirit* ini mendorong lahirnya gaya jurnalisme yang reflektif dan beretika, jauh dari gaya sensasional atau provokatif. Dalam konteks lokal, RSP menjadi identitas simbolik 'Suara Merdeka' yang mempertegas posisinya sebagai koran Jawa Tengah. Identitas ini diperkuat oleh *tagline*-nya, 'Perekat Komunitas Jawa Tengah', yang tidak sekadar slogan pemasaran, tetapi mencerminkan misi kultural media tersebut. Dalam wawancara dengan informan AM (AJI Semarang, 2024), menekankan bahwa RSP adalah "ciri khas atau

ikon dari 'Suara Merdeka' yang harus dipertahankan karena memiliki nilai yang membedakan."

Rubrik ini lanjut informan AM (2024), bukan sekadar fitur editorial. Menurutnya, RSP sebagai elemen pembentuk identitas simbolik media yang menumbuhkan ikatan emosional dengan pembacanya, khususnya kalangan sepuh, akademisi, dan masyarakat yang memaknai budaya Jawa sebagai sumber kebijaksanaan hidup. Hal ini sesuai penjelasan informan SSL (2020) bahwa RSP memiliki fungsi ganda yaitu sebagai wahana ideologis untuk menanamkan nilai budaya Jawa, sekaligus mekanisme redaksional untuk mempertahankan identitas simbolik 'Suara Merdeka'.

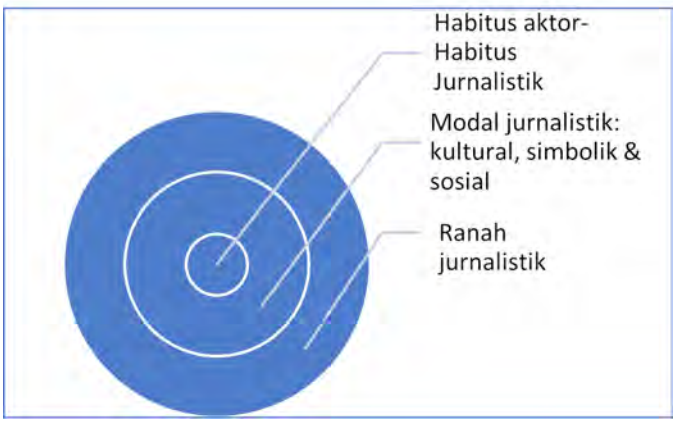
Dalam konteks ini, *spirit pamomong* bekerja sebagai mekanisme sosial pengikat komunitas pembaca. *Spirit* ini menumbuhkan rasa memiliki dan kedekatan kultural antara pembaca dan media. Informan WW (2024) menegaskan bahwa bagi pembaca perantau, membaca RSP "membuat mereka seolah kembali menjadi orang Jawa meskipun berada di luar lingkar budaya Jawa." Artinya, RSP berperan sebagai ruang imajiner tempat orang Jawa berjumpa kembali dengan akar budayanya melalui bahasa, nilai, dan simbol yang dikenalnya. Hal ini memperlihatkan fungsi *pamomong* tidak hanya bersifat moral, tetapi juga emosional dan berperan dalam pembentukan identitas kultural.

Berdasarkan perspektif modal simbolik, RSP menjadi aset immaterial yang sangat berharga. Rubrik ini memberi legitimasi moral bagi 'Suara Merdeka' sebagai media yang tidak sekadar mengejar profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab kultural. Pandangan ini sejalan dengan McQuail (2010) yang menegaskan bahwa media lokal memiliki peran strategis dalam mempertahankan keragaman budaya dan mem-

perkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Dengan menjaga RSP, 'Suara Merdeka' berupaya melestarikan memori kolektif dan identitas kebudayaan masyarakat Jawa Tengah.

Bahkan menurut informan MT (2020), RSP bukan hanya sebagai warisan budaya, melainkan sebagai modal simbolik yang dinamis sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menandaskan s*pirit pamomong* memperkuat posisi 'Suara Merdeka' sebagai media lokal yang menuntun masyarakat untuk menimbang makna kehidupan, kekuasaan, dan kemanusiaan melalui kerangka budaya. Hal ini sejalan dengan hasil studi Haryono et al., (2025) bahwa media lokal lebih dari sekadar saluran distribusi informasi. Media lokal diklaim sebagai ruang kultural yang berperan dalam membangun makna, menyampaikan nilai-nilai lokal secara kontekstual, serta merefleksikan pengalaman sosial masyarakatnya.

Berikut Gambar 5.1. terkait *habitus* aktor dalam produksi RSP secara keseluruhan pada periodisasi 1996-2020:



Gambar 5.1: *Habitus*, Modal, dan Ranah dalam Produksi RSP 1996-2020
Sumber: Penulis (2026)

Gambar 5.1 menunjukkan kelangsungan RSP dikendalikan sepenuhnya oleh *habitus* kultural aktor dalam spektrum jurnalistik di 'Suara Merdeka' yang melibatkan penulis internal sekaligus pengasuh rubrik serta kolaborasi dengan para penulis eksternal dengan beragam latar belakang. Namun, kesamaannya yakni berasal dari kultural Jawa tepatnya Jawa Tengah. Artinya, *habitus* sebagai titik sentral. Namun *habitus* baru bisa bergerak jika para aktor memiliki modal ataupun akumulasi modal yang memadai. Dalam konteks RSP, modal yang berperan adalah modal simbolik, modal kultural, dan modal sosial. Selanjutnya *habitus* dan modal hanya bisa bekerja dalam ranah yang tepat sebagai wadahnya. Dikaitkan RSP, maka ranah jurnalistik di 'Suara Merdeka' sangat berperan dan penting artinya dalam memfasilitasi maupun menunjang para aktor untuk berkarya melalui *habitus* dan akumulasi modal yang dimiliki.

BAB VI

FUNGSI SOSIAL RUBRIK 'SANG PAMOMONG'

A. Fungsi Sosial Rubrik 'Sang Pamomong'

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) pada surat kabar 'Suara Merdeka' sepanjang periodisasi 1996–2020 dianalisis dalam empat periode, yakni 1996–1998, 1999–Februari 2000, Maret 2000–2010, dan 2011–2020. Pembagian periode ini disusun berdasarkan kebijakan redaksi serta konteks sosial-politik nasional yang melatarbelakangi keberadaan rubrik pada masing-masing rentang waktu.

Periodisasi tersebut digunakan untuk menguraikan fungsi sosial RSP dalam lanskap jurnalistik 'Suara Merdeka' yang berorientasi pada tanggung jawab sosial pers dari Mc Quail (2010) yang mengutip Siebert et., al (1984). Pembahasan pada bab ini diarahkan pada posisi rubrik dalam kehidupan sosial untuk menjalankan fungsi sosialnya. Periodisasi berfungsi sebagai acuan waktu analitis dalam penjelasan fungsi sosial RSP secara keseluruhan.

Periode Awal (1996-1998)

Analisis delapan artikel Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) periode 1996–1998 menunjukkan bahwa rubrik ini menjalankan tiga fungsi sosial pers secara terintegrasi: fungsi informatif, pengawasan sosial, dan ruang publik kultural, sesuai prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1984; McQuail, 2010).

Empat artikel yang menekankan pengawasan sosial menggunakan nilai budaya sebagai tolok ukur etis. Pada artikel berjudul 'Martabat dalam Krisis Besar' (6 November 1997), Rendra menegaskan bahwa manusia Jawa "menciptakan budaya kolusi, korupsi, tak terbuka, dan sok menjadi diktator," sementara Darmanto Jatman menekankan pentingnya martabat melalui "kejujuran dan keikhlasan dalam mengabdikan diri ke masyarakat." Pada artikel berjudul 'Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan' (22 Januari 1998), Onghokham menyatakan aparat birokrasi "justru tak sepenuhnya berguna bagi negara," sedangkan MT Arifin mengingatkan agar kepatuhan birokrat dijalankan "tanpa *reserve*," menegaskan orientasi etis atas kontrol sosial. Pada artikel berjudul 'Gaya Hidup Boros Akibatkan Elite Jawa Runtuh' (12 Februari 1998) mengungkap elite yang sarat "ritualisme, simbolisme, dan mitologi," sementara Djuliati Suroyo mencatat bahwa gaya hidup elite "menjadikan mereka *dililit* utang," memperlihatkan refleksi moral lintas waktu. Dalam artikel berjudul 'Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi' (3 September 1998), Rama Sudi Yarmana menegaskan "idiom-idiom kepemimpinan Jawa sebenarnya tetap bagus," dan Damardjati Supadjar mengingatkan agar ajaran Jawa "jangan sekali-kali dimanipulasi," menunjukkan fokus RSP pada etika dan makna nilai.

Empat artikel lain berperan informatif sekaligus membuka ruang publik melalui wawancara dengan sejumlah narasumber. Dalam artikel berjudul 'Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!' (21 November 1996), RSP menegaskan bahwa "prinsip-prinsip nilai dalam budaya Jawa ternyata universal sekali," sedangkan artikel berjudul'Ketika Orang Jawa Menantikan *Ratu Adil*' (15 Mei 1997) menampilkan observasi bahwa "kerinduan akan keadilan itu merupakan kerinduan yang kontekstual." Artikel berjudul 'Raja Tak Sekadar Berbekal *Pulung*' (6 November 1997) memuat pandangan Soemarsaid Moertono bahwa raja adalah "eksponen mikrokosmos negara," sementara Doyo Santoso menekankan "*pulung* hanyalah alat atau mitos." Terakhir, dalam artikel berjudul 'Sultan HB X Dianggap Ratu Adil' (10 September 1998), suara *kawula alit* dikutip bahwa Sultan "*tansah paring ayem tentrem,*" dan akademisi menambahkan bahwa Sultan adalah "tokoh yang justru melayani rakyat."

Secara keseluruhan, RSP menunjukkan praktik jurnalistik yang khas, memadukan pengawasan sosial melalui kritik terselubung ala *pasemon*, informasi bernilai dari narasumber kompeten, dan ruang publik kultural. Strategi ini selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial pers, bahwa informasi disajikan edukatif, pengawasan sosial dijalankan secara etis, dan dialog publik dibangun untuk refleksi kolektif.

Pada periode 1996–1998, rubrik ini beroperasi di tengah era otoriter Soeharto yang menjelang akhir pemerintahannya menghadapi tekanan luar biasa: krisis moneter 1997–1998 memicu keruntuhan ekonomi, sementara krisis multidimensional meliputi sosial, politik, dan legitimasi kekuasaan menimbulkan ketidakstabilan nasional (Imron et al., 2016; Suwirta, 2018).

Dalam kondisi ini, RSP berperan sebagai ruang refleksi kultural yang tetap mempertahankan etika jurnalistik, meski kebebasan pers dibatasi. Rubrik ini menegaskan bahwa pengawasan sosial dapat dijalankan secara 'halus' atau lembut melalui simbol, metafora, dan nilai budaya, sementara informasi dan ruang publik tetap memfasilitasi pemikiran kritis.

Dengan demikian, RSP tidak hanya bertahan di tengah tekanan struktural dan politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media dapat membangun kesadaran moral kolektif yang adaptif. Rubrik ini secara tersirat mengkritisi pemerintahan Soeharto yang sarat KKN, manipulatif, dan otoriter, dengan strategi menyampaikan pesan melalui simbol dan nilai budaya Jawa. Rubrik ini juga menjaga keseimbangan fungsi pers yang etis, edukatif, dan kultural di masa-masa krisis yang akhirnya berujung pada lengsernya Soeharto melalui Reformasi Mei 1998.

Periode Transisi (1999-2000)

Periode 1999–2000 merupakan fase jeda bagi RSP sehingga rubrik ini tidak terbit sehingga tidak dapat dianalisis secara langsung melalui teks maupun simbolisme budaya. Ketiadaan ini secara metodologis membatasi observasi empiris, tetapi dari perspektif fungsi sosial media, absennya RSP menyimpan makna penting. Tidak terbitnya rubrik mencerminkan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat membatasi kemampuan media dalam menjalankan peran sebagai penjaga nilai etis dan kultural.

Krisis moneter 1997 berdampak luas pada industri pers: kenaikan harga bahan baku, turunnya pendapatan iklan, dan perubahan perilaku

konsumsi media memaksa redaksi melakukan penyesuaian strategis untuk bertahan. Di sisi lain, dinamika pasca-Reformasi menciptakan lanskap politik dan sosial yang 'cair'. Euforia kebebasan pers, pergantian kekuasaan, dan meningkatnya konflik publik mendorong media menekankan liputan aktual dan politis. Dalam konteks ini, rubrik reflektif seperti RSP, yang menekankan nilai moral dan kearifan lokal, berada pada posisi kurang strategis dibandingkan liputan langsung dan responsif terhadap peristiwa harian.

Absennya RSP mencerminkan keterbatasan struktural media dalam mempertahankan ruang refleksi etis. Fungsi sosial RSP sebagai penyaji informasi bernilai, pengawas moral, dan pewaris budaya tidak hilang, tetapi implementasinya tertunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi sosial media tidak semata ditentukan oleh komitmen editorial, tetapi sangat dipengaruhi stabilitas sosial-ekonomi dan politik yang menaungi institusi pers. Tekanan eksternal memaksa media melakukan kompromi, dan praktik jurnalistik reflektif serta kultural sering menjadi korban pertama yang ditunda.

Meski demikian, kebutuhan publik akan ruang refleksi moral dan kultural tetap relevan, bahkan meningkat di masa krisis dan transisi. Ketiadaan RSP mengungkap ketegangan antara idealisme fungsi sosial media, menyajikan informasi, membuka ruang publik, dan menjalankan pengawasan etis dengan realitas struktural yang membatasinya. Rubrik ini menjadi contoh konkret bagaimana ruang etis dalam media dapat terpinggirkan ketika media menghadapi tekanan multidimensional.

Fase jeda ini juga berfungsi sebagai konteks historis penting untuk memahami keberlanjutan fungsi sosial RSP pada periode berikutnya.

Ketika rubrik kembali terbit, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman absensi sebelumnya. Pengalaman kehilangan ini menekankan pentingnya ruang kultural dalam lanskap media yang berubah, sekaligus membentuk kesadaran publik dan redaksi tentang nilai refleksi moral dalam jurnalistik.

Secara lebih luas, fenomena ini menegaskan bahwa media merupakan institusi sosial yang senantiasa berinteraksi dengan struktur ekonomi dan politik. Media tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan fungsi sosialnya, melainkan harus bernegosiasi dengan tekanan eksternal. Ketiadaan RSP pada periode 1999–2000 menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan fungsi sosial media sangat bergantung pada kondisi struktural yang memungkinkan atau membatasinya. Pemahaman ini memperkaya analisis fungsi sosial RSP secara keseluruhan, menegaskan bahwa rubrik bukan sekadar produk editorial, tetapi praktik sosial yang rentan terhadap dinamika lingkungan sekitarnya.

Periode Konsolidasi (2000-2010)

Analisis 18 artikel RSP periode 2000–2010 menunjukkan rubrik tetap membangun refleksi humanis dan kesadaran moral-kultural. RSP berlangsung di era pasca-Reformasi dan euforia kebebasan pers (Arnus, 2015; Anom & Waluyo, 2011; Andani & Birsyada, 2024). Dari total 18 artikel, 13 menekankan fungsi pengawasan sosial yang etis dan reflektif, sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984; dikutip McQuail, 2010). Rubrik selain menyampaikan informasi, juga membentuk ruang publik sehingga pembaca dapat

memahami fenomena sosial dengan perspektif moral, budaya, dan etika.

Artikel berjudul '*Nglali Ya Nglali, Aja Ning Banget-Banget*' (2 Desember 2001) mengartikulasikan praktik *nglali* dalam masyarakat Jawa, di mana psikolog Emmanuela Hadriami menegaskan, "secara umum, *nglali*... untuk menyelamatkan diri dari rasa malu atau menjaga gengsi dan harga diri," namun dalam budaya Jawa terkait prinsip rukun dan hormat. Kisah Yudistira dalam *Drona Gugur* dihadirkan untuk menumbuhkan pemahaman etis: "ungkapan *ngono ya ngono* merelatifkan segala tindakan yang pada awalnya dianggap tercela itu."

Rubrik juga menampilkan refleksi moral terhadap kekuasaan. Artikel berjudul '*Ngedan, Edan-edanan* Pada Zaman *Edan*' (25 Agustus 2002) menyatakan, "Jika perahu 'Indonesia' dinakhodai *wong edan ning kuasa*... tentu mengundang kecemasan teramat-amat-sangat," dan menekankan motivasi moral penguasa: "pribadi orang Jawa... selalu dalam proses untuk mencapai keselarasan". Dalam artikel berjudul 'Bila *Jagad Gedhe* Melongsorkan Penguasa' (16 Maret 2003), Djoko Soeryo menegaskan: "raja lalim akan jatuh karena ketidakadilannya... alam pasti akan melongsorkannya." Artikel berjudul '*Sowan Asuh Muka Soroh Bandha*' (2 Mei 2004) menyorot risiko praktik elite: "*kedok* untuk *asung muka* sekaligus *soroh bandha,* hingga menjadi ajang untuk menyemaikan benih-benih korupsi".

Dalam perspektif kepemimpinan, RSP menekankan tanggung jawab moral penguasa. Artikel berjudul 'Dalam Pusaran Takhta untuk *Brayat*' (30 Mei 2004) mengulas Sultan HB IX: "demi kemaslahatan lebih banyak orang, dia 'merendahkan diri' sebagai orang kedua." Artikel berjudul 'Kehilangan Mimpi Ketiadaan Harapan' (13 Juni 2004)

menghadirkan suara rakyat sebagai cermin evaluasi sosial: "saya nyaris tak punya harapan lagi". Kritik sosial juga diarahkan pada praktik birokrasi, misalnya artikel berjudul '*Mosok Wong* Jawa Tidak Bisa Korupsi?' (19 Juni 2005): "Yang dari atas mengguyur *pengayoman*, sedangkan dari bawah *konjuk kabekten*" dan 'Menepis Kemelaratan dengan *Tan Amukti Palapa'* (3 Juli 2005): "Ke atas menyembah, ke bawah *menyepak*".

Selain itu, RSP menekankan penjaga moral dan pewarisan budaya. Artikel berjudul '*Ratu Ngopeni Kawula Demi Kuasa yang Langgeng'* (31 Juli 2005) menyatakan: "Kini siasat untuk memperoleh suara *kawula* dianggap tidak cukup lagi dengan *sapa aruh*... uang pula yang tampil sebagai primadona", sementara artikel berjudul 'Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja' (29 April 2007) menegaskan, "rakyat bersama Sultan menghadap pada Yang Maha Kuasa untuk meminta keadilan". Artikel berjudul 'Jurus Pemangku Penjinak Lawan' (18 Oktober 2009) dan artikel berjudul 'Mencari Baladewa di Panggung Kuasa' (16 Juni 2010) menekankan nilai moral dan integritas penguasa, sedangkan artikel berjudul 'Kuasa yang (Dianggap) *Sarwa Ora Pener'* (31 Oktober 2010) menekankan tanggung jawab sosial dan moral: "Monumen dan candi... tempat penguasa memprasastikan diri sebagai *panguwasa* yang juga menunaikan tugas *ngopeni kawula*."

Selain pengawasan sosial, lima artikel lain menegaskan fungsi informatif, pengawal moral, dan pewaris budaya, misalnya artikel berjudul 'Menang Tanpa *Ngasorake,* Kenapa Tidak?' (12 Maret 2000) dan artikel berjudul 'Menang Sejati *Tan Ngasorake*' (12 Juli 2009), membimbing pembaca membangun pemahaman etis melalui pengetahuan budaya, sejarah, dan sastra.

Lebih jauh, 18 artikel dalam periode ini menunjukkan RSP sebagai ruang publik, membimbing pembaca membangun pemahaman etis, reflektif, dan humanis terhadap fenomena sosial seraya mewariskan nilai budaya Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa RSP tidak sekadar mempertahankan 'ruh' jurnalistik periode sebelumnya, tetapi mengembangkan perannya secara lebih matang dalam konteks sosial pasca-Reformasi.

Menariknya, dominasi fungsi pengawasan sosial pada periode ini menandai konsistensi RSP dalam menjalankan tanggung jawab sosial pers. Namun, berbeda dengan fase akhir Orde Baru yang cenderung defensif, pengawasan sosial dalam artikel-artikel RSP pasca-2000 tampil lebih 'terbuka'. Kritik sosial tidak lagi semata melalui simbol atau *pasemon* yang terselubung, melainkan melalui refleksi etis yang lebih eksplisit terhadap krisis moral, maupun konteks kepemimpinan dalam kehidupan publik. Meski demikian, RSP tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui pendekatan kultural dan normatif. Pengawasan sosial dijalankan bukan untuk mempermalukan atau mendeligitimasi aktor sosial tertentu, melainkan untuk mengingatkan publik pada nilai-nilai etis yang dianggap mulai tergerus dalam dinamika sosial-politik pasca-Reformasi.

Secara keseluruhan, fungsi sosial RSP pada periode 2000–2010 menunjukkan konfigurasi jurnalistik yang semakin kompleks. RSP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sosial dan fungsi informatif secara terpisah, tetapi mengintegrasikannya dengan peran sebagai pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial masyarakat. Praktik ini menegaskan bahwa RSP beroperasi sebagai aktor sosial-kultural yang aktif membentuk ruang refleksi publik.

Termasuk untuk merealisasikan prinsip tanggung jawab sosial pers dalam konteks budaya lokal dan dinamika demokrasi pasca-Reformasi.

Dalam periode ini ditandai transisi kepemimpinan nasional melalui tiga presiden: Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun reformasi membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka, krisis kepemimpinan tetap berlanjut. RSP menghadirkan refleksi kultural terhadap fenomena ini, mengulas inkonsistensi moral, praktik KKN yang masih berlangsung, dan tantangan legitimasi kepemimpinan, sambil tetap menekankan nilai-nilai budaya Jawa sebagai tolok ukur etis bagi pembaca. Rubrik ini menunjukkan bahwa perubahan politik formal tidak otomatis menyelesaikan krisis kepemimpinan. Atas dasar itu, pengawasan sosial yang reflektif tetap diperlukan sebagai penyeimbang dinamika kekuasaan.

Periode Kontemporer (2011-2020)

Analisis 22 artikel RSP periodisasi 2011-2020 menunjukkan fungsi sosial rubrik sebagai pengawas moral, pewaris budaya, dan penyaji informasi yang membangun kesadaran publik, selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984; McQuail, 2010). Fungsi pengawasan sosial tampil menyikapi praktik kekuasaan, penyalahgunaan politik, dan degradasi nilai budaya.

Kritik sosial tampak jelas dalam artikel berjudul 'Saat Orang Jawa Kehilangan 'Rai'' (3 April 2011) yang mengungkap ketimpangan sosial akibat kekuasaan koruptif: "Padahal, semua itu dikomunikasikan 'hanya' demi kekuasaan yang besar dan prestise." Artikel berjudul 'Orientasi Politik Jawa Soeharto' (29 Mei 2011) menegaskan manipulasi

simbol budaya dalam politik: "Soeharto menghadirkan Jawa sebagai 'selimut', Jawa sebagai dekorasi dari politik eksploitatif dan represif."

Kritik serupa muncul dalam artikel berjudul 'Tradisi dan Kampanye Politikus' (2 Maret 2014): "Tradisi tidak dimaknai sebagai barang mati, tetapi *jambangan* yang siap diisi olahan kreativitas pegiat budaya," serta dalam artikel berjudul '*Reshuffle* dan *Jagat* Wayang' (7 Agustus 2016) yang menekankan figur teladan seperti Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Artikel 2018–2020, antara lain berjudul 'Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan' (7 Oktober 2018) dan artikel berjudul 'Membangun Markas Batin Jawa' (16 Desember 2018), menekankan pentingnya kesadaran batin dalam demokrasi, menegaskan RSP sebagai ruang membangun nilai etis. Artikel 2019–2020 antara lain berjudul 'Kuasa, Bencana dan Budaya' (27 Januari 2019), 'Politik Umuk dan Kemaruk' (10 Februari 2019), serta 'Wabah versus *Power* Budaya' (5 April 2020) menegaskan hubungan antara praktik politik, etika, dan konsekuensi sosial-budaya, memperkuat fungsi korektif rubrik.

Sementara itu, fungsi informatif RSP ditampilkan dalam tujuh artikel yang menekankan pemahaman kepemimpinan berbasis budaya Jawa. Artikel berjudul 'Mengontrol *Gung Binathara*' (26 Juni 2011) memaparkan batas etis kekuasaan: *kabeh ana watese, kabeh ana takerane,* sedangkan 'Ayo Siapa Berani Memimpin?' (1 April 2012) menegaskan prinsip saling mengerti dan *satyawacana*. Artikel berjudul 'Tak Mau *Lengser* Sampai Hilang' (8 Juli 2012) menyorot siklus kekuasaan dan kaderisasi melalui referensi Majapahit, sementara artikel berjudul 'Mengalah dan Kemenangan Sejati' (9 Juni 2013) menegaskan kemenangan bukan tujuan utama: "kemenangan bukan segalanya." Artikel berjudul '*Ratu Adil* & Simbol Pemimpin' (22 Juni 2014) menje-

laskan evolusi simbol *ratu adil* dalam konteks politik kontemporer, dan artikel dengan judul 'Yudistira & Kejujuran Kita' (10 April 2016) menghadirkan realitas politik sebagai "negara teater" yang menuntut kesadaran etis. Artikel berjudul 'Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan' (27 Agustus 2017) mengikat semua narasi ini melalui ajaran *Hasta Brata* dan pepatah *sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti*, menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada *welas asih* dan kebenaran.

Dari 22 artikel dalam RSP di fase ini, mayoritas menonjolkan fungsi pengawasan sosial atau kritik sosial, menegaskan posisi rubrik sebagai *watchdog* yang etis dan reflektif. Dominasi ini menunjukkan RSP memosisikan dirinya sebagai medium dalam menyikapi dan memaknai realitas sosial kepemimpinan melalui nilai budaya Jawa dan etika kepemimpinan.

Temuan ini menegaskan RSP mempertahankan relevansi jurnalistiknya, meskipun berada di tengah krisis industri pers cetak, dominasi wacana instan, dan tekanan politik yang semakin variatif.

Lebih jauh, fungsi pengawasan sosial tetap menjadi pilar utama RSP, namun mengalami penyesuaian bentuk dan orientasi seiring konteks politik yang berubah. Pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kritik sosial mulai lebih terbuka, meski tetap dikemas secara halus melalui strategi *pasemon*: metafora hewan, metafora *Hasta Brata*, *wejangan*, *pitutur*, *paribasan*, kisah wayang, dan cerita kerajaan Jawa kuno. Kritik diarahkan pada praktik kepemimpinan, etika birokrasi, dan dinamika kehidupan publik, memanfaatkan euforia kebebasan pers pasca-Reformasi. Rubrik menegaskan peran pengawasan sosial sebagai ajakan kultural, bukan sebagai tekanan politik atau pemaksaan.

Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, RSP menghadapi tantangan baru. Kebebasan pers mulai terhambat, muncul kecenderungan penguasa anti-kritik, polarisasi politik meningkat, dan krisis surat kabar semakin membuncah (Restendy et al., 2025). Di tengah kondisi ini, RSP menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui kritik ala *pasemon*, menyorot degradasi etika publik, runtuhnya keteladanan kepemimpinan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang disampaikan tetap bersifat reflektif, menggunakan simbol budaya sebagai medium untuk mengantisipasi risiko konfrontasi langsung, sekaligus menjaga integritas etis rubrik.

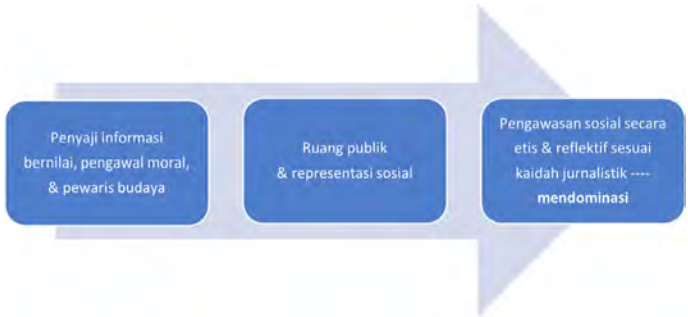
Tujuh artikel yang menampilkan fungsi informatif, pengawal moral, pewaris budaya, sekaligus ruang publik dan representasi sosial menunjukkan RSP memperluas jangkauan sosialnya. Wawancara dengan narasumber yang kompeten menghadirkan perspektif yang relevan terhadap isu sosial kontemporer, termasuk isu politik lokal, dinamika pemerintahan, dan pergeseran nilai budaya di tengah disrupsi media. Fungsi informatif ini tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi menjadi wahana yang mendorong pembaca untuk memahami persoalan sosial-politik melalui koridor budaya dan etika.

Atas dasar itu, nilai-nilai kearifan lokal Jawa khususnya *Hasta Brata* tetap sebagai rujukan etis yang hidup. Budaya digunakan sebagai instrumen interpretatif untuk memahami perubahan sosial-politik yang cepat, termasuk dampak pandemi COVID-19, praktik dinasti politik, dan polarisasi publik. Dengan cara ini, RSP menegaskan perannya sebagai pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi sosial RSP pada periode 2011–2020 menampilkan kemampuan adaptasi jurnalistik. Rubrik mempertahankan fungsi pengawasan sosial melalui kritik terbuka yang tetap halus ala *pasemon*, memperluas fungsi informatif dan ruang publik, serta menegaskan perannya sebagai mediator nilai dan penyeimbang informasi. Praktik ini menunjukkan bahwa RSP tetap relevan sebagai aktor sosial-kultural yang menjalankan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1984; McQuail, 2010). Bahkan rubrik ini mampu bertahan di tengah tekanan struktural, polarisasi politik, dan krisis media yang semakin membebani praktik jurnalistik modern.

Potret Keseluruhan Fungsi Sosial RSP (1996-2020)

Analisis terhadap 48 artikel RSP yang dikaji sepanjang periode 1996–2020 menunjukkan dinamika fungsi sosial jurnalistik yang diterapkan rubrik ini. Secara keseluruhan, sebanyak 32 artikel mengandung fungsi pengawasan sosial berbasis etika dan refleksi moral. Sedangkan 16 artikel lainnya menampilkan fungsi informatif yang sekaligus membentuk ruang publik, pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial. Berikut gambar 6.1 menunjukkan implementasi fungsi sosial RSP periodisasi 1996-2020:



Gambar 6.1. Implementasi Fungsi Sosial RSP 1996-2020
Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan gambar 6.1 memperlihatkan RSP bukan sekadar rubrik budaya yang pasif. Rubrik ini sebagai aktor jurnalistik dalam merespons dinamika sosial masyarakat, seraya menyesuaikan bentuk pengawasan sosialnya dengan konteks historis.

Terkait RSP yang didominasi fungsi pengawasan sosial diakui informan GBS (2020) selaku penulis internal sekaligus pengampu halaman RSP. Menurutnya fungsi pengawasan sosial yang dimanifestasikan melalui kritik sosial sebagai penerapan hak kontrol sosial oleh pers terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kekuasaan maupun dalam masyarakat.

Berikut penjelasan informan GBS:

> "Kami mengkritik melalui Rubrik 'Sang Pamomong' karena kami tersentuh atas kondisi yang terjadi yang kami pandang tidak sepatutnya, sehingga kami tergerak untuk mengingatkan siapa pun agar tidak terjerumus semakin jauh. Namun kami mengingatkannya secara kultural dengan meneropong dari perspektif budaya Jawa." (Wawancara dengan GBS, 2020).

Dominasi fungsi pengawasan sosial mengindikasikan orientasi etis yang kuat dalam praktik jurnalistik RSP. Pengawasan ini tidak hadir sebagai kritik langsung yang konfrontatif, melainkan sebagai refleksi moral yang mengajak pembaca menilai realitas sosial melalui kerangka nilai. Kritik sosial ala *pasemon* menjadi salah satu strategi utama RSP untuk menjalankan fungsi pengawasan sosial.

Informan TT (2020) penulis tetap dan pengasuh RSP yang juga Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' menjelaskan, penggunaan *pasemon,* metafora, dan simbol budaya menjadi strategi khas untuk menghindari represi politik sekaligus menyampaikan kritik tajam terhadap kekuasaan. Ini menunjukkan kecerdikan budaya Jawa dalam 'berbicara' melalui kehalusan dan bukan dilakukan secara frontal.

> "Bisa saja dikatakan Rubrik 'Sang Pamomong' mengandung 'makna di balik 'makna'. Hal ini sah-sah saja. Toh, kami meneropong berbagai persoalan yang kami anggap tidak tepat atau katakanlah menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku secara halus sesuai ciri khas budaya Jawa. Sehingga apa yang kami tuangkan dalam rubrik ini (RSP-red) tidak keluar dari koridor kultural Jawa." (Wawancara dengan TT, 2020).

Rubrik 'Sang Pamomong' pada periode 1996–1998, ketika pers berada di bawah pengawasan ketat Orde Baru, rubrik ini menyalurkan kritik melalui metafora hewan, metafora *Hasta Brata* yang disimbolkan dari delapan elemen alam, wejangan, *pitutur, paribasan,* kisah wayang, dan cerita kerajaan Jawa kuno. Strategi simbolik ini sebagai cara RSP menyampaikan refleksi etis dan penilaian moral terhadap praktik kepemimpinan, perilaku sosial, dan krisis nilai tanpa menimbulkan konflik terbuka dengan penguasa. Kritik tidak hadir sebagai tekanan eksternal, melainkan sebagai panggilan reflektif bagi pembaca, selaras

dengan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1984; McQuail, 2010). Strategi simbolik ini sebagai kritik sosial disampaikan secara halus, aman dari risiko penyensoran. Namun tentunya tetap mendidik pembaca untuk menimbang praktik kepemimpinan, etika publik, dan krisis nilai masyarakat.

Periode 1999–2000 menandai fase jeda dalam perjalanan RSP, saat rubrik tidak terbit dan praktik jurnalistiknya tidak dapat diamati langsung melalui teks maupun simbol. Ketiadaan ini menghadirkan makna sosial yang signifikan. Dari perspektif fungsi sosial media, absennya RSP menyingkap keterkaitan antara kondisi politik, ekonomi, dan sosial dengan kemampuan media menjaga nilai etis dan kultural. Saat rubrik tidak hadir, publik kehilangan ruang refleksi yang biasanya menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan nilai budaya Jawa serta prinsip kepemimpinan *Hasta Brata.* Kondisi ini menegaskan bahwa keberlangsungan media bergantung bukan hanya pada konten atau format, tetapi juga pada stabilitas lingkungan sosial yang mendukung praktik jurnalistik. Dengan demikian, fase jeda RSP memperlihatkan bahwa fungsi sosial media bersifat dinamis, lahir dari interaksi antara media, masyarakat, dan konteks sejarah. Fase ini sekaligus menegaskan pentingnya kontinuitas nilai sebagai jangkar kultural di tengah ketidakpastian zaman.

Perihal RSP sempat vakum pasca-krismon, diakui informan TT (2023) bahwa kondisi saat itu memang sangat tidak memungkinkan untuk RSP tetap terbit mengingat manajemen 'Suara Merdeka' mengalami kendala non-teknis yang bersumber pada kondisi perusahaan. Penghentian sementara RSP merupakan pukulan terberat bagi dirinya selaku pihak yang turut membidani kelahiran rubrik budaya

ini. Hanya saja ia pun tidak berdaya atas keputusan manajemen dan berharap RSP bisa tetap terbit seperti biasanya.

Berikut penjelasan informan TT selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' sekaligus pengasuh dan penulis tetap di RSP:

> "Jujur saja rubrik ini (RSP) sarat dengan nilai-nilai filosofis sehingga memang sangat disayangkan tidak terbit meski tidak lama. Selain itu, rubrik ini merupakan identitas dari 'Suara Merdeka' sebagai koran lokal yang peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya." (Wawancara dengan TT, 2023).

Memasuki era pasca-Reformasi (2000–2010), kritik sosial RSP mulai lebih terbuka. Euforia kebebasan pers dan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga SBY memberikan ruang bagi rubrik untuk menegaskan pengawasan sosial secara artikulatif. Kritik sosial tetap melalui *pasemon*, namun menyoroti krisis moral, serta kualitas kepemimpinan dalam kehidupan publik. Kritik yang disampaikan tetap halus, reflektif, dan normatif, menghindari konfrontasi langsung, serta memanfaatkan simbol budaya sebagai medium etis yang diterima publik.

Informan GBS (2020), pengampu halaman RSP yang juga penulis internal rubrik ini menjelaskan, meski tidak ada kebijakan secara tertulis, mekanisme RSP tetap pada *pakemnya* yaitu 'patuh dan taat' pada koridor budaya Jawa. Artinya, konten RSP tidak boleh ke luar dari 'rel' sehingga apa pun isi konten artikel tetap menginduk secara kultural Jawa. Termasuk dalam menyuarakan kritik yang tajam sekalipun diarahkan secara halus (*pasemon*).

Pada periode 2011–2020, RSP menghadapi tantangan baru: disrupsi digital, krisis pers cetak, polarisasi politik, praktik dinasti politik, serta

tekanan politik di era pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya periode kedua, ketika kebebasan pers mulai kembali terhambat. Fungsi pengawasan sosial tetap menjadi pilar utama rubrik, namun lebih diarahkan pada degradasi etika publik, kaburnya keteladanan, dan melemahnya tanggung jawab moral di tengah perubahan sosial. Kritik sosial melalui *pasemon* tetap dijalankan secara halus. Hanya saja kritik tersebut lebih relevan terhadap isu kontemporer, seperti fragmentasi informasi, dominasi budaya populer, dan kegelisahan moral kolektif selama pandemi COVID-19.

Seluruh artikel *headline* yang diteliti dalam periode 2011-2020 merupakan karya penulis eksternal yang sudah paham akan *pakem* dalam penulisan RSP. Hal ini sesuai penjelasan informan SA (2020) selaku Redaktur Pelaksana 'Suara Merdeka' yang juga penulis tetap RSP dan sebelumnya pengampu halaman RSP. Menurutnya penulisan dalam RSP tetap bersumbu pada nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa sebagai landasan etika jurnalistik.

Lebih jauh, 16 artikel yang menampilkan fungsi informatif, pengawal moral, pewaris budaya, dan ruang publik-representasi sosial memperkuat dimensi dialogis praktik jurnalistik RSP. Melalui wawancara dengan narasumber berkompeten, RSP tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pertimbangan etis dan refleksi bersama.

Informan HB (2020) selaku salah satu perintis RSP sekaligus pengasuh rubrik menjelaskan bahwa pada awal kehadiran rubrik maupun selanjutnya, *headline* merupakan hasil reportase oleh pengasuh rubrik (saat awal RSP, reportase mayoritas dikerjakan oleh TT).

Berikut penjelasan informan HB:

> "Saya kerap merancang isu-isu aktual untuk mengisi *headline* RSP hingga satu bulan ke depan. Pelaksanaannya dilakukan melalui reportase oleh tim dengan mewawancarai sejumlah pihak berkompeten menyikapi fenomena sosial yang terjadi saat itu. Namun ada juga isu-isu yang *genting* atau yang lebih aktual sehingga itulah yang kita garap untuk di edisi yang terdekat. Sehingga fungsi informatifnya tetap ada bahkan lebih dari itu karena kami menyajikan liputan secara *in-depth*." (Wawancara dengan HB, 2020).

Fungsi informatif ini terintegrasi dengan peran rubrik sebagai pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial masyarakat. Dengan demikian, ruang publik yang dibentuk bersifat deliberatif dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa.

Hasil studi Tejedor et al., (2020) menegaskan pers bertugas menginformasikan konten dengan pendekatan informatif dan menghindari sensasionalisme dalam teks-sesuai teori tanggung jawab sosial pers. Informasi yang bernilai, sangat mutlak karena dibutuhkan publik. Hal ini sesuai studi Planer et al., (2022) bahwa publik berhak menerima informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Dalam tradisi tanggung jawab sosial pers, RSP sebagai pendidik publik, pengawal nilai-nilai luhur, dan pewaris budaya. Studi Oso et al., (2024) menunjukkan etika jurnalistik menuntut jurnalis memahami, menghormati, dan menjaga keberagaman budaya. Fungsi ini menjadikan pers turut merawat, meneruskan, dan memediasi nilai budaya melalui praktik pemberitaan. Studi Realgo (2023) menegaskan media berperan dalam pelestarian, reproduksi, dan transmisi antargenerasi warisan budaya. Media dituntut mampu menjaga keberlangsungan nilai, identitas, dan warisan budaya masyarakat.

Fungsi sosial RSP sepanjang 1996–2020 menunjukkan konfigurasi jurnalistik yang khas, adaptif, dan berkelanjutan. Pengawasan sosial melalui kritik ala *pasemon* menjadi 'benang merah' yang menghubungkan seluruh periode. Rubrik bergerak dari simbolik dan hati-hati pada akhir Orde Baru, menjadi lebih terbuka dan artikulatif pada era pasca-Reformasi, hingga menyesuaikan fokus pada 'kegelisahan moral' masyarakat di era digital dan tekanan politik modern. Kombinasi fungsi pengawasan sosial, fungsi informatif, pembentukan ruang publik, serta peran sebagai pengawal moral dan pewaris budaya menegaskan RSP sebagai praktik jurnalistik yang menjalankan tanggung jawab sosial pers secara kontekstual. Rubrik tidak sekadar menyampaikan informasi dan membentuk orientasi etis publik. RSP menjaga kontinuitas nilai budaya, dan mempertahankan relevansi sosial-kultural di tengah perubahan sosial, politik, dan ekologi media yang terus berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil studi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sosial terhadap kekuasaan tampil sebagai fungsi yang paling dominan dan diwujudkan melalui kritik sosial yang bersifat etis, reflektif, serta tidak konfrontatif. Kritik tersebut disampaikan melalui simbol, *pasemon*, dan narasi moral yang berakar pada kearifan lokal Jawa serta sejalan dengan kaidah jurnalistik. Di samping itu, RSP menjalankan fungsi informatif yang mencakup peran sebagai penjaga moral dan pewaris nilai budaya. Fungsi sebagai ruang publik dan representasi sosial hadir, meski dalam intensitas yang relatif terbatas. Keseluruhan temuan ini menegaskan posisi RSP sebagai praktik jurnalistik budaya yang menempatkan fungsi pengawasan sosial sebagai poros utama.

B. RSP sebagai Refleksi Kesadaran Jurnalis

Sejak terbit perdana pada 21 November 1996, RSP memosisikan diri sebagai ruang refleksi dan pembelajaran budaya bagi masyarakat Jawa Tengah. Terlebih koran lokal ini mengklaim sebagai *korane wong Jawa Tengah*. Rubrik ini bukan sekadar saluran informasi, melainkan ruang simbolik budaya Jawa seraya mengadopsi nilai luhur dan merangkai orientasi moral dalam praksis kehidupan sehari-hari.

Informan GP (2020) selaku Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' (2015-2022) menjelaskan, RSP sebagai ruang refleksi budaya dan moral masyarakat Jawa. Rubrik ini sarat mengandung refleksi yang beragam termasuk pada spektrum realitas sosial kepemimpinan kontemporer, yang di antaranya dengan merujuk pada nilai-nilai normatif *Hasta Brata.* Sejalan dengan hal tersebut, RSP menampilkan kearifan lokal budaya Jawa, antara lain nilai-nilai kepemimpinan seperti *ambeg adil paramarta, gung binathara, berbudi bawa leksana, tatatentreming praja*, hingga *laku* utama.

Secara terpisah, informan TT (2020) selaku penulis tetap RSP, pengasuh RSP dan Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' menjelaskan tulisan dalam RSP bukan sekadar produk jurnalistik, tetapi *laku* batin dan bentuk pengabdian terhadap budaya Jawa. Penulis memposisikan diri sebagai *pamomong* yang menuntun masyarakat menuju kesadaran moral.

Berikut penjelasan informan TT:

> "Nilai-nilai budaya seperti rukun, sabar, *aja dumeh, adigang, adigung, adiguna, welas asih, eling lan waspada* hingga *tepa selira* dijadikan pedoman etis penulisan. Kearifan lokal tidak hanya menjadi tema, tetapi juga *roh* yang menjiwai cara berpikir dan menulis." (Wawancara dengan TT, 2020).

TT bersyukur 'Suara Merdeka' menyediakan 'ruang aman dan bebas' bagi dirinya maupun penulis lainnya untuk menulis refleksi budaya dan kritik sosial, meski tetap dalam koridor budaya Jawa dan sesuai visi misi media itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan redaksi yang mendukung ekspresi kultural menunjukkan adanya kepekaan dan kepedulian redaksional yang sadar budaya. Dalam ruang semacam inilah, RSP tumbuh sebagai media refleksi budaya, moralitas, dan kepemimpinan Jawa.

Posisi wartawan dalam hal ini dipandang sebagai penuntun masyarakat, bukan sekadar pelapor fakta. Jurnalisme diartikulasikan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk membentuk kesadaran publik yang bijak.

Menurut TT (2020), RSP merupakan praktik jurnalistik yang berpadu antara estetika, spiritualitas, dan kritik sosial. Kearifan lokal Jawa menjadi sumber nilai dan strategi ekspresi sehingga kritik terhadap kekuasaan disampaikan tanpa menimbulkan konflik. Bahasa *pasemon* berfungsi sebagai 'senjata halus" yang sarat makna moral, menjadikan tulisan-tulisan RSP bukan sekadar teks jurnalistik, tetapi juga *laku* budaya dan spiritual.

Secara pribadi, TT memandang aktivitas menulis bukan sekadar kerja jurnalistik, tetapi sebagai jalan pengabdian dan spiritualitas. Hal ini sebagai bentuk *tapa brata* intelektual yang menuntun masyarakat menuju kesadaran moral dengan bahasa yang lembut, simbolik, dan penuh makna.

Lebih lanjut penjelasan informan TT:

> "Kekuatan pers bukan terletak pada keberaniannya berteriak, melainkan pada kemampuannya menuntun, menyadarkan, dan

meneduhkan masyarakat dengan kebijaksanaan lokal yang lembut namun tegas secara moral. Melalui 'Sang Pamomong', menjadikan jurnalisme sebagai *laku pamomong* yakni seni menuntun 'rasa' dan jiwa manusia maupun bangsa dengan bahasa kebijaksanaan, kehalusan, dan kearifan Jawa." (Wawancara dengan TT, 2020).

Hal senada diungkapkan informan SSL (2020) selaku pengampu halaman edisi Minggu yang juga bertanggung jawab pada halaman RSP, menjelaskan RSP merupakan refleksi budaya berbasis kesadaran budaya dalam menyorot berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat dan dikaji dalam perspektif budaya Jawa.

Berikut penjelasan informan SSL:

"Rubrik 'Sang Pamomong' menghadirkan moralitas lokal dalam format jurnalistik yang komunikatif, normatif, dan reflektif berbasis kultural dan etis. Rubrik ini di antaranya merujuk pada nilai-nilai *Hasta Brata* sebagai landasan normatif kepemimpinan ideal ala Jawa yang sepatutnya dapat diterapkan dalam kepemimpinan kontemporer karena relevan dengan perkembangan zaman." (Wawancara dengan SSL, 2020).

Sementara itu, SA (2020) selaku Redaktur Pelaksana 'Suara Merdeka' yang sebelumnya sebagai pengampu RSP menegaskan, artikel di RSP memang mayoritas ke arah kritik sosial. Tidak heran, rubrik ini kerap *menyentil* pemerintahan, tapi melalui perspektif budaya Jawa sebagai hasil reflektif atau perenungan dalam menyikapi kondisi yang terjadi di masyarakat.

Berikut penjelasan informan SA:

"Rubrik 'Sang Pamomong' lahir karena redaksi memandang pentingya ruang budaya Jawa di media lokal sebagai sumber pengetahuan sosial, selain pelestarian budaya. Rubrik ini (RSP-red) mempertegas 'Suara Merdeka' sebagai media yang mampu

mengemong pembaca seraya menuntun dan mendidik masyarakat secara moral dan budaya." (Wawancara awal dengan SA, 2020).

Sebelumnya, informan HB (2020) selaku salah satu penggagas RSP mengatakan, rubrik budaya ini lahir dari keinginan memberi *oase* bagi publik yang jenuh dengan berita politik dan konflik. Menurutnya, rubrik ini bernilai pendidikan dengan mengajak publik berpikir kritis, sehingga bukan sekadar membaca berita.

Berikut penjelasan informan HB (2020):

"Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) memberi nutrisi kebudayaan dengan menghadirkan nilai-nilai budaya (Jawa) masa lalu dalam konteks masa kini." (Wawancara dengan HB, 2020).

Berdasarkan penjelasan sejumlah informan, menunjukkan refleksi kolektif tersebut tumbuh dari kesadaran etis jurnalis dalam menjalankan tanggung jawab sosial pers. Kesadaran ini hadir ketika realitas kepemimpinan dinilai tidak selaras dengan nilai kepemimpinan ideal. Melalui RSP, sikap etis tersebut diwujudkan dalam kritik sosial yang reflektif dan berlandaskan nilai-nilai budaya Jawa, termasuk filosofi *Hasta Brata.*

Refleksi kolektif yang hadir dalam praktik jurnalistik RSP tidak lahir secara tiba-tiba sebagai sikap institusional. Refleksi tersebut berakar pada kesadaran etis para jurnalis sebagai individu yang terlibat langsung dengan realitas sosial yang melingkupinya. Kesadaran kultural ini tumbuh dari pengalaman sehari-hari jurnalis dalam mengamati krisis nilai, ketimpangan kekuasaan, dan situasi sosial-politik yang dirasakan semakin tidak kondusif. Dalam konteks inilah,

praktik jurnalistik tidak semata dijalankan sebagai kerja profesional, tetapi juga sebagai respons atas panggilan 'hati nurani'.

Ketika kesadaran individual tersebut berulang dan diartikulasikan secara bersama di kalangan jurnalis, maka kesadaran tersebut berkembang menjadi refleksi kolektif. Refleksi ini kemudian membentuk arah kritik sosial rubrik, yang disampaikan secara simbolik, *pasemon,* dan kultural, alih-alih melalui bahasa konfrontatif.

Dikaitkan dengan konteks studi ini, RSP sebagai ruang refleksi kolektif jurnalis dalam menyikapi realitas sosial kepemimpinan kontemporer. Dominasi tematik krisis kepemimpinan dalam RSP sepanjang periode 1996–2020 memperlihatkan, bahwa refleksi kolektif jurnalis/aktor tumbuh dari keprihatinan etis bersama terhadap praktik kepemimpinan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai ideal. Dalam situasi tersebut, filosofi *Hasta Brata* berfungsi sebagai kerangka normatif yang membingkai cara jurnalis menilai, mengkritik, dan merefleksikan realitas kekuasaan.

Berpijak dari hal tersebut, refleksi kolektif dalam RSP tidak hadir sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai praktik jurnalistik yang berakar pada nilai etis-kultural yang sama. Refleksi kolektif tersebut bersumber dari kesadaran etis yang dibangun dan dipraktikkan secara bersama dalam kerja jurnalistik. Jurnalis memaknai nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* untuk diadaptasi sebagai rujukan normatif, etis, dan kultural. Kesadaran ini tidak dimaknai sebagai kesadaran kolektif dalam pengertian sosiologis klasik, melainkan sebagai orientasi etik yang terinstitusionalisasi dalam praktik redaksional rubrik.

Kesadaran etis tersebut juga merepresentasikan panggilan tanggung jawab sosial pers dalam menyikapi kondisi kepemimpinan

yang dinilai tidak selaras dengan nilai kepemimpinan ideal. Dalam perspektif teori tanggung jawab sosial pers, pers tidak hanya berfungsi menyajikan informasi, tetapi juga menjalankan peran pengawasan sosial dan penjaga nilai moral publik (McQuail, 2010). Melalui RSP, panggilan etis tidak diekspresikan secara konfrontatif, melainkan diwujudkan dalam narasi reflektif yang memadukan kritik sosial dengan rujukan nilai budaya Jawa.

Dalam kerangka RSP inilah kesadaran refleksi kolektif diwujudkan melalui narasi yang kaya simbol, metafora, *pitutur* dengan nuansa *pasemon* (halus dan santun). Setiap tulisan menghadirkan makna yang mempertemukan pengalaman individual dengan pengalaman kolektif yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Di sisi lain, pengalaman kolektif ini mengalir dan diperkuat melalui praktik komunikasi simbolik sehingga nilai budaya dan moral disampaikan secara reflektif. Atas dasar itu, Carey (2009) menjelaskan komunikasi secara umum merupakan tindakan ritual. Sejalan dengan pemikiran Carey, RSP bekerja sebagai praktik simbolik yang menjaga 'kedekatan batin' antara teks, pembaca, dan nilai budaya. Setiap narasi menjadi semacam 'ritual membaca', sehingga pembaca mengalami proses internalisasi nilai melalui refleksi dan perenungan lebih khusus oleh pembaca yang memang berasal dari suku Jawa.

Koentjaraningrat (1984) menegaskan, masyarakat Jawa memahami dunia melalui tanda dan isyarat yang menyimpan keluhuran budi, sementara Herusatoto (1987) menunjukkan simbol budaya berfungsi sebagai pengikat moral yang halus namun kuat. Di sinilah, RSP mengoptimalkan mekanisme simbolik untuk menyampaikan pesan moral yang menyentuh lapisan batin pembaca dan menjadikan

rubrik bukan sekadar teks. Rubrik ini juga mengasah pengalaman etis yang dapat dirasakan secara emosional dan reflektif, bahkan memperkuat identitas budaya. Hal ini selaras dengan studi Andriyani (2015) bahwa koran lokal tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengembangkan identitas budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Hall (1996) menambahkan dimensi dinamis dalam identitas budaya selalu berkelindan dengan *being* dan *becoming*. Artinya, identitas tidak berhenti pada apa yang diwariskan, melainkan terus bergerak mengikuti tantangan zaman. RSP menjadi ruang terhadap nilai identitas Jawa antara lain *rukun, wedi, isin, sungkan, tepa selira, sangkan paraning dumadi, nrimo ing pandum* dan *manunggaling kawula gusti* diolah kembali untuk menyikapi dinamika kehidupan termasuk pula dalam konteks sosial- politik yang senantiasa berubah. Rubrik selain menyajikan simbol atau cerita klasik, juga menyediakan panduan moral bagi pembaca untuk menavigasi tantangan modern tanpa kehilangan akar budaya.

Pengolahan nilai identitas budaya tersebut berkelindan dengan pembentukan sikap yakni cara seseorang memaknai dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai moral dan budaya yang diinternalisasi, salah satunya melalui *wejangan*, nasihat atau *pitutur* (kata-kata bijak). Sumodiningrat & Wulandari (2014) serta Ahmad (2014) menegaskan bahwa *pitutur* Jawa berfungsi sebagai media pendidikan yang menginternalisasi norma sosial dan etika. Magnis-Suseno (2001) memandang etika Jawa sebagai sistem nilai yang memberi arah bagi harmoni sosial. Endraswara (2016, 2018) menekankan kearifan lokal sebagai basis refleksi moral yang menuntun orientasi hidup secara seimbang. Keseluruhan nilai ini bertaut dengan falsafah hidup Jawa yang menekankan

keselarasan relasi dengan Tuhan, sesama manusia, alam semesta, dan diri sendiri sebagai landasan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat spiritual (Muktiyo, 2011).

Atas dasar itu, RSP menghadirkan beragam narasi mulai informasi, membimbing pembaca melalui proses pembelajaran moral hingga menumbuhkan kesadaran etis. Dalam konteks ini, rubrik berfungsi sebagai sarana edukasi sosial-budaya, sehingga pembaca diajak memahami, merenungkan, dan menginternalisasi nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan ini, RSP memposisikan dirinya sebagai rubrik yang beroperasi dalam genre jurnalisme budaya yang tetap mengusung prinsip dan kaidah jurnalistik. Rubrik berfungsi membangun refleksi moral, internalisasi nilai, dan memperkuat pilar kohesi sosial. Peran RSP ini selaras dengan hasil studi Torres-Toukoumidis et al., (2024) bahwa media lokal membentuk jalinan kebersamaan masyarakat melalui penyajian konten, representasi budaya, dan narasi lokal yang menghubungkan pengalaman, identitas, serta aspirasi warga, sehingga memperkuat kohesi dan solidaritas komunitas.

C. Jurnalisme *Pamomong* dan Refleksi Praktik Sosial

Dalam pandangan sejumlah informan, keberadaan RSP tidak sekadar dimaknai sebagai ruang pemberitaan budaya, tetapi juga sebagai *laku pamomong* sebuah praktik komunikasi berbasis etika sosial dan kearifan lokal budaya Jawa. Informan AM (2024), informan MT (2020), dan informan WW (2024), ketiganya mengatakan rubrik ini menjalankan fungsi jurnalistik yang berakar pada nilai-nilai luhur

masyarakat Jawa, yakni 'prinsip mendidik tanpa menggurui', 'menuntun tanpa memaksa', serta 'memberi arah dengan cara halus dan bijak'.

Penjelasan informan tersebut mengindikasikan RSP secara empiris menerapkan 'jurnalisme *pamomong*'. Jurnalisme genre ini sebagai sebuah bentuk praksis jurnalistik untuk menyampaikan informasi, membangun budi pekerti sosial melalui bahasa yang teduh, simbolik, dan sarat makna moral.

Lebih lanjut, para informan yang berasal dari latar belakang beragam mulai dari akademisi, budayawan, jurnalis, hingga pembaca setia menegaskan bahwa RSP hadir sebagai ruang refleksi kultural di tengah situasi sosial-politik yang sering kali 'keras' dan penuh intrik. Informan MT (2020) misalnya, mengatakan, kehadiran RSP sangat diperlukan sebagai ruang refleksi kultural di tengah masifnya praktik jurnalistik pada media arus utama yang lebih memprioritaskan isu-isu politik maupun yang didominasi logika bisnis.

Itu sebabnya lanjut MT (2020), RSP tidak sekadar menghadirkan konten budaya, melainkan menampilkan pesan-pesan moral yang mengandung nasihat kehidupan (*piwulang*), kritik sosial, serta ajakan untuk memperbaiki diri dan semacam itu yang intinya adalah untuk membangun peradaban bangsa.

Dari perspektif jurnalis senior yakni informan HB (2020) selaku salah satu penggagas RSP menegaskan, rubrik budaya ini sebagai konsistensi redaksi untuk menggelorakan suara kebijaksanaan masyarakat Jawa melalui medium jurnalistik. Lebih dari itu, makna *pamomong* dalam Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) merujuk pada sosok yang 'menuntun dengan kasih', bukan mendominasi dengan kuasa ataupun kekuasaan. Di sisi lain, informan pembaca seperti S (2020) menilai rubrik

ini "penting dan bermanfaat karena berisi falsafah Jawa yang menjadi pegangan hidup", menegaskan fungsi etis dan edukatif dari tulisan-tulisan RSP.

Dengan demikian, 'Jurnalisme *pamomong*' yang diterapkan 'Suara Merdeka' dalam RSP berkelindan antara 'idealisme moral dan realitas politik', antara 'tradisi lokal dan tantangan globalisasi', antara 'bahasa simbolik dan pesan sosial yang eksplisit'. Di sinilah perbedaan mendasar RSP dibandingkan rubrik lain dalam media massa arus utama.

Sebagai implementasi dari jurnalisme *pamomong*, informan TT (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka' yang juga pengasuh RSP menjelaskan, rubrik ini bertujuan membangun kesadaran reflektif yang lahir dari kepekaan budaya. Berbagai tulisan dalam RSP sering kali menggunakan metafora, *pasemon, pitutur*, dan kisah wayang untuk 'mengingatkan' kekuasaan tanpa 'menyerang secara langsung'. Dalam kerangka ini, kritik sosial dilakukan dengan bahasa budaya, cara khas Jawa yang mengedepankan kesantunan (*tata krama*), keteduhan, dan kehalusan tutur.

Beberapa informan seperti AM (2024) menilai cara ini sebagai bentuk 'jurnalisme cerdas dan elegan' yang efektif di masa Orde Baru, ketika kebebasan pers sangat terbatas. Ia menegaskan bahwa "RSP berani mengkritik pemerintahan Soeharto tapi tetap aman karena dilakukan secara lembut". Dengan demikian, kritik halus ini memperlihatkan bahwa 'jurnalisme *pamomong*' tidak hanya merupakan praktik etis, melainkan juga strategi komunikasi untuk bertahan di tengah represi politik. Kritik dilakukan dalam bahasa *pasemon,* sebuah bentuk komunikasi khas Jawa yang 'menyembunyikan' pesan moral di balik

kisah dan simbol. Cara ini sejalan dengan pandangan Bourdieu (1998) tentang *habitus*. Menurut sosiolog asal Prancis ini, produk media merupakan hasil dari interaksi antara konteks struktural eksternal dan *habitus* berupa disposisi kultural aktor. Hal ini tercermin dalam nilai, etika, dan keyakinan yang memandu praktik produksi media.

Habitus wartawan 'Suara Merdeka' yang berakar pada kultur Jawa membentuk logika produksi RSP sebagai ruang refleksi kultural yang menegosiasikan nilai, etika, dan pandangan hidup Jawa dalam relasinya dengan konteks kekuasaan.

Sementara itu, RSP juga berfungsi sebagai media pendidikan moral bagi masyarakat. Informan MT (2020) mengatakan tulisan-tulisan dalam RSP merupakan bentuk interaksi kebudayaan antara penulis dan pembaca yang memiliki latar nilai yang sama. Ia menegaskan, "tulisan-tulisan RSP penting karena mengandung *ideal culture* yang berisi ajaran moral, spiritualitas, dan budi pekerti." *Ideal culture* yang dimaksud Mujahirin merupakan ajaran-ajaran luhur yang berperan menuntun manusia agar hidup selaras dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Nilai-nilai kearifan lokal antara lain *eling lan waspada*, *tepa slira*, *andhap asor*, dan *ngeli tanpa keli* merupakan inti dari moralitas Jawa yang sering diangkat dalam tulisan-tulisan RSP. Melalui teks-teks tersebut, RSP berperan sebagai medium transmisi nilai, menjembatani antara warisan budaya masa lalu, dan kebutuhan moral masyarakat modern.

Bagi pembaca yakni informan K(2020) berpendapat RSP menjadi ruang yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk berita politik dan ekonomi. Sedangkan informan DZ (2020) yang juga penulis tetap RSP, memandang rubrik ini sebagai "ruang perenungan batin yang mem-

buat pembaca kembali menengok diri". Hal ini memperlihatkan bahwa 'jurnalisme *pamomong*' tidak sekadar menyajikan informasi faktual, tetapi menghidupkan kembali fungsi media sebagai penjaga nurani publik. Jurnalisme model ini tidak mengejar sensasi. RSP dalam konteks ini memperluas fungsi pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 dari fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan pengawasan sosial menuju fungsi etika kultural.

Sejalan dengan fungsi etika tersebut, fungsi *pamomong* sebagai 'motor' RSP dalam mengartikulasikan praktik komunikasi komunal khas masyarakat Jawa. Artikel-artikel dalam RSP kerap menampilkan ajaran kepemimpinan *Hasta Brata* tentang watak bijaksana, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial yang secara implisit ditujukan kepada pemimpin publik. Dalam konteks ini, kritik terhadap pemimpin bukan sebagai bentuk perlawanan frontal, melainkan ajakan untuk introspeksi.

Berbagai kajian mengindikasikan bahwa praktik kepemimpinan masa kini cenderung mengalami degradasi nilai moral dan etika, yang tercermin dari rendahnya integritas, seringnya pelanggaran komitmen politik, serta menguatnya praktik korupsi yang menggerus kepercayaan publik (Setiawan & Taufik, 2022; Manara et al., 2020; Ilham, 2022). Lebih lanjut, Ronnie (2024) menggarisbawahi kemunculan tipe pemimpin yang bersifat otoriter, manipulatif, populis, dan ego-sentris (*toxic leader)* yang berdampak buruk terhadap keberlanjutan pembangunan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran ruang-ruang diskursif yang mampu menawarkan rujukan etis alternatif di luar narasi kepemimpinan pragmatis semata.

Dengan cara itulah, RSP memiliki peran ganda yaitu sebagai ruang kultural yang menjaga nilai-nilai *adiluhung,* dan sebagai ruang ideologi yang menanamkan etika kepemimpinan berbasis kebajikan melalui 'Jurnalisme *pamomong*'. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan SSL (2020) selaku pengampu desk edisi Minggu di surat kabar 'Suara Merdeka' yang juga menangani halaman RSP. Menurutnya, RSP sebagai wadah ideologis untuk menanamkan nilai budaya Jawa, sekaligus mekanisme redaksional 'Suara Merdeka' untuk mempertahankan identitas media lokal.

Dari perspektif teoritis, 'jurnalisme *pamomong*' merupakan bentuk praksis yang unik dalam kajian jurnalistik Indonesia. Jurnalisme ini memadukan logika jurnalistik modern dengan etos budaya lokal. Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa isi media ditentukan oleh struktur hierarki mulai dari individu wartawan, rutinitas redaksi, organisasi media, hingga ideologi dan sistem sosial. Dalam konteks 'Suara Merdeka', struktur tersebut dimediasi oleh nilai budaya Jawa yang hidup dalam *habitus* para wartawannya. Hasilnya adalah produk media yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar atau tekanan politik, melainkan kepedulian dan kesadaran untuk menjalankan misi kultural. Nilai *pamomong* menjadi modal simbolik (dalam istilah Bourdieu) yang memberi legitimasi moral pada 'Suara Merdeka' di mata masyarakat Jawa Tengah sebagai 'korannya *wong* Jawa'.

Nilai *pamomong* dalam konteks studi ini diangkat sebagai etos budaya yang menjiwai praktik media, khususnya pada RSP. Etos ini menjadi penghubung antara teori tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984) yang menekankan peran moral media, teori konstruksi realitas sosial, dan perspektif Bourdieu (1988, 1993) yang menjelaskan

praktik media sebagai hasil internalisasi nilai melalui *habitus* aktor yang terlibat.

Sementara itu, RSP di Harian '*Suara Merdeka*' diposisikan melalui kerangka konstruktivis yang menempatkan media bukan sebagai cermin realitas sosial yang objektif dan netral, melainkan sebagai ruang konstruksi berbasis budaya. Dalam perspektif konstruktivis, realitas kepemimpinan sebagai hasil proses penafsiran yang dibentuk melalui praktik jurnalistik, pilihan narasi, serta sistem nilai yang diinternalisasi dan dioperasionalkan oleh aktor-aktor media. Kepemimpinan dalam RSP bukan sebagai fakta yang berdiri sendiri, melainkan sebagai realitas simbolik yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

Habitus kultural berperan penting dalam membentuk cara aktor RSP memandang dan menafsirkan realitas kepemimpinan. Krisis kepemimpinan yang terjadi dalam konteks sosial-politik Indonesia pasca-reformasi bukanlah sebagai kegagalan struktural sistem politik atau administrasi pemerintahan. Sebaliknya, krisis tersebut dikonstruksi sebagai persoalan degradasi nilai dan etika sosial. Cara pandang ini mencerminkan skema persepsi dan apresiasi yang terinternalisasi dalam diri aktor media, sehingga memengaruhi pilihan tema, sudut pandang, serta bahasa yang digunakan dalam narasi RSP.

Dengan mengangkat nilai-nilai *Hasta Brata* yang disimbolisasikan melalui unsur-unsur alam, RSP membangun kerangka normatif yang memberikan acuan tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan dalam konteks sosial masyarakat Jawa. Selain *habitus*, RSP juga mengandalkan modal simbolik dalam menjalankan praktik jurnalistiknya. Modal simbolik ini berupa legitimasi budaya, otoritas moral, dan pengakuan sosial yang diperoleh melalui konsistensi RSP

dalam mengusung nilai-nilai etika Jawa. Dengan mengadopsi simbol-simbol budaya seperti *Hasta Brata*, mitos *Ratu Adil,* dan figur *Satriya Piningit*, RSP membangun narasi kepemimpinan yang memiliki daya tarik kuat di kalangan pembaca. Modal simbolik tersebut memberi ruang RSP untuk menyampaikan kritik sosial secara halus dan reflektif tanpa kehilangan penerimaan sosial di tengah publiknya.

Konstruksi kepemimpinan dalam RSP sejalan dengan teori konstruksi realitas sosial yang banyak diaplikasikan dalam kajian media (Hamad, 2004). Dalam perspektif ini, media dipahami sebagai institusi sosial yang secara aktif membentuk realitas melalui proses seleksi isu, penekanan aspek tertentu, serta pembingkaian makna. Realitas kepemimpinan yang dihadirkan RSP merupakan hasil dari proses tersebut, sehingga aspek etika, moral, dan tanggung jawab sosial lebih ditonjolkan dibandingkan aspek prosedural.

Melalui praktik tersebut, RSP mengonstruksi kepemimpinan sebagai arena nilai yang sarat dengan konsekuensi moral. Kepemimpinan ideal digambarkan sebagai praktik kekuasaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keteladanan, dan kejujuran, sementara praktik kepemimpinan yang menyimpang dipresentasikan sebagai kegagalan etika. Krisis kepemimpinan sebagai kondisi berulang yang mencerminkan lemahnya komitmen moral para pemimpin dalam menjalankan amanah rakyat.

Melalui konstruksi tersebut, RSP membentuk kesadaran reflektif pembaca mengenai normatif kepemimpinan. Representasi pemimpin yang digambarkan semakin menjauh dari rakyat, tidak peka terhadap aspirasi publik, dan menutup diri dari kritik berfungsi sebagai simbol atas penyimpangan nilai kekuasaan. Sebaliknya, figur-figur ideal, baik

yang bersifat simbolik seperti *Ratu Adil* maupun yang bersifat empiris seperti Sultan Hamengku Buwono X, dikonstruksi sebagai rujukan moral yang menunjukkan bahwa kepemimpinan beretika tetap mungkin diwujudkan dalam praktik sosial tertentu.

Dalam kerangka konstruktivis inilah, kehadiran figur imajiner dan empiris tersebut tidak dimaknai sebagai penilaian normatif yang mutlak, melainkan sebagai bagian dari strategi simbolik RSP dalam membangun horizon makna kepemimpinan. Figur-figur tersebut berfungsi sebagai refleksi sosial yang membantu pembaca menyikapi realitas sosial kepemimpinan yang dihadapi dan nilai-nilai kepemimpinan yang diidealkan.

Di sisi lain, praktik jurnalistik RSP diposisikan melalui teori tanggung jawab sosial pers sebagaimana dirumuskan oleh Siebert dkk. dan dikembangkan lebih lanjut oleh McQuail (2010). Dalam perspektif ini, pers dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik, menjaga nilai-nilai sosial, serta berkontribusi pada kualitas kehidupan demokratis. RSP menjalankan fungsi tersebut dengan menempatkan isu kepemimpinan sebagai isu sentral dalam kerangka etika dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata dalam kerangka konflik politik.

Kritik sosial yang disampaikan RSP meskipun bersifat implisit dan simbolik, mencerminkan orientasi tanggung jawab sosial pers. Media tidak hanya bertugas mengungkap penyimpangan, tetapi juga berperan dalam mengingatkan penguasa dan masyarakat mengenai nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar praktik kekuasaan. Dalam konteks ini, gaya penyampaian yang santun dan reflektif bukan meru-

pakan kelemahan, melainkan strategi etis yang selaras dengan fungsi sosial pers.

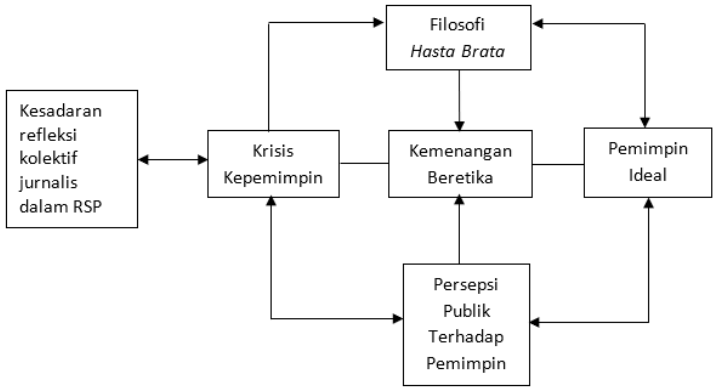
Hal ini diperkuat oleh pernyataan HB (2020) bahwa RSP lahir dari jurnalistik reflektif yang berakar pada kearifan lokal Jawa.

Sebagai penggagas rubrik ini, ia tidak sekadar membangun rubrik budaya, tetapi merancang dan menerapkan praktik jurnalisme yang *ngemong*, *ngajari*, dan *ngelingake* (menuntun, mendidik, dan mengingatkan) masyarakat dengan santun. Rubrik ini menjadi ruang inovatif untuk memodernkan nilai budaya Jawa tanpa kehilangan esensi moralitasnya.

Berikut petikan wawancara dengan HB:

> "Kami membangun jurnalisme moral yang menyeimbangkan kritik, pendidikan, dan pencerahan publik. Rubrik budaya ini (RSP-red) menjadi cermin fleksibilitas budaya Jawa yang mampu beradaptasi terhadap modernitas sekaligus mempertahankan integritas etika dan identitas lokal." (Wawancara dengan HB, 2020).

Bertolak dari penjelasan tersebut, studi ini menyajikan model konstruksi kepemimpinan dalam RSP seperti tercantum pada gambar 6.2.



Gambar 6.2. Model Konstruksi Kepemimpinan dalam RSP (Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 6.2 menunjukkan model konstruksi kepemimpinan dalam RSP merupakan hasil interaksi antara *habitus* kultural aktor media, modal simbolik yang dimiliki, logika ranah jurnalistik, orientasi tanggung jawab sosial pers, serta praktik jurnalisme *pamomong* sebagai kerangka operasional produksi konstruksi nilai-nilai kepemimpinan menyikapi dinamika realitas sosial kepemimpinan kontemporer.

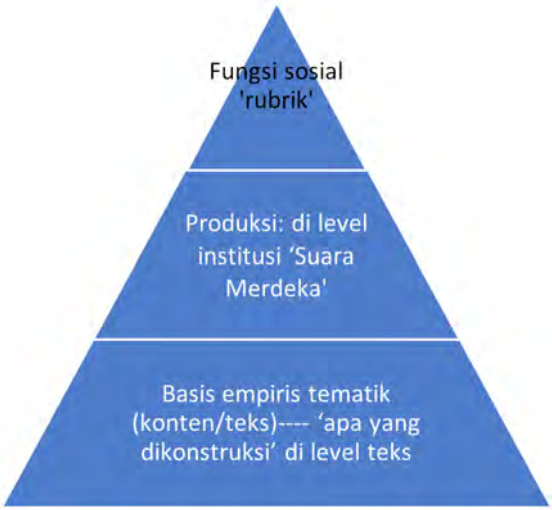
Realitas kepemimpinan tersebut tetap dipandang secara reflektif oleh aktor RSP. Kesadaran reflektif individual ini kemudian berkembang menjadi kesadaran reflektif kolektif dengan merujuk pada kerangka normatif dan etis yakni ajaran *Hasta Brata* dan sebagai implementasi teori tanggung jawab sosial pers, dalam hal ini fungsi pengawasan sosial yang dominan. Pemimpin-pemimpin yang menjalankan kekuasaan dalam sistem politik modern dikonstruksi sebagai sosok yang semakin tidak terbuka "mata dan hatinya", menjauh dari rakyat, abai terhadap aspirasi publik, serta menunjukkan sikap anti kritik seperti

yang dituangkan dalam sejumlah artikel RSP. Kondisi ini memicu munculnya protes dari sebagian kelompok masyarakat, yang dalam narasi RSP sebagai konsekuensi dari kegagalan etika kepemimpinan. Wajar saja jika kemudian muncul beragam persepsi publik yang negatif terhadap pemimpin sehingga memicu terjadinya krisis kepemimpinan.

Di sisi lain, RSP juga mengonstruksi kemenangan beretika sesuai prinsip *Hasta Brata* yakni pemimpin yang teguh, jujur, bijaksana, dan adil yang hanya bisa lahir dari 'rahim' proses pemilihan yang jujur, *fair*, tanpa merendahkan ataupun mempermalukan pihak lawan (*menang tan ngasorake*). Proses pemilihan yang jujur diharapkan melahirkan pemimpin yang amanah, bukannya pemimpin yang tidak beretika maupun yang rakus dan 'haus' akan kekuasaan.

Dalam kerangka inilah, RSP berperan sebagai ruang refleksi sosial dengan menyuarakan pesan moral dan kritik sosial yang bersifat mengingatkan. Kritik diarahkan agar para pemimpin kembali pada *khitah* kekuasaan, yakni menjalankan amanah rakyat dengan melayani secara tulus, tanpa pamrih dan tanpa diskriminasi. RSP menegaskan bahwa dalam tatanan etika Jawa, pemimpin sejatinya adalah *pamomong*, pengasuh dan pelindung rakyat sesuai prinsip kepemimpinan ideal *Hasta Brata*, bukan sosok yang membohongi rakyatnya.

Secara keseluruhan, berikut hasil studi konstruksi kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP periode 1996-2020 seperti tercantum pada gambar 6.3:



Gambar 6.3. Implementasi Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 6.3 menunjukkan piramida dari implementasi konstruksi kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020. Diawali dari tingkatan/lapisan mendasar yaitu sebagai basis empiris yang kuat untuk memahami apa yang muncul di level konten/teks, termasuk dominasi tema krisis kepemimpinan, harapan terhadap pemimpin ideal, dan pewarisan nilai budaya Jawa (filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*). Lapisan pertama ini menjadi fondasi mendasar karena tanpa pemahaman konten, analisis produksi dan fungsi sosial tidak bisa dilakukan.

Selanjutnya, di lapisan menengah yaitu bagaimana rubrik diproduksi dalam institusi media ('Suara Merdeka'), melalui kerangka Bourdieu: *habitus*, modal, dan arena. Hal ini menunjukkan hubungan antara

struktur institusi, praktik jurnalis, dan hasil rubrik, sehingga pembaca bisa memahami konstruksi nilai kepemimpinan bukan hanya di teks, tapi juga dalam konteks institusional.

Sebagai klimaksnya yakni di lapisan tertinggi menyorot peran rubrik dalam fungsi sosial pers mulai sebagai sebagai pengawas, pewaris budaya, dan penyedia ruang publik untuk isu kepemimpinan. Di tahapan inilah menjelaskan dimensi operasional rubrik dalam masyarakat tanpa menilai efek atau dampaknya, melainkan mengungkap bagaimana rubrik menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, bagian ini menghubungkan temuan tematik dan produksi institusi dengan konteks sosial yang lebih luas.

D. Tantangan RSP di Era Kontemporer

Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) selama kurun waktu 1996–2020 menunjukkan kontinuitas yang menegaskan fungsinya sebagai arena konstruksi makna kepemimpinan ideal dan refleksi sosial-budaya Jawa pada umumnya. Rubrik ini sebagai wahana tempat makna, nilai, dan norma dibentuk melalui interaksi antara *habitus* aktor, modal kultural dan simbolik, serta struktur media (Bourdieu, 1993).

Informan TT (2020) menjelaskan, pengasuh rubrik dan penulis eksternal menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa termasuk filosofi *Hasta Brata* dan menjadikannya sebagai kerangka etis untuk menafsirkan isu-isu kontemporer. Termasuk dalam menyuarakan kritik sosial terhadap penguasa ataupun masyarakat sekalipun.

Berikut penjelasan informan TT:

> "Rubrik ini (RSP-red) bukan sekadar rubrik budaya, melainkan wujud praktik jurnalisme yang menyatukan spiritualitas, moralitas, dan kritik sosial khas Jawa sebagai sarana *momong* jiwa publik dengan kebijaksanaan. *Pasemon* dan simbol Jawa digunakan untuk mengkritik kekuasaan dengan cara lembut, cerdas, dan penuh makna. Kritik disampaikan tanpa konfrontasi langsung." (Wawancara dengan TT, 2020).

Praktik ini mempertegas fungsi RSP sebagai wahana pendidikan publik tanpa mengorbankan prinsip jurnalistik. Namun, tantangan yang dihadapi RSP semakin kompleks seiring disrupsi digital dan perubahan perilaku pembaca. Tekanan sirkulasi, dominasi konten daring, serta ekspektasi publik yang semakin beragam mendorong aktor jurnalistik menyesuaikan strategi produksi dan distribusi tanpa mengaburkan nilai moral.

Pada level rutinitas media, penyesuaian tampak pada fleksibilitas jadwal terbit dan adaptasi format *e-paper*, mengingat pada dekade 2020-an RSP tidak hadir di platform daring selain edisi *e-paper* berbayar. Pada level individu dan organisasi, praktik jurnalistik dimaknai melalui kreativitas simbolik, *habitus* penulis, serta dukungan modal kultural, sosial, dan simbolik dalam lanskap media digital.

Dalam ekosistem media lokal di Indonesia, lanskap tersebut ditandai oleh keterkaitan erat antara idealisme redaksional dan tuntutan ekonomi media di era digital. Media tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemaknaan moral dan edukatif, tetapi juga beroperasi sebagai entitas ekonomi yang harus beradaptasi dengan logika pasar dan digitalisasi. Dalam pengertian ini, struktur ekonomi media membentuk konteks produksi jurnalistik, sebagaimana dijelaskan oleh

Herman & Chomsky (2008). Sejalan dengan itu, Wahl-Jorgensen et al., (2016) serta Croteau & Hoynes (2006) menunjukkan bahwa faktor pasar, kepemilikan, dan kebijakan internal media turut membingkai ruang praktik jurnalistik, yang kemudian dimaknai dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor media dalam kerja redaksional sehari-hari.

Pemahaman tersebut selaras dengan pandangan Olsen (2019), Harcup (2023), dan Salem (2025) yang melihat media modern beroperasi dalam pertautan antara logika budaya dan logika pasar (Bro, 2018; Makwambeni et al., 2023). Dalam praktiknya, kedua logika ini tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan membentuk penyesuaian agar media tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya sekaligus menjaga keberlanjutan institusional.

Dalam konteks tersebut, negosiasi antara idealisme dan komersialisasi tidak hanya berlangsung pada tataran kebijakan media, tetapi juga menyentuh ranah nilai profesionalisme dan etika jurnalistik. Informan AM (2024) menekankan pentingnya menjaga pagar api jurnalistik (*firewall*) antara redaksi dan kepentingan bisnis agar praktik jurnalistik tetap independen. Sejumlah studi menunjukkan bahwa lemahnya batas tersebut kerap berkaitan dengan persoalan manajerial dan tekanan ekonomi yang memengaruhi orientasi redaksional (Harcup, 2023; Salem, 2025; Krisdinanto, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa menjaga idealisme budaya tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan isi rubrik, tetapi juga dengan penguatan etos profesional yang menopang legitimasi moral media. Idealisme kultural, dalam pengertian ini, terwujud melalui praktik kerja jurnalistik yang konsisten, reflektif, dan berakar pada nilai-nilai yang diyakini bersama oleh para pelakunya.

Berpijak pada kerangka Pierre Bourdieu (1998), kondisi tersebut untuk menjaga derajat otonomi dalam ranah jurnalistik sebagai ruang produksi makna, meskipun berada dalam sistem ekonomi kapitalistik. Di Harian 'Suara Merdeka', otonomi tidak dimaknai sebagai struktur yang kaku, melainkan sebagai hasil interaksi dan praktik yang terus dikonstruksi oleh wartawan dan penulis RSP. Pilihan sebagian penulis terutama penulis eksternal untuk terus berkontribusi tanpa imbalan finansial mencerminkan bagaimana nilai, motivasi, dan keyakinan budaya dibangun melalui pengalaman dan pemaknaan bersama. Dalam perspektif konstruktivis, praktik ini memperlihatkan bagaimana identitas profesional dan komitmen terhadap tradisi intelektual Jawa dipertahankan melalui proses interpretasi yang berkelanjutan.

Dikaitkan dengan level ekstra-media, praktik RSP dipengaruhi oleh perubahan tren pembaca termasuk generasi muda, serta regulasi media yang terus bergerak. Meski demikian, ideologi rubrik tetap berakar pada filosofi *Hasta Brata* dan kearifan lokal Jawa, yang berfungsi sebagai 'kompas etis' dalam membimbing keputusan editorial (Shoemaker & Reese, 1996, 2014; Bro, 2018; Makwambeni & Trust, 2023). Nilai-nilai tersebut menjadi rujukan dalam menyikapi tekanan eksternal tanpa menghilangkan identitas kultural rubrik.

Oleh karena itu, refleksi terhadap RSP menegaskan pentingnya kontinuitas *habitus* serta mobilisasi modal kultural, sosial, dan simbolik dalam menjaga konsistensi nilai. Interaksi antara agensi dan struktur, sebagaimana dijelaskan Bourdieu, menjadi pijakan RSP tetap relevan sebagai wahana pendidikan budaya, meskipun konteks sosial, politik, dan teknologi terus berubah. Konsep hierarki isi media membantu memahami bahwa setiap konten RSP diproduksi melalui interaksi

multilevel: rutinitas media, aktor individual, organisasi, tekanan ekstra-media, dan ideologi- yang secara kolektif membentuk identitas rubrik dan legitimasi publiknya.

Melihat ke depan, RSP dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang dalam lanskap media kontemporer (Siregar et al., 2022). Pertama, digitalisasi membuka kemungkinan perluasan jangkauan budaya Jawa, namun juga menghadirkan risiko homogenisasi konten. Dalam konteks industri media yang semakin pragmatis, keberlanjutan RSP bergantung pada kemampuannya bertransformasi tanpa kehilangan pijakan nilai (Sandriester et al., 2025). Dilema utama tidak hanya berkisar pada idealisme dan komersialisasi (Rewira, 2024), tetapi juga pada bagaimana menjembatani tradisionalitas medium cetak dengan modernitas pola konsumsi digital (Islamiyah et al., 2025).

Kedua, generasi pembaca muda berharap pendekatan komunikasi yang lebih interaktif dan visual, sehingga perlunya inovasi dalam format penyajian tanpa mengorbankan nilai-nilai jurnalistik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa generasi muda mengalami pergeseran signifikan dalam pola konsumsi berita. Generasi Z tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media arus utama, melainkan mengakses informasi melalui cara yang lebih fleksibel atau 'cair', personal, dan sangat dipengaruhi oleh platform digital.

Pergeseran menuju konsumsi informasi berbasis platform digital dan media sosial ini juga banyak dikaji dalam literatur akademik. Casero-Ripollés (2012) mencatat peralihan konsumsi berita ke media sosial tidak serta-merta menurunkan minat kaum muda terhadap informasi publik. Sementara itu, Hartley (2018) menunjukkan bahwa modal kultural berperan penting dalam membentuk cara generasi

milenial dan Gen Z menilai, menyaring, dan memaknai informasi. Dalam konteks keseharian, Vogler et al., (2023) menyorot peran sentral telepon seluler sebagai medium utama konsumsi berita remaja dalam mengakses secara instan, tetapi sekaligus berisiko menimbulkan fragmentasi pemahaman.

Hanya saja, tidak sedikit generasi Z mengaku kebingungan dalam menghadapi arus informasi yang dikendalikan oleh logika algoritmik platform digital (Ehrlén et al., 2023). Oleh karena itu, Oliveira et al., (2024) menegaskan pentingnya literasi digital yang inklusif agar anak muda mampu bersikap lebih reflektif, kritis, dan sadar dalam menavigasi lanskap informasi yang semakin kompleks.

Menyikapi hal ini, sejumlah informan misalnya WW (2024) dan AM (2024) menyarankan agar RSP dimigrasikan ke platform digital dengan strategi yang tepat, seperti menjadikannya *multiplatform content* yang ramah pembaca muda (Nurlaila et al., 2024; Fadillah et al., 2022). Ide ini sejalan dengan gagasan Jenkins (2006) tentang *convergence culture* yakni integrasi berbagai medium (cetak, *online,* media sosial) yang saling memperkuat dalam penyebaran nilai budaya. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak harus berbenturan dengan modernitas, melainkan bisa saling mendukung melalui adaptasi bentuk dan wahana.

Di sisi lain, saran dari informan pembaca seperti K (2020) dan S (2020) yang berharap agar RSP tampil juga di platform *online* memperlihatkan adanya kebutuhan aktualisasi nilai budaya di ruang digital. Artinya, publik masih menghendaki jembatan antara warisan budaya dan cara baru dalam masyarakat modern.

Dari sudut pandang teori media, inilah bentuk transformasi nilai luhur ke dalam format dan ekosistem baru tanpa kehilangan substansi moralnya (Pereda et al., 2025; Pata, 2024). Jenkins (2006) dalam gagasan *convergence culture* mempertegas pentingnya kolaborasi lintas platform agar pesan budaya dapat menyebar secara lebih luas dan partisipatif. Dalam konteks ini, RSP dapat berkembang menjadi konten multiplatform, misalnya versi audio *podcast Pitutur Pamomong*, infografis *pitutur* Jawa di media sosial, atau rubrik daring interaktif yang mengajak pembaca menulis refleksi mereka. Dengan strategi seperti ini, idealisme budaya menemukan bentuk baru yang adaptif terhadap zaman.

Hal ini sejalan dengan gagasan informan DZ, sastrawan, akademisi, dan penulis tetap di RSP. Baginya, RSP bukan sekedar rubik, melainkan ruang ingatan kolektif budaya Jawa yang sepatutnya diadaptasi ke media digital agar tetap relevan dan mampu menjangkau generasi muda.

Berikut petikan wawancara dengan DZ:

> "*Rubrik 'Sang Pamomong'* berfungsi sebagai ruang kaderisasi budaya sekaligus arena kritik moral berbasis nilai Jawa. Melalui bahasa pasemon dan refleksi wayang, berupaya menghidupkan kembali fungsi *pamomong*- menuntun tanpa menggurui, mengingatkan tanpa menyerang. Jadi, pentingnya konsistensi nilai dan etika kepemimpinan (sabdo pandito ratu) sebagai pedoman publik, sekaligus mengingatkan bahwa krisis moral modern disebabkan oleh hilangnya *pamomong* dalam kehidupan sosial. Akan lebih bagus lagi manakala rubrik ini bisa menjembatani antara idealisme dan tujuan komersil media dan juga tampil di ranah online." (Wawancara dengan DZ, 2020).

Hanya saja, sekitar tahun 2020, RSP tidak tayang di media *online* (suaramerdeka.com) karena dianggap jadul, teks panjang, dan tidak sesuai algoritma pasar *online* dan selera Gen Z. Format RSP tayang utuh di *e-paper* berbayar, namun dengan jumlah pelanggan yang terbatas. Kondisi ini membuktikan produksi RSP berbasis jurnalisme budaya ini sangat dipengaruhi oleh tekanan ranah digital. Pemimpin Redaksi suaramerdeka.com–ATW (2024) menjelaskan, RSP memang tidak ditayangkan di *online* karena kontennya tidak sesuai dengan segmentasi audiens dan strategi pasar.

Berikut petikan wawancara dengan ATW:

> "Masa depan media bergantung pada sinergi antar-platform (cetak, online, media sosial) dan kemampuan media lokal bertransformasi menjadi aktor nasional tanpa kehilangan identitas nilai dan idealismenya. Jurnalisme digital adalah medan baru bagi *pamomong* modern-yang menuntun masyarakat melalui algoritma, tanpa kehilangan roh kulturalnya." (Wawancara dengan ATW, 2024).

Paralel dengan ATW, Kepala Divisi Sosial Media 'Suara Merdeka', Y (2024) mengakui RSP sama sekali tidak tampil di media sosial resmi dan *podcast* 'Suara Merdeka'. Alasannya sangat klasik, RSP dianggap tidak sesuai logika algoritma yang sangat diandalkan untuk menghasilkan iklan dari *google adsense.* Selain itu, Y juga mengamini bahwa konten RSP dianggap 'jadul' alias ketinggalan zaman sehingga tidak menarik minat baca Gen Z.

> "Jujur saja RSP tidak sesuai dengan selera pasar, sehingga kami tidak menayangkan di semua platform media sosial maupun *podcast* resmi 'Suara Merdeka'. Bukannya kami tidak peduli untuk berpartisipasi dalam mengawal dan melestarikan budaya melalui rubrik ini (RSP-red), namun kami juga harus realitas dengan kondisi pasar. Karena bagaimana pun bisnis media ya bisnis yang berorientasi pada pasar untuk menghasilkan profit melalui

komodifikasi sejumlah konten yang kami kelola." (Wawancara dengan Y, 2024).

Tantangan ketiga yang dihadapi RSP berkaitan kaderisasi pembaca. Sebagian besar pelanggan koran 'Suara Merdeka' berusia sepuh dan sebagian sudah wafat, namun tradisi membaca koran tidak berlanjut ke level anak, cucu dan seterusnya. Hal ini sebagai imbas pergeseran minat baca dan pola konsumsi (*media habit* dan *media use*). Jika pun RSP tetap bertahan, kemungkinan besar yang setia membaca yakni dari jajaran redaksi 'Suara Merdeka' itu sendiri termasuk penulis internal selain penulis eksternal yang artikelnya terbit di RSP maupun yang memang menjadi 'pembaca setia'.

SHK, informan yang juga Sekretaris Redaksi Harian 'Suara Merdeka' mengakui kondisi dilematis (kelangsungan pembaca RSP) pada titik tertentu bisa jadi secara riil akan tidak ada lagi yang membaca RSP.

> "Jika memang (RSP) tetap dipertahankan, harus bisa diperkirakan bahwa rubrik ini memang tetap ada yang baca. Kan *eman-eman* banget sudah disediakan satu halaman full tapi gimana? Jika dialokasikan untuk iklan, kan sudah berapa itu pendapatan dari iklan? Tapi ternyata yang baca bukan pembaca secara riil, paling *banter* yang baca rubrik ini (RSP-red) dari pengasuh rubrik atau kerabat atau penulis internal, selain dari penulis eksternal yang tulisannya dimuat. Selebihnya, tidak ada yang baca. Dengan kondisi ini harus difikirkan ke depannya, terlebih bisnis media tidak terlepas dari *profit taking* untuk kelangsungan media ini sendiri." (Wawancara dengan SHK, 2024).

Tantangan keempat RSP adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) di jajaran redaksi 'Suara Merdeka' dalam hal kompetensi di bidang sastra Jawa untuk secara rutin mengisi halaman RSP- sehingga

tidak tergantung pada penulis eksternal. Sejak tahun 2020, pengasuh RSP sebagian pensiun sehingga SDM semakin berkurang. Kondisi ini diakui Pemimpin Redaksi, TT (2023) bahwa SDM di 'Suara Merdeka' yang berkompetensi di bidang sastra Jawa memang sangat terbatas. Kendati sebenarnya seorang wartawan harus *all out* dalam menguasai bidang jurnalistik di mana pun ditempatkan bertugas.

> "Betul, kami terbatas wartawan di bidang sastra Jawa. Tapi sebenarnya di era modern ini, wartawan tak lagi ada sekat-sekat melalui desk. Prinsipnya wartawan harus selalu 'siap tempur' termasuk untuk mengisi halaman sang *pamomong*. Menyiasati keterbatasan ini, sekitar tahun 2015 ke atas, kami memang boleh dikatakan mengandalkan penulis eksternal untuk mengisi HL (tulisan utama-red), termasuk untuk versi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa." (Wawancara dengan TT, 2023).

Tantangan kelima merupakan tantangan paling krusial adalah keberlangsungan RSP sebagai bagian dari konten Harian 'Suara Mereka'. Secara faktual, rubrik ini tidak berfungsi sebagai penghasil iklan maupun pendorong sirkulasi surat kabar. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa iklan hanya muncul secara terbatas pada masa awal penerbitan, seperti iklan otomotif berwarna pada Januari 1997 dan iklan bioskop hitam putih pada 1998. Sedangkan pada periode selanjutnya hingga kini, RSP hampir sepenuhnya bebas dari iklan.

Kondisi tersebut diakui oleh Senior Manager Sales Product (Sirkulasi) 'Suara Merdeka', MEF, yang menyatakan bahwa RSP tidak signifikan secara ekonomis. Dalam konteks krisis industri surat kabar, sekitar tahun 2017 muncul dorongan dari manajemen untuk mengevaluasi rubrik-rubrik berdasarkan kontribusi ekonominya, termasuk wacana pengurangan halaman atau penghapusan rubrik demi efisiensi biaya operasional.

Berikut penjelasan MEF:

> "RSP memang bukan rubrik produktif sebagai sumber pendapatan iklan bagi 'Suara Merdeka'. Rubrik ini juga tidak signifikan mendongkrak sirkulasi. Sehingga sekitar tahun 2017 ada desakan dari pihak manajemen agar RSP dievaluasi supaya kontennya bisa bernilai ekonomis. Manajemen dalam rapat redaksi membahas rubrik-rubrik mana saja yang positif (menghasilkan iklan) dan sebaliknya. Seiring krisis surat kabar, manajemen melakukan evaluasi terhadap redaksi melalui konten-konten yang dihasilkan dan memang harus dilakukan pengurangan halaman maupun penghapusan rubrik-rubrik tertentu dengan pertimbangan untuk efisiensi biaya operasional." (Wawancara dengan MEF, 2024).

Namun, usulan penghapusan RSP mendapat penolakan tegas dari Wakil Pemimpin Redaksi 'Suara Merdeka', TT. Baginya, RSP bukan sekadar rubrik, melainkan identitas kultural yang membedakan 'Suara Merdeka' dari media lokal lainnya. Ia menegaskan bahwa rubrik ini lahir dari perjuangan jurnalistik dan kegelisahan moral untuk merawat etika, nilai luhur, serta kearifan budaya Jawa di tengah arus globalisasi.

Berikut penegasan TT:

> "Saya yang paling menentang RSP dihapus. Silakan rubrik ini dievaluasi, tapi jangan sampai rubrik ini hilang sama sekali. Dalam dunia yang semakin menglobal, pertahanan bangsa melalu kearifan budaya sepatutnya menjadi atensi khusus bagi para pihak. Termasuk di kalangan institusi media yang sepatutnya sebagai garda terdepan dalam melestarikan budaya untuk diwariskan ke antar generasi. Serta sebagai pengawas sosial (watchdog function) berbasis kaidah jurnalistik dan semacam itu." (Wawancara dengan TT, 2023).

Pandangan serupa disampaikan oleh BS, penggagas RSP, yang menempatkan rubrik ini sebagai suplemen nonkomersial sekaligus sebagai ekspresi idealisme media dalam menjalankan tanggung jawab

sosial-kulturalnya. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal RSP diposisikan bukan semata sebagai produk jurnalistik, melainkan sebagai ruang praktik simbolik yang memuat nilai, refleksi, dan orientasi kultural tertentu.

Jika dicermati melalui perspektif McManus (1994) dalam Rianto (2015) mengenai kecenderungan jurnalisme modern yang semakin dipengaruhi oleh pertimbangan pasar (*market-driven journalism*), keberadaan RSP sebagai bagian dari proses penyesuaian redaksional dalam lanskap industri media yang terus berubah. Dalam konteks ini, logika ekonomi media dan idealisme redaksional tidak diposisikan secara *head to head*, melainkan hadir berdampingan sebagai kerangka yang saling membingkai praktik produksi jurnalistik. Melalui cara ini, jurnalisme tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai *laku* kebudayaan yang berperan merawat memori budaya bersama (ingatan kolektif).

Dengan pemahaman tersebut, meskipun RSP menghadapi berbagai tantangan struktural, rubrik ini tetap memiliki peluang untuk terus hadir di ruang publik. Peluang tersebut terbuka sejauh RSP mampu mengelola dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang melingkupinya, sehingga keberadaannya tetap relevan dan bermakna bagi pembaca, meskipun jumlah khalayak yang dijangkau cenderung terus menyusut.

Atas pertimbangan tersebut, salah satu peluang RSP adalah menggunakan strategi penggunaan nilai budaya sebagai bentuk *local branding* (Astari et al., 2025). Dengan mengklaim sebagai '*korane wong* Jawa Tengah', 'Suara Merdeka' memanfaatkan RSP untuk memperkuat *positioning* di tengah kompetisi dengan 'Kompas' Jawa Tengah, 'Jawa

Pos', dan 'Tribun'. Dalam hal ini, idealisme budaya dijadikan diferensiasi pasar, sesuatu yang tidak dimiliki oleh media lain (Cayla & Arnould, 2008).

Tidak bisa dielakkan, idealisme yang bertransformasi secara riil harus tetap kreatif dan inovatif. Dalam wawancara dengan informan WW (2024) muncul kesadaran bahwa nilai luhur tidak dapat langsung diinternalisasi, tetapi membutuhkan proses pengendapan makna. Oleh karena itu, RSP tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga berperan sebagai penanda budaya yang kelak dapat dijumpai kembali oleh generasi muda ketika mereka 'bernostalgia dengan masa lalunya' (Manzuch, 2017). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Deuze (2005) yang menunjukkan jurnalisme memiliki peran penting dalam menumbuhkan *sense of community* ataupun *spirit of community* yakni rasa keterikatan individu dengan komunitas serta identitas kulturalnya. Upaya tersebut merefleksikan bentuk nyata dari *adaptive journalism* (Sánchez et al., 2019).

Atas dasar itulah, 'Suara Merdeka' melalui RSP dapat terus menjadi model jurnalistik budaya yang adaptif, edukatif, dan humanis, sekaligus menjaga relevansi filosofis *Hasta Brata* dalam konteks media modern.

Mengutip studi Olsen (2019), disebutkan bahwa koran lokal sepatutnya mampu menciptakan nilai sosial, kultural dan demokratis bagi komunitasnya di tengah tekanan digitalisasi. Untuk itu, keberlanjutan media lokal selain tergantung pada ekonomi, juga pada hubungan sosial dan kepercayaan dengan masyarakat/pembaca. Menyikapi hal ini, koran lokal sejatinya mampu menciptakan 'nilai' yakni memperkuat identitas lokal, menjaga budaya, serta menjalankan fungsi pengawasan sosial, termasuk *watchdog journalism.*

Dengan demikian, produksi RSP selama periode 1996–2020 menunjukkan rubrik ini berfungsi sebagai arena konstruksi makna kepemimpinan dan refleksi sosial-budaya yang dinamis. Studi Barnard (2018) menyimpulkan, jurnalisme bukan sekedar profesi tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, setiap produksi RSP mulai periodisasi 1996-1998, periode jeda (1999–2000), periodisasi 2000-2010, hingga periodisasi 2011-2020 memperlihatkan bagaimana praktik jurnalistik berbasis budaya dibentuk melalui interaksi antara *habitus* aktor, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik. *Habitus* pengasuh RSP maupun penulis eksternal tidak hadir secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses internalisasi budaya Jawa, pengalaman sastrawi, serta orientasi etis yang merujuk pada filosofi *Hasta Brata.*

Proses pembentukan *habitus* tersebut sejalan dengan temuan Yoedtadi dan Salman (2023) bahwa nilai budaya yang dihayati sejak kecil kehidupan berperan penting dalam membentuk cara pandang dan praktik jurnalis. Dalam konteks RSP, internalisasi nilai budaya tersebut mendorong praktik jurnalistik yang menekankan toleransi, keharmonisan sosial, serta refleksi etis dalam menyikapi realitas sosial. *Habitus* tersebut tidak hanya membentuk orientasi moral individu pengasuh dan penulis, tetapi juga mewujud dalam struktur kognitif yang mengarahkan proses pengambilan keputusan editorial dalam produksi rubrik.

Struktur kognitif aktor RSP beroperasi dalam jaringan pengaruh yang lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam hierarki pengaruh isi media lima level Shoemaker dan Reese (1996, 2014). Sejalan dengan Bro (2018), Sudibyo (2009), serta Makwambeni dan Trust (2023), produksi

RSP dipengaruhi lapisan struktural yang saling terkait: rutinitas media membentuk format narasi, level individu menentukan pilihan isu dan internalisasi nilai lokal, level organisasi mengatur kebijakan redaksi, level ekstra-media mencakup tekanan politik dan disrupsi digital, sementara pada level ideologi, nilai *Hasta Brata* berfungsi sebagai 'kompas moral' produksi konten.

Kerangka pengaruh yang berlapis tersebut diinternalisasi oleh para aktor dan bekerja sebagai struktur kognitif dalam rutinitas praktik jurnalistik. Pada tataran praktik, struktur kognitif ini berfungsi sebagai kerangka pemaknaan yang membimbing pemilihan isu, pengembangan narasi, serta penggunaan simbol-simbol budaya sebagai sarana refleksi publik (Bourdieu, 1993; Bourdieu & Wacquant, 1992). Dengan demikian, konten RSP sebagai hasil konstruksi makna yang lahir dari rahim 'interaksi berkelanjutan antara *habitus*, modal, dan konteks sosial yang melingkupinya'.

Dalam lintasan historisnya, temuan ini memperlihatkan RSP mempertahankan orientasi etis di tengah perubahan konteks sosial-politik dan media. Sejak pembatasan ekspresi di era Orde Baru, terbukanya ruang kritik pasca-reformasi, hingga tuntutan adaptasi di era disrupsi digital, RSP tetap berfungsi sebagai sarana konstruksi makna kolektif tentang kepemimpinan ideal dan refleksi sosial-politik. Dalam pengertian ini, RSP sebagai praktik jurnalisme budaya yang melibatkan distribusi simbol, legitimasi makna, serta pembentukan nilai moral di ruang publik.

Berdasarkan praktik tersebut, produksi RSP memperlihatkan interaksi antara *habitus* Jawa, modal simbolik, modal kultural, modal sosial, serta peran kurasi pengasuh rubrik dalam setiap fase produksi.

Kritik sosial disampaikan secara halus dan kontekstual, seraya tetap menginternalisasi nilai *Hasta Brata.* Pada saat yang sama, dinamika honorarium, loyalitas penulis, serta tekanan pasar digital menjadi bagian dari struktur ranah jurnalistik kontemporer yang memengaruhi proses produksi, tanpa menghilangkan orientasi nilai yang diusung rubrik ini.

Secara keseluruhan, RSP bukan sekadar wahana publikasi artikel budaya, melainkan ruang praktik jurnalistik yang merefleksikan sinergi antara agen dan struktur. RSP menjadi contoh empiris bagaimana *habitus*, modal, dan struktur media bekerja secara simultan dalam menghasilkan konten yang humanis, etis, dan reflektif. Temuan ini sekaligus memperlihatkan relevansi teori praktik Bourdieu serta kerangka hierarki pengaruh isi media dalam memahami dinamika produksi jurnalisme budaya di media lokal.

Dalam konteks tersebut, RSP sebagai *pamomong* yang membimbing masyarakat melalui narasi reflektif dan nilai budaya (Siregar et al., 2022). Keberlanjutan rubrik ini menunjukkan potensi media lokal sebagai ruang kontinuitas budaya dan refleksi sosial. Potensi tersebut tercermin dari kemampuan RSP beradaptasi terhadap perubahan zaman, tanpa menempatkannya dalam kerangka dikotomi antara kepentingan pasar dan kepentingan publik. Dengan demikian, RSP merefleksikan kelenturan sekaligus kepekaan dalam merespons kebutuhan pembaca, seraya tetap menjaga keseimbangan nilai-nilai yang melandasinya.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan kajian pada konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam Rubrik 'Sang Pamomong' (RSP) di Harian 'Suara Merdeka' (1996-2020), penulis menarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis tematik RSP periodisasi 1996–2020 dari 48 artikel menunjukkan enam kategori tema: krisis kepemimpinan, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, harapan terhadap pemimpin ideal, kemenangan beretika, kaderisasi kepemimpinan, serta persepsi publik terhadap pemimpin. Dari keseluruhan tema tersebut, krisis kepemimpinan tampil paling dominan secara akumulatif dan hadir di seluruh periode. Dominasi ini menegaskan bahwa isu kepemimpinan sebagai isu sentral dan menjadi persoalan penting yang terus 'dikawal' dan dikonstruksi redaksi dalam merespons dinamika sosial-politik bangsa. Pada periode awal 1996–1998, pembahasan krisis kepemimpinan diikuti oleh tema yang menghadirkan rujukan nilai dan figur kepemimpinan Jawa, seperti pemimpin ideal, dan

filosofi *Hasta Brata*. Periode 1999–Februari 2000 menempati posisi krusial meskipun RSP tidak terbit. Ketiadaan ini mencerminkan tekanan ekonomi media dan pergeseran orientasi jurnalistik pascareformasi yang menyempitkan ruang bagi rubrik reflektif-kultural. Memasuki periode 2000–2010, dominasi krisis kepemimpinan tetap bertahan, disertai penguatan tema kemenangan beretika, pemimpin ideal, filosofi *Hasta Brata,* dan persepsi publik. Konstruksi ini menandai perhatian pada bagaimana kepemimpinan dijalankan dan dinilai secara sosial. Pada periode 2011–2020, tema krisis kepemimpinan semakin menguat secara kuantitatif, diiringi dengan kemunculan tema kaderisasi kepemimpinan yang menandakan perhatian pada keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan. Secara keseluruhan, dominasi tematik krisis kepemimpinan, filosofi *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal membentuk fondasi refleksi RSP. Temuan ini menunjukkan adanya *gap* antara nilai luhur kepemimpinan Jawa dan praktik kepemimpinan nasional sejak era Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo.

2. Produksi RSP sepanjang 1996–2020 menunjukkan perubahan konfigurasi aktor, mekanisme kerja, dan dukungan sumber daya, tanpa meninggalkan kesinambungan orientasi kultural dan etis. Pada fase awal 1996–1998, produksi RSP bersifat terpusat dan personal. Pengasuh rubrik berperan sebagai penulis internal sekaligus penentu arah nilai, dengan praktik jurnalistik budaya yang reflektif dan bertumpu pada pengalaman kultural serta kedalaman tradisi Jawa. RSP tidak terbit pada periode 1999–2000. Ketidakhadiran ini mencerminkan keterbatasan produksi jurnalistik berbasis nilai dalam situasi krisis moneter dan transisi pascareformasi. Tekanan ekonomi dan perubahan prioritas redaksional

menyempitkan ruang bagi rubrik reflektif, sehingga *habitus* kultural pengelola menghadapi hambatan struktural yang kuat, sementara modal simbolik rubrik belum cukup menopang keberlanjutannya. Memasuki periode 2000–2010, produksi RSP berkembang secara kolaboratif melalui keterlibatan penulis eksternal berlatar budaya Jawa. Pengasuh rubrik menjalankan fungsi kuratorial untuk menjaga kesinambungan nilai dan gaya refleksi. Pada periode 2011–2020, produksi RSP sepenuhnya ditopang oleh jejaring penulis eksternal. Sejak awal 2019, penghentian honor menggeser dasar keberlanjutan rubrik dari relasi profesional berbasis insentif ekonomi menuju loyalitas kultural dan komitmen etis. Kedekatan personal, kepercayaan, dan kesamaan orientasi nilai memperkuat modal sosial pengasuh rubrik dalam menjaga kesinambungan produksi. Relasi yang dibangun antara pengasuh rubrik, penulis internal–eksternal, dan khalayak membentuk ekosistem kultural yang saling menopang, sehingga RSP tetap terbit, terjaga orientasi nilainya, dan relevan dengan perkembangan zaman.

3. RSP mengimplementasikan fungsi sosial pers melalui praktik jurnalisme budaya yang humanis dan berakar pada nilai lokal. Pertama, RSP berfungsi sebagai penyaji informasi bernilai yang disusun sesuai kaidah jurnalistik, sekaligus berperan sebagai pengawal moral dan pewaris nilai budaya Jawa. Setiap tulisan tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi mendorong pembaca memahami persoalan sosial dan merawat nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai 'jangkar etis' dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, RSP berfungsi sebagai ruang publik kultural dan representasi sosial masyarakat, menghadirkan pengalaman, kegelisahan, dan refleksi kolektif melalui simbol, metafora, serta narasi budaya yang dekat

dengan keseharian pembaca. Ketiga, RSP menjalankan fungsi pengawasan sosial secara etis dan reflektif, menyampaikan kritik dan pesan moral melalui bahasa *pasemon*, kisah wayang, dan *pitutur* luhur, sehingga nilai etis dapat dihayati tanpa kesan menggurui. Melalui 'jurnalisme *pamomong*' yang konsisten 'mengemong' pembaca, RSP menegaskan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab secara sosial, selaras dengan semangat 'Suara Merdeka' sebagai 'Perekat Komunitas Jawa Tengah'. Keberlanjutan RSP bertumpu pada konsistensi dalam meneguhkan fungsi sosial pers berbasis kearifan lokal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, studi ini mengajukan saran-saran baik secara teoretis maupun praktik.

Secara teoretis:

1. Perlu pengembangan kajian jurnalistik berbasis nilai-nilai lokal untuk memperkaya model jurnalisme budaya dalam menjalankan fungsi sosial pers terutama fungsi pengawasan sosial, di luar paradigma Barat;
2. Konsep jurnalistik *pamomong* dapat menjadi kerangka teoretis dalam kajian komunikasi budaya khususnya dalam lingkup media lokal di Indonesia; dan
3. Pendekatan konstruksi sosial dan skema budaya perlu digunakan secara lebih luas dalam studi media lokal karena mampu menjelaskan bagaimana media membentuk makna, nilai, dan orientasi sosial masyarakat melalui praktik simbolik yang berakar pada

pengalaman kultural, sejarah lokal, serta dinamika kehidupan sehari-hari pembacanya.

Sementara itu, secara praktis:

1. Redaksi media lokal dapat mengembangkan pendekatan jurnalistik yang memadukan profesionalisme dengan kearifan lokal;
2. Jurnalis sebaiknya diberi pelatihan untuk memahami dan menarasikan nilai-nilai budaya lokal tanpa kehilangan daya kritisnya; dan
3. Rubrik-rubrik bernuansa edukatif dan kultural seperti 'Sang Pamomong' perlu dikembangkan sebagai penyeimbang di tengah derasnya arus berita sensasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. W. (2014). *Ensiklopedia Kearifan Jawa*. Araska.

Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., & Khdhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, *6*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198.

Andani, A. A., & Birsyada, M. I. (2024). Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas Bangsa Pada 1945-1998. *JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES "ESTORIA*, *4*(2). https://journal.unindra.ac.id/index.php/estoria/article/view/2720

Anderson, C. (2012). Between creative and quantified audiences: Web metrics and changing patterns of newswork in local US newsrooms. *Journalism*, *12*(5), 550–566. https://doi.org/10.1177/1464884911402451

Andriyani, K. (2015). Budaya, Identitas dan Media Lokal. *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, *8*(2).

Anom, E., & Waluyo, D. (2011). Model dan Sistem Mengontrol Media di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, *2*(1), 27–44. https://media.neliti.com/media/publications/233725-model-dan-sistem-mengontrol-media-di-ind-0cd9db7f.pdf

Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*, *8*(1), 103–113.

Astari, A. R., Shilfa, I., Aulia, O. A., Hanafiah, T., & Purwanto, E. (2025). Strategi Branding Budaya dalam Media Digital oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Technology and System Information*, *2*(3), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jtsi.v2i3.4334

Barnard, S. R. (2018). The Journalistic Field in a Time of Mediatization. In *Citizens at the Gates*. Springer International Publishing.

Benson, R. (2006). News Media as a "Journalistic Field": What Bourdieu Adds to New Institutionalism, and Vice Versa. *Political Communication*, *23*(2), 187–202. https://doi.org/https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.1080/10584600600629802

Benson, R., & Neveu, E. (2010). *Bourdieu and the Journalistic Field*. Polity Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan LP3ES*. LP3ES.

Biernacka-Ligieza, I. (2013). Journalists in local newspaper – traditional press missionaries or digital media workers? *I Congreso Internacional De Comunicacion Y Sociedad Digital*.

Boughen, R. (2023). *Sino-African journalism and journalistic fields: CGTN Africa's workers between worlds. Dissertation. University of Westminster, Inggris.* University of Westminster, Inggris.

Bourdieu, P. (1993). *The Field and Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Polity Press.

Bourdieu, P. (1993). *The Rules of Art*. Polity Press.

Bourdieu, P. (1998). *On Television*. New Free Press.

Bourdieu, P. (2010). *The Field of Cultural Production. Essay of Arts and Literature. Diterjemahkan oleh Yudi Santosa*. Kreasi Wacana.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Polity Press.

Bratawijaya, T. W. (1997). *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*. Pradnya Paramita.

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, *56*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Carey, J. W. (2009). *Communication as culture: Essays on media and society (Rev. ed.)*. Routledge.

Casero-Ripollés, A. (2012). Beyond Newspapers: News Consumption among Young People in the Digital Era. *Comunicar*, 1134–3478. https://doi.org/DOI: 10.3916/C39-2012-03-05

Cayla, J., & Arnould, E. J. (2008). A Cultural Approach to Branding in the Global Marketplace. *Journal of International Marketing*, *16*(4), 86–112.

Chika, U., & Ugochi, M. (2016). Language use and the media: preserving the African values. *Journal of Religion and Human Relations*, *8*(1), 230–245.

Christou, P. A. (2023). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism, Advance Access*. https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006

Croteau, D., & Hoynes, W. (2006). *The Business of Media. Corporate Media and the Public Interest*. Pine Forge Press.

Danzon-Chambaud, S., & Cornia, A. (2023). Changing or Reinforcing the "Rules of the Game": A Field Theory Perspective on the Impacts of Automated Journalism on Media Practitioners. *Journalism Practice*, *17*(2), 174–188. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1919179

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research. Penerjemah: Dariyatno, dkk* (cetakan ke). Pustaka Pelajar.

Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. *Journalism*, *6*(4), 442–464. https://doi.org/10.1177/1464884905056815

Djuroto, T. (2022). *Manajemen Penerbitan Pers*. Remaja Rosdakarya.

Dlamini, T. (2023a). *Newsroom Culture and Journalistic Practice at the South African Broadcasting Corporation (SABC): An Ethnographic study by A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Journalism and Me*. *September*. https://wiredspace.wits.ac.za/items/27054dc7-e7e4-427a-bee1-5a0ac5d34332

Dlamini, T. (2023b). *Newsroom Culture and Journalistic Practice at the South African Broadcasting Corporation (SABC): An Ethnographic study. Dissertation*.

Dunne, S. (2017). *Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System. Dissertation*.

Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju.

Ehrlén, V., Talvitie Lamberg, K., Salonen, M., Koivula, M., Villi, M., & Uskali, T. (2023). Confusing Content, Platforms, and Data: Young Adults and Trust in News Media. *Media and Communication*, *11*(4), 320–331. https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.v11i4.7104

Endraswara. (2016). *Memayu Hayuning Bawana. Laku Menuju Keselamatan dan Kebahagiaan Hidup Orang Jawa*. Narasi.

Endraswara, S. (2018). *Falsafah Hidup Jawa. Menggali Mutiara Kehidupan dari Intisari Filsafat Kejawen*. Cakrawala.

Fadillah, M., Nurbalqis, A., & Agustina, L. (2022). Pengaruh Konten Digital Terhadap Generasi Gen Z dalam Pemanfaatan Media Sosial dan Digital Native di Kota Tanjungpinang. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*, *4*(2).

Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Pustaka Jaya.

Hall, S. (1996). *Cultural Identity and Diaspora*. Arnold.

Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Granit.

Hanusch, F. (2013). CULTURAL FORCES IN JOURNALISM. The impact of cultural values on Mâori journalists' professional views. *Journalism*

Studies, *16*(2), 1–16. https://doi.org/DOI:10.1080/1461670X.2013.859864

Harcup, T. (2023). The Struggle for News Value in the Digital Era. *Journalism and Media*. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/journalmedia4030058

Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (1990). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Diterjemahkan oleh Pipit Maizier*. Jalasutra.

Hartley, J. M. (2018). 'It's Something Posh People Do': Digital Distinction in Young People's Cross-Media News Engagement. *Media and Communication*, *6*(2), 46–55. https://doi.org/DOI: 10.17645/mac.v6i2.1322

Heikkilä, R., & Lauronen, T. (2018). The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010. *European Journal of Cultural Studies*, *21*(6), 669– 686. https://doi.org/DOI: 10.1177/1367549416682970

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2008). *Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media*.

Herusatoto, B. (1987). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. hanindita.

Hidayat, D. R. (2012). *Komitmen Budaya Televisi Swasta Lokal Dalam Program Siaran: Studi Tentang Komitmen Budaya dan Komersialisasi Program Siaran Budaya Pada TV Swasta di Bandung. Disertasi. Universitas Padjadjaran.*

Imron, Sariyatun, & Yunianto, T. (2016). Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Candi*, *3*(1), 143–159.

Islamiyah, A. B., Ningsih, S. E., Rahmawati, A. D., Setiawan, A. F., & Purwanto, E. (2025). Media Tradisional vs Media Baru dalam Mempromosikan Budaya Berkelanjutan. *CONVERSE: Journal Communication Science*, *2*(1), 1–13.

Jaakkola, M. (2015). *The Contested Autonomy of Arts and Journalism The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and continuity in the dual professionalism*. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97272/978-951-44-9849-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jaakolla, M. (2015). *The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism. University of Tampere, Finlandia.* University of Tampere, Finlandia.

Jenkins, H. (2006). *Convergenca Culture. Where Old & New Media Collide*.

Kersten, A., & Janssen, S. (2017). Trends in Cultural Journalism The Development of Film Coverage in Cross-National Perspective. *Journalism Practice*, *11*(7), 840–856. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2016.1205955

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.

Krisdinanto, N. (2018). *Runtuh Dari Dalam. Serangan Komersialisasi terhadap Pagar Api Jurnalistik di Indonesia. Disertasi.* Universitas Airlangga.

Kristensen, N. N., & Riegert, K. (2017). Why Cultural Journalism in the Nordic Countries? In *Cultural Journalism in the Nordic Countries*.

Nordicom. https://www.nordicom.gu.se/en/publications/cultural-journalism-nordic-countries

Lindell, J., Jakobsson, P., & Stiernstedt, F. (2019). The Field of Television Production: Genesis, Structure and Position-Takings. *Journal Poetics*.

Maares, P., & Hanusch, F. (2022). Interpretations of the journalistic field: A systematic analysis of how journalism scholarship appropriates Bourdieusian thought. *Journalism Studies*, *23*(4), 736–754. https://doi.org/DOI: 10.1177/1464884920959552

Machmud, A. (2010). *Arus Generasi Pengemas Informasi*. Mascscom Graphy.

Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Jawa. Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Gramedia Pustaka Utama.

Makwambeni, B., Matsilele, T., & Msimanga, M. J. (2023). Through the Lenses of the Sociology of News Production: An Assessment of Social Media Applications and Changing Newsroom Cultures in Lesotho. *Journal of Asian and African Studies*, 1–15. https://doi.org/DOI: 10.1177/00219096231179661

Manzuch, Z. (2017). Ethical Issues In Digitization Of Cultural Heritage. *Journal of Contemporary Archival Studies*, *4*.

Marlierre, P. (1998). The Rules of Journalistic Field. Pierre Bourdieu's Contribution to the Sociology of the Media. *European Journal of Communication*, *13*(2), 219–234.

Maryani, E., Karlinah, S., & Rahmawan, D. (2018). The Sustainability of Local Media Within the Domination of National Media Industry. *E3S Web of Conference*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873

McQuail, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa. Penerjemah: Putri Iva Izzati.* (Edisi ^. B). Salemba Humanika.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muktiyo, W. (2011). *Dinamika Media Lokal Dalam Mengkonstruksi Realitas Budaya Lokal Sebagai Sebuah Komoditas*. UNS Press.

Mulyana, D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mulyono, S. (1982). *Wayang. Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya*. Inti Idayu Press.

Munnik, M. B. (2018). A Field Theory Perspective on Journalist–Source Relations: A Study of 'New Entrants' and 'Authorised Knowers' among Scottish Muslims. *Journal Sociology*, *52*(6), 1169–1184. https://doi.org/10.1177/0038038517696220

Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*. https://doi.org/DOI: 10.1177/16094069231205789.

Nahak, F. M. (2018). Role of Media in Preserving of Culture: A comparative analysis of primetime news bulletins of two regional TV Channels. *Pramana Research Journal*, *8*(7), 280–292.

Nielsen, R. K. (2015). Introduction: The Uncertain Future of Local Journalism. In *Local Journalism: The Decline of Newspapers and The Rise of Digital Media*. IB Tauris.

Nurlaila, C., Aini, Q., Setyawati, S., & Laksana, A. (2024). Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *1*(6).

Oliveira, A. F., Carvalho, M. J. L. de, & Sousa, C. (2024). Young People's Diversity and Digital Media: A Systematic Review (2010–2022). *Media and Communication*, *12*. https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.8237

Olsen, R. K. (2019). *The Value of Local News Unpacking Dynamics of Local Newspapers' Value Creation for Audiences and Society. Dissertation.*

Örnebring, H., Karlsson, M., Fast, K., & Lindell, J. (2018). The Space of Journalistic Work: A Theoretical Model. *Communication Theory*, 1–21. https://doi.org/doi:10.1093/ct/qty006

Oso, L., Adeniran, R., & Arowolo, O. (2024). Journalism ethics- the dilemma, social and contextual constraints. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2328388

Pata, K. (2024). Cultural Resilience Practices in the Digital Heritage Ecosystem. *KUI Conference Culture and Computer Science —From Humanism to Digital Humanities (KUI 2024)*.

Pawito. (2014). Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat. *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, *7*(1). https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1111/1024

Pearson, H., Myall, M., Darlington, A.-S., & Gibson, F. (2025). The approach and application of analysing inductive and deductive datasets: a worked example using reflexive thematic analysis. *QUALITATIVE RESEARCH IN PSYCHOLOGY*, *22*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14780887.2025.2499265

Pereda, J., Willcox, P., Candela, G., Sanchez, A., A, P., & Murrieta Flores. (2025). Online cultural heritage as a social machine: a socio technical approach to digital infrastructure and ecosystems. *International*

Journal of Digital Humanities, *7*, 39–69. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42803-025-00097-6

Planer, R., Godulla, A., Seibert, D., & Pietsch, P. (2022). Journalistic Quality Criteria under the Magnifying Glass: A Content Analysis of the Winning Stories of World Press Photo Foundation's Digital Storytelling Contest. *Journalism and Media*, *3*, 594–614.

Realgo, B. R. (2023). Understanding the Practices of Cultural Heritage Reporters. *Southeast Asian Media Studies Journal*, *5*(1).

Rewira, A. E. (2024). Jurnalistik: Antara Jurnalisme dan Idealisme di Tengah Pusaran Dinamika Global. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *22*(2).

Rianto, P. (2015). Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2003). *Teori Sosiologi Modern edisi ke-6. Diterjemahkan oleh Alimandan*. Prenada Media.

Roza, A. (2022). *Title Page Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes Certificate of Original Authorship*. https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/167731/2/02whole.pdf

Saifuddin, A. F. (2016). Membaca Teori Pierre Bourdieu: Suatu Catatan Pengantar. In *Pierre Bourdieu. Menyingkap Kuasa Simbolik*. Jalasutra.

Salem, M. A. M. (2025). *Commercial Pressures and Editorial Independence: Egypatian Journalists' Perciption of Advirtiser Influence In Contemporary Media*. Universitat Autònoma de Barcelona,.

Sánchez, J. L. M., Ruiz, M. J. U., & Casa, J. M. H. de la. (2019). Journalistic innovation and digital society: An adaptation of journalism studies. *Revista Latina de Comunicación Social, 74*, 1633–1654. https://doi.org/DOI: 10.4185/RLCS-2019-1402en

Sandriester, J., Harfst, J., Kern, C., & Zuanni, C. (2025). Digital Transformation in the Cultural Heritage Sector and Its Impacts on Sustainable Regional Development in Peripheral Regions. *Sustainability -MDPI*, *17*. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17156661.

Schudson, M. (2003). *The Sociology of News*. W. W. Norton & Company.

Schultz, I. (2007). The Journalistic Gut Feeling Journalistic doxa, news habitus and orthodox news values. *Journalism Practice*, *1*(2), 190–207.

Selvarajah, C., & Meyer, D. (2017). Human capacity development in Indonesia: leadership and managerial ideology in Javanese organizations. *Asia Pacific Business Review*, *23*(2), 264–289. https://doi.org/doi.org/10.1080/13602381.2017.1299401

Sen, A. F. (2021). Watchdog Journalism During The Corona Virus Crisis in Turkey. *Advances in Applied Sociology*, *11*, 500–512.

Simons, M., & Dickson, G. (2017). *Availability of local news and information (2019 State of The Region Report-Australia)*.

Siregar, R. K., Karlinah, S., Maryani, E., & Sjuchro, D. W. (2022). Dynamics of Local Media in Preserving Local Wisdom of Javanese Culture (Case Study: Rubrik Sang Pamomong in Suara Merdeka Newspaper). *Neuroquantology*, *20*(15). https://doi.org/10.14704/NQ.2022.20.15.NQ88160

Sormin, A. (2022). *Local Media Summit 2022: Jadi Ajang Curhat dan Solusi Pengelolaan Media Lokal di Indonesia*. Lampungpro.Co.

Soysal, Z. (2025). An Epistemic Role for Opinion Journalism. *Political Philosophy*, *2*(2). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.16995/pp.23009

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kuantitaif & R&D*. Alfabeta.

Sumadiria, H. (2008). *Jurnalistik Indonesia*. Simbiosa Rekatama Media.

Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2014). *Pitutur Luhur Budaya Jawa*. NARASI.

Suwirta, A. (2018). *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru/ : Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung , 1966-1974*. *3*(September), 113–136. https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/13949

Suyono, J. (2023). Empirical study of Javanese leadership style in Surakarta, Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, *9*(4), 83–91. https://doi.org/https://doi.org/10.29210/0202312262

Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., Portales, M., & Zabotina, M. (2020). Information on the Covid-19 Pandemic in Daily Newspapers' Front Pages: Case Study of Spain and Italy. *International Journal of Environmental Research. Public Health*, *17*. https://doi.org/10.3390/ijerph17176330

Torres-Toukoumidis, A., Becerra, M. H., Marín-Gutiérrez, I., & Pallo-Chiguano, M. (2024). Exploratory Analysis of Local Media across the Post-Pandemic Era: Between Glocality and Closeness. *Journalism and Media*, *5*, 552–565. https://doi.org/doi.org/10.3390/journalmedia5020037

Vogler, D., Weston, M., Ryffel, Q., Rauchfleisch, A., Jürgens, P., Eisenegger, M., Schwaiger, L., & Christen, U. (2023). Mobile News Consumption and Its Relation to Young Adults' Knowledge About and

Participation in Referendums. *Media and Communication*, *11*(1), 6–18. https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.v11i1.6029

Vos, T. P., Eichholz, M., & Karaliova, T. (2018). Audiences and Journalistic Capital. *Journalism Studies*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1477551

Wahl-Jorgensen, K., Williams, A., Sambrook, R., Harris, J., Garcia-Blanco, I., Dencik, L., Cushion, S., Carter, C., & Allan, S. (2016). The Future of Journalism Risks, threats and opportunities. *Digital Journalism*, *4*(7), 809–815. https://doi.org/dx.doi.org/10.1080/21670811.2016.1199469

Wijayanto. (2019). Bourdieu and Media Theory/ : Explaining Media s Changes and Continuities in The Post Authoritarian Countries. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *4*(July), 274–300. https://www.researchgate.net/publication/334693669_Bourdieu_and_Media_Theory_Explaining_Media's_Changes_and_Continuities_in_The_Post_Authoritarian_Countries

Willig, I. (2012). Newsroom ethnography in a field perspective. *Journal Journalism*, 1–16. https://doi.org/DOI: 10.1177/1464884912442638

Yin, R. K. (2015). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd ed.). London Guilford Press.

Yoedtadi, M. G., & Salman, D. (2023). Habitus Jurnalisme Keberagaman dan Kearifan Lokal Masyarakat Kupang. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, *1*(3). https://www.journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/download/28358/16893/84420

Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia.

Disertasi

Boughen, Robert (2023). *Sino-African Journalism and Journalistic Fields: CGTN Africa's Workers Between Worlds*. University of Westminster, Inggris.

Dlamini, Tula (2023). *Newsroom Culture and Journalistic Practice at The South African Broadcasting Corporation (SABC): An Enthnographic Study*. University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan.

Dune, Stephen. (2017). *Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System*. School of Communications Dublin City University, Irlandia.

Jaakolla, Maarit (2015). *The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism*. University of Tampere, Finlandia.

Olsen, Ragnhild Kristine (2019). *The Value of Local News Unpacking Dynamics of Local Newspapers' Value Creation for Audiences and Society*. University of Oslo, Norwegia.

Roza, Adek (2022). *Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes*. University of Technology Sydney.

Website

https://kawruhbasa.com/laku/

INDEKS

A

Abdurrahman Wahid 62
Adab 118
Adaptive journalism 259
Afrika Selatan 17
Agen 10, 37
Akademisi 157
Alat politik 82
Algoritma 254
Aliran objektivisme 30
Amanah 104, 241
Analisis tematik 9, 66
Andhap asor 64
Aspirasi publik 127
Audiens 254
Australia 19

B

Bahasa 42
Bambang Sadono 5
Bengawan Pos 56
Berita sensasional 267
Bioskop 256
Birokrasi 93
Bisnis media 77
Blora 56
Budaya Jawa 75, 101
Budayawan 157
Budi pekerti 116

C

Cerpenis 194
Click-bait 51
Convergence culture 252

Covid-19 4, 191
Cultural guardian 59

D

Daerah Istimewa Yogyakarta 85
Daya beli 77
Demak 68
Demokrasi 62, 88
Dewa 88
Dialektika 42
Dialog 167, 183
Diferensiasi pasar 259
Digitalisasi 249
Dinasti politik 223
Disrupsi digital 179, 223
Doksa 25
Doktrin 48, 94
Dominasi 183

E

E-paper 248
Editor 156
Ekosistem media 188
Elite 82
Era digital 189
Estetika 148
Etika 53
Etika birokrasi 217
Etika jurnalistik 46, 224
Etos kerja 164
Euforia kebebasan pers 210

F

Falsafah hidup Jawa 233
Filosofi Hasta Brata 136, 230, 264
Finlandia 18

G

Gaya jurnalistik 171
Geger politik 84
Gen Z 254
Generasi muda 101
Genre 38
Globalisasi 257
Google adsense 254
Gus Dur 173

H

Habitus 16, 21, 23, 28, 30, 130, 193, 239, 260
HAM 95
Hambatan struktural 265
Hard news 78
Harian Satria 56
Harmoko 5, 134
Harmoni 76
Harmoni sosial 193
Hasta Brata 3, 47, 64, 241, 265
Headline 5, 50, 61, 136
Hendro Basuki 5, 60
Hiburan 238
Honorarium 180, 262
Humaniora 131

I

Idealisme 210
Idealisme redaksional 249
Identitas 50, 179, 225
Identitas lokal 54
Ideologi 59, 250
Iklan 10, 184
Ilmu sosial 34
Imajinasi 104
Independensi pers 62
Indonesia 54
Industri media 15, 28, 179
Industri pers 209
Ingatan kolektif 258
Inggris 20
Institusi informasi 160
Integritas 8, 76
Interaksionisme simbolik 30
Internalisasi 47
Introspeksi 238
Irlandia 20

J

Jawa Tengah 55, 156
Jepara 56
Joko Widodo 6, 109, 264
Jurnalisme Barat 17
Jurnalisme budaya 19, 29, 262
Jurnalisme keberagaman 21
Jurnalisme lintas budaya 17
Jurnalisme *pamomong* 266
Jurnalistik kontemporer 262

K

Kaderisasi 101, 263
Kampanye 95
Kawula 82
Keadilan 71, 101
Kearifan Jawa 82
Kearifan lokal 79
Kearifan lokal Jawa 43, 225
Kebebasan pers 21, 210
Kebijaksanaan 116
Kedekatan simbolik 153
Kekerasan simbolik 35
Kekuasaan 82, 173, 231
Kepala desa 26
Kepemimpinan *Hasta Brata* 263
Kepemimpinan Jawa 48
Kepemimpinan nasional 80
Kepemimpinan tradisional 44
Kerajaan Jawa 158
Kerajaan Jawa kuno 221
Kesadaran budaya 106
Kesadaran palsu 36
Keseimbangan sosial 71
Ketegasan etis 76
Keteladanan 101
Ketidakstabilan nasional 208
Ketimpangan 230
KKN 209
Klaim kebenaran 37
Kodam VII/Diponegoro 55
Kolom 169
Kolumnis 131, 194
Kompas 258
Kompas moral 136

Kompetisi 170
Kompetisi simbolik 109
Komunikasi komunal 202
Konfrontasi 133
Konstruksi realitas sosial 145
Konten kebudayaan 199
Kontributor 190
Koran lokal 233
Koran Rakyat 56
Kordinator Liputan 113
Korupsi 238
Kriminalitas 13
Krisis kepemimpinan 67, 245
Krisis media 219
Krisis moneter 70
Kritik moral 10
Kritik sosial 64, 191
Kudus 55
Kupang 21
Kurator 156

L

Laku batin 98
Laku pamomong 234
Legitimasi 94
Legitimasi moral 153
Levi-Staruss 30
Liputan budaya 50
Local branding 258
Logika media daring 21
Logika pasar 51, 249
Loyalitas penulis 262

M

Majapahit 216
Makna 37
Makna sosial 186
Market-driven journalism 10, 258
Martabat 67
Mataram 26
Media arus utama 251
Media digital 253
Media habit 255
Media liberal 20
Media lokal 46
Media massa 29
Media *meta-capital* 25
Media sosial 252
Megawati Soekarnoputri 93
Memayu hayuning jagad 73
Metafora 3, 63
Metafora Hasta Brata 125
Metro Semarang 56
Mikrokosmos 208
Mingguan Mahasiswa Indonesia (MMI) 27
Mitos 208
Modal 25, 130
Modal ekonomi 180
Modal jurnalistik 39
Modal kultural 23
Modal simbolik 165
Model Konstruksi Kepemimpinan 244
Modernitas 252
Moral 3, 53

Moralitas 228
Multiplatform content 252

N

Narasi 169, 175, 240
Negara 93, 208
Negosiasi 193
Negosiasi makna 145
Newsroom 171
Nilai 1
Nilai identitas Jawa 233
Norma 1
Norwegia 20

O

Observasi etnografis 18
Opini 179
Oplah 10, 57
Oposisi biner 34
Orang Jawa 134
Orde Baru 4, 66
Organisasi 52, 251
Orientasi etik 1
Otomotif 256
Otonomi–heteronomi jurnalis 25
Otoritas kultural 153
Otoritas moral 39
Otoriter 69

P

Pakubuwono IV 200
Pandemi 4
Panggung sandiwara 103
Pascareformasi 4
Pasemon 4, 59, 141, 185, 266
Pati 56
Pelanggaran HAM 95
Pembaca 143, 266
Pemimpin ideal 85, 102, 263
Pemimpin Redaksi 118, 256
Pendidikan 238
Pengasuh rubrik 143, 163, 264
Pengasuhan moral *(Pamomong)* 63
Penggiat budaya 131
Penggiat komunitas budaya 175
Pergeseran minat baca 255
Perlawanan politik 28
Pers 1, 152
Persepsi publik 88, 263
Peter L. Berger 42
Pierre Bourdieu 16, 130
Pitutur 64, 112
Platform digital 251
Podcast 254
Polarisasi politik 109
Polemik 114
Politik dinasti 109
Praktik budaya 178
Praktik kultural 145
Presiden B.J. Habibie 6
Problem etika 105
Produksi jurnalistik 151

Profit 10
Proses editorial 168
Punakawan 5

R

Radar Semarang 56
Raden Patah 68
Raja 208
Rakyat 72
Ranah 130
Ranggawarsita 200
Ratu Adil 71, 208, 241
Realitas sosial 33, 175
Redaksi 198
Redaktur 18
Refleksi batin 54
Refleksi moral 112
Refleksi sosial 10
Reformasi 4, 209
Relasi sosial 50
Rembang 57
Reportase 224
Represif 69
Reputasi 39
Romantisasi budaya 114
Ruang publik 44, 209
Ruang refleksi kultural 54
Rubrik 1
Rubrik budaya 235
Rubrik 'Sang Pamomong' 2, 16, 89, 111
Rukun 48
Rutinitas media 251

S

Sandiwara 103
Sangkan paraning dumadi 64
Sastra Jawa 256
Sastrawan 131, 162
Satriya Piningit 116, 241
SBY 6
Segmentasi audiens 254
Sejarah 213
Selaras 48
Semar 5
Semarang 55
Semarang Post 56
Serat Kalatidha 200
Serat Wulangreh 200
Simbol 63, 98
Sindiran 185
Sistem nilai 178
SIUPP 6
Soeharto 128, 264
Soeloeh Rakjat 55
Solo 55
Solopos 56
Spiritualitas 148, 237
Springer International Publishing 25
Sragen 26
Strategi pasar 254
Struktur 10, 37
Struktur media 247
Struktur mental 37
Strukturalisme 30
Suara Merdeka 2, 14, 55, 111
Sukoharjo 26

Sultan Hamengku Buwono (HB) X 71
Suplemen mingguan 61
Surat kabar 2, 35
Survei 23
Susilo Bambang Yudhoyono 62, 109

T

Tapa brata intelektual 228
Tata krama 59
Tekanan ekonomi 264
Tekanan pasar digital 262
Tekanan politik 149
Teks jurnalistik 228
Teks media 48
Televisi 34
Teori *mediatization* 25
Tepa selira 48
Thomas Luckmann 42
Tiongkok 17
Tokoh pewayangan 158
Toleransi 146
Toxic leader 8, 238
Tradisi Jawa 3
Traffic report 13
Triyanto Triwikromo 60

V

VOC 68

W

Wakil Pemimpin Redaksi 227
Wartawan 18, 43, 136
Watchdog 217
Wayang 112, 221
Wejangan 221
Wicaksana 73

Y

Yudistira 212

Z

Ziarah 99

TENTANG PENULIS



Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom. Lulus dari program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tahun 2015 dengan predikat: *The Best Student*. Lulus dari Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2026 dengan predikat: Sangat Memuaskan.

Penulis adalah Dosen Favorit dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tahun 2022 dan Dosen Terbaik Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tahun 2018. Penulis adalah penerima Hibah Riset dari Kemenristek Dikti untuk skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2017, penerima Hibah Riset dari Kemenristek Dikti untuk skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2019, dan penerima Hibah Pengabdian Masyarakat dari Kemenristek Dikti untuk Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tahun 2018.

Penulis bekerja sebagai reporter di 'Harian Pos Kota' (1994-2020), dan sejak 2008 hingga sekarang, penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur. Sambil bergiat di kampus, penulis aktif berorganisasi dan menjadi anggota di berbagai organisasi: Persatuan Dosen Republik Indonesia (2022-2025), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (2019), Asosiasi Dosen Indonesia (2019), serta anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2000-2020.

Sebagai akademisi, penulis aktif meneliti dan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di berbagai jurnal. Peneliti pada 2019 menerbitkan buku *Jurnalisme Warga 'HOT' (Hiburan, Objektif & Terpercaya): Teori dan Praktik*. Buku ini sebagai hasil karya dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dibiayai Kemenristek Dikti.


JURNALISME
WARGA
'HOT'
(Hiburan,
Objektif &
Terpercaya)
Teori
dan
Praktik

Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan

Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* pada Era Kontemporer

Di tengah perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung, perbincangan tentang kepemimpinan selalu berkelindan. Setiap zaman akan menghadirkan harapan dan sekaligus kekecewaan terhadap figur dan praktik kepemimpinan yang tampil di ruang publik. Dalam konteks masyarakat Jawa, filosofis kepemimpinan tak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar pada tradisi panjang kebudayaan. Salah satunya melalui prinsip leluhur *Hasta Brata*, sebuah ajaran yang menempatkan seorang pemimpin sebagai pribadi yang meneladani laku alam: membumi, meneduhkan, memberi arah, menjaga keseimbangan.

Buku ini mengkaji bagaimana kepemimpinan ideal tersebut dimaknai dan dihadirkan kembali di dalam ruang media. Dengan berpijak pada paradigma konstruktivis, penulis menempatkan media bukan sekadar saluran informasi, melainkan juga sebagai ruang sosial tempat makna kepemimpinan diproduksi dan diinformasikan kepada khalayak. Buku ini di antaranya mengeksplorasi konstruksi kepemimpinan nasional dan fokusnya adalah implementasi *Hasta Brata* sebagai rujukan normatif dan etis mulai dari era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo.

Melalui penafsiran reflektif atas Rubrik 'Sang Pamomong' pada surat kabar 'Suara Merdeka', buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana makna kultural *Hasta Brata* dikonstruksi sebagai pedoman etis dalam memahami dan merefleksikan kepemimpinan kontemporer. Apakah filosofi *Hasta Brata* hanya sekadar warisan simbolik, atau tetap menjadi 'kompas etis' yang membimbing cara media memaknai kepemimpinan nasional?